WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk periode 2018-2023 telah terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu disusun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Perencanaan ...

8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

16. Rencana ...

16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

24. Visi ...

24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
30. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
31. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
32. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
33. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

34. Sasaran ...

34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.
35. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
38. Kabupaten/kota lainnya adalah daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
40. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2018-2023 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2018-2023

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III	:	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
BAB VI	:	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB VII	:	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
BAB VIII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
BAB IX	:	PENUTUP.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 4

RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan Evalusi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
    d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

(2) Dalam ...

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan target kinerja RPJMD 2018-2023 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berikutnya.

(4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(3/46/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA SETDA BANDUNG

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP.19650715 198603 1 027

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG

WAKIL WALI KOTA BANDUNG

Kata **Pengantar**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 merupakan penyempurnaan Rancangan Akhir setelah mendapatkan masukan dari proses Musrenbang, pembahasan bersama Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, serta masukan berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat melalui Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Sistematika RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, terdiri atas: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Umum Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Rerangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bandung untuk lima tahun ke depan.

Bandung, Maret 2019

WALI KOTA BANDUNG

H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.

Daftar **Isi**

Kata Pengantar iv
Daftar Isi v
Daftar Gambar ix
Daftar Tabel x

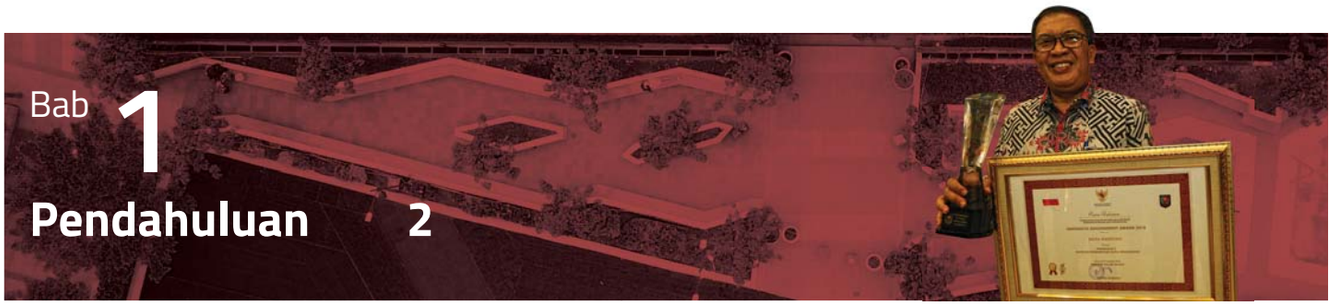

Bab **1**
Pendahuluan **2**

1. Latar Belakang 3
2. Dasar Hukum Penyusunan 6
3. Hubungan Antar Dokumen 8
   - 3.1. RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung 9
   - 3.2. RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah 10
   - 3.3. RPJMD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 11
   - 3.4. RPJMD Kota Bandung dengan Perencanaan Lainnya 11
4. Maksud dan Tujuan 12
   - 4.1 Maksud 12
   - 4.2 Tujuan 12
5. Sistematika Penulisan 13

Bab **2**
Gambaran Umum Kota Bandung **16**

1. Aspek Geografi dan Demografi 17
   - 1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung 17
   - 1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 22
   - 1.3. Wilayah Rawan Bencana 25
   - 1.4. Demografi 27
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 33
   - 2.1. Indeks Pembangunan Manusia 33
   - 2.2. Kesehatan 48
   - 2.3. Pendidikan 50
3. Aspek Pelayanan Umum 51
   - 3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 51
   - 3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 62
   - 3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 83
   - 3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan 86

4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 89
4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 92
4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 96
4.5. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 97
4.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 108
4.7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 113
4.8. Kerjasama Daerah 114
4.9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 116

Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah 126

1. Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017 127
   1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2013 - 2017 128
   1.2. Neraca Daerah 142
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 152
   2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran 156
   2.2. Analisis Pembiayaan 158
3. Kerangka Pendanaan 162
   3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 162
   3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan 166

Bab 4 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah 170

1. Permasalahan Pembangunan 171
   1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 172
   1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 179
   1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 189
   1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 190
2. Isu Strategis 193
   2.1 Pertimbangan Penentuan Isu Strategis 193
   2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung 219

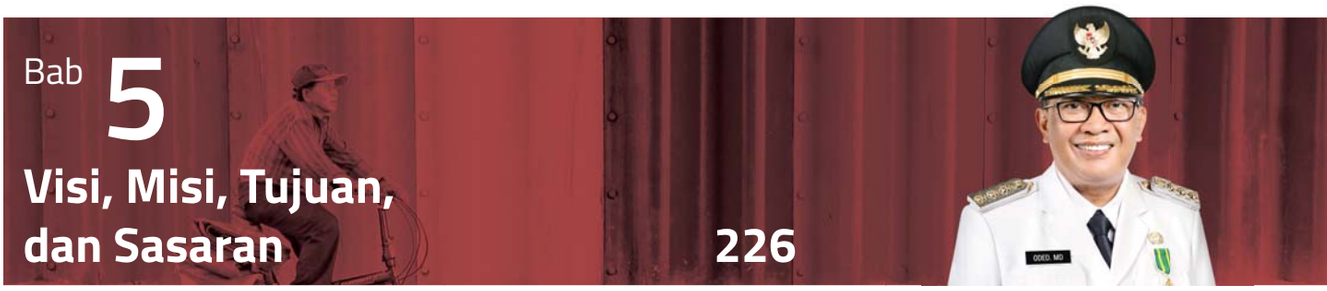

Bab 5
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 226

1. Visi 227
2. Misi 230
3. Tujuan dan Sasaran 231

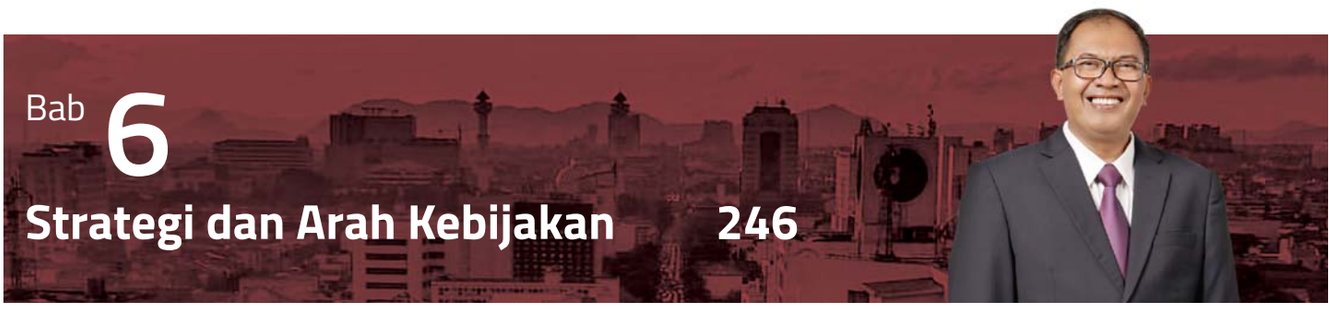

Bab 6
Strategi dan Arah Kebijakan 246

1. Strategi Pembangunan Daerah 247
2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 251
3. Program Pembangunan Daerah 261

Bab 7
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 342

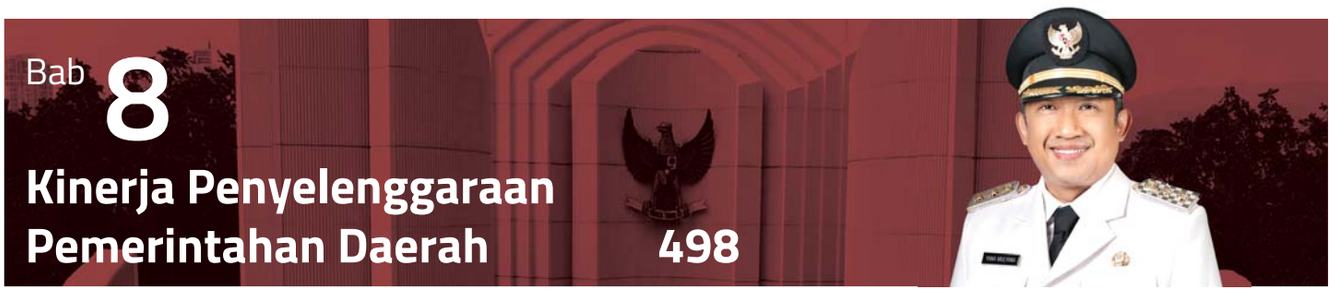

Bab 8
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 498

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 504
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 518

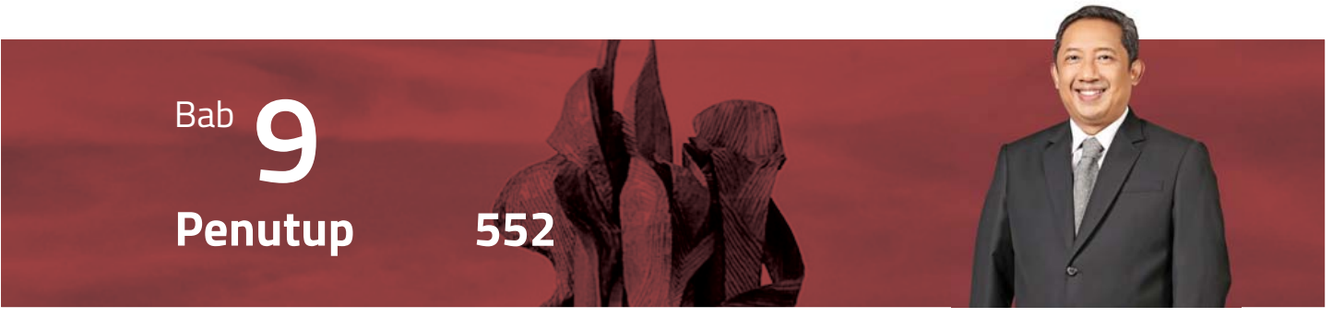

Bab 9 Penutup 552

1. Kaidah Pelaksanaan 553
2. Pedoman Transisi 555

Lampiran 558

1. Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 - 2023 Misi 1 559
2. Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 - 2023 Misi 2 561
3. Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 - 2023 Misi 3 562
4, Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 - 2023 Misi 4 565
5. Pemetaan Kinerja/Kerangka Logis RPJMD 2018 - 2023 Misi 5 572

Daftar **Gambar**

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung 5
Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah 9
Gambar 1.3 Tahapan Pembangunan 10
Gambar 1.4 Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 10
Gambar 1.5 Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah 11
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bandung 18
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 28
Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2017 30
Gambar 2.4 Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2017 31
Gambar 2.5 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 2013-2015, dan 2017 32
Gambar 2.6 Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2017 33
Gambar 2.7 IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2017 34
Gambar 2.8 Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 35
Gambar 2.9 Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku) 38
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010) 39
Gambar 2.11 PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017 40
Gambar 2.12 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Bandung, Tahun 2013-2017 (dalam ribu rupiah) 41
Gambar 2.13 Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2017 42
Gambar 2.14 Inflasi Tahun 2017 Kota di Jawa Barat 43
Gambar 2.15 Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012–2017 45
Gambar 2.16 Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Tahun 2013-2015 dan 2017 47
Gambar 2.17 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2011-2017 (dalam tahun) 48
Gambar 2.18 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bandung Tahun 2013-2017 48
Gambar 2.19 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bandung Tahun 2013-2017 49
Gambar 2.20 Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017 50
Gambar 2.21 Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2013-2017 51
Gambar 2.22 Grafik Potensi Air Hujan dan Kebutuhan Air Kota Bandung Tahun 2016 68
Gambar 2.23 Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandung Tahun 2017 71
Gambar 2.24 Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandung 2015 71
Gambar 2.25 Kepemilikan Kendaraan 76
Gambar 2.26 Jumlah Pelanggan yang Menggunakan Listrik PLN Tahun 2013-2017 91
Gambar 2.27 Liveable City Index Kota Bandung Tahun 2017-2018 92
Gambar 2.28 Capaian Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target 109
Gambar 2.29 Capaian TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target 109
Gambar 2.30 Capaian TPB Kategori yang Memiliki Data Namun Belum Menjadi Indikator 110
Gambar 2.31 Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data 110
Gambar 2.31 Capaian TPB Kota Bandung Terhadap Target Nasional 112
Gambar 3.1 Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013-2017 131
Gambar 3.2 Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 132
Gambar 3.3 Pertumbuhan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2013-2017 132
Gambar 3.4 Pertumbuhan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017 134
Gambar 3.5 Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2013-2017 135
Gambar 3.6 Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2013-2017 136
Gambar 3.7 Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013-2017 137
Gambar 3.8 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah 162
Gambar 3.9 Analisis Proyeksi Belanja Daerah 164

Gambar 3.10 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah 166
Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung 202
Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung..... 203
Gambar 5.1 Pemetaan Kinerja Misi 1 241
Gambar 5.2 Pemetaan Kinerja Misi 2 242
Gambar 5.3 Pemetaan Kinerja Misi 3 243
Gambar 5.4 Pemetaan Kinerja Misi 4 244
Gambar 5.5 Pemetaan Kinerja Misi 5 244
Gambar 6.1 Logic Model..... 248

Daftar **Tabel**

Tabel 2.1 Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari di Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 20
Tabel 2.2 Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017 20
Tabel 2.3 Kelembapan Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017 20
Tabel 2.4 Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kota Bandung..... 26
Tabel 2.5 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 28
Tabel 2.6 Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2017..... 29
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kota Bandung Tahun 2017 30
Tabel 2.8 IPM Kota Bandung Tahun 2011-2017..... 34
Tabel 2.9 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013–2017 36
Tabel 2.10 PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013–2017 37
Tabel 2.11 Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)..... 41
Tabel 2.12 Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2013-2017 42
Tabel 2.13 Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017..... 45
Tabel 2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014 - 2017..... 46
Tabel. 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pada Jenjang Dikdas dan Dikmen..... 51
Tabel 2.16 Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 52
Tabel 2.17 Persentase Guru Berpendidikan > S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 53
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 53
Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 53
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2013-2017 54
Tabel 2.21 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 54
Tabel 2.22 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 55
Tabel 2.22 Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2014 – 2016 55
Tabel 2.23 Persentase Minimal Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung Tahun 2013-2017..... 57

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2017 .. 58
Tabel 2.25 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2013-2017 59
Tabel 2.26 Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 59
Tabel 2.27 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2013-2017 60
Tabel 2.28 Indikator Ketertiban Umum Tahun 2013-2017 60
Tabel 2.29 Indikator Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017 61
Tabel 2.30 Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2011-2016 62
Tabel 2.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013-2017 62
Tabel 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013-2017 63
Tabel 2.33 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2013-2017 63
Tabel 2.34 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 64
Tabel 2.35 Indikator Pangan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 65
Tabel 2.36 Indikator Pertanahan Kota Bandung Tahun 2013-2017 65
Tabel 2.37 Perkembangan Baku Mutu Sungai 66
Tabel 2.38 Kebutuhan Air Bersih Domestik dan Non Domestik Tiap Kecamatan (m^3/detik) 67
Tabel 2.39 Perbandingan Sumber Air Hujan dengan Kebutuhan Air Kota 67
Tabel 2.40 Wilayah Operasional Cakupan Pelayanan Sampah Kota Bandung 69
Tabel 2.41 Kualitas Udara 70
Tabel 2.42 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bandung Tahun 2017 70
Tabel 2.43 Penambahan Luas Taman/RTH di Kota Bandung 72
Tabel 2.44 Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013-2017 74
Tabel 2.45 PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 74
Tabel 2.46 Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 75
Tabel 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 75
Tabel 2.48 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2017 76
Tabel 2.49 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017 77
Tabel 2.50 Persentase Koperasi Aktif dan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 77
Tabel 2.51 Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 78
Tabel 2.52 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2017 78
Tabel 2.53 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013-2017 79
Tabel 2.54 Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2013-2017 79
Tabel 2.55 Prestasi Olahraga Kota Bandung 80
Tabel 2.56 Indikator Statistik Kota Bandung Tahun 2013-2017 80
Tabel 2.58 Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013-2017 81
Tabel 2.59 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung Tahun 2013-2017 82
Tabel 2.60 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017 82
Tabel 2.61 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013-2017 83
Tabel 2.62 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kota Bandung Tahun 2013-2017 .. 83
Tabel 2.63 Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013-2017 84
Tabel 2.64 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2013-2017 84
Tabel 2.65 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2017 84
Tabel 2.66 Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2017 85

Tabel 2.67	Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2017	85
Tabel 2.68	Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013-2017	86
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017	86
Tabel 2.70	Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 – 2017	87
Tabel 2.71	Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 – 2017	88
Tabel 2.72	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 – 2017	88
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2017-2018	88
Tabel 2.73	Capaian Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2017-2018	89
Tabel 2.74	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2013-2016 (Rp Juta)	89
Tabel. 2.75	Jumlah Penginapan/Hotel	90
Tabel 2.76	Liveable City Index Tahun 2017-2018	91
Tabel 2.77	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	93
Tabel 2.78	Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)	95
Tabel 2.79	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2013-2017	96
Tabel 2.80	Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2013-2016 (dalam Persen)	97
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Misi 1 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	98
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Misi 2 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	100
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Misi 3 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	102
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Misi 4 RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018	105
Tabel 2.85	Capaian TPB Kota Bandung terhadap Target Nasional	111
Tabel 2.86	Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018	116
Tabel 2.87	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	117
Tabel 3.1	Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	128
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	129
Tabel 3.3	Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	130
Tabel 3.4	Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	131
Tabel 3.5	Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	132
Tabel 3.6	Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	132
Tabel 3.7	Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	133
Tabel 3.8	Realisasi Target Dana Perimbangan Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	134
Tabel 3.9	Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	135
Tabel 3.10	Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	136
Tabel 3.11	Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)	136

Tabel 3.12 Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 137
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 138
Tabel 3.14 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 139
Tabel 3.15 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 140
Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 141
Tabel 3.17 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 143
Tabel 3.18 Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 151
Tabel 3.19 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah) 156
Tabel 3.20 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah) 157
Tabel 3.21 Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah) 158
Tabel 3.22 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah) 159
Tabel 3.23 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Dalam Miliar Rupiah) 159
Tabel 3.24 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah) ... 160
Tabel 3.25 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Dalam Miliar Rupiah) 161
Tabel 3.26 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung 163
Tabel 3.27 Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2019-2023 165
Tabel 3.28 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bandung 166
Tabel 3.29 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung 167
Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung 167
Tabel 3.31 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bandung 168
Tabel 4.1 Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023 204
Tabel 4.2 Identifikasi RPJMD Daerah Lain 215
Tabel 4.3 Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung 223
Tabel. 5.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung dengan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 231
Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 328
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi 248
Tabel 6.2 Capaian Kinerja Misi 1 252
Tabel 6.3 Capaian Kinerja Misi 2 253
Tabel 6.4 Capaian Kinerja Misi 3 253
Tabel 6.5 Capaian Kinerja Misi 4 254
Tabel 6.6 Capaian Kinerja Misi 5 254
Tabel 6.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bandung 255
Tabel 6.8 Fokus Pembangunan 256
Tabel 6.9 Tema Pembangunan 256
Tabel 6.10 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 257
Tabel 6.11 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 262
Tabel 6.12 Program Prioritas Kepala Daerah 266

Tabel 6.13	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Pembangunan Daerah	271
Tabel 6.14	Rencana Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2018-2023	339
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 - 2023	344
Tabel 7.2	Tabel Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah	345
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Daerah/ Tujuan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023	498
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019-2023	503
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung	517

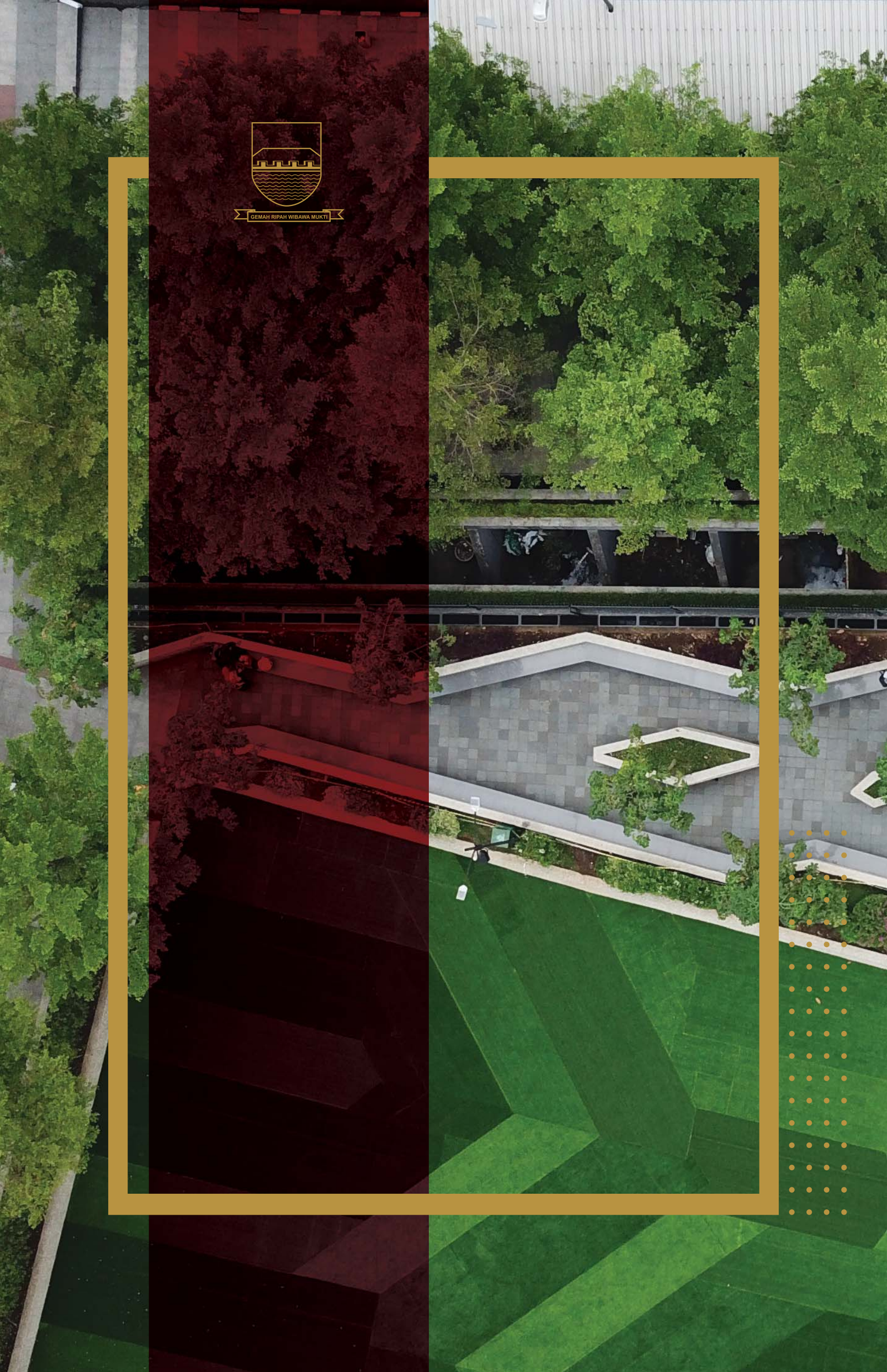
GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 1
Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Dengan terpilihnya Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung masa bakti periode 2018-2023 yang dilantik pada tanggal 20 September 2018, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah mengacu atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah, selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan visi daerah, yaitu: Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, yang didalamnya memuat indikator dan target capaian kinerja. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2003-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), Tahap IV (2018-2023), dan Tahap V (2024-2025).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, merupakan Tahap IV (keempat) RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJM Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya disusun berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran

agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bandung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik.

Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung ini adalah pemahaman awal posisi Kota Bandung yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan RPJMD Kota Bandung

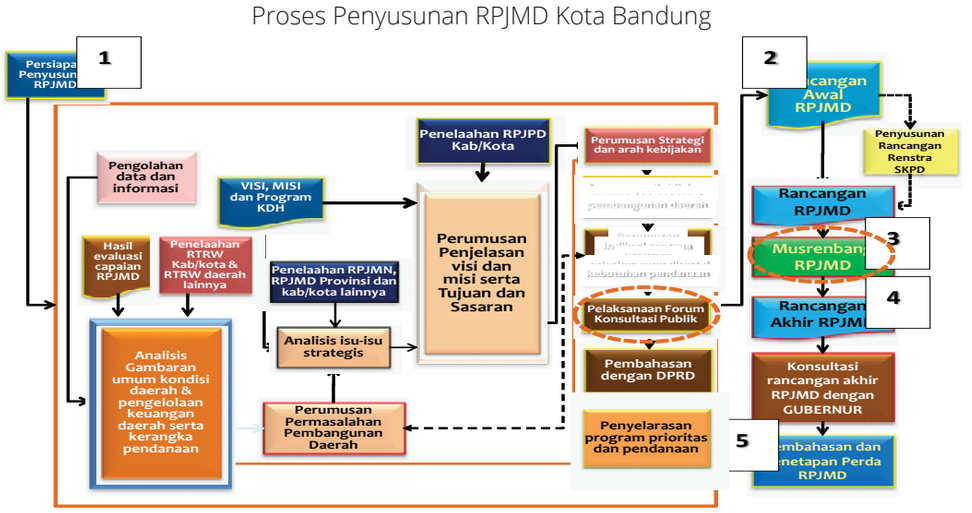

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbang;
5. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Agar RPJMD Kota

Bandung Tahun 2018-2023 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

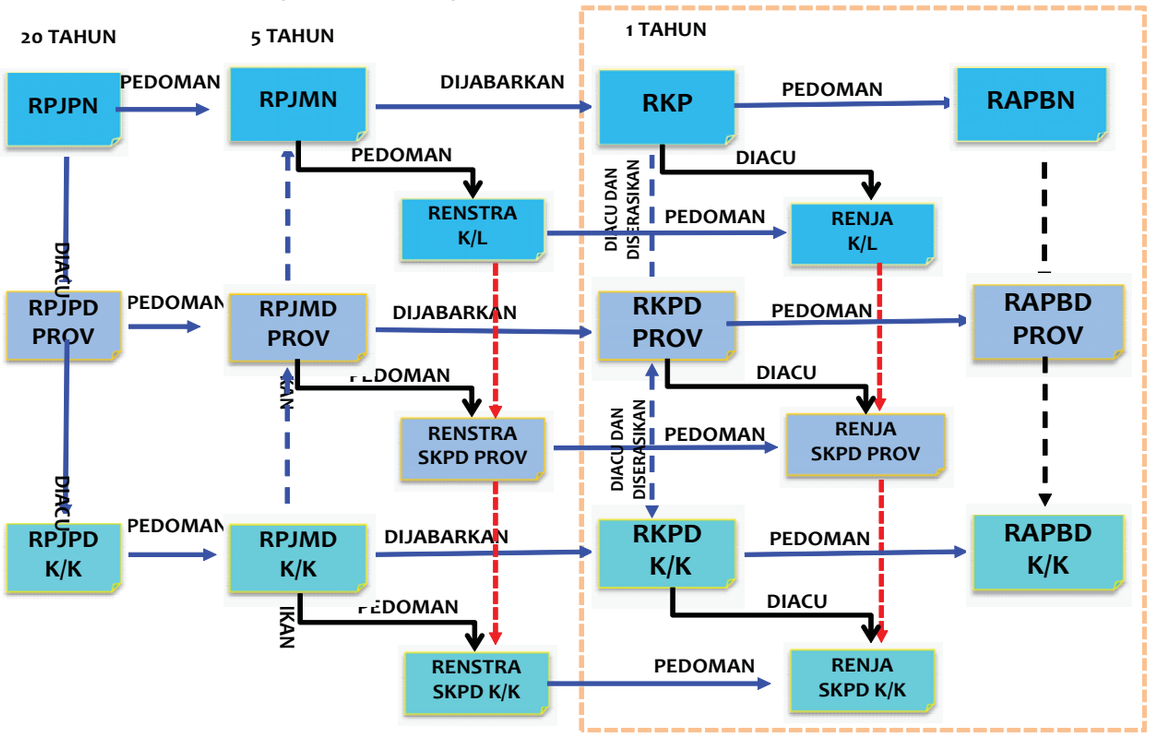

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

3.1. RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1.3
Tahapan Pembangunan

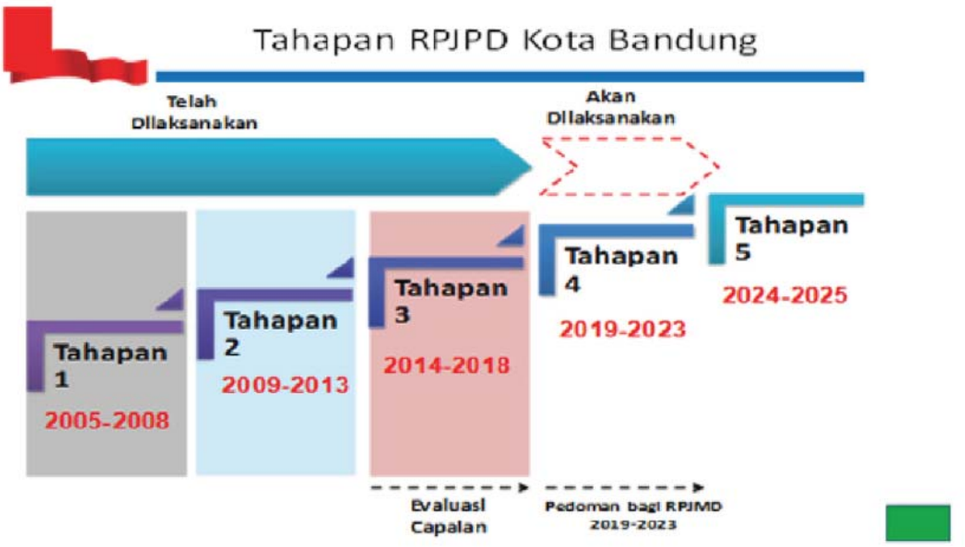

Sumber: *RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025*

3.2. RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra perangkat daerah disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi perangkat daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Gambar 1.4
Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

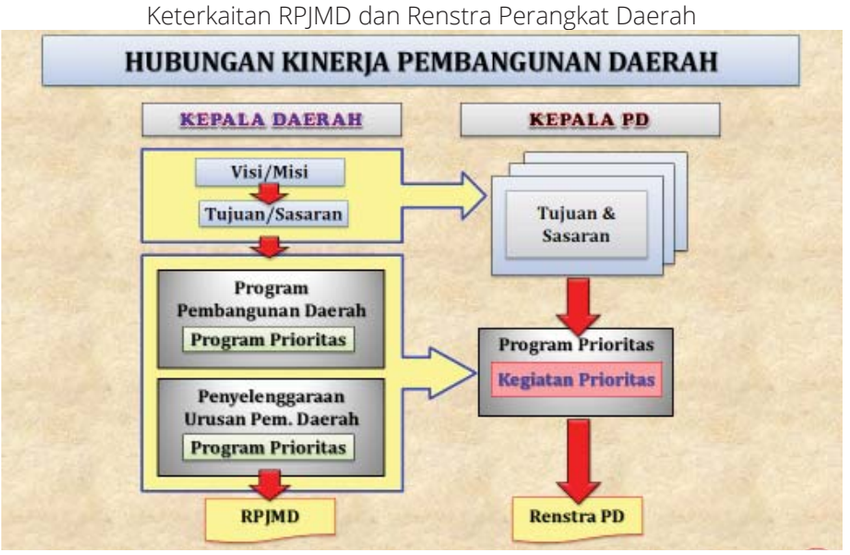

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

3.3. RPJMD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung yang memuat prioritas program dan kegiatan dari rencana kerja perangkat daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bandung, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

Gambar 1.5
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

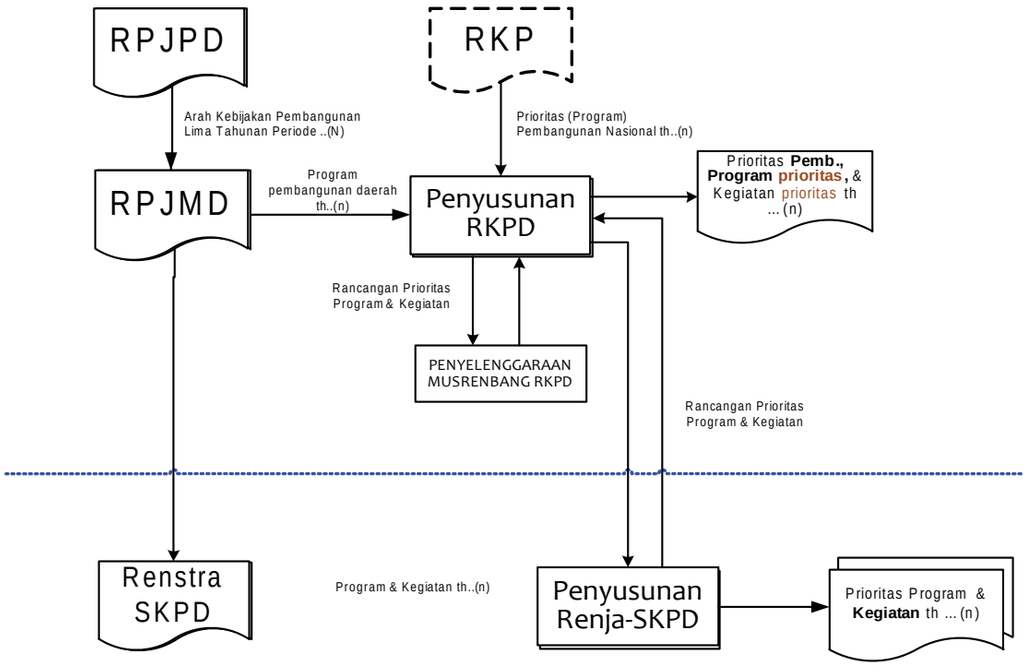

Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

3.4. RPJMD Kota Bandung dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai sub sistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, dan kabupaten/kota di cekungan Bandung, yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah cekungan Bandung (Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang);
5. Dokumen terkait lainnya (dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Maksud dan Tujuan

4.1 Maksud

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

4.2 Tujuan

RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, bertujuan antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Renstra perangkat daerah periode 2018-2023;

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018-2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023.
5. Menetapkan indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bandung periode 2018-2023.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri atas 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Bandung.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bandung secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) kinerja keuangan masa lalu, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta (3) kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Bandung dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 2

Gambaran Umum Kota Bandung

1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Bandung

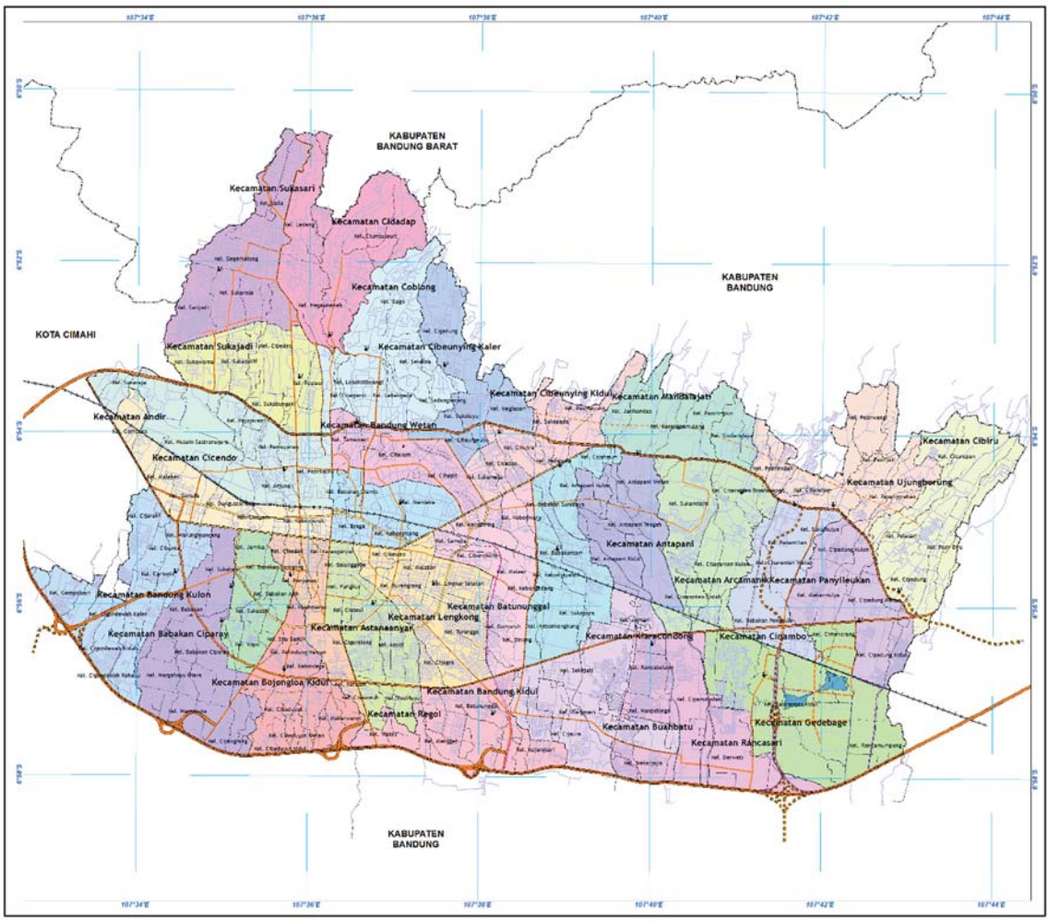

Sumber: *Pemerintah Kota Bandung, 2018*

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Bandung berada pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah "Cekungan Bandung" dengan dimensi luas 233.000 ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

c. Kondisi Topografi

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki permukaan tanah relatif datar, sedangkan wilayah kota bagian utara memiliki topografi berbukit.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada Cekungan Bandung (*basin*) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m sampai lebih dari 2.000 m. Pada dasar cekungan mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di Pantai Utara Jawa. Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah

datar (kemiringan 0 – 8%), 21% merupakan daerah landai (kemiringan 8% – 15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%).

d. Kondisi Geologi

Keadaan geologis Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial yang merupakan hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Pada bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik.

e. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 11 sungai sepanjang 252,55 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cinambo, Sungai Citepus, Sungai Cisaranten, Sungai Cikapundung Kolot, Sungai Citarum, Sungai Cikeruh, Sungai Palasari, dan Sungai Cibeureum. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini, kondisi sebagian besar sungai di Kota Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolahan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

f. Kondisi Klimatologi

Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya.

1) Curah Hujan

Pada tahun 2017, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 39,1 mm sampai dengan 442,2 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 442,2 mm dan curah hujan terendah pada bulan Juli sebesar 39,1 mm. Kondisi curah hujan rata-rata, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari
di Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	LPM (%)
2017	191,54	19,75	56,25
2016	295,80	30	52
2015	184,74	17,42	67
2014	198,80	18,8	60,3
2013	223,45	20	59

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

2) Suhu

Pada tahun 2017, suhu di Kota Bandung tercatat suhu tertinggi 24,2°C pada bulan Januari dan suhu terendah 23°C pada bulan Februari. Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Rata-rata temperatur di Kota Bandung pada tahun 2017 mencapai 23,48°C. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017

Tahun	Temperatur (^{0}C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2017	23,48	29,17	20,07
2016	23,8	24,4	23,1
2015	23,6	29,9	19,5
2014	23,4	29,1	19,8
2013	23,5	29,0	19,9

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD , 2018*

3) Kelembapan Udara

Selama tahun 2017, kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 77% dan kelembapan terendah terjadi pada bulan November sebesar 37%. Kondisi kelembapan udara rata-rata Kota Bandung dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kelembapan Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Rata-rata (%)
1	2017	56,25
2	2016	80
3	2015	74
4	2014	77,17
5	2013	77

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

g. Penggunaan Lahan

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri atas:

- Kawasan perumahan,
- Kawasan pertanian,
- Kawasan perdagangan dan jasa,
- Kawasan industri dan pergudangan,
- Kawasan wisata buatan,
- Kawasan hankam,
- Kawasan perkantoran.

Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman, jumlahnya meningkat sangat signifikan dari tahun 2013. Pada tahun 2014 sebesar 57,23% (9.601,46 ha), persentase tersebut terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Bandung, terutama pertumbuhan perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung. Persentase luas lahan pertanian basah di tahun 2014 tercatat hanya sekitar 6,75% berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa mencapai 2,35% dan penggunaan lahan untuk industri sebesar 5,36% dari total lahan yang ada.

2) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,
- Kawasan perlindungan setempat,
- Kawasan RTH,
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya,
- Kawasan eks industri,
- Kawasan rawan bencana,
- Kawasan lindung lainnya.

Luasan kawasan RTH di Kota Bandung terdiri atas RTH privat dan RTH Publik. Data tahun 2017 sesuai LKPJ AMJ, RTH Kota Bandung sebesar 12,20% dari luas total Kota Bandung. RTH publik, terdiri atas: taman kota, kebun bibit, RTH pemakaman, sempadan tegangan tinggi/sutet, sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan kereta api, serta RTH yang merupakan PSU perumahan formal yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. RTH privat, terdiri atas: RTH kawasan permukiman, RTH sarana pelayanan umum pendidikan, RTH sarana pelayanan umum kesehatan, RTH kawasan militer, RTH kawasan perdagangandan industri, dan RTH perkantoran dan perdagangan.

1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

a. Pengembangan Kawasan Perumahan

Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.

Perumahan kepadatan sedang, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah, yaitu di Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan *slum area* (daerah kumuh) dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang mendekati 80% - 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan *urban renewal* dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, dengan cara optimalisasi aset Pemerintah Kota Bandung pada zona perumahan, pembangunan rumah susun, kampung wisata, kampung kreatif, dan perbaikan infrastruktur pemukiman. *Urban renewal* dan *redevelopment* direncanakan pada beberapa daerah kumuh, antara lain di Kelurahan Taman Sari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong di atas tanah milik pemerintah daerah.

b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini:

1. Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank, dan pasar modal;
2. Jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan, dan kontraktor;
3. Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter, dan psikolog;
4. Jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka; dan
5. Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan.

Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur;
2. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya;

3. Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini dapat berupa pasar modern (***shopping mall***), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
2. Pembangunan kembali (*redevelopment*) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujung Berung, dan pasar-pasar khusus lainnya;
3. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan;
4. Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage.

Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:

1. pengendalian pusat belanja di wilayah Bandung Barat;
2. pengembangan pusat belanja ke wilayah Bandung Timur;
3. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor.

c. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

d. Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan

Rencana pengembangan kawasan industri non polutan dan pergudangan adalah sebagai berikut:

1. Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;
2. Mempertahankan industri kecil dan rumah tangga ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
3. Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;
4. Pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Bandung Barat dan diarahkan untuk dikembangkan ke wilayah Bandung Timur.

Rencana pengembangan kawasan industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan pada kawasan strategis ekonomi Kota Bandung;

2. Mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, dan Gedebage.

Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage.

Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga, yang terdiri atas: sentra kaos Surapati, sentra tekstil dan konveksi Cigondewah, sentra boneka Sukamulya (dihapus), sentra rajutan Binongjati, sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut; serta sentra industri potensial lainnya yang dikembangkan;
2. Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
3. Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

e. Pengembangan Kawasan Wisata Buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;
2. Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur;
3. Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
4. Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur;
5. Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

f. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

g. Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
2. Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;
3. Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
4. Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

h. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;
2. Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan *Sport Centre* Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;
3. Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;
4. Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar, seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
5. Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

i. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung, terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut:

- Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan, meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung;
- Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

2) Kawasan Pertanian

Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung, dan Cibiru, serta menetapkan menjadi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)

1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/***fault***) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang terindentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
3. Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
4. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.
5. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblong, dan Cibeunying Kaler.

Tabel berikut merupakan rencana penanganan kawasan bencana di Kota Bandung.

Tabel 2.4
Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kota Bandung

No	Rencana Penanganan Kawasan Bencana	
1	Rencana penanganan rawan bencana kebakaran.	a. Pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan b. Peningkatan cakupan pelayanan penangulangan bencana kebakaran.
2	Rencana penanganan rawan bencana gerakan tanah.	a. Relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor dan b. Pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah.
3	Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir.	a. Rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b. Peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan d. Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
4	Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi.	Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

No	Rencana Penanganan Kawasan Bencana	
5	Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi.	Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

Sumber: *RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031*

1.4. Demografi

Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (***sustainable development***), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan (*people-centered development*). Hal tersebut menjadi penting karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) inilah yang menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, baik yang bertujuan untuk menetap ataupun komuter. Penduduk yang semakin besar ini mendorong perubahan tatanan aspek-aspek kehidupan Kota Bandung yang meliputi aspek sosial, ekonomi, spasial, pola demografis, dan sebagainya yang semakin kompleks. Dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (***public services***) secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2013-2017, terus mengalami peningkatan. Catatan data tahun 2013 relatif belum valid, karena saat itu ada pergantian sistem aplikasi. Jika pada tahun 2013 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak

2.322.010 jiwa, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.412.458 jiwa, dan pertahun mengalami tren pertumbuhan yang terus mengecil. Dalam hal ini rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung periode 2014-2017 mencapai 1,67%. Berdasarkan tren yang ada, maka bila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kota Bandung termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% atau kurang 1%.

Gambar 2.2
Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung
Tahun 2013 – 2017

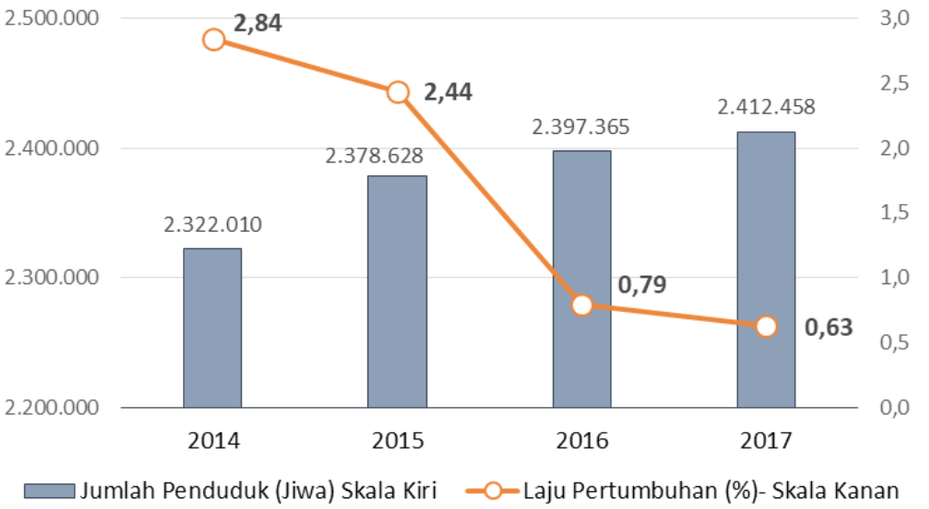

Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Tabel 2.5
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata Perubahan
Jumlah Penduduk (jiwa)	N/A	2.322.010	2.378.628	2.397.365	2.412.458	1,28
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	N/A	13.879	14.218	14.330	14.420	1,28
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	N/A	2,84	2,44	0,79	0,63	1,67
Komposisi Penduduk, menurut:						
a. Jenis Kelamin						
– Laki - Laki (orang)	N/A	1.182.714	1.202.025	1.211.803	1.218.143	0,99
– Perempuan (orang)	N/A	1.139.296	1.176.603	1.185.562	1.194.315	1,59
b. Angkatan Kerja (orang)	N/A	1.192.770	1.192.521	N/A	1.219.398	1,21
– Jumlah yang Bekerja (orang)	N/A	1.096.799	1.084.989	N/A	1.116.529	2,19
– Jumlah Pengangguran (orang)	129.142	95.971	107.532	N/A	102.869	-5,99
– Tingkat Pengangguran (%)	10,98	8,05	9,02	N/A	8,44	1,48
c. Pendidikan (penduduk usia> 10 tahun dan ijazah tertinggi).						
– Tidak Mempunyai Ijazah (%)	N/A	12,39	13,82	12,11	11,70	-1,41
– SD/MI/Sederajat (%)	N/A	16,39	17,01	15,56	15,46	-1,78

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata Perubahan
– SMP/MTs/Sederajat (%)	N/A	17,11	16,77	16,64	16,72	-0,75
– SLTA/Sederajat (%)	N/A	36,20	34,37	37,57	37,70	1,53
– Perguruan Tinggi (%)	N/A	17,90	18,03	18,11	18,41	0,93

Sumber: *BPS dan Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

a. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2014 - 2015 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.6
Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk
di Kota Bandung Tahun 2014-2017

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	Kepadatan 2017
1	Sukasari	71.280	70.136	72.456	74.029	11.807
2	Coblong	108.468	128.238	110.803	111.247	15.135
3	Babakan Ciparay	123.277	119.886	130.470	132.497	17.785
4	Bojongloa Kaler	116.140	110.888	121.107	120.851	39.885
5	Andir	97.793	104.807	101.975	99.085	26.707
6	Cicendo	91.330	93.132	93.745	94.048	13.710
7	Sukajadi	96.218	91.893	98.998	99.672	23.180
8	Cidadap	49.856	47.497	52.092	52.044	8.518
9	Bandung Wetan	29.406	38.076	30.957	29.774	8.783
10	Astana Anyar	71.893	68.047	73.643	73.236	25.342
11	Regol	77.109	93.926	81.753	80.314	18.678
12	Batununggal	114.164	114.486	116.707	117.515	23.363
13	Lengkong	70.759	79.205	71.575	70.943	12.024
14	Cibeunying Kidul	106.377	101.646	109.045	109.149	20.790
15	Bandung Kulon	127.498	120.501	130.562	130.831	20.252
16	Kiaracondong	118.888	123.778	122.312	124.255	20.303
17	Bojongloa Kidul	81.286	78.173	83.289	84.079	13.431
18	Cibeunying Kaler	67.727	67.727	67.913	68.316	15.182
19	Sumur Bandung	34.800	41.406	35.538	35.919	10.564
20	Antapani	71.493	68.715	74.008	75.209	19.844
21	Bandung Kidul	54.692	51.173	56.909	57.732	11.477
22	Buah Batu	93.103	100.711	96.696	97.857	12.340
23	Rancasari	76.706	81.951	79.229	80.701	11.010
24	Arcamanik	67.476	65.494	70.667	72.424	12.338
25	Cibiru	69.378	81.614	70.200	71.612	11.701
26	Ujungberung	76.757	74.806	79.600	81.271	12.698
27	Gedebage	36.091	35.425	37.504	38.169	3.984
28	Panyileukan	36.193	35.778	37.401	37.882	7.428
29	Cinambo	23.186	22.385	23.871	24.145	6.561
30	Mandalajati	62.666	67.128	66.340	67.652	10.143
JUMLAH		**2.322.010**	**2.378.628**	**2.397.365**	**2.412.458**	**14.526**

Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,31 km^2, sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 14.526 jiwa per km^2. Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari grafik berikut terlihat bahwa kepadatan penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung.

Gambar 2.3
Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2017

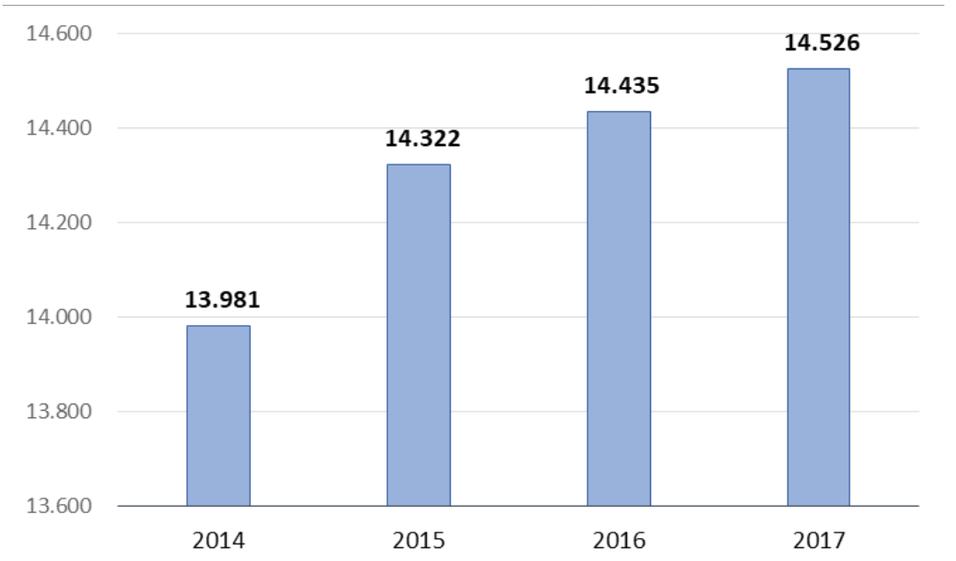

Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2017 yang mencapai 72,24% (1.804.494 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Secara rinci, jumlah dan persentase penduduk kelompok umur tahun 2017, tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kota Bandung Tahun 2017

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0–4	103.395	99.363	202.758	8,12
5–9	98.225	93.070	191.295	7,66
10□14	87.936	84.752	172.688	6,91

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
15–19	108.881	111.143	220.024	8,81
20–24	133.509	125.321	258.830	10,36
25–29	119.219	109.698	228.917	9,16
30–34	109.736	101.912	211.648	8,47
35–39	98.859	97.470	196.329	7,86
40–44	93.020	92.975	185.995	7,45
45–49	81.692	83.777	165.469	6,62
50–54	71.057	72.357	143.414	5,74
55–59	57.880	59.402	117.282	4,70
60–64	38.847	37.739	76.586	3,07
65–69	26.682	28.172	54.854	2,20
70–74	16.750	18.112	34.862	1,40
75+	14.516	22.471	36.987	1,48

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (***human capital investment***) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Gambar 2.4
Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014 – 2017

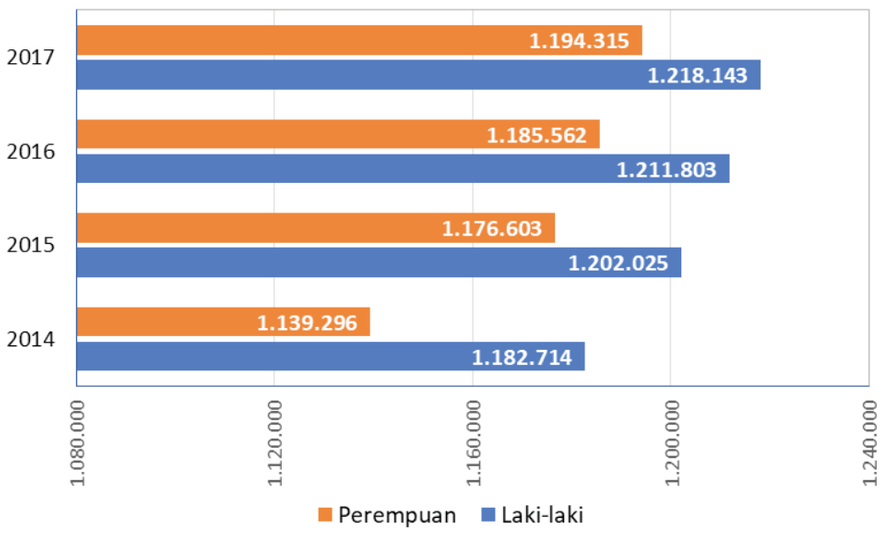

Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin selama periode tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki–laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan, namun rata-rata peningkatan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,59% atau lebih besar daripada penduduk laki-laki sebesar 0,99%.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,21% selama periode tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.219.398 tenaga kerja di tahun 2017. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2013-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 tingkat pengangguran mencapai 10,98%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 8,44% di tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,13% dan Provinsi sebesar 8,16% maka TPT Kota Bandung paling besar.

Gambar 2.5
Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung
Tahun 2013-2015, dan 2017

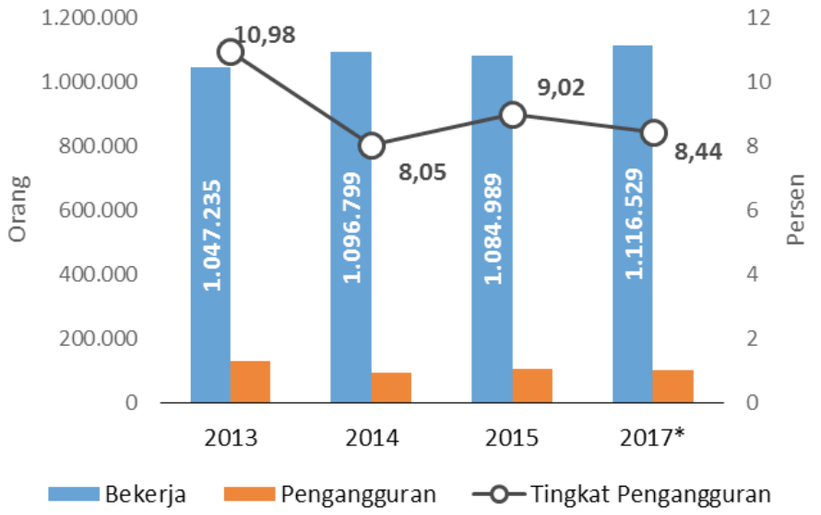

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2018*

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang merupakan proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung dalam jangka panjang.

Pada tahun 2014, penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 12,4% dan kemudian mengalami penurunan menjadi 11,7%, pada tahun 2017. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/sederajat,

SMP/MTs/sederajat, SLTA/sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi, sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/sederajat mengalami peningkatan dari 36,2% di tahun 2014 menjadi 37,7% pada tahun 2017. Kenaikan terus menerus terjadi pada persentase penduduk yang lulus perguruan tinggi dari diploma hingga doktoral, yaitu dari semula pada tahun 2014 sebesar 17,9%, terus meningkat menjadi 18,4% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung setiap tahunnya telah cukup mengalami peningkatan kesadaran (*awareness*) atas arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif.

Gambar 2.6
Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2017

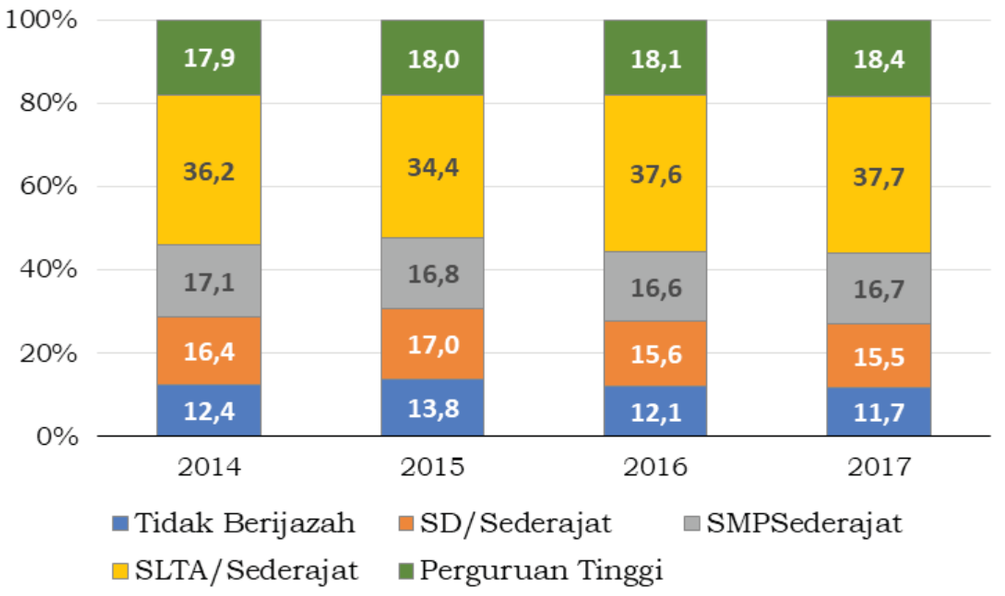

Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2018*

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1. Indeks Pembangunan Manusia

a. Tingkat dan Perkembangan IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.8
IPM Kota Bandung Tahun 2011-2017

Indikator Satuan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan								
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,97	13,05	13,13	13,33	13,63	13,89	13,90
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,33	10,35	10,37	10,51	10,52	10,58	10,59
Kesehatan								
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,74	73,77	73,79	73,80	73,82	73,84	73,86
Standar Hidup Layak								
Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/ Orang/ Tahun	14.700	14.763	14.957	15.048	15.609	15.805	16.033
Indeks Pembangunan Manusia		78.13	78.30	78.55	78.98	79,67	80,13	80,31

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

IPM Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai 2017. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,17-0,69 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,69, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,3 tahun) dan pengeluaran per kapita (+561 ribu rupiah/ orang/ tahun).

Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Bandung agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. Akan tetapi perlu disadari bahwa investasi ini hasilnya tidak berdampak langsung secara instan karena investasi pembangunan manusia merupakan pembangunan jangka panjang.

1) Perbandingan IPM Kota Bandung

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/ kota secara nasional.

Gambar 2.7
IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2011-2017

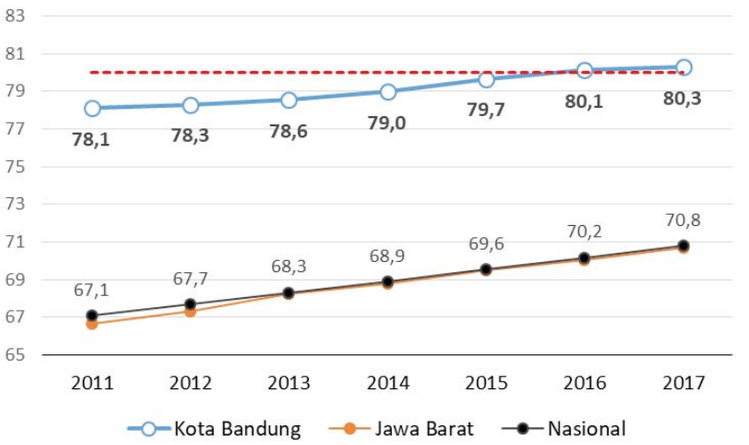

Sumber: *IPM Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018), IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat (Sumber: BPS Pusat, 2018)*

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Bandung mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Bandung berada di atas level provinsi dan nasional.

Gambar 2.8
Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

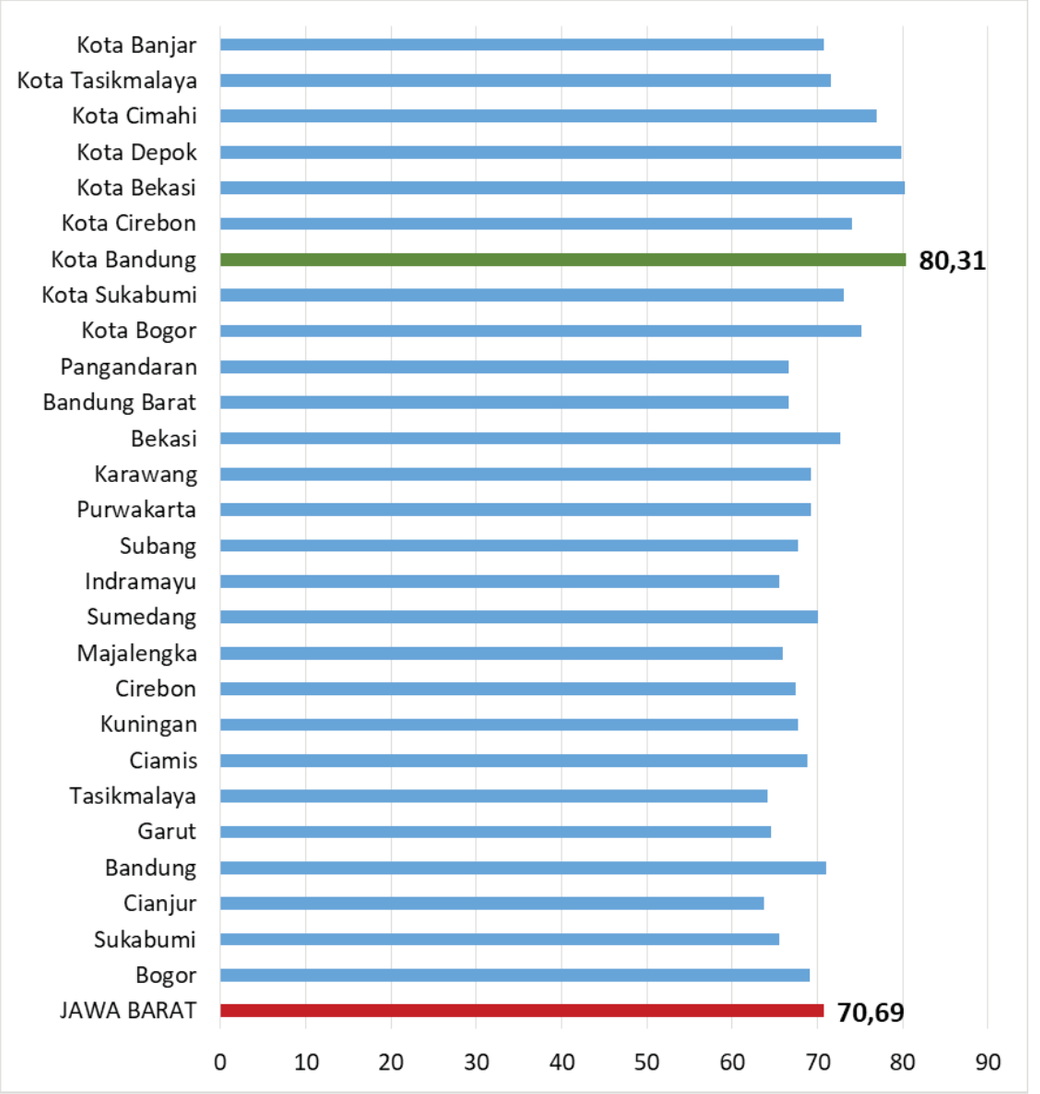

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2018*

Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2017 yaitu 80,31. tingkat kedua diduduki oleh Kota Bekasi dengan nilai IPM sebesar 80,30 dan kemudian disusul oleh Kota Depok sebesar 79,83. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus terus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing (*competitiveness*) yang semakin dinamis di era global saat ini.

2) Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan

Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi *ultimate goal* yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai

suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi ditangan segelintir golongan. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan.

3) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013–2017

KBLI	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	80.669,42	180.982,18	184.106,23	176.341,00	188.927,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	29.371.304,16	30.755.949,25	31.968.181,17	33.249.092,63	34.753.930,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	138.004,83	145.553,91	150.726,82	160.823,06	165.363,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	247.170,73	260.825,38	269.975,16	279.883,24	278.409,85
F	Konstruksi	11.480.053,10	12.260.690,81	13.224.753,36	14.141.570,29	15.238.956,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.550.557,04	40.412.177,42	43.307.804,29	46.451.124,92	49.410.000,07
H	Transportasi dan Pergudangan	9.502.247,92	10.315.596,63	11.498.477,22	12.618.047,71	13.331.526,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.900.296,92	6.552.047,68	7.091.232,14	7.900.173,63	8.715.422,04
J	Informasi dan Komunikasi	12.155.505,10	13.947.533,24	16.244.007,58	18.774.381,73	21.245.090,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.801.283,93	7.320.270,77	7.772.481,69	8.429.764,67	8.994.224,74
L	Real Estate	1.777.794,51	1.880.435,39	1.956.856,28	2.041.429,60	2.188.004,24
M,N	Jasa Perusahaan	940.255,71	1.039.534,08	1.122.114,35	1.217.219,57	1.334.194,37
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.985.218,53	4.022.538,11	4.063.849,09	4.103.285,65	4.135.291,28

KBLI	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
P	Jasa Pendidikan	3.777.642,18	4.074.172,98	4.389.017,34	4.734.861,96	5.157.685,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.149.454,58	1.274.376,79	1.422.891,18	1.564.364,77	1.707.983,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.048.003,22	4.518.256,84	4.913.905,03	5.385.467,54	6.006.950,49
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	129.005.461,88	138.960.941,47	149.580.378,93	161.227.831,96	172.851.960,77

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Ket: **Angka Sementara*

**Angka* Sangat Sementara

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2013- 2017), struktur perekonomian Kota Bandung didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; konstruksi; serta jasa keuangan dan asuransi. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 82,16 persen terhadap total PDRB Kota Bandung tahun 2017.

Tabel 2.10

PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2013–2017

KBLI	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.108,54	236.522,06	266.413,55	258.769,06	286.222,02
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	33.136.006,61	37.095.553,31	40.314.207,91	43.335.237,91	46.404.982,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	128.446,01	137.945,41	168.553,20	201.844,34	237.643,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	291.785,04	332.943,60	362.908,52	409.965,23	448.010,00
F	Konstruksi	13.657.347,15	15.542.877,75	17.632.271,56	19.244.245,34	21.275.805,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	43.172.759,14	47.982.312,20	53.770.990,71	58.434.424,88	63.777.426,91
H	Transportasi dan Pergudangan	12.932.830,47	15.966.907,79	20.837.641,53	24.390.912,95	27.395.577,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.785.257,71	7.986.461,20	8.925.149,88	10.282.633,55	11.761.828,92
J	Informasi dan Komunikasi	13.608.490,11	15.627.204,47	18.197.267,51	21.064.357,80	24.270.353,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.687.069,45	10.016.160,81	11.181.554,01	12.613.090,39	14.145.708,63
L	Real Estate	1.961.795,21	2.139.831,98	2.275.164,75	2.410.798,87	2.639.101,52
M,N	Jasa Perusahaan	1.153.164,83	1.328.737,41	1.480.912,31	1.636.892,02	1.830.372,66
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.781.209,94	5.129.943,93	5.521.871,65	5.806.555,43	6.426.695,55
P	Jasa Pendidikan	4.912.216,57	5.624.665,47	6.305.998,39	6.973.897,03	7.964.887,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.421.210,08	1.734.019,17	2.012.776,11	2.322.079,53	2.590.047,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.945.669,24	5.815.782,89	6.520.702,98	7.477.935,29	8.654.962,31
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	151.794.366,11	172.697.869,44	195.774.384,58	216.863.639,62	240.109.626,72

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Ket: **Angka Sementara*

**Angka Sangat Sementara*

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bandung pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 26,56 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,33 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,41 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,11 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 8,86 persen serta lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,89 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Gambar 2.9 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Bandung tahun 2017 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) hingga nilai kontribusi terkecil (kategori pengadaan listrik dan gas) dengan menggunakan harga berlaku.

Gambar 2.9
Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku)

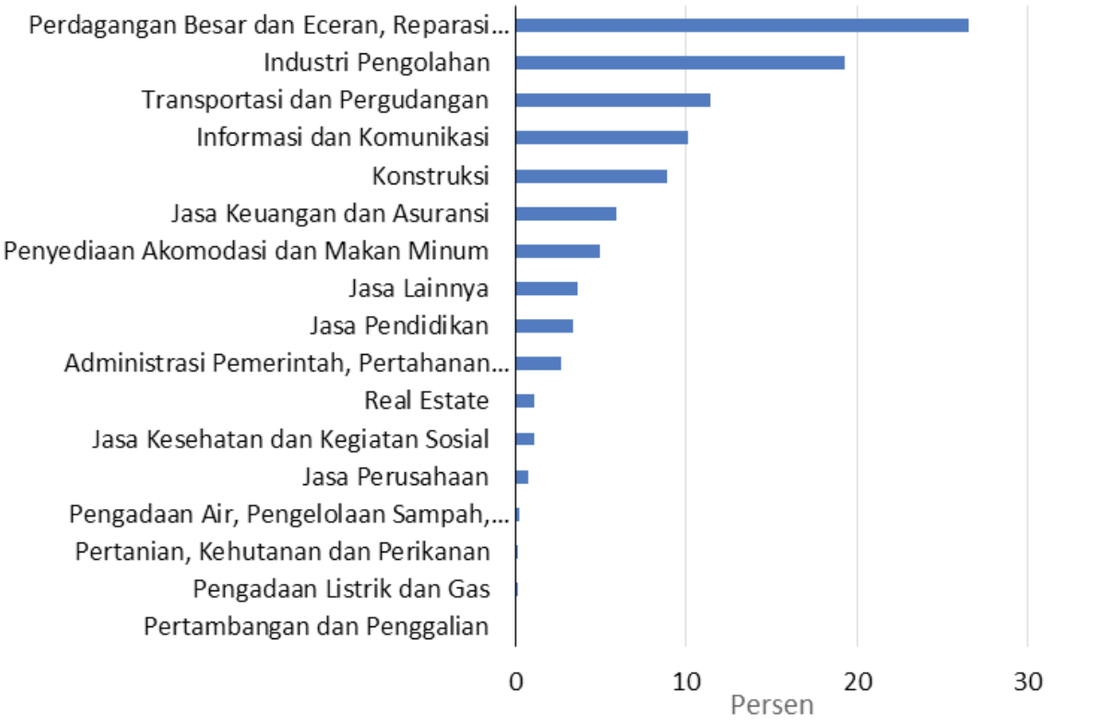

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Apabila melihat tren dari tahun 2013–2017, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2013-2017 kedua lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan peranannya berangsur-angsur meningkat. Sementara lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kota Bandung ke kategori jasa-jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2017 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2013, perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 7,84%, kemudian melambat menjadi 7,72% dan 7,64% pada tahun 2014 dan 2015 yang selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,79%, serta mengalami perlambatan menjadi 7,21% pada tahun 2017.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017.

Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Selama periode 2013-2017, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,64%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2017 masing–masing sebesar 5,48% dan 5,11%.

Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional
(Metode Tahun Dasar 2010)

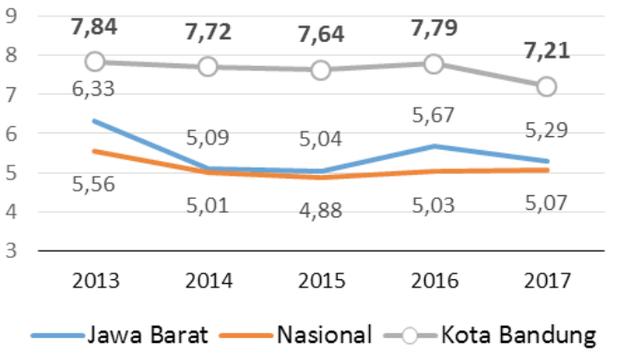

Keterangan:
LPE Kota Bandung dan Jawa Barat (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2018)
LPE Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2018)

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

4) PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bandung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita tercatat sebesar 61,74 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 96,12 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Bandung juga mengalami kenaikan sejak tahun 2013 hingga 2017, masing-masing sebesar 52,47 juta rupiah dan 69,20 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11
PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017

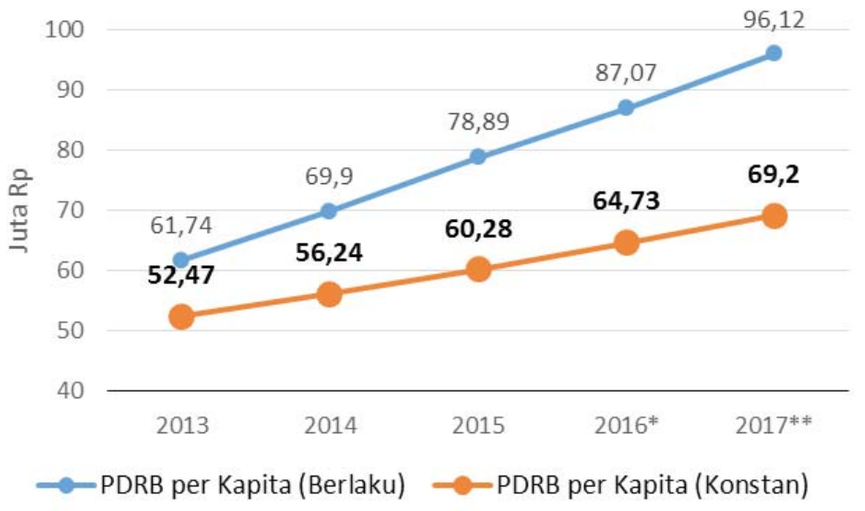

**Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Pada tahun 2017, seluruh kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya mengalami peningkatan PDRB per kapita dibandingkan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 37,18 juta rupiah pada tahun 2017, maka PDRB per kapita Kota Bandung adalah lebih tinggi. Berdasarkan analisis *Klassen Typology*, Kota Bandung termasuk ke dalam kategori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (*Rapid Growth Region*) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi.

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat diketahui bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.11
Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung,
Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016*	2017**
Kota Bandung	61,74	69,9	78,89	87,07	96,12
Kabupaten Bandung	19,93	22,01	24,23	26,29	28,26
Kabupaten Sumedang	18,01	19,75	21,83	23,65	25,85
Kabupaten Bandung Barat	17,24	19,06	20,86	22,47	24,14
Kota Cimahi	32,2	35,52	38,61	41,35	44,14
Provinsi Jawa Barat	27,77	30,11	32,65	34,88	37,18

**Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

5) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar hidup hidup layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pada tahun 2013, pengeluaran per kapita Kota Bandung sebesar Rp14.957 ribu per tahun yang setiap tahunnya mengalami tren peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,67%. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.12
Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung,
Tahun 2013-2017 (dalam ribu rupiah)

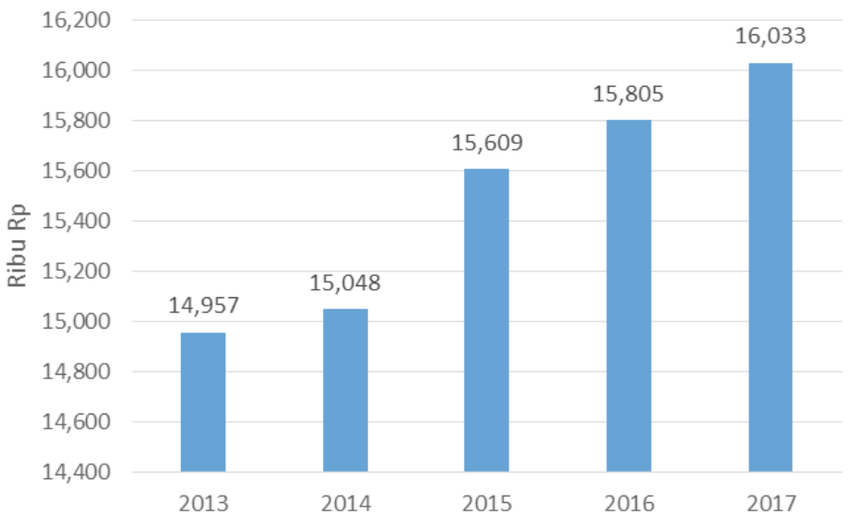

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah)*

6) Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga

barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2013-2017, Kota Bandung mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2013, tingkat inflasi Kota Bandung pada posisi 7,97%, sedangkan pada tahun 2014, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 7,76% dan pada tahun 2015, inflasi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,93% serta mengalami penurunan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 3,46%. Selanjutnya pada tahun 2017, laju inflasi Kota Bandung mengalami peningkatan menjadi 3,46%. Peningkatan inflasi pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, beras, tarif kereta api, bahan bakar rumah tangga, cabe merah, angkutan udara, tomat sayur, cabe rawit, dan wortel.

Tabel 2.12
Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2013-2017

No	Cakupan	Laju Inflasi				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kota Bandung	7,97	7,76	3,93	2,93	3,46
2	Prov. Jawa Barat	9,15	7,41	2,73	2,75	3,63
3	Nasional	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia*

Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi di tingkat nasional dan regional Jawa Barat, nilai inflasi di Kota Bandung pada tahun 2017 cenderung lebih rendah daripada regional Jawa Barat dan nasional. Selain itu, tingkat inflasi Kota Bandung di tahun 2017 juga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan 5 kota lainnya di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cirebon, Depok, dan Tasikmalaya). Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga di Kota Bandung cenderung tidak mengalami fluktuasi yang relatif besar.

Gambar 2.13
Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2010-2017

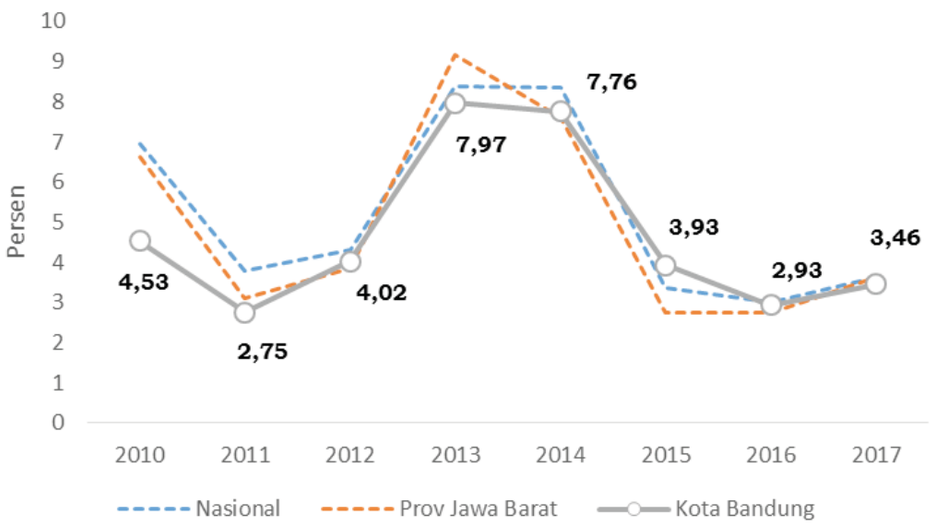

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat*

Gambar 2.14
Inflasi Tahun 2017 Kota di Jawa Barat

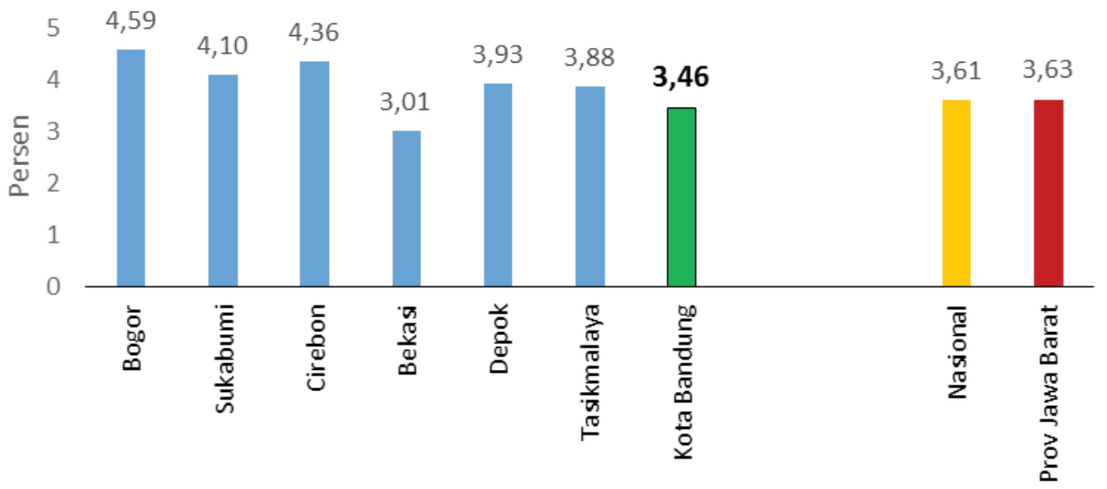

Sumber: *BPS yang dikelola dalam SIPD, 2017*

7) Indeks Gini

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi ***uniform*** (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- 0,4 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Gambar 2.15
Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012–2017

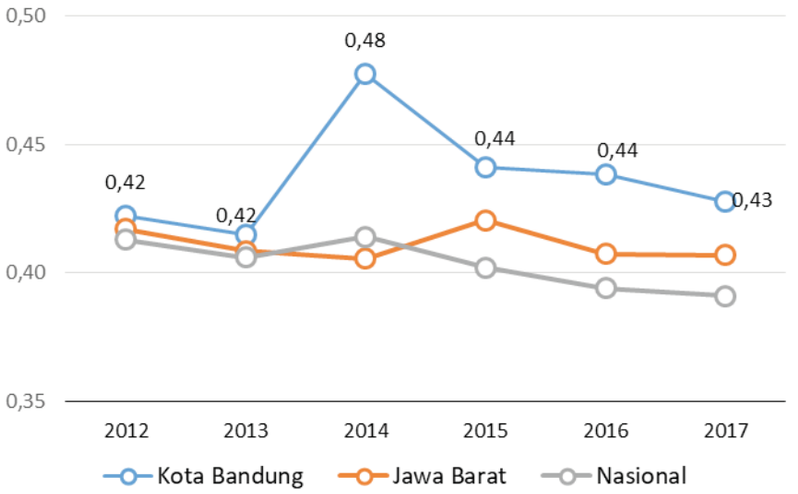

Sumber: *BPS Kota Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2017*

Gini ratio di Kota Bandung lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat dan nasional, artinya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Bandung termasuk tinggi. Dari tahun 2012 hingga tahun 2014 angka gini ratio merangkak naik dan bahkan sudah mencapai angka 0,48 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi 0,43 pada tahun 2017. Angka gini ratio Kota Bandung menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong 'sedang'. Situasi ini membutuhkan upaya penurunan ketimpangan dan agar tidak terjadi tingkat ketimpangan 'tinggi'. Berikut ini adalah perkembangan gini ratio di Kota Bandung dari tahun 2012-2017.

8) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bandung, jumlah penduduk miskin terbilang signifikan karena mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah warga Kota Bandung. Berikut adalah tabel rincian jumlah rumah tangga miskin setiap kecamatan di Kota Bandung.

Tabel 2.13
Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin per Kecamatan
di Kota Bandung Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Kk	%
1	Andir	5.452	3,93%
2	Antapani	2.785	2,01%
3	Arcamanik	3.887	2,80%
4	Astanaanyar	3.823	2,76%
5	Babakan Ciparay	9.811	7,07%
6	Bandung Kidul	3.857	2,78%
7	Bandung Kulon	8.344	6,01%
8	Bandung Wetan	1.044	0,75%
9	Batununggal	8.672	6,25%
10	Bojongloa Kaler	11.405	8,22%
11	Bojongloa Kidul	6.031	4,35%
12	Buahbatu	5.653	4,07%
13	Cibeunying Kaler	2.924	2,11%
14	Cibeunying Kidul	6.094	4,39%
15	Cibiru	4.491	3,24%
16	Cicendo	3.968	2,86%
17	Cidadap	1.903	1,37%
18	Cinambo	1.560	1,12%
19	Coblong	6.265	4,52%
20	Gedebage	1.936	1,40%
21	Kiaracondong	8.589	6,19%
22	Lengkong	2.658	1,92%
23	Mandalajati	3.853	2,78%
24	Panyileukan	1.651	1,19%
25	Rancasari	3.138	2,26%
26	Regol	4.264	3,07%
27	Sukajadi	5.469	3,94%
28	Sukasari	2.596	1,87%
29	Sumur Bandung	1.046	0,75%
30	Ujungberung	5.564	4,01%
Jumlah		138.733	100,00%

Sumber: *Dinsosnangkis Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Berdasarkan data pada tabel tersebut, pada tahun 2017, Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu sebanyak 11.405 KK atau 8,22% dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung yang mencapai 138.733 KK. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berada di daerah pusat kota dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik.

Tingginya jumlah keluarga miskin di kecamatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya aksesibilitas warga miskin terhadap sistem sumber yang ada, ketidakberdayaan warga miskin dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya sistem perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Sementara Kecamatan Bandung Wetan merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah tangga miskin terendah yaitu sebanyak 1.044 KK atau 0,75%.

9) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan *(Poverty Gap Index* = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2014 – 2017, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi. Akan tetapi, bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2014 – 2017, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi, pada tahun 2014-2015 indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan.

Tabel 2.14
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014 - 2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	115,00	4,65	0,69	0,17	353.423
2015	114,12	4,61	0,72	0,19	376.311
2016	107,58	4,32	0,55	0,12	400.541
2017	103,98	4,17	0,68	0,18	420.579

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,69 pada tahun 2014 menjadi 0,72 pada tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Sementara itu selama periode 2015-2016 mengalami penurunan menjadi 0,55, ini artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekat garis kemiskinan. Dan selama periode 2016-2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,68. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

10) Aspek Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 1,39% selama periode tahun 2013-2014. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 orang dan meningkat menjadi 1.192.770 orang di tahun 2014. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung di tahun 2013 yang sebesar 10,98%, mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2014 menjadi sebesar 8,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Namun pada

tahun 2015, pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,02% yang selanjutnya mengalami penurunan menjadi 8,44% pada tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui kebijakan dan programnya yang ***pro-job*** cukup berhasil mengurangi angka pengangguran yang ada. Hal ini juga ditunjang oleh semakin membaiknya tingkat perekonomian makro ekonomi Kota Bandung, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan mengalami perbaikan.

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

Gambar 2.16
Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung
Tahun 2013-2015 dan 2017

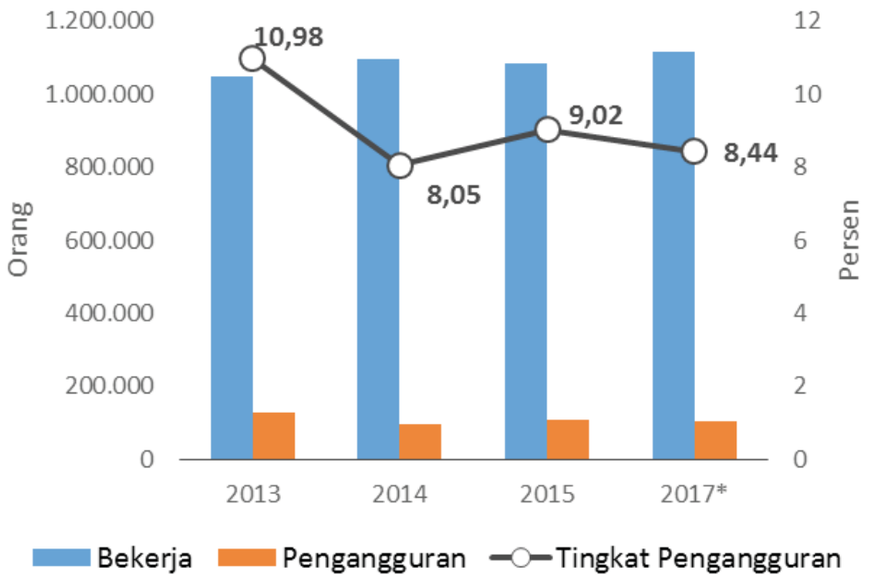

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Berdasarkan berbagai analisis yang telah disampaikan di atas, sebagai kota berpenduduk banyak dan padat, maka terjadi terjadi keterbatasan lahan pertanian. Karena itu Kota Bandung selalu mendatangkan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan Sektor Industri Pengolahan yang dahulunya cukup dominan, saat ini telah mengalami penurunan dan lebih banyak bergerak pada sektor jasa. Industri kreatif berkembang kuat, sehingga Bandung termasuk sebagai *Creative City* dalam aspek desain, menurut UNESCO pada tahun 2015. Sektor perdagangan dan perhubungan-telekomunikasi serta sektor pendukung pariwisata tumbuh pesat, walaupun perkembangan pariwisata pada akhir tahun ini mengalami penurunan atau kejenuhan.

2.2. Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Bandung selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung
Tahun 2011-2017 (dalam tahun)

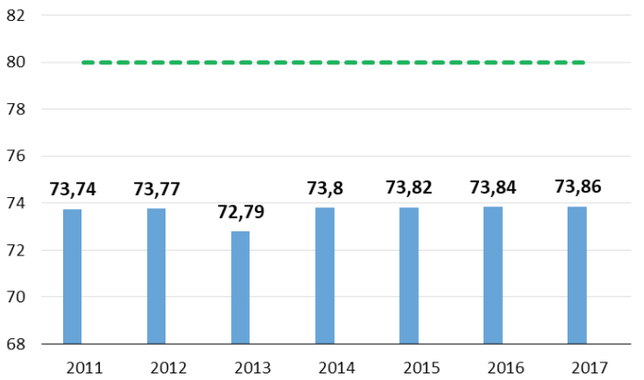

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018 (diolah)*

Pada gambar tersebut terlihat bahwa selama periode 2011-2017, Angka Harapan Hidup di Kota Bandung selalu meningkat. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup penduduk Kota Bandung adalah sebesar 73,86. Jika dibandingkan dengan tahun 2011-2017, angka tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut berarti bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2017, rata-rata penduduk Kota Bandung dapat bertahan hidup, yaitu sampai usia 73-74 tahun.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

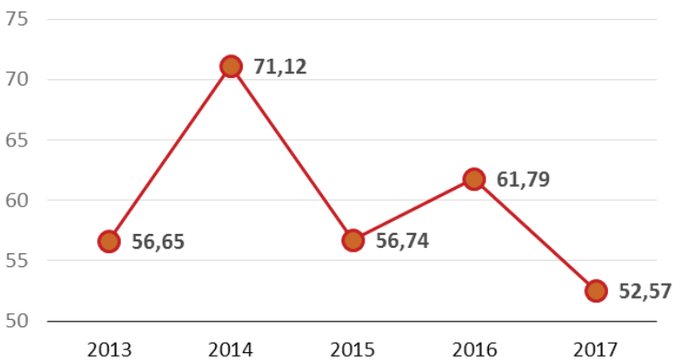

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, diolah*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKI di Kota Bandung selama rentang tahun 2013-2017 berfluktuasi, dengan AKI tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 71,12 dan yang terendah pada tahun 2017 sebesar 52,57. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan angka kematian ibu di Kota Bandung mengalami perbaikan dengan kecenderungan menurunnya AKI seperti pada tahun 2017 yang telah mencapai 52,57 yang berarti bahwa terdapat terdapat 53 kematian ibu di Kota Bandung yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

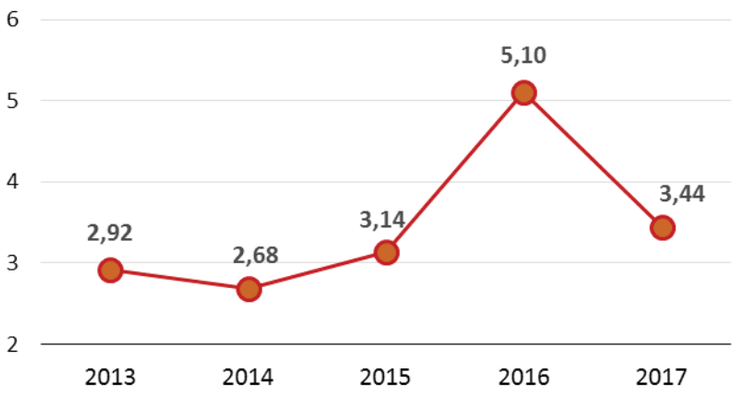

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, diolah*

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa AKB di Kota Bandung selama rentang tahun 2013-2017 berfluktuasi, dengan AKB terendah pada tahun 2014 sebesar 2,68 dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 5,10. Setelah mengalami peningkatan di tahun 2016, AKB Kota Bandung menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya AKB sebesar 1,66 poin menjadi 3,44 pada tahun 2017 yang berarti bahwa di Kota Bandung pada tahun 2017, diantara 1.000 kelahiran hidup ada 3 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

2.3. Pendidikan

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). HLS Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 13,90 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,90 tahun atau setara dengan Diploma III. Adapun RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. RLS Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 10,59, ini artinya rata-rata lama sekolah setara dengan SMA Kelas 2 atau kelas XI. Hal ini karena pengaruh pola pikir masyarakat kota yang relatif sadar akan pentingnya pendidikan dan iklim di Kota Bandung yang relatif kondusif dengan banyaknya lembaga pendidikan.

Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni.

HLS merupakan indikator baru pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.20
Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2010-2017

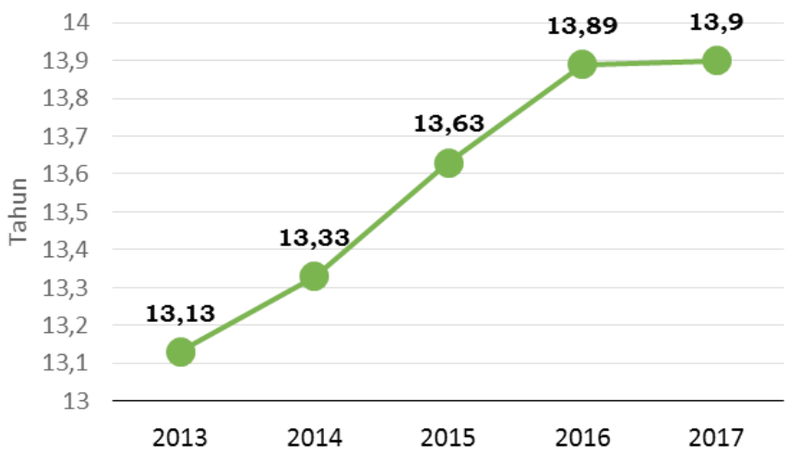

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017*

HLS Kota Bandung terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 13,13 tahun pada tahun 2013, menjadi 13,90 tahun pada tahun 2017. Adapun RLS Kota Bandung terus mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 10,37 tahun pada tahun 2013, menjadi 10,59 tahun pada tahun 2017.

Gambar 2.21
Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2013-2017

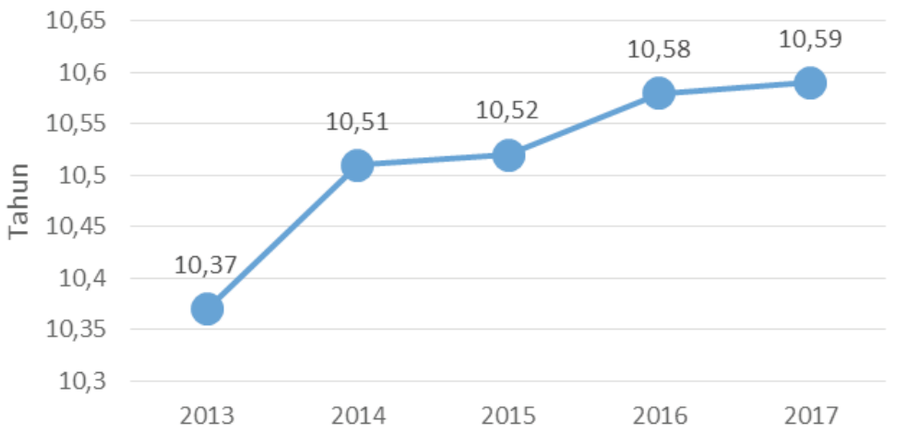

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017*

3. Aspek Pelayanan Umum

3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

a. Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, karena melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

1) Rasio Ketersediaan Sekolah

Tabel. 2.15
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
pada Jenjang Dikdas dan Dikmen

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
	Jumlah SD/MI	N/A	N/A	N/A	889	823
	Jumlah Penduduk Usia 7-12	N/A	N/A	N/A	231.174	229.718
	Rasio Ideal	N/A	N/A	N/A	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	N/A	N/A	N/A	38,46	35,83
2	SMP/MTs					
	Jumlah SMP/MTs	N/A	N/A	N/A	234	236
	Jumlah Penduduk Usia 13-15	N/A	N/A	N/A	110.218	107.890

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Rasio Ideal	N/A	N/A	N/A	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	N/A	N/A	N/A	21,23	21,87
3	SMA/SMK					
	Jumlah SMP/MTs	N/A	N/A	N/A	274	262
	Jumlah Penduduk Usia13-15	N/A	N/A	N/A	119.264	124.642
	Rasio Ideal	N/A	N/A	N/A	52	52
	Rasio Ketersediaan Sekolah	N/A	N/A	N/A	22,97	21,02

Sumber: *Pusdalisbang Prov. Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Bandung (Diolah)*

Mengacu kepada tabel tersebut bahwa secara umum rasio ketersediaan sekolah pada semua tingkatan menunjukkan masih jauh dari rasio ideal atau kurang memadai, artinya jumlah siswa di semua level sekolah dan rasio jumlah siswa dengan ruang kelas berlebihan.

2) Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bandung pada periode 2013 sampai dengan 2017 cukup rendah (< 1 %). Misalnya pada tahun 2017, angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan diperoleh persentase sebagai berikut, SD/MI sebesar 0,01% dan SMP/MTs sebesar 0,02%. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu 2013 – 2017.

Tabel 2.16
Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI:	0,001%	0,001%	0,01%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs:	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
3	SMA/MA/SMK:	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

3) Persentase Guru Berpendidikan > S1

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Ayat 1-6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1).

Tabel 2.17
Persentase Guru Berpendidikan ≥ S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90%	93%	95%	96%	98%

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

4) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2017 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu 106,19% untuk APK SD/MI dan 104,80% untuk APK SMP/MTs serta 109,66% untuk SMA/SMK/MA. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	%	131,05	109,13	102,01	110,13	106,19
2	SMP/MTs	%	116,16	108,19	103,19	104,17	104,80
3	SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)	%	98,96	99,31	104,25	102,81	109,66

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

5) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian APM Kota Bandung pada tahun 2017 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts mencapai 100%. Hanya saja, untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK masih di bawah 100% yaitu sebesar 95,71%, sehingga perlunya dukungan program tersebut.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%
2	SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	100%
3	SMA/SMK/MA/Paket C	90,59%	94,04%	94,86%	95,69%	95,71%

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

6) Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) adalah rasio jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap total jumlah penduduk. Nilai angka tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Di Kota Bandung pada tahun 2017, angka tamat SD sebesar 20,66%, angka tamat SMP sebesar 21,56%, angka tamat SMA sebesar 35,59%, dan angka tamat PT sebesar 14,88%, artinya sebagian besar penduduk di Kota Bandung telah menamatkan jenjang pendidikan SMA.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Aspek Pendidikan Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	APT	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD / MI / Sederajat	21,2%	20,91%	22,37%	25,12%	20,66%
2	SLTP / MTs / Sederajat	18,3%	20,2%	17,69%	14,51%	21,56%
3	SMU / MA / Sederajat	35,3%	32,9%	34,96%	32,09%	35,59%
4	Perguruan Tinggi	13,5%	15,77%	16,56%	12,14%	14,88%

Sumber: *Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Situasi dan kondisi pendidikan di Kota Bandung, ditentukan oleh penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Pada sekolah-sekolah negeri, kondisi saat ini diantaranya karena masih adanya: (1) ketimpangan sebaran sekolah; (2) perbedaan kualitas yang menimbulkan munculnya sekolah favorit; (3) tingkat kompetensi guru; (4) kemampuan manajerial sekolah; serta (5) kurangnya ***link & match***. Selain itu persoalan pendidikan inklusif bagi yang berkebutuhan khusus relatif masih belum dapat dipenuhi.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bahkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak". Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.21
Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	1.959	1.967	1.973	1.978	1.978
2	Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,91	0,88	0,92	0,92	0,98

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

2) Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,88	0,85	0,88	0,88	0,90

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Tabel tersebut menggambarkan rasio Puskesmas per 30.000 penduduk di Kota Bandung pada tahun 2013-2017. Rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk menurun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, hal ini disebabkan laju pertambahan jumlah puskesmas lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 rasio puskesmas mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan jumlah puskesmas tidak secara langsung menggambarkan pemenuhan pelayanan kesehatan, ada banyak faktor dan indikator yang bisa menunjukan tinggi rendahnya tingkat pemenuhan layanan kesehatan.

Situasi dan kondisi kesehatan di Kota Bandung, berkaitan pula dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, lembaga masyarakat, termasuk lembaga pelayanan yang dikelolan provinsi dan pemerintah pusat. Pada layanan kesehatan oleh Pemerintah Kota Bandung, beberapa situasi dan kondisinya, diantaranya adalah: (1) sebaran puskesmas yang belum merata; (2) belum semua puskesmas terakreditasi untuk dapat memberikan layanan sesuai standar; (3) masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan dan non-kesehatan; serta (4) kondisi fisik alam dan sosial masyarakat yang belum maksimal mendukung derajat kesehatan masyarakat.

3) Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan

Ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan masih terbatas, dimana hal ini dapat terlihat dari sumber daya manusia bidang kesehatan di Kota Bandung sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 menunjukkan gambaran seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2014 – 2016

Tahun	2014	2015	2016
Dokter Spesialis	1296	0	999
Dokter Umum	564	103	487
Dokter Gigi	115	85	192
Dokter Gigi Spesialis	0	0	42
Bidan	984	344	550

Tahun	2014	2015	2016
Perawat	4854	217	2941
Perawat Gigi	46	50	118
Tenaga Teknis Kefarmasian	0	35	372
Apoteker	0	5	121
Kesmas	93	7	43
Kesling	36	51	83
Nutrisionis	82	68	117
Dietisien	0	0	30
Fisioterapis	4	0	64
Okupasi Terapis	0	0	15
Terapis Wicara	0	0	16
Akupuntur	0	0	1
Radiographer	0	0	77
Radioterapis	0	0	0
Teknisi Elektromedis	7	0	17
Teknisi Gigi	0	0	0
Analisis Kesehatan	12	30	195
Refraksionis Optisien	0	0	19
Ortetik Prostetik	0	0	0
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	2	249
Teknisi Transfusi Darah	0	0	5
Teknisi Kardiovaskuler	0	0	

Sumber: *Dinas Kesehatan yang dikelola dalam SIPD*

Pada data tersebut, terlihat pada tahun 2015 ada penurunan jumlah yang signifikan dibanding tahun sebelum dan sesudahnya, hal ini terjadi karena hanya didapatkan data jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas saja. Apabila dilihat tren tahun 2014 dan 2016 saja, secara umum didapatkan bahwa jumlah dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat mengalami penurunan jumlah.

Tenaga dokter spesialis, dokter dan dokter gigi lebih banyak memberikan pelayanan pada upaya kesehatan perorangan. Pada upaya kesehatan masyarakat, peran tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, perawat dan sanitarian sangatlah besar. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, sistem rujukan harus diberlakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier.

Pada pelayanan primer, upaya kesehatan yang utama adalah upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat dengan tenaga utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, sanitarian, bidan, dan perawat.

Pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah tenaga tersebut sangatlah minimal. Untuk itu perlu upaya-upaya khusus dari Pemerintah Kota Bandung agar kebutuhan tenaga tersebut dapat terpenuhi. Ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan perorangan akan memberikan dampak pembiayaan kesehatan yang jauh lebih besar daripada upaya kesehatan masyarakat. Dengan pembiayaan yang terbatas, seharusnya upaya kesehatan masyarakat harus lebih menjadi prioritas.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

Berikut gambaran Rasio Ruas Jalan di Kota Bandung dalam kondisi baik selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.23
Persentase Minimal Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik (%)	68,96%	80%	91,22%	100%	100%

Sumber: *Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Dalam hal penataan ruang, indikator penilaian difokuskan pada persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dan tertib pemanfaatan ruang. Tertanganinya jumlah pengaduan, permasalahan, dan pelanggaran yang ditertibkan dan diselesaikan serta pelaksanaan penyegelan bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang. Permasalahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang terutama berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan ketaatan untuk memiliki IMB, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran tata ruang dan bangunan.

Adapun dalam hal tertib pemanfaatan ruang, terealisasi 100%. Penyiapan perangkat untuk perwujudan tertib pemanfaatan ruang telah terlaksana pada tahun 2015 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Kota Bandung, sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang terutama sebagai acuan dalam perizinan. Faktor pendorong pencapaian target adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, melalui penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ, serta kegiatan sosialisasi RDTR dan PZ yang telah dilaksanakan pula pada tahun 2015 untuk meningkatkan pemahaman aparat Pemerintah Kota Bandung.

Terkait penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mencapai target karena pada tahun 2014 target 60% dan realisasi sampai dengan tahun 2017 adalah 67% artinya persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melebihi target.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (%)	N/A	60,34%	65,00%	67,00%	-

Sumber: *Dinas Penataan Ruang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi kawasan permukiman kumuh mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Selain itu perlu juga adanya pertimbangan lain untuk menentukan kawasan sebagai kawasan penyangga kota metropolitan, seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Wilayah kumuh di Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandung No. 648/KEP.286 DISTARCIP/2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bandung menyebutkan bahwa terdapat sebaran kawasan permukiman kumuh di 454 kawasan pada 121 kelurahan dengan total luas 1.457,45 ha. Ada tiga kategori permukiman yang bisa disebut kumuh, yaitu kumuh berat, kumuh ringan, dan kumuh sedang. Di Kota Bandung sudah tidak terdapat wilayah yang dikategorikan sebagai kategori kumuh berat, yang ada hanya kumuh sedang dan kumuh ringan.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menilai suatu kawasan termasuk kumuh atau tidak adalah dengan memakai kriteria kawasan kumuh adalah sebagai berikut:

a) Tersedianya proteksi kebakaran/bencana, bobot 10%;
   - Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran
   - Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

b) Terpenuhinya kuantitas dan kualitas bangunan, bobot 15%;
   - Ketidakteraturan bangunan
   - Tingkat kepadatan bangunan
   - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

c) Terpenuhinya kualitas jalan lingkungan, bobot 10%;
   - Cakupan pelayanan jalan lingkungan
   - Kualitas permukaan jalan lingkungan

d) Terpenuhinya kualitas drainase lingkungan, bobot 25%;
   - Ketidakmampuan drainase mengalirkan limpasan air
   - Ketidaktersediaan drainase
   - Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan
   - Tidak terpeliharanya drainase
   - Kualitas konstruksi drainase

e) Tersedianya pengolahan air limbah rumah tangga, bobot 10%;
   - Sistem pengelolaan air limbah tidak Sesuai standar teknis
   - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis

f) Tersedianya cakupan layanan air minum, bobot 10%;
   - Ketidaktersediaan akses aman air minum
   - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum

g) Terlaksananya pengelolaan sampah, bobot 15%;
   - Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
   - Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
   - Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Persentase penduduk berakses air minum dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penduduk berakses air minum	70%	70%	70,65%	72,15%	75,75%

Sumber: *PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Cakupan pelayanan air minum menjadi kewenangan PDAM dan DPKP3. DPKP3 bertanggungjawab dengan pengelolaan non perpipaan yang mencapai 1,52%, sedangkan untuk layanan perpipaan PDAM capaian kinerja sebesar 75,75% sehingga total menjadi 77,27%. Saat ini produksi air baku yang sudah ada sebanyak 2.800 liter/detik di 7 lokasi, yaitu:

1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak Singa, kapasitas 1.800 l/detik;
2. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pakar, 600 l/detik;
3. Mata Air Pakar, 60 l/detik;
4. Sumur Bor tersebar, 100 l/detik;
5. Mata Air Cibeureum, 100 l/detik;
6. Mata Air tersebar, 120 l/detik;
7. Mata Air Cipanjalu, 20 l/detik.

Tingkat kehilangan air eksisting tahun 2018 adalah sebesar 42%, diharapkan ada penurunan sebesar 12% selama 5 tahun sehingga target tahun 2023 menjadi 30% dengan upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kalibrasi dan/atau penggantian meteran air;
b. Rehabilitasi atau penggantian saluran pipa;
c. Upaya penegakkan hukum terhadap pelanggar penggunaan air terutama untuk pengguna kelompok niaga dan kelompok industri.

Persentase cakupan pelayanan air limbah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	61,90%	66.60%	70,77%	72,07%	79,09%

Sumber: *PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Adapun perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Na	85	1614	2993	4978

Sumber: *DPKP3 Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Penanganan perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4.978 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi karena ada rutilahu yang sudah di perbaiki secara swadaya maupun sudah berpindah tangan. sehingga tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan dan mengundurkan diri.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perda

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat, dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan di kabupaten/kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketenteraman, dan keindahan di kabupaten/kota. Capaian kinerja indikator ketertiban umum di Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Indikator Ketertiban Umum Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	123,9	124	101,5	128,6	119
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) (%)	100	100	82,71	75,53	100
3	Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	70,30	84,00	90,35	100

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja yang dikelola dalam SIPD*

2) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Proteksi terhadap bencana kebakaran, berdasarkan Permen PU RI Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk

suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu ***public service*** dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di WMK. Pada tahun 2015 dari target <18 menit dapat terealisasi 14,20 menit. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydran, dan peran serta masyarakat/satwankar.

Tabel 2.29
Indikator Perlindungan Masyarakat Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	64,27%	64,27%	71,27%	75,15%	78,50%
2	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	61,15%	66,29%	68,18%	70,73%	73,73%
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	100%

Sumber: *DKPB Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Bandung dari tahun 2013-2017 selalu ada peningkatan. Pada tahun 2017 mencapai 78,50% dan sampai bulan September 2018 sudah mencapai 100%. ***Respon time*** (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (***response time rate***) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sampai tahun 2017 sudah mencapai 73,73%.

Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT<15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar. Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2017 sudah mencapai 100% dari 210 KK yang tertipa bencana semuanya mendapat bantuan.

f. Sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain sebagainya yang terdapat di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Bandung dalam kurun waktu 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2011-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sarana Sosial	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah

Sumber: *Dinas Sosial Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi non pelayanan dasar masyarakat meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

a. Tenaga Kerja

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/ wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,55%	63,04%	62,52%	62,52%	63,11%

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Jika TPAK Kota Bandung pada tahun 2017 sebesar 63,11% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen, TPT berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,98%	8,05%	9,02%	N/A	8,44%

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Data tersebut menunjukkan bahwa TPT Kota Bandung pada rentang tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 TPT Kota Bandung sebesar 8,44%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPR	6%	6%	6%	6%	6%
	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	3	3	3
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	50	50	50	50	50
2	Rasio KDRT (%)	0,016%	0,019%	0,009%	0,010%	0,006%
	Jumlah KDRT	104	122	45	53	33
	Jumlah Rumah Tangga	661.194	657.769	521.765	531.111	532.433
3	Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	6.341	6.361	372.671	442.803	504.779
4	Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganaan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	97,7%	100%	92,9%	97,2%	97,4%

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah laporan ditindaklanjuti	130	190	78	105	147
	Jumlah laporan yang masuk ke unit pelayan terpadu	133	190	84	108	151
5	Cakupan perempuan dan anak korban yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/ PKT di rumah sakit	12,8%	16,8%	19,1%	25%	23,2%
	Jumlah korban KTPA yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas	17	32	16	27	35
	Jumlah seluruh korban KTPA yang terdata datang ke psukesmas maupun tatalaksana kasus KTPA dan RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	133	190	84	108	151

Sumber: *DP3APM dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Tabel 2.34
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	38,00%	47.97%	46,73%	N/A	N/A

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Hal yang menarik adalah pada perbedaan persentase yang cukup besar, dimana persentase perempuan yang bekerja hanya sebesar 46,73 persen sedangkan laki-laki sebesar 63,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang bekerja lebih dominan dibanding perempuan, penduduk laki-laki umumnya merupakan tulang punggung keluarga sehingga mereka yang seharusnya bekerja, sedangkan kaum perempuan lebih dominan bekerja mengurus rumah tangga.

c. Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung. Ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah

satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Indikator Pangan di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan pangan utama	144,35 kg/ kapita/ thn	149,4 kg/ kapita/ thn	197,17 kg/ kapita/ thn	197,42 kg/ kapita/ thn	197,05 kg/ kapita/ thn
2	Ketersediaan pangan/ kapita/hari X kandungan kalori	NA	1990	2733,59	2312,19	2048,23
3	Ketersediaan pangan/ kapita/hari X kandungan protein	NA	60,6	119,39	88,02	83,67
4	Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar	NA	0	20	13	0
5	Jumlah target kasus pangan segar yang tercemar	NA	50	50	45	40

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

d. Pertanahan

Dalam hal pertanahan, indikator difokuskan pada persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah negara yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Indikator Pertanahan Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase luas lahan bersertifikat	12,17%	12,78%	15,45 %	10,81%	14,75%
	Luas lahan bersertifikat	1.355.927	1.442.912	1.750.587	2.046.278	2.797.263
	Jumlah luas wilayah	11.144.426	11.290.392	11.331.319	18.937.462	18.961.096
2	Penyelesaian kasus tanah negara	100%	100%	100%	100%	NA
	Jumlah kasus yang terfasilitasi	7 Kasus terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	12 Kasus terfasilitasi	10 Kasus terfasilitasi	NA
	Jumlah kasus yang terdaftar	7 Kasus terdaftar	10 Kasus terdaftar	12 Kasus terdaftar	10 Kasus terdaftar	

Sumber: *BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

e. Lingkungan Hidup

1) Kondisi Daya Dukung Ketersediaan Air

Air adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Keadaan hidrologi di Wilayah Kota Bandung meliputi sistem air tanah dan air permukaan. Secara umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Bandung tersedia cukup memadai. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah Kota Bandung berada di dataran rendah yang dilewati oleh 15 sungai sepanjang 265,05 km, dimana sungai utamanya yaitu Sungai Cikapundung beserta anak-anak sungainya pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bermuara ke Sungai Citarum.

Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan) setiap tahun realisasinya tidak sesuai target kecuali pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,00%. Pada tahun 2014 tidak terealisasi dari target 12,50%, sedangkan realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 12,50% dari target sebesar 17,00%. Indikator sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B menunjukkan kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu air kelas IV pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan dalam penentuan status mutu air dengan metode STORET memiliki skor yang berada pada rentang nilai kelas B, yaitu -1 sampai dengan -10 dan dikategorikan sebagai cemar ringan. Dengan kondisi air sungai yang masih terkontaminasi oleh limbah domestik, maka status cemar ringan ini akan sulit dijangkau.

Tabel 2.37
Perkembangan Baku Mutu Sungai

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sungai yang memenuhi baku mutu Kelas IV Gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	N/A	-	12,00%	17,00%	-

Sumber: *DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Kebutuhan air terbanyak di Kota Bandung adalah untuk rumah tangga. Diasumsikan kebutuhan air di Kota Bandung terdiri atas air bersih untuk domestik (rumah tangga), non domestik (industri, perkantoran, fasilitas umum dan lain-lain) serta untuk pertanian (pertanian, peternakan).

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam melangsungkan kegiatannya sehari-hari, sehingga pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ketersediaan air bersih sangat tergantung kepada sumber air bersih yang dapat diolah dan dimanfaatkan, dimana dalam penyediaannya air bersih dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kegiatannya serta sumber air yang ada. Perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kebutuhan air bersih per orang adalah 150 liter/hari.
b) Kebutuhan non domestik adalah 20% dari total kebutuhan domestik.
c) Asumsi kebocoran 15% dari total kebutuhan air bersih.
d) Kebutuhan non domestik: 20% kebutuhan domestik.
e) Kebutuhan air pertanian sawah: 1 liter/detik/ha.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dengan jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2016 sebanyak 2.490.622 jiwa, maka kebutuhan air bersih pada tahun 2016 adalah 5,92 m^3/detik, sebagaimana pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.38
Kebutuhan Air Bersih Domestik dan Non Domestik Tiap Kecamatan (m3/detik)

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Sawah Ha	Kebutuhan Air m3/detik			Jumlah (m3/ detik)
			Domestik	Non Domestik	Sawah	
2015	2.481.469	736	4,31	0,86	0,736	5,91
2016	2.490.622	736	4,32	0,86	0,736	5,92
2017	2.503.822	736	4,35	0,87	0,736	5,95
2018	2.517.093	736	4,37	0,87	0,736	5,98
2019	2.530.433	736	4,39	0,88	0,736	6,01
2020	2.543.844	736	4,42	0,88	0,736	6,04
2021	2.557.327	736	4,44	0,89	0,736	6,06
2022	2.570.881	736	4,46	0,89	0,736	6,09
2023	2.584.506	736	4,49	0,90	0,736	6,12

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

2) Daya Dukung Air Kota Bandung

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, apabila diasumsikan seluruh air hujan yang jatuh di Kota Bandung tertampung dalam sebuah danau yang besar, maka kapasitasnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Bandung bahkan hingga tahun 2023. Kebutuhan air total di Kota Bandung tahun 2016 adalah 5,92 m^3/det baik untuk kebutuhan domestik, non domestik maupun irigasi sawah, dan kapasitas air hujan yang jatuh sebesar 12,94 m^3/det, lebih dari dua kali kebutuhan Kota Bandung. Sehingga secara teori seharusnya dapat dipenuhi. Namun pada kenyataannya terdapat kejadian-kejadian kekurangan air di Kota Bandung. Bila kita bahas lebih detil lagi, perbandingan antara potensi sumber air hujan yang turun dengan kebutuhan air di Kota Bandung, akan terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39
Perbandingan Sumber Air Hujan dengan Kebutuhan Air Kota

Bln	CH (mm)	Potensi Air Hujan (m^3/det)	Kebutuhan Domestik 2016	Kebutuhan Non Domestik (m^3/det)	Kebutuhan Irigasi (m^3/ det)	Jumlah Kebutuhan Kota m^3/ det	Selisih m^3/ detik
Jan	208,51	13,02	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	7,76
Feb	227,14	15,17	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	9,90
Mar	328,36	20,51	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	15,25
Apr	297,76	19,22	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	13,96
Mei	222,91	13,92	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	8,66
Jun	138,90	8,97	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	3,70
Jul	99,88	6,24	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	0,98

Bln	CH (mm)	Potensi Air Hujan (m^3/det)	Kebutuhan Domestik 2016	Kebutuhan Non Domestik (m^3/det)	Kebutuhan Irigasi (m^3/det)	Jumlah Kebutuhan Kota m^3/det	Selisih m^3/detik
Ags	72,06	4,50	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	-0,76
Sep	143,60	9,27	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	4,01
Okt	201,40	12,58	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	7,32
Nop	363,03	23,43	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	18,17
Des	313,31	19,57	-4,324	-0,865	-0,074	-5,262	14,31

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

Gambar 2.22
Grafik Potensi Air Hujan dan Kebutuhan Air Kota Bandung Tahun 2016

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat bahwa secara teori sepanjang tahun kebutuhan air di Kota Bandung tahun 2016 dapat dipenuhi dengan potensi air hujan yang ada, kecuali pada bulan kering yang terjadi di bulan Agustus, kebutuhan air Kota Bandung tidak bisa dipenuhi dengan potensi curah hujan yang ada pada bulan tersebut.

3) Kondisi Kapasitas Daya Tampung Sampah

a) Persentase Penanganan Sampah

Salah satu permasalahan perkotaan yang dihadapi saat ini adalah timbunan sampah yang besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.412.458 jiwa pada tahun 2017 dan timbulan sampah per kapita sebanyak 0,6 kg/orang/hari (Kajian Timbulan Sampah Kota Bandung Tahun 2016, DLHK), maka setiap harinya Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak ±1.499 ton. Dari jumlah timbulan sampah harian tersebut, sampah yang dikirim ke TPA rata-rata adalah sebesar 1.101,19 ton/hari atau 97,47%.

Tabel 2.39
Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pananganan Sampah	74%	87,23%	87,41%	90,4%	97,47%

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Sampah merupakan persoalan serius yang dihadapi wilayah Bandung Raya, termasuk juga Kota Bandung di dalamnya. Produktivitas sampah di kota metropolitan seperti Bandung yang merupakan ibukota dari Jawa Barat sangat tinggi. Sampah tersebut bersumber dari sampah yang diproduksi perumahan, pasar, kantor daerah komersil, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Secara umum, 65% sampah masih didominasi oleh sampah domestik. Dari jumlah itu, baru sekitar 300 ton per hari yang bisa diolah menjadi bahan kerajinan, kompos, bahan bakar gas, dan listrik.

b) Cakupan Pelayanan Sampah

Luas cakupan pelayanan Kota Bandung kurang lebih 90% dari luas area Kota Bandung dan dibagi ke dalam empat wilayah operasional kerja yaitu operasional wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, dan Bandung Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Wilayah Operasional Cakupan Pelayanan Sampah Kota Bandung

No	Operasional Wilayah	Lingkup Operasional
1.	Bandung Utara	Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kecamatan Bandung Wetan
2.	Bandung Barat	Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, dan Kecamatan Astana Anyar.
3.	Bandung Selatan	Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiara Condong, dan Kecamatan Bandung Kidul
4.	Bandung Timur	Kecamatan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Ujung Berung, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Gedebage, dan Kecamatan Buah Batu

Sumber: *DLHK Kota Bandung, 2018*

Berdasarkan tabel tersebut, sarana persampahan di Kota Bandung tersebar di wilayah sebanyak 160 unit TPS, diantaranya 10 lokasi TPS kegiatan 3R dan 1 lokasi pengomposan di eks TPA Jelekong, kontainer ukuran 6 m^3 dan 10 m^3 sebanyak 170 unit, 82 unit tong komposter, 742 tempat sampah terpilah, dan 11 unit mesin pencacah, sedangkan 1 unit TPA berlokasi di Desa Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan TPA Sarimukti hanya bisa dilaksanakan sampai dengan tahun 2023. Setelah itu, sedang direncanakan pemanfaatan TPA Legok Nangka skala regional.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus diubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang melalui prinsip 3R (***reduce, reuse, recycle***). Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berupaya melakukan pengurangan sampah di TPS 3R dan Ex TPA. Kegiatan pengurangan sampah dilakukan melalui pengolahan sampah organik yaitu dengan pengomposan dan teknologi biodigester.

Kegiatan 3R yang efektif dilaksanakan masih di 4 (empat) TPS dan 1 (satu) eks TPA dari 10 TPS 3R yang ada, yaitu TPS Tegallega, TPS Ciroyom, TPS Indramayu, TPS Gedebage, dan ex-TPA Jelekong. Upaya tersebut menghasilkan pengurangan sampah pada tahun 2015 adalah sebesar 0,18% dari jumlah sampah total yang masuk ke TPS dengan jumlah pengurangan sampah organik yang dijadikan kompos sebesar 2.905,17 ton/tahun atau sebesar 8 ton per hari, sedangkan dengan upaya biodigester jumlah pengurangan sampah organik sebesar 53.460 ton/hari atau 146,5 ton per hari.

4) Kondisi Kualitas Udara

Tingkat kualitas udara perkotaan harus memenuhi baku mutu udara ambien. Indikator tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien setiap tahun terealisasi sesuai target bahkan melebihi target pada tahun 2014 dan 2015. Realisasi pada tahun 2014 adalah sebesar 96,00% dari target sebesar 30,00%, realisasi pada tahun 2015 adalah sebesar 92,60% dari target 35,00% dan realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar 60,00% sesuai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.41
Kualitas Udara

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	N/A	96,00%	92,60%	60,00%

Sumber: *DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Transportasi, industri, rumah tangga, dan pembakaran sampah (TPA) merupakan sumber-sumber pencemaran udara kota, dan sektor transportasi merupakan penyebab utama pencemaran udara di berbagai kota termasuk Kota Bandung. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung akan berdampak terhadap penurunan kualitas udara ambien. Indeks Kualitas Udara Kota Bandung tahun 2017 berada pada rentang 40,00 hingga 85,59. Indeks terendah berada di Jalan Elang dan indeks kualitas udara paling tinggi di Pintu Tol Pasteur. Berikut ditampilkan tabel dan gambar hasil perhitungan indeks kualitas udara Kota Bandung tahun 2017.

Tabel 2.42
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Bandung Tahun 2017

No.	Lokasi	Indeks (Ieu) SO^2	Indeks (Ieu) NO^2	Indeks (Ieu) Rata-rata	IKU
1.	Terminal Leuwipanjang	0,156	1,379	0,7675	57,46
2.	Terminal Cicaheum	0,31925	1,339	0,829125	54,04
3.	Bunderan Cibiru	0,056	0,7335	0,39475	78,17
4.	Jalan Elang	0,33375	1,83	1,081875	40,00
5.	Pintu Tol Pasteur	0,219	0,3035	0,26125	85,59
6.	Jl. Soekarno-Hatta depan Astra Bizz	0,056	1,8615	0,95875	46,84
7.	Jl. Soekarno-Hatta depan Aria Graha	0,056	0,9615	0,50875	71,84
8.	Jl. BKR depan Alifa	0,37225	1,384	0,878125	51,32

No.	Lokasi	Indeks (Ieu) SO^2	Indeks (Ieu) NO^2	Indeks (Ieu) Rata-rata	IKU
9.	Terminal Ledeng	0,1975	0,7595	0,4785	73,52
10.	Alun-alun Jl. Asia Afrika	0,365	1,481	0,923	48,82
11.	Jl. Ahmad Yani	0,22425	0,875	0,549625	69,57
12.	Jl. Tegalega depan Pendopo	0,222	1,2825	0,75225	58,31
13.	Jl. Ir. H. Djuanda (saat tidak CFD)	0,20925	0,6345	0,421875	76,66
14.	Jl. Buah batu (saat tidak CFD)	0,2665	1,039	0,65275	63,84
15.	Jl. Merdeka (Balaikota)	0,22625	1,7895	1,007875	44,11
16.	Jl. Rumah Sakit	0,196	1,0025	0,59925	66,81

Sumber: *DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Gambar 2.23
Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandung Tahun 2017

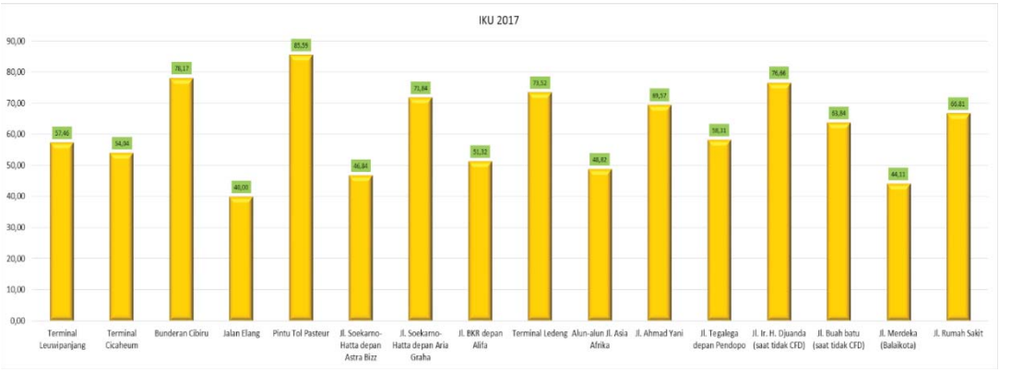

Sumber: *DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Dibandingkan tahun 2015, di tahun 2017 memperlihatkan ada kenaikan nilai yang di beberapa lokasi pantau yang menunjukkan perbaikan kondisi kualitas udara terutama SO_2 dan NOx. IKU di Terminal Leuwipanjang dan Terminal Cicaheum memperlihatkan kondisi kualitas udara membaik di tahun 2017 karena ada perubahan nilai dari 20,09 dan 32,36 menjadi 57,46 dan 54,04. Beberapa lokasi pantau yang mengalami penurunan indeks kualitas udara di tahun 2017 dibandingkan 2015, antara lain: Jl. Elang, Jl. Sukarno Hatta depan Astra Bizz, dan Alun-Alun Jalan Asia Afrika.

Gambar 2.24
Grafik Indeks Kualitas Udara Kota Bandung 2015

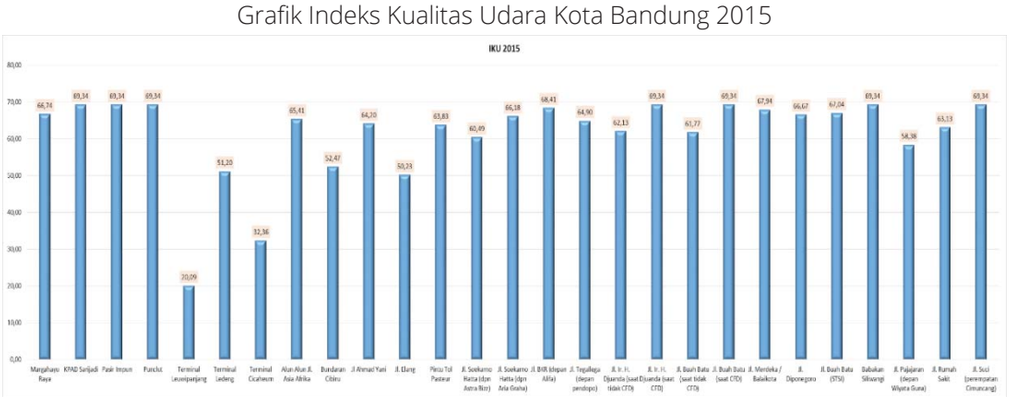

Sumber: *DLHK Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

5) Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Kondisi RTH Eksisting

Dinamika pembangunan yang berlangsung di Kota Bandung menyebabkan tekanan terhadap 'infrastruktur hijau perkotaan' yang lazim disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan taman-taman lingkungan yang terdapat di kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan industri, serta kawasan permukiman. Meskipun peraturan perundangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi ruang terbuka hijau privat telah tersedia, namun dalam kenyataannya konversi RTH untuk berbagai kepentingan pembangunan tidak dapat dihindarkan.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung menjadi sebab akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kota Bandung, sehingga mengakibatkan kebutuhan RTH di Kota Bandung diganggu oleh adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan tersebut. Berdasarkan data dari DPKP3 Kota Bandung, penambahan luas RTH pada tahun 2017 seluas 48.165 m^2 (4,8 ha) dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Taman RW di 40 lokasi dengan luas 4.507 m2;
- Pengadaan lahan untuk RTH dengan luas 6.591 m2;
- Serah terima PSU Perumahan Batununggal seluas 37.067 m2.

Persentase luasan RTH Kota Bandung tahun 2017 sebesar 2.041,47/16.729 adalah 12,20%. Hal tersebut masih jauh dari target RTH Publik yaitu sebesar 20%, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur jumlah RTH minimal seluas 30% dari total luas kota. Minimnya RTH di Kota Bandung berdampak besar terhadap lingkungan. Satu di antaranya adalah suhu udara di Kota Bandung yang mulai terasa panas, akan tetapi potensi perluasan RTH di masa yang akan datang sangat memungkinkan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Penambahan Luas Taman/RTH di Kota Bandung

Taman Per Kecamatan	Luas (M^2) Lama	Hasil Up dating RTH
WILAYAH BOJONEGARA		
I. Kecamatan Sukasari	44.939	48.506
II. Kecamatan Sukajadi	43.404	57.760
III. Kecamatan Cicendo	42.436	53.416
IV. Kecamatan Andir	44.368	44.818
WILAYAH CIBEUNYING		
I. Kecamatan Cidadap	10.666	10.666
II. Kecamatan Coblong	246.232	255.670
III. Kecamatan Bandung Wetan	312.742	314.089
IV. Kecamatan Sumur Bandung	62.329	62.329
V. Kecamatan Cibeunying Kidul	8.527	13.517
VI. Kecamatan Cibeunying Kaler	9.654	32.593
WILAYAH TEGALLEGA		

Taman Per Kecamatan	Luas (M^2) Lama	Hasil Up dating RTH
WILAYAH BOJONEGARA		
I. Kecamatan Astana Anyar	8.874	9.394
II. Kecamatan Babakan Ciparay	2.973	3.997
III. Kecamatan Bandung Kulon	300	7.089
IV. Kecamatan Bojongloa Kidul	549	896
V. Kecamatan Bojongloa Kaler	8.848	9.579
WILAYAH KAREES		
I. Kecamatan Kiaracondong	7.553	8.867
II. Kecamatan Batununggal	28.702	29.174
III. Kecamatan Lengkong	60.127	60.127
IV. Kecamatan Regol	209.375	209.675
WILAYAH UJUNGBERUNG		
I. Kecamatan Antapani	39.769	712.855
II. Kecamatan Arcamanik	19.177	687.416
III. Kecamatan Mandalajati	85.000	92.603
IV. Kecamatan Ujung Berung	7.067	7.407
V. Kecamatan Panyileukan	22.714	48.452
VI. Kecamatan Cibiru	8.409	8.669
WILAYAH GEDEBAGE		
I. Kecamatan Buah Batu	27.629	29.914
II. Kecamatan Rancasari	32.450	32.769
III. Kecamatan Bandung Kidul	20.983	25.844
IV. Kecamatan Cinambo	5.745	6.460
IV. Kecamatan Gedebage	-	1.430
Jumlah	1.402.362	2.199.344

Sumber: *KLHS RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, 2018*

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin berkurang, disebabkan terjadinya perubahan fungsi yang semula berupa lahan RTH menjadi area terbangun untuk berbagai keperluan seperti perumahan, industri, pertokoan, kantor, dan lain-lain. Hal tersebut lambat laun dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi ekologi, sosial, hingga ekonomi, sekaligus juga menurunkan kualitas ruang kota. Semakin berkurangnya RTH, khususnya taman dapat menimbulkan munculnya kerawanan dan penyakit sosial sifat individualistik dan ketidakpedulian terhadap lingkungan yang sering ditemukan di masyarakat perkotaan.

Secara ekologis, terbatasnya RTH juga berpengaruh terhadap peningkatan temperatur udara dan perubahan kualitas mikroklimat, pencemaran udara, terjadinya banjir dan berbagai dampak negatif lingkungan lainnya. Sebagai akibatnya, berbagai penyakit mulai dari infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit sanitasi kulit, dan penyakit sosial juga dapat timbul pada warga kota. Menurunnya kualitas lingkungan

hidup kota dan berkurangnya kualitas hubungan sosial karena minimnya ruang terbuka publik lambat laun juga menurunkan kualitas ruang kota. Hal ini akan berdampak pada penurunan nilai ekonomi ruang kota dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada iklim investasi ekonomi dan kegiatan pembangunan kota di masa depan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah. Peningkatan/ penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.44
Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penduduk memiliki KTP	95,5%	99,05%	89,05%	95,38%	96,75%

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan, dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *DP3APM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

2) Posyandu Aktif

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari keluarga berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas

kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan posyandu, yaitu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) hamil, melahirkan, dan nifas.
2. Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS).
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan pasangan usia subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur (PUS). Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rata –rata Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 70,18%. Selama 5 tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Peserta KB Aktif	68,10%	68,75%	70,10%	70,60%	73,35%

Sumber: *Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

i. Perhubungan

Berdasarkan hasil survei preferensi masyarakat, kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bandung dapat diukur menurut kelompok usia, pada gambar berikut menunjukan kepemilikan kendaraan terdapat pada usia 10-25 tahun didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis mobil, dan pada usia 26-40 tahun kepemilikan kendaraan pribadi didominasi oleh kendaraan pribadi dengan jenis motor. Ledakan jumlah kendaraan bermotor itu menjadi pemicu berbagai permasalahan trasportasi karena penambahan ruas jalan hanya berkisar 1,29% per tahun tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 9,34% per tahun (*Bandung Urban Mobility Project* (BUMP), 2015).

Gambar 2.25
Kepemilikan Kendaraan

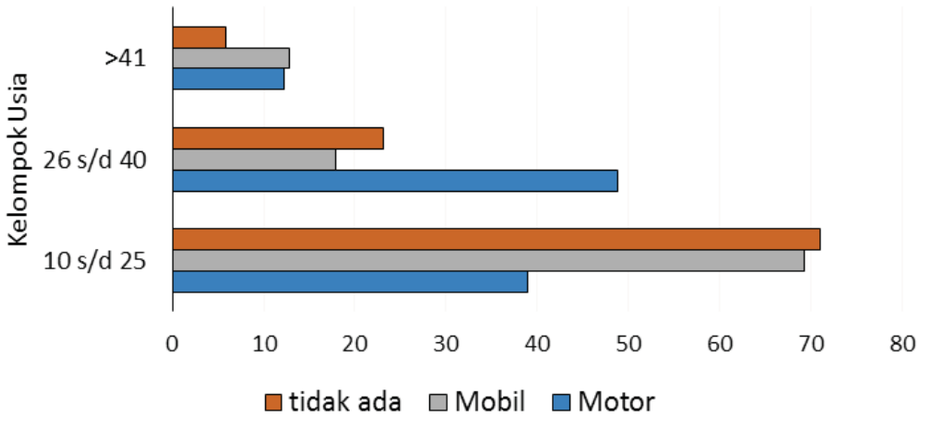

Sumber: *Bandung Urban Mobility Project (BUMP) Tahun 2015*

Implikasi yang jelas dari fenomena tersebut adalah peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Dari survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada tiga temuan yang terkait dengan kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

- Pertama, volume lalu lintas tertinggi ditemukan antara pukul 07.00 - 09.00 dan 17.00 - 19.00 WIB.
- Kedua, kecepatan rata-rata di Bandung sekitar 16 km/jam .
- Ketiga, *Volume Capacity Ratio* (VCR) pada beberapa ruas jalan sudah mendekati atau lebih dari 1. VCR adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lalu lintas, di mana VCR <1 berarti bahwa koridor belum mencapai titik jenuh dan VCR ≥ 1 berarti koridor telah melampaui kapasitasnya. Karena nilai VCR di banyak jalan di Bandung sekitar 1, dapat disimpulkan bahwa pengguna transportasi mengalami kemacetan lalu lintas dan hanya bisa mengendarai dengan kecepatan rendah.

Dalam situasi ini, isu yang terjadi di Kota Bandung adalah penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat masih sangat dominan, sehingga pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan sistem angkutan publik yang aman, nyaman dan terjangkau untuk masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah penyediaan akses bagi pejalan kaki untuk menuju dan dari tempat penyediaan angkutan umum serta keterjangkauan pelayanan angkutan umum yang dapat diakses oleh masyarakat.

Jumlah arus penumpang umum (bis/kereta api/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah Kota Bandung selama 1 (satu) tahun, dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Bandung Tahun 2011-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	9.186.378	8.195.919	6.956.581	6.496.803	5.419.322

Sumber: *Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah arus penumpang umum yang keluar masuk ke Kota Bandung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 – 2017. Hal ini disebabkan berbagai hal, diantaranya semakin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasinya, penggunaan transportasi ***online*** yang tidak bisa diketahui secara pasti jumlah penumpangnya, serta faktor persepsi orang ketika akan menggunakan angkutan umum terkait faktor keamanan dan keselamatan cenderung rendah ketika menggunakan angkutan umum.

j. Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi *digital, mobile, virtual* serta *personal*, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai urusan komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dengan indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	-	-	410%	450%	500%

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

k. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi, koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Tabel 2.50
Persentase Koperasi Aktif dan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Koperasi Aktif	81,14%	81,76%	83,50%	84,67%	86,24%
2	Persentase Usaha Mikro dan kecil	94,23%	94,42%	94,65%	94,76%	95,13%

Sumber: *Dinas Koperasi UMKM dan Perindag Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam mengupayakan agar koperasi yang tidak aktif dapat menjadi koperasi aktif dan koperasi aktif menjadi koperasi yang lebih besar.

Indikator koperasi aktif pada tahun 2013 sampai tahun 2017 terus meningkat, dengan persentase koperasi aktif pada tahun 2017 mencapai 86,24% dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.212 koperasi. Untuk usaha mikro dan kecil pada tahun 2017 mencapai 5.510 usaha dengan persentase usaha mikro dan kecil sebesar 95,13% dimana dari tahun 2013-2017 selalu terjadi peningkatan.

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya jumlah pengangguran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.51
Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Koperasi Aktif	81,14%	81,76%	83,50%	84,67%	86,24%
2	Jumlah Anggota	NA	552.064	553.326	553.593	553.593

Sumber: *Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

2) Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Binaan

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.581	4.336	5.251	5.365	5.799

Sumber: *Dinas KUMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

I. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	40	51	142	212	200
2	PMDN	13	20	60	94	109
3	Total	53	71	202	306	309

Sumber: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung kurun waktu 2013-2017 dibuktikan pada tabel jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Bandung berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	183,8	190,5	321	780,2	1.082,9
2	PMDN	1.578,4	3.420,6	4.957	6.388,9	11.617,5
3	Total	1.762,2	3.611,1	5.278	7.169,2	12.700,4

Sumber: *Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

m. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 834 organisasi kepemudaan/komunitas.

Kota Bandung menjadi sangat layak disebut kota pemuda karena dari total jumlah penduduk Kota Bandung 2,4 juta jiwa lebih dari 45 persennya berusia 15 sampai 39 tahun (lihat tabel 2.7), hal itu juga mendorong Kota Bandung merupakan kota pertama yang mempunyai peraturan daerah tentang kepemudaan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2016. Lebih dari itu, dengan keberpihakan kebijakan program pemerintah Kota Bandung terhadap kepemudaan diwujudkan dengan dibangunnya berbagai fasilitas fasilitas publik seperti *Bandung Creative Center* sebagai wadah komunitas-komunitas kreatif, *skate park,* taman film, taman musik dan taman-taman lainnya sebagai wadah penunjang kepemudaan.

Kondisi dan potensi keolahragaan di Kota Bandung menjadi kontributor terbesar baik atlet, pelatih maupun ofisial bagi prestasi olahraga Provinsi Jawa Barat. Prestasi olahraga Kota Bandung tergambar dalam raihan medali pada *event* olahraga prestisius, yaitu Porda, PON, *Sea Games* dan *Asian Games* seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Prestasi Olahraga Kota Bandung

Uraian	Porda XIII 2018			Pon XIX 2016			Sea Games 2017			Asian Games 2018		
	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu	Emas	Perak	Perunggu
Prestasi	131	149	139	63	50	56	2	5	16	3	1	2
Jumlah Atlet	949 Orang			307 Orang			43 Orang			52 Orang		
Jumlah Ofisial	462 Orang			131 Orang			21 Orang			43 Orang		
Jumlah Cabor	58 Cabor			44 Cabor			18 Cabor			26 Cabor		

Sumber: *Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Khusus pembinaan olahraga prestasi terhadap bibit unggul, Kota Bandung selalu ikut serta dalam kegiatan pekan olahraga pelajar yang dilaksanakan setiap 2 tahun. Kota Bandung selalu menjadi juara umum dalam kegiatan tersebut.

n. Statistik

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dokumen statistik antara lain Buku Kota Dalam Angka dan buku PDRB Kota. Berikut adalah indikator statistik di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.56
Indikator Statistik Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Bandung Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

o. Persandian

Indikator persandian dapat dilihat melalui persentase tingkat keamanan informasi/ data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan dilakukannya pemeliharaan peralatan komunikasi untuk lingkup pimpinan, pemeliharaan sarana komunikasi dan dilakukannya pengamanan data sistem informasi berupa pengamanan data sandi dan keamanan sistem aplikasi. Pengukuran target dengan terpeliharanya peralatan komunikasi di lingkup pimpinan dan keamanan sistem informasi, tersedianya dukungan peralatan yang tersedia, sehingga memudahkan pengelola jaringan dan adanya tenaga ahli ***security***, sehingga data dan informasi aman dan valid.

p. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di

tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	26 buah	26 buah	26 buah	26 buah	26 buah
2	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	87 kali	120 kali	146 kali	160 kali	176 kali
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15,54%	15,54%	15,54%	11,49%	11,49%
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	99	99	99	99	370

Sumber: *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2013-2017 selalu ada peningkatan. Pada tahun 2017, penyelenggaraan festival seni budaya sebanyak 176 kali atau 202% dari tahun 2013 yang hanya 87 kali. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu oleh Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 99 cagar budaya. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan cagar budaya yang dikelola secara terpadu menjadi 370 cagar budaya.

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berikut gambaran kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.58
Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	26 buah	26 buah	26 buah	26 buah	26 buah
2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	87 pagelaran	120 pagelaran	146 pagelaran	160 pagelaran	176 pagelaran
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	15,54%	15,54%	15,54%	11,49%	11,49%

Sumber: *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

q. Perpustakaan

1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 91.287 orang, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.59
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pengunjung Perpustakaan per Tahun	4.520 orang	6.010 orang	4.517 orang	54.181 orang	91.287 orang

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

2) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Secara terperinci mengenai koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah selama kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	52,578	64,784	74,366	87,836	96,886

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

r. Kearsipan

Kearsipan (*filing*) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip, yaitu:

1. Penyimpanan arsip menurut abjad;
2. Penyimpanan menurut wilayah;

3. Penyimpanan menurut nomor;
4. Penyimpanan menurut tanggal.

Dalam hal pengelolaan arsip secara baku ini, baru sebagian kecil PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakannya. Sampai tahun 2014, hanya 11% dari seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengelolaan Arsip secara Baku	11%	11%	58,23%	91.14%	58 PD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	38,16 (29 PD)	45,57	58,23	91,14	77,33 (58 PD)
3	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1	1	1	2	1 sosialisasi dan 12 penyuluhan

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan pariwisata; pertanian; perdagangan, perindustrian; transmigrasi; serta kelautan dan perikanan.

a. Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Jumlah wisawatan yang datang ke Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata di Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan wisata	102%	108%	111%	122%	102%
2	Lama kunjungan Wisata	2,0	2,1	2,6	-	-
3	PAD sektor pariwisata	26%	25%	27%	30%	26%

Sumber: *Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Persentase kunjunan wisata di Kota Bandung dari tahun 2013-2016 selalu ada peningkatan dari target yang direncanakan, sampai dengan tahun 2016 mencapai 122%. Pada tahun 2017, persentase kunjungan wisata mengalami penurunan menjadi 102%, sebanyak 6.960.512 orang dari target 6.800.000 orang. Secara keseluruhan, kunjungan wisata dari tahun 2013-2017 selalu meningkat. Rata-rata lama kunjunan wisata di Kota

Bandung mencapai 2 hari. Tahun 2013-2017 sektor pariwisata dapat menunjang PAD sebesar 25%-30% dari PAD Kota Bandung, dengan nilai terbesar pada tahun 2016 sebesar 654 miliar atau 30% dari PAD Kota Bandung.

b. Pertanian

1) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian, seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buah Batu, dan Arcamanik. Produktivitas tanaman padi pada tahun 2017 sebanyak 6.808 ton/ha, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.63
Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	6.295	6.503	6.505	6.805	6.808

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil, hanya berada pada kisaran 0,12%. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.64
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	0,14%	0,14%	0,13%	0,12%	N/A

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

c. Perdagangan

Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung pada tahun 2017 didapat sebesar US$465 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Bandung. Berikut gambaran mengenai ekspor bersih perdagangan Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.65
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ekspor bersih perdagangan ($ juta)	601,5	603	635	609	465

Sumber: *Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

d. Perindustrian

Kota Bandung memiliki potensi industri, baik industri skala besar, menengah, dan kecil. Dari data Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Bandung, pada tahun 2017, berdasarkan nilai investasi terdapat 253 industri besar, 835 industri menengah, 2.932 industri kecil formal, dan 6.828 industri kecil non formal di Kota Bandung. Di kelompok industri kecil dan mikro, industri sandang merupakan industri dengan jumlah unit usaha terbesar sebanyak 1.237 unit usaha.

Tabel 2.66
Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2017

No	Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Besar	253	31.767
2	Industri Menengah	835	27.263
3	Industri Kecil Formal	2.932	46.540
4	Industri Kecil Non Formal	6.828	20.572

Sumber: *Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017*

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa industri kecil formal dan non formal di Kota Bandung merupakan sektor industri terbesar dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Adapun data rinci sekor industri kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2017

No	Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Kecil Pangan	516	2.210
2	Industri Kecil Sandang	1.237	6.253
3	Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan	36	124
4	Industri Kecil Logam dan Elektronika	222	451
5	Industri Kecil Kerajinan	711	3.762

Sumber: *DKUMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2017*

e. Transmigrasi

Pada implementasi urusan transmigrasi, Kota Bandung berperan sebagai daerah pengirim calon transmigran ke daerah-daerah tujuan transmigrasi melalui pelaksanaan penyuluhan dan pendaftaran calon transmigran. Pada tahun 2014-2015 telah dilaksanakan penyuluhan transmigrasi dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang, selanjutnya pada tahun 2017 dilaksanakan penyuluhan transmigrasi kepada 140 orang calon transmigran dari Kota Bandung.

f. Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Namun demikian, produksi ikan konsumsi masih cukup besar bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, produksi ikan konsumsi mencapai 100,02% dari target, sementara konsumsi ikan mencapai 106,08% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.68
Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produksi Perikanan	103%	106,3%	101%	101,16%	100,02%
2	Konsumsi ikan	100,3%	101,34%	102,28%	102,53%	106,08%
3	Peningkaatan Produksi Ikan Konsumsi	NA	2764,09 ton	2877 ton	2965 ton	2970,7 ton

Sumber: *Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.69
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	-	-	-
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada	-	-	-	-	1
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	2	2	2	2	2
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

b. Keuangan

Opini BPK terhadap laporan kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam hal penetapan APBD, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 termasuk kategori tidak tepat waktu, dan seiring dengan adanya perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran maka pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan kategori menjadi tepat waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Realisasi)	33,30%	34,64%	36,48%	37,87%	44,96%
	PAD (Realisasi) Rp M	1.442,8	1.716,1	1.859,7	2.1528	2.578,5
	Jumlah Pendapatan Daerah (realisasi)	4.332,1	4.953,9	5.098,1	5.685,1	5.735,0
2	Hasil Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Persentase SILPA	17,63%	27,35%	19,11%	9,13%	10,86%
	Total SILPA Rp.M	710,2	1.213,0	994,1	532,1	601,8
	Total APBD (realisasi) Rp M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%) (Realisasi)	36,81%	37,53%	33,79%	28,93%	21,53%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (Realisasi) Rp M	1.482,7	1.664,5	1.757,7	1.686,6	1.193,1
	Total APBD (Realisasi) Rp M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7
5	Persentase belanja kesehatan (Realisasi)	8,59%	8,83%	10,18%	10,82%	16,10%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (Realisasi) Rp M	346,0	391,5	529,6	630,8	892,1
	Total APBD (Realisasi) Rp M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7
6	Perbandingan antara belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (Realisasi)	47,46%	47,24%	54,18%	56,16%	51,48%
		52,54%	52,76%	45,82%	43,84%	48,16%
	Jumlah Belanja Langsung (Realisasi) Rp M	1.911,5	2.095,6	2.818,3	3.274,3	2.852,9
	Total APBD (Realisasi) Rp M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (Realisasi) Rp M	2.116,0	2.340,0	2.383,6	2.556,1	2.668,9
	Total APBD (Realisasi) Rp M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7
7	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: *BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penempatan SDM aparatur sipil negara sesuai formasi dan kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,13	0,09	0,05	0,11	0,13
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	63,55%	67,91%	69,05%	88,34%	95,53%
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	76,27%	81,24%	86,98%	102,15%	95,25%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35	35	35	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	212	212	212	208	220
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	13,637	13,468	13,558	9,770	9,603

Sumber : *BKPP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti telah mencapai 70% pada tahun 2017.

Tabel 2.72
Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	30%	50%	50%	50%
2	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	70,00	44,44	90,91
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	-	-	-	-
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	-	-	-
5	Persentase implementasi rencana kelitbangan	N/A	100	100	100	100
6	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	N/A	N/A	10	9	11
7	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	-	-	-

Sumber: *Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

e. Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang lainnya, salah satu indikator yang diukur adalah persentase perangkat daerah dengan nilai IKM Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Kategori perangkat daerah dengan IKM yang "Baik" di Kota Bandung diukur dari hasil suvey kepuasan atau IKM yang memperoleh nilai minimal 75.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Bandung juga telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan perangkat daerah. Berdasarkan hasil survey IKM, berikut merupakan data persentase perangkat daerah dengan IKM Baik.

Tabel 2.73
Capaian Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya
Tahun 2017-2018

No	Indikator	2017	2018
1	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik	96,67%	100%

Sumber: *Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

4. Aspek Daya Saing Daerah

4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung.

Tabel 2.74
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung
Periode 2013-2016 (Rp Juta)

Harga Berlaku (Rp. Juta)	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	812.568.323,76	881.109.398,50	983.714.226,82	1.083.451.790,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.518.791,37	9.189.585,86	8.908.646,21	9.564.959,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	73.717.544,96	81.202.692,40	98.292.764,94	105.727.585,26
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	301.400.003,83	346.009.578,17	382.985.600,09	412.295.910,95
5. Perubahan Inventori	58.549.693,39	64.617.769,57	59.421.457,85	68.495.050,07
6. Ekspor Barang dan Jasa	440.292.657,25	504.250.137,96	559.711.664,37	609.399.248,37
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	436.057.685,79	500.554.085,97	568.202.158,76	636.345.101,30
Produk Domestik Regional Bruto	**1.258.989.328,78**	**1.385.825.076,49**	**1.524.832.201,52**	**1.652.589.443,18**

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung 2013-2016*

4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas Wilayah Terkena Banjir/Genangan

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan di Kota Bandung, pada tahun 2013 masih terdapat 48 lokasi banjir yang belum teratasi. Sekarang di daerah kota diperkirakan sebesar 75% dan di Kawasan Bandung Utara sebesar 60%. Tingginya air

larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya, tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir/genangan di musim hujan. Pada tahun 2017 luas area yang terkena banjir/genangan di Kota Bandung di setiap tempat bervariasi antara 0,05 ha sampai 1,60 ha di 68 titik. Total luas lahan yang terkena banjir tahun 2017 mencapai 33,35 ha dengan frekuensi/lama genangan kurang dari 2 jam. Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang ada atau melintas Kota Bandung.

Topografi Kota Bandung, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik. Dalam membangun dan merevitalisasi drainase kota, akan banyak implikasi kebaikan yang akan diperoleh. Banjir cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan.

b. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Kota Bandung terdapat 472 restoran dan 14 bar yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bandung merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

c. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki cukup banyak sarana akomodasi. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah hotel bintang dan non bintang di Kota Bandung sebanyak 336 unit, atau mengalami penurunan sebesar 14,29 persen dibanding tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 392 unit hotel. Adanya penurunan jenis hotel tersebut dikarenakan banyaknya hotel-hotel khususnya hotel non bintang yang beralih fungsi menjadi kost-kostan. Jumlah rincian jenis hotel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.75
Jumlah Penginapan/Hotel

Uraian	2014	2015	2016	2017
Hotel Bintang 5	10	9	9	9
Hotel Bintang 4	28	32	32	32
Hotel Bintang 3	40	41	42	42
Hotel Bintang 2	25	25	25	25
Hotel Bintang 1	9	10	10	10
Hotel Non Bintang	270	275	218	218

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Meskipun secara keseluruhan jumlah hotel pada tahun 2016 dan 2017 menurun dibanding tahun 2015, ternyata jumlah kamar yang disewakan justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah kamar hotel yang disewakan ada sebanyak 16.821 kamar dan meningkat menjadi sebanyak 16.951 kamar pada tahun 2016 dan 2017 (naik 0,77 persen). Kenaikan jumlah kamar tersebut ternyata terjadi pada jumlah kamar hotel

non bintang dan hotel bintang 3. Pada hotel non bintang, naik dari sebanyak 60.10 kamar menjadi sebanyak 60.41 kamar. Untuk hotel bintang 3, naik dari 34.08 kamar menjadi 35.07 kamar.

d. Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bandung, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2017 sebanyak 888.968 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,66%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.26
Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN Tahun 2013-2017

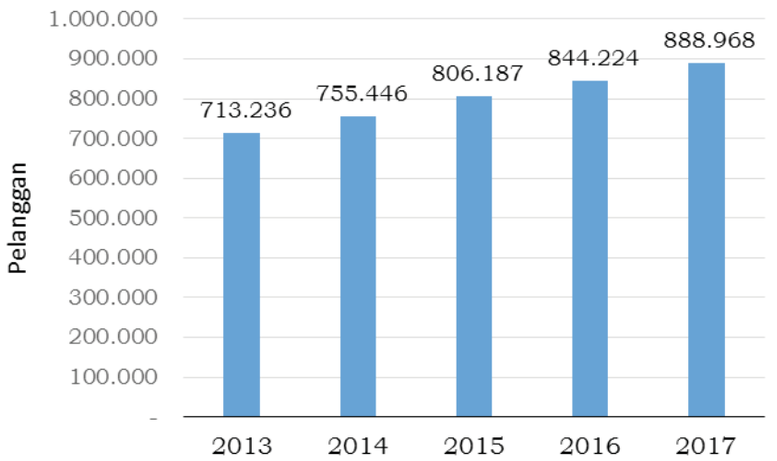

e. *Liveable City Index*

Untuk menggambarkan kondisi infrastruktur Kota Bandung dapat digunakan *Livable City Index (LCI). Livable city* adalah gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). *Livable city index* Kota Bandung terdiri dari tujuh aspek dengan nilai sebagai berikut.

Tabel 2.76
Liveable City Index Tahun 2017-2018

No	Aspek	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Transportasi	6,1	6,6
2	Tata Ruang	7,3	7,0
3	Sosial dan Keamanan	8,5	7,9
4	Lingkungan dan Kesehatan	8,1	7,1
5	Layanan Dasar	6,3	7,0
6	Utilitas	7,2	8,8
7	Ekonomi	7,5	8,0
8	LCI Kota Bandung	7,3	7,5

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung*

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran gambaran bahwa sasaran investasi swasta perlu diarahkan pada aspek dengan skor yang masih di bawah rata-rata yaitu aspek transportasi dan layanan dasar.

Gambar 2.27
Liveable City Index Kota Bandung Tahun 2017-2018

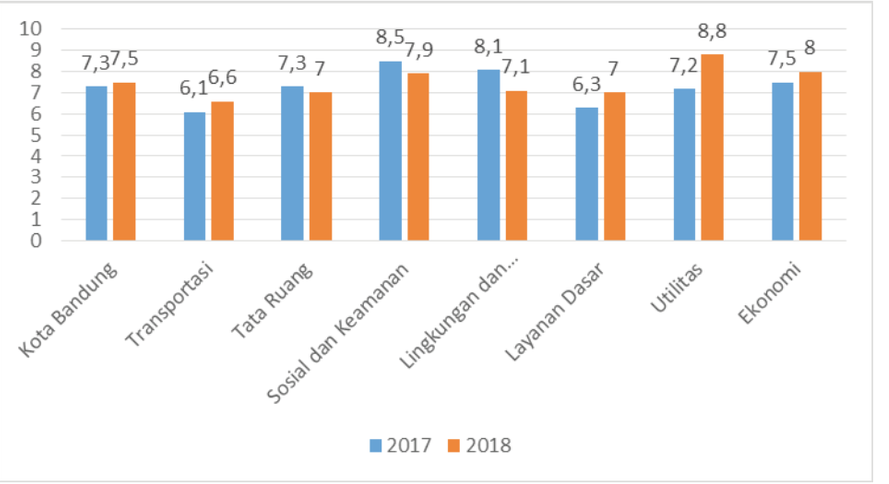

4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Investasi dan Perijinan

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat menanam modal.

Kota Bandung memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik kota metropolitan. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Fokus investasi Kota Bandung di dorong untuk mendukung Kota Bandung sebagai destinasi wisata dunia berdasarkan rencana umum penanaman modal Kota Bandung, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan warga dapat terwujud di Kota Bandung.

Kota Bandung terpilih menjadi kota nomor satu terbaik se-Indonesia dalam ajang penghargaan *Indonesia's Attractiveness Award* (IAI) pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran dan observasi terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia di sektor investasi, layanan publik, infrastruktur dan pariwisata oleh *Frontier Consulting Group* dan Tempo Media Group. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Bandung masih memiliki daya tarik untuk menarik investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor. Hal ini akan berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat menggairahkan ekonomi setempat baik sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya.

Sektor yang berpotensi untuk mrningkatkan penanaman modal di Kota Bandung adalah: industri kreatif (seperti: *e-commerce*, iklan, fashion dan pakaian, desain, dan lain-lain), telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan dan properti, kesehatan, barang dan jasa, sektor industrial, dan serta perdagangan.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini berarti pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan. Sejak tahun 2015, telah diresmikan aplikasi baru berbasis elektronik atau yang terkenal dengan *online services system,* bertajuk *HAYU bandung!* sebuah aplikasi perizinan berbasis website, *full online, full paperless services*. Inovasi ini memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian proses. Dengan aplikasi ini, petugas dan pemohon perizinan tidak perlu lagi untuk tatap muka. Terdapat 3 langkah mudah dalam penggunaan pelayanan ini, yaitu mendaftar, membayar untuk 3 izin yang berbayar (Izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin memperkerjakan orang asing dan izin trayek), serta menunggu izin diantar lewat pos ke alamat tujuan pemohon.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan layanan Perizinan berbasis smartphone dengan nama "GAMPIL" (*Gadget Mobile Application for License*), yang merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun sistem perizinan *online*. Inovasi ini bermanfaat terutama perizinan bagi UKM dengan cara mudah dan persyaratan minimal.

b. Pajak dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak *(taxing power)* dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis.

Tabel 2.77
Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017
1	Pajak Hotel	295.385.661.260
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	278.760.056.903
3	Pajak Hiburan	85.094.874.308
4	Pajak Reklame	12.844.048.144
5	Pajak Penerangan Jalan	193.033.914.175

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017
6	Pajak Parkir	40.137.159.581
7	BPHTB	695.876.761.086
8	Pajak Bumi dan Bangunan	543.210.584.172
9	Pajak Air Bawah Tanah	30.520.721.234
	Jumlah	2.174.863.780.863

Sumber: *Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2017 yang dikelola dalam SIPD*

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, jenis-jenis pajak tersebut meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; Pajak Bumi Bangunan (PBB); Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan pajak air tanah. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) komponen pajak daerah, terdapat 5 (lima) komponen pajak yang capaiannya melebihi target, sedangkan 4 (empat) komponen lainnya belum mencapai target. Realisasi pajak yang melampaui target pada tahun 2017, adalah (i) pajak restoran, (ii) pajak hiburan, (iii) pajak penerangan jalan, (iv) pajak parkir, dan (v) pajak BPHTB.

Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut aturan tersebut bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman (Dinas Tata Ruang);
2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan);
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan);
4. Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran (Diskar PB);
5. Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi (Diskominfo);
6. Retribusi pelayanan tera/tera ulang (Disdagin)
7. Retribusi terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum (Dinas Perhubungan)
8. Retribusi tempat rekreasi (DPKP3);
9. Retribusi rumah potong hewan (Dispangtan)
10. Retribusi TMB (Dinas Perhubungan)
11. Retribusi izin mendirikan bangunan (DPMPTSP);
12. Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi (DPMPTSP);
13. Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan (DPMPTSP);
14. Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi (DPMPTSP);

15. Retribusi pemberian izin trayek kepada badan (DPMPTSP);
16. Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing - LRA (DPMPTSP)

Rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017	
		Realisasi Pendapatan	Perangkat Daerah
1	Retribusi pelayanan penguburan/ pemakaman	3.750.547.000	Distaru
2	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	5.995.581.500	Dinas Perhubungan
3	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	4.468.409.300	Dinas Perhubungan
4	Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran	1.054.113.900	Diskar PB
5	Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	0	Diskominfo
6	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	549.579.650	Disdagin
7	Retribusi terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum	4.458.543.900	Dinas Perhubungan
8	Retribusi tempat rekreasi	543.633.600	DPKP3
9	Retribusi rumah potong hewan	1.580.700.000	Dispangtan
10	Retribusi TMB	1.479.501.000	Dinas Perhubungan
11	Retribusi izin mendirikan bangunan	19.194.470.768	DPMPTSP
12	Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi);	519.193.452	DPMPTSP
13	Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan	4.327.840.464	DPMPTSP
14	Retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi	1.150.000	DPMPTSP
15	Retribusi pemberian izin trayek kepada badan	127.500.000	DPMPTSP
16	Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing - LRA	2.013.792.800	DPMPTSP
	Jumlah	50.064.557.334	

Sumber: *Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2017 yang dikelola dalam SIPD*

Pada tabel tersebut menunjukan bahwa total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 50.064.557.334,00 atau

19,06% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 262.678.023.845,00. Dari 16 (enam belas) komponen retribusi yang dipungut, terdapat 3 (tiga) komponen retribusi yang melebihi target, 1 (satu) komponen tidak ditarget tapi memberi pemasukan, 11 (sebelas) komponen tidak mencapai target, dan 1 (satu) komponen tidak menghasilkan retribusi.

4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada.

Tabel 2.79
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lulusan S1/ S2/S3	261.402	325.865	391.328	368.896	372.191
2	Jumlah Penduduk	2.483.977	2.470.802	2.481.469	2.490.622	2.499.809
3	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	10,52 %	13,19%	15,77%	14,81%	14,89%

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah)*

Data dari tabel tersebut, menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Bandung masih rendah walaupun menunjukan kecenderungan meningkat. Implikasi kebijakan ke depan adalah mendorong masyarakat meningkatkan jenjang pendidikan hingga sarjana atau pasca sarjana, untuk mengantisipasi tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan formal.

b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio*, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif

lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.80
Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2013-2016 (dalam Persen)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-Laki	38,9	38,6	38,4	38,9
2	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan	39,8	39,5	39,2	39,8
3	Rasio Ketergantungan Total	39,3	39	38,8	39,4

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah)*

Selama periode tahun 2013 – 2016, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 – 2015, rasio ketergantungan penduduk terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 39,3 persen menjadi 38,8 persen. Namun rasio ketergantungan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi 39,4 persen. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak- anak dan proporsi penduduk usia kerja.

4.5. Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

Secara umum capaian kinerja Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 70,00 persen, atau dari sejumlah 40 indikator kinerja sasaran, terdapat 28 indikator sasaran tercapai, dan 12 indikator kinerja sasaran tidak tercapai. Diantara indikator sasaran yang tidak tercapai adalah tingkat cakupan air minum, luasan ruang terbuka hijau, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, serta wirausaha baru.

Sedangkan untuk capaian kinerja urusan serta program RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 92,10 persen, atau dari total sebanyak 329 indikator program, tercapai 303 indikator program dan tidak tecapai sebanyak 26 indikator program. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung pada periode sebelumnya, yaitu Bandung Sehat, Bandung Resik, Bandung Nyaman, dan Bandung Sejahtera yang telah tercapai adalah 15 program prioritas, dan yang tidak tercapai adalah 7 program prioritas, diantaranya adalah Bebas Banjir, Bebas Macet, perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni, penciptaan 100.000 wirausahawan baru, penciptaan 250.000 lapangan pekerjaan baru, subsidi harga sembako dan gas 3 Kg, serta santunan kematian Rp 2 Juta/Jiwa.

Capaian kinerja misi/sasaran, serta capaian kinerja urusan dan program RPJMD 2013-2018 sampai dengan tahun 2017, tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian kinerja tahun 2014-2016, sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur urusan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, serta berdasarkan indikator kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Tabel 2.81
CAPAIAN KINERJA MISI 1 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
MISI 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan													
Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten													
1	Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Persentase	60	63,34	63	65	67	67	-	-	-	-	-
2	Tingkat implementasi tata ruang	Persentase	-	-	-	-	-	-	80	85	85	87	Tercapai
3	Tingkat keterbangunan infrastruktur PPK Gedebage	Persentase	30	34,9	40	37,1	45	46	60	51.38	70	59,89	Belum Tercapai
Sasaran 2: Terwujudnya infrastruktur jalan, sanitasi, dan air bersih yang berkualitas dan merata													
4	Rasio luas jalan dalam kondisi baik	Persentase	75	81,03	85	91,22	100	100	-	-			-
5	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	Tercapai
6	Indeks aksesibilitas Jalan	Skala	7,42	7,41	65	7,42	7,45	7,43	7,47	7,47	7,48	7,48	Tercapai
7	Persentase wilayah Kota Bandung terang pada malam hari	Persentase	55	55	75	83,27	100	96,91	-	-	-	-	-
8	Persentase minimal jumlah PJU terbangun berfungsi baik	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	Tercapai
9	Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Persentase	70	58,46	80	81,24	100	91,22	-	-	-	-	-
10	Persentase minimal saluran drainse yang berfungsi dengan baik	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	Tercapai
11	Titik banjir terselesaikan	Lokasi	32 titik	30 titik	50 titik	50 titik	68 titik	58 titik	68 titik	66 titik	68 titik	68 titik	Tercapai
12	Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat	Persentase	66	66,6	68	70,77	70	72,07	-	-	-	-	-
13	Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem *offsite* dan *onsite*	Persentase	-	-	-	-	-	-	72	79.09	74	80,77	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
14	Tingkat cakupan pelayanan air minum	Persentase	78	70,26	29	70,65	82	72,15	84	77.27	85	78,88	Belum Tercapai
Sasaran 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan													
15	Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	10,76	8,50	10,5	8,71	10,27	9,93	10,03	9,76	-	-	Tercapai
16	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	11	9	14	10	16	11	-	-	-	-	-
17	Perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	80	85	2,480	1,529	2,480	1,379	-	-	-	-	-
Sasaran 4: Terwujudnya sistem transportasi publik yang nyaman serta terkendalinya kemacetan													
18	Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Kota	Persentase	23	16	47	32	35	32	-	-	-	-	-
19	Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali	Persentase	31	31,25	29	46,88	69	53	-	-	-	-	-
20	Titik kemacetan yang teratasi	Lokasi	-	-	-	-	-	-	24	24	32	28	Belum Tercapai
21	Rasio antara pengguna transportasi umum dengan kendaraan pribadi	Rasio	-	-	-	-	-	23:77	24:76	19,5:80,5	25 : 75	26,14 : 73,86	Belum Tercapai
Sasaran 5: Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas													
22	Tingkat pengelolaan sampah kota	Persentase	88	87,23	89	87,41	90	90.4	-	-	-	-	-
23	Persentase pelayanan sampah	Persentase	-	-	-	-	-	-	100	100	100	97,97	Belum Tercapai
24	Tingkat kualitas udara perkotaan memenuhi baku mutu udara ambien	Persentase	30	96	17	92,6	40	35	-	-	-	-	-
25	Tingkat kualitas udara perkotaan pada titik pantau memenuhi baku mutu udara ambien	Persentase	-	-	-	-	-	-	45	65	86	96,27	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Sasaran										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
26	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Persentase	12,50	0	2	12,50	17	17	-	-	-	-	-
27	Sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV gol. B (dari tercemar berat menjadi tercemar ringan)	Jumlah	-	-	-	-	-	-	2 Sungai	2 Sungai	2 Sungai	5 Sungai	Tercapai
28	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persentase	2	6,38	16	5,23	2	2,05	-	-	-	-	-
29	Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi	Persentase	14	12,14	16	12,15	18	12,17	-	-	-	-	-
30	Luasan ruang terbuka hijau	Persentase	-	-	-	-	-	12,17	20	12.2	23	12,2	Belum Tercapai
31	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persentase	45,98	45,98	45,98	45,98	68,57	68,57	-	-	-	-	-
32	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*)	Menit	<20	<20	<18	14,20	<16	14,70	-	-	-	-	-

Tabel 2.82
CAPAIAN KINERJA MISI 2 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
MISI 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani													
Sasaran 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN													
1	PD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/administrasi	Persentase	26	6,56	23	19,67	20	1,64	_	_	_	_	_
2	PD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	Persentase	33	40,98	50	52,46	65	81,97	_	_	_	_	_

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik													
3	Perangkat daerah dengan IKM "Baik"	Persentase	_	_	_	_	_	49,18	75	96,67	90	100	Tercapai
4	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	B	B	B	B	B	B	_	_	_	_	_
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi													
5	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Persentase	73	73,56	76	75,27	79	92,59	_	_	_	_	_
6	Tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Survey	Cukup	N/A	Baik	N/A	Baik	N/A	_	_	_	_	_
7	Nilai evaluasi AKIP Kota	Kategori	CC	CC	CC	A	A	A	A	A	A	A	Tercapai
8	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Kategori	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	N/A	Belum Tercapai
9	Hasil dari EKPPD	Kategori	Sangat baik = 3,0550	Baik/tinggi = 2,8400	Sangat baik = 3,0992	Baik	Sangat baik = 3,1434	Tinggi	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST	Sangat Tinggi (ST	Tercapai
Sasaran 4 : Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government													
10	Cakupan wilayah untuk pelayanan informasi pembangunan	Persentase	50	34,21	75	74,83	85	85	-	_	_	_	_
11	Tingkat layanan interaksi pengaduan secara *0*	Persentase	100	100	100	100	100	100	-	_	_	_	_
Sasaran 5 : Terwujudnya Bandung *Smart City*													
12	Level kematangan *smart city*	Kategori	-	-	-	-	-	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Integrative	Belum Tercapai
Sasaran 6 : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis													
13	Indeks demokrasi	Skala	-	-	66.50-67.00	N/A	-	-	-	_	_	_	_
Sasaran 7 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu													
14	Tingkat partisipasi pemilihan umum	Persentase	57	77,76	-	-	-	-	-	_	_	_	_

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran 8: Meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam penerapan produk hukum													
15	Cakupan penegakan Perda	Persentase	70	70	75	84	80	90,35	90.5	100	_	_	Tercapai

Tabel 2.83
CAPAIAN KINERJA MISI 3 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
MISI 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing													
Sasaran 1: Mewujudkan sistem pendidikan di Kota Bandung yang merata, berkeadilan, dan berdaya saing secara global													
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	11,07	10,51	11,37	10,52	11.15	10,58	11,8	10.59	12	N/A	Belum Tercapai
2	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,66	99,63	99,75	99,65	99,65	99.69	99,93	99.77	100	N/A	Belum Tercapai
Sasaran 2: Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.													
3	Persentase pelayanan kesehatan dasar pada bayi, balita, anak, remaja, dan ibu	Persentase	80	100,76	85	99,45	87	118,92	_	_	_	_	_
4	Persentase penyakit menular yang ditangani	Persentase	100	80,67	100	101,19	100	102,38	_	_	_	_	_
5	Persentase pasien miskin yang dirujuk dan dilayani oleh PPK II	Persentase	100	100	100	100	100	100	_	_	_	_	_
6	Persentase RS memenuhi standar pelayanan	Persentase	60	66,91	65	83,48	70	100	_	_	_	_	_
Sasaran 3: Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan													
7	Angka Kematian Ibu (AKI)/ konversi	Per 100 ribu kelahiran hidup	_	_	_	_	_	53,47	53,37	52.57	53,37	75,33	Belum Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8	Angka Kematian Bayi (AKB) / konversi	Per 1.000 kelahiran hidup	_	_	_	_	_	29,22	28,99	28.91	28,90	23,8	Tercapai
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	_	_	_	_	_	73,84	73,86	73,86	73,87	N/A	Tercapai
10	Persentase gizi buruk	Persentase	_	_	_	_	_	0,57	0,49	0.39	0,42	0,38	Tercapai
11	Jumlah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar layanan	Unit	_	_	_	_	_	18	26	26	33	35	Tercapai
Sasaran 4: Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan, dan penyehatan lingkungan													
12	Jumlah RW siaga aktif	RW	778	714	959	1.229	1.14	1.338	_	_	_	_	_
13	Persentase kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	Persentase	7	13,90	14	21,85	20	38,41	_	_	_	_	_
14	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	Persentase	73,80	72,47	75,80	72,97	76,3	84,48	_	_	_	_	_
Sasaran 5: Terkendalinya kasus penyakit zoonosa													
15	Kasus penyakit zoonosa	Kasus	8	1	8	0	8	0	_	_	_	_	_
Sasaran 6: Terwujudnya karakter/jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya													
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	_	_	_	_	_	N/A	_	_	52,49	N/A	_
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	65,3	67,73	65,35	73,93	65,4	95,52	65,55	95.52	65,60	95,03	Tercapai
Sasaran 7: Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan													
18	Jumlah penduduk maksimal Kota Bandung	Jiwa	2.502.808	2.470.802	2.530.122	2.481.469	2.557.636	2.490.622	_	_			_
19	Angka fertilitas	Anak per wanita usia subur	1,99	1,99	1,98	1,97	1,97	1,97	1.96	1.95			Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
20	Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement*)	Skala	70,05	73,93	70,1	70,6	70,15	58,27	_	_			_
21	Kelurahan layak anak per seluruh kelurahan	Persentase	10	10	20	20	40	60	_	_			_
Sasaran 8: Meningkatnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga													
22	Jumlah seni budaya tradisi yang dilestarikan	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	10 unit	3	10	_	_			_
23	Prestasi olah raga di tingkat provinsi dan nasional	Peringkat	Juara 1 pada POR Provinsi dan Juara 1 pada POR Pemda	Juara 2 POR Pemda	Juara 1 POR Pemda	Juara 12 POR Pemda	Kontribusi atlet kontingen PON, Juara	Juara Umum	_	_	_	_	_
Sasaran 9: Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama													
24	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Nilai	C	N/A	Cukup (C)	N/A	B	N/A	_	_	_	_	_
25	Terwujudnya toleransi dan kerukunan umat beragama	Nilai	C	N/A	Cukup (C)	Tinggi (T)	B	N/A	_	_	_	_	_
Sasaran 10: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan													
26	Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	150 miliar	179,206 miliar	165 miliar	191,7 miliar	181,5 miliar	201,2 miliar	_	_	_	_	_
27	Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan	Skala	NA	NA	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	_	_	_	_	_

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran 11: Menurunnya angka kemiskinan													
28	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Jiwa	301.890	304.939	298.871	366.296	295.882	366.296	292.923	276,708	289.994	276.708	Tercapai
29	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlayani	Persentase	20	20,9	22	28,38	24	32,27	34	47.41	36	48,85	Tercapai
30	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	80	85	2.480	1.614	2.480	2.993	7.007	4.978	10.000	8.266	Belum Tercapai
31	Daya tampung rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	KK	-	-	-	-	-	990	1.790	961	2.390	961	Belum Tercapai
32	Luas kawasan permukiman kumuh	Persentase	10.76	8.5	10.5	8.71	10.27	9.93	10.03	9.76	9.79	5.16	Tercapai

Tabel 2.84

CAPAIAN KINERJA MISI 4 RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
MISI 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan													
Sasaran 1: Terjaganya ketersediaan pangan													
1	Penguatan cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	24	26,7	60	72,26	60	82,29	60	79,83	60	89,057	Tercapai
Sasaran 2: Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri													
2	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US $	603	603	606	635	609	609	614	465	614	465	Tidak Tercapai
Sasaran 3: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah													
3	Penerimaan pajak daerah	Juta Rupiah	1.400.000.	1.400.863	1.598.000	1.485.256	2.186.416	1.720.491	2.400.000	2.175.084	2.644.000	2.160.182	Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4	Penerimaan retribusi	Juta Rupiah	138.000	99.192	107.56	64.99	142.000	92.165	144.000	50.065	146.000	69.134	Tidak Tercapai
Sasaran 4: Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/ masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik													
5	Insentif pajak daerah	Jumlah kelompok sasaran	12	12	13	13	14	16	-	-	-	-	-
Sasaran 5: Meningkatkan sinergitas pembiayaan pusat, provinsi, daerah													
6	Program/kegiatan yang pendanaannya melibatkan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kota Bandung	Jumlah	-	6 Program dan 14 Kegiatan pada 6 SKPD	-	-	1	21 Banprov; 20 Kegiatan DAK; 2 Kegiatan Tugas Pembantuan.	-	-	-	-	-
Sasaran 6: Penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional dalam pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swata)													
7	Jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	Jumlah	35	70	40	217	50	195	-	-	-	-	-
Sasaran 7: Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi													
8	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun Rupiah	3,862	3,611	4,059	12,808	4,291	7,169	4,532	12,7	4,756	14,349	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN										Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran 8: Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mendukung tercapainya Bandung sebagai Kota Kreatif													
9	Tercapainya parameter kota kreatif yang meliputi kebijakan; infrastruktur; aspek hukum, HKI dan etika kreatif; sistem pendukung; kapasitas dan kontribusi ekonomi kreatif	Kategori	Cukup	N/A	Cukup	N/A	Cukup	N/A	-	-	-	-	-
10	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	Sub sektor	-	-	-	-	-	5	6	8	7	8	Tercapai
Sasaran 9: Berkembangnya koperasi dan UMKM													
11	Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi	Unit	155	761	420	622	450	467	-	-	-	-	-
12	Koperasi aktif	Persentase	81,76	81,77	83,34	83,5	84,41	84,67	86,24	86,24	88,82	88,85	Tercapai
Sasaran 10: Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan													
13	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	5.807.564	5.480.821	6.061.094	5.877.162	6.899.582	6.899.582	6.960.512	6.947.880	7.585.346	Tercapai
Sasaran 11: Meningkatkan kesempatan kerja													
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	10,78	8,05	10,55	9,02	10,36	9,02	10,17	8,44	10	8,44	Tercapai
15	Lapangan pekerjaan baru	Orang	30.000	9.695	40.000	11.021	50.000	11.216	60.000	14.571	250.000	62.350	Tidak Tercapai
16	Wirausaha baru	Orang	10.000	19.925	15.000	25.970	25.000	28.995	25.000	23.890	100.000	121.811	Tercapai

4.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Capaian implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia meliputi 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jumlah indikator TPB berdasarkan urusan kewarnanegaraan meliputi 319 indikator dan pembagiannya terdiri atas 4 (empat) kewenangan, di antaranya :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat sebanyak 308.
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 235.
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220.
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota sebanyak 222.

Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD. Untuk Kota Bandung sendiri telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB tidak ada target/TT/BB
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Pencapaian target tersebut adalah yang dianggarkan untuk berbagai pilar pembangunan. Adapun capaian target yang diperoleh dari Kota Bandung baru sebesar 21% dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 45 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan agar memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Adapun masing-masing pencapaian pada tiap pilar dapat dijelaskan dari uraian di bawah ini.

a. Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

Secara keseluruhan, indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 45 indikator atau bila dipersentasekan menjadi 21% dari keseluruhan target yang dikaji pada kewenangan pemerintah. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan pertama yaitu pada tujuan menghilangkan kemiskinan, yaitu sebanyak 10 target pencapaian. Sedangkan pada tujuan lainnya yang mencapai target hanya berkisar pada 1 hingga 5 target saja.

Gambar 2.28

Capaian Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target

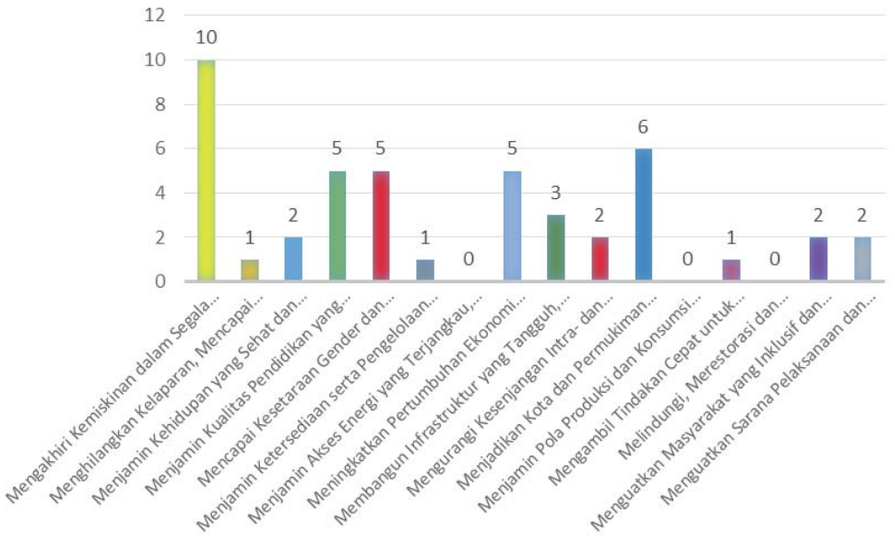

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pada tujuan kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya berada pada tujuan pemukiman yang inklusif sebanyak 6 indikator, 5 indikator lainnya pada kualitas pendidikan, kesetaraan gender, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.

b. Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (BB)

Secara keseluruhan yang termasuk pada kategori ini hanya mencapai 17% dari total indikator. Adapun indikator terbanyak pada kategori ini berada pada tujuanpengembangan kawasan kota dengan pemukiman inklusif yang mencapai 6 indikator dan tujuan lainnya yang telah terlaksana namun belum mencapai target berada pada tujuan peningkatan ekonomi dengan masing-masing sebanyak 5 indikator.

Gambar 2.29

Capaian TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target

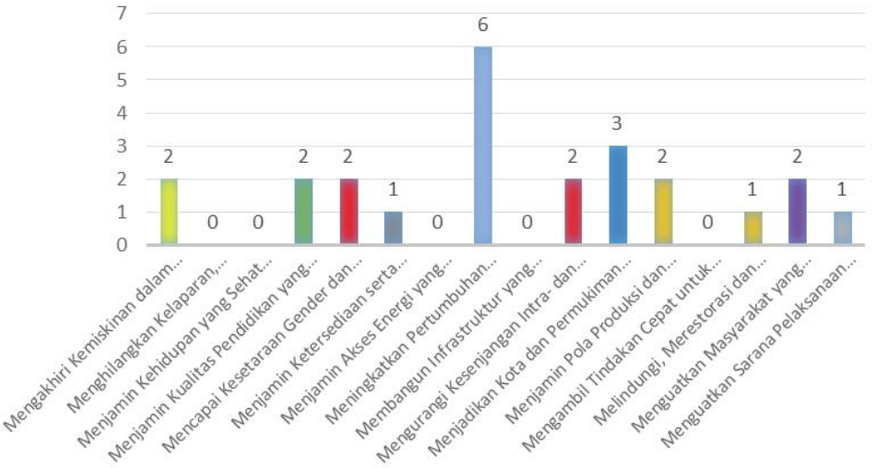

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

c. Indikator Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT)

Indikator pada kategori ini memiliki data masing-masing yang mengampu kegiatan terkait. Secara keseluruhan, indikator yang termasuk pada kategori ini terdapat pada tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh

penduduk semua usia. Dalam arti bahwa data yang dikumpulkan dalam pencapaian target ini belum ada meski adanya ketersediaan data dapat dilakukan. Adapun banyaknya target yang mencapai tujuan kesehatan masing-masing mencapai 24 indikator. Adapun indikator lainnya yang memiliki data namun tidak ada target yang jelas terdapat pada tujuan mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

d. Indikator Target TPB yang Belum Memiliki Data (NA)

Indikator pada kategori ini tidak dapat mendukung penjelasan capaiannya. Namun secara keseluruhan, indikator yang tidak memiliki data dan tidak memiliki target tertinggi berada pada tujuan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan Membangun Kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, yaitu sebanyak 17 target. Maksudnya bahwa dari pencapaian tujuan dari kategori ini tidak menjelaskan tujuan yang akan dicapai pada KLHS RPJMD Kota Bandung. Lalu pada target lainnya terdapat pada tujuan menjamin kehidupan sehat sebanyak 8 indikator, 11 indikator pada tujuan kemitraan global, dan tujuan peningkatan ekonomi yang inklusif.

Gambar 2.30
Capaian TPB Kategori yang Memiliki Data Namun Belum Menjadi Indikator

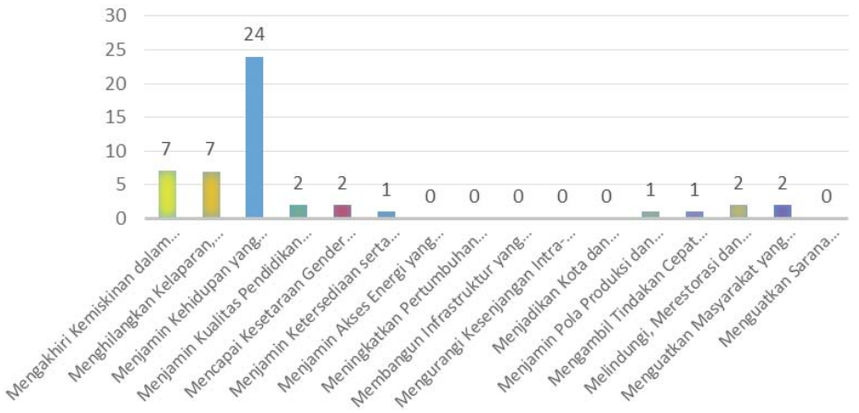

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

Gambar 2.31
Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data

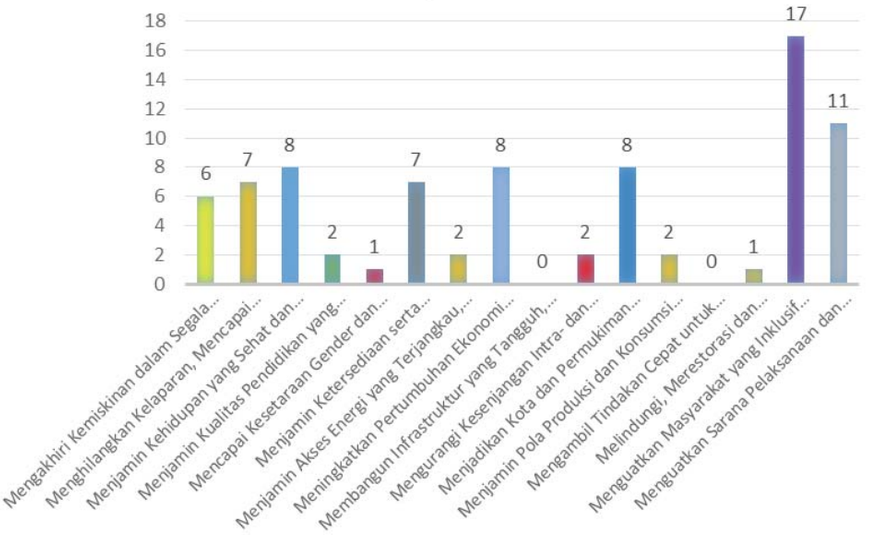

Sumber: *KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

Bila ditinjau secara keseluruhan berdasarkan kategori dan jumlah indikator yang digunakan dalam analisis capaian tujuan, maka akan terlihat seperti berikut:

Tabel 2.85
Capaian TPB Kota Bandung terhadap Target Nasional

NO. TPB	TUJUAN TPB	CAPAIAN INDIKATOR					Jumlah
		SS	SB	TT	NA	TDR	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	5	7	6		28
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	1	0	7	7		15
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	2	0	24	8		34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	5	2	2	2		11
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5	2	2	1		10
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	1	9	1	7		18
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern untuk Semua	0	0	0	2		2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	5	6	0	8		19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	3	0	0		2	5
10	Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara	2	2	0	2		6
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	6	4	0	8		18
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	0	2	1	2		5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	0	1	0		2
15	Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	0	1	2	1		4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	2	2	2	17		23

NO. TPB	TUJUAN TPB	CAPAIAN INDIKATOR					Jumlah
		SS	SB	TT	NA	TDR	
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	2	1	0	11		14
TOTAL		**45**	**36**	**49**	**82**	2	214

Sumber : *Hasil Analisis KLHS Kota Bandung Tahun 2018-2023*

Berdasarkan penilaian tabel tersebut, capaian TPB dari tiap indikator pembangunan di Kota Bandung dianalisis menjadi 3 tujuan pembangunan yang memiliki indikator terbanyak, serta dengan adanya pencapaian indikator tersebut target terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya:

1. Terdapat pada tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dengan bentuk apapun, dengan total indikator yang tercapai sebanyak 10 indikator.
2. Lalu dengan capaian yang dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 5 indikator.
3. Terdapat pada tujuan ke-11 yaitu kota dan permukiman aman, tangguh, dan berkelanjutan. Adapun total indikator yang dinilai sebanyak 6 indikator dengan tercapainya 4 indikator yang telah dilaksanakan mencapai target.
4. Terdapat pada tujuan ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pekerjaan layak dinilai sebanyak 5 indikator dan sebanyak 6 indikator pula yang telah dilaksanakan sesuai target.

Adapun pelaksanaan target yang belum terdapat data ditunjukkan sebanyak 82 indikator, di mana pencapaian ini cenderung belum terlaksana berdasarkan tujuan yang dicapai. Di antaranya dari yang terbanyak berada pada tujuan 16 yaitu meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan yang diidentifikasi belum memiliki data sebanyak 17 indikator serta tujuan ke-17 yaitu revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang diidentifikasi mencapai 11 indikator. Sedangkan total kelompok indikator TPB yang memiliki target namun belum memiliki data diidentifikasi sebanyak 49 indikator, dengan indikator terbanyak berada pada tujuan ke-3 yaitu menjamin kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 24 indikator. Total indikator pada masing masing tujuan dalam TPB beserta rinciannya ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 2.31

Capaian TPB Kota Bandung Terhadap Target Nasional

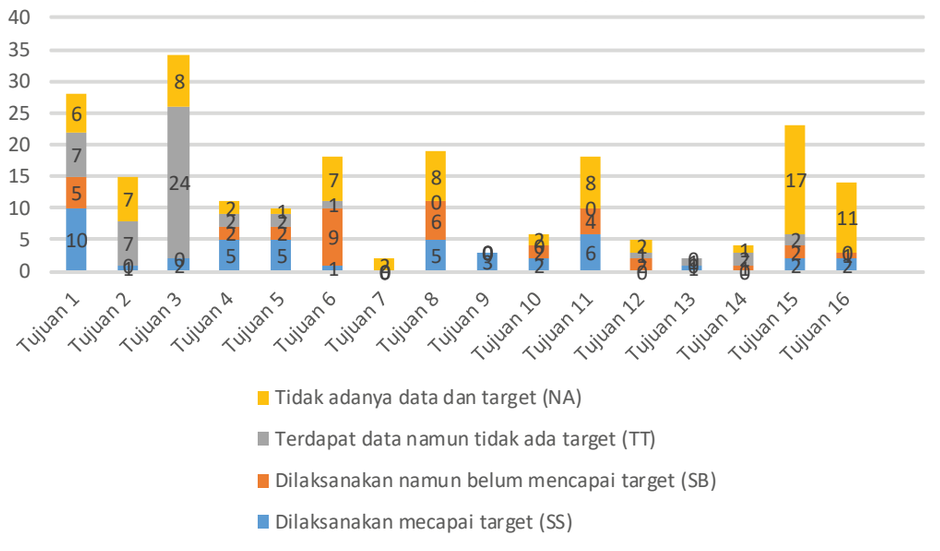

4.7. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksananya, telah memberikan penguatan kepada badan usaha milik daerah sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana BUMD didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah yang dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Pemerintah Kota Bandung sampai dengan 2018 telah memiliki 5 BUMD yang terdiri atas:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987, berubah namanya menjadi PDAM Tirtawening;
2. Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
4. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perusahaan daerah Pasar Bermartabat kota Bndung;
5. PT. Bandung Infra Investama yang didirikan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bandung Infra Investama dan mendapatkan status badan hukumnya melalui Akte Pendirian PT Bandung Infra Investama Nomor 4 Tanggal 22 Desember 2017.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksananya, keempat perusahaan daerah tersebut akan berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah melalui peraturan daerah yang akan dibahas dalam Propemperda Tahun 2019.

Adapun PT. Bandung Infra Investama merupakan BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah yang sahamnya 70% dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sedangkan 30% nya dimiliki oleh pihak mitra.

Dari modal dasar yang tertuang dalam peraturan daerah masing-masing BUMD, sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah Kota Bandung sehingga akan dilakukan penyertaan modal secara bertahap melalui mekanisme peraturan daerah setelah dilakukan analisa investasi. Sampai dengan Tahun 2018, penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bandung kepada masing masing BUMD adalah sebagai berikut:

1. PD. Pasar Bermartabat
   Modal Dasar : Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
   Modal Disetor : RP 870.511.428.795,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar lima ratus sebelas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)
2. PDAM
   Modal Dasar : Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
   Modal Disetor : RP 647.789.602.115,00 (enam ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu seratus lima belas rupiah).
3. PD. Kebersihan
   Modal Dasar : Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)
   Modal Disetor : RP 5.675.201.611,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
4. PD. Bank Perkreditan Rakyat
   Modal Dasar : Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)
   Modal Disetor : RP 123.040.794.540,00 (seratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
5. PT. Bandung Infra Investama
   Modal Dasar : sampai dengan Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun)
   Modal Disetor : RP 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

4.8. Kerjasama Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kerjasama daerah diartikan sebagai kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Kerjasama antar daerah diatur dalam Pasal 363 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerjasama antar daerah ini dapat dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kerjasama wajib adalah apabila dilaksanakan kerja sama

antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama sukarela adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efi sien jika dilaksanakan dengan bekerjasama. Kebijakan kerjasama daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah**.**

Berdasarkan ketentuan perda tersebut, kerjasama daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber PAD. Adapun tujuan pengembangan kerjasama daerah adalah untuk: 1) meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan; 2) memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah; 3) meningkatkan kualitas pelayanan publik; 4) mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) meningkatkan PAD; dan 6) meningkatkan efi siensi penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan baik dari aspek SDM, kemampuan keuangan, manajemen, maupun teknologi. Oleh karena itu, demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini Kota Bandung membutuhkan dukungan dari berbagai pihak/ *stakeholder* pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas) untuk bersama-sama dalam satu kolaborasi secara sinergis dalam rangka peningkatan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung memandang bahwa dengan kolaborasi, tujuan pembangunan akan tercapai lebih efektif. Namun demikian, kerjasama tersebut harus dilakukan sesuai dengan kemampuan daerah dan bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan kemajuan daerah yang dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dengan asas saling menguntungkan.

Selain itu, pelaksanaan kerjasama daerah di Kota Bandung harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, didalamnya memuat antara lain ruang lingkup, prinsip, objek yang dikerjasamakan, dan subjek pelaksana kerjasama. Prinsip dasar pemerintahan yang diselenggarakan di Kota Bandung mengacu pada tiga hal utama, yaitu: (1) desentralisasi: yaitu prinsip pendelegasian kewenangan pada sub kewilayahan di bawah pemerintah kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; (2) inovasi: yaitu prinsip menerapkan gagasan baru untuk memprakarsai atau memperbaiki proses dan hasil akhir layanan yang mengarah pada pembenahan; (3) kolaborasi: yaitu prinsip kerjasama dengan segenap *stakeholders* untuk menyelesaikan permasalahan wilayah. Perkembangan jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Jumlah Kerjasama Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 – 2018

No	Bentuk Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama / Tahun						Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	**Kerja Sama Dalam Negeri**							**270**
1	Kerja Sama antardaerah	1	4	3	37	68	47	**160**
2	Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain	3	2	9	6	4	8	**32**
3	Kerja Sama dengan Badan Hukum	13	4	5	5	8	9	**44**
4	Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi	3	6	5	2	3	15	**34**
II	**Kerja Sama Luar Negeri**	3	2	3	4	7	15	**34**
	Jumlah	23	18	25	54	90	94	304

Sumber : *Bagian Kerjasama Setda Kota Bandung, 2019*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jumlah kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung selama periode 2013-2018 adalah sebanyak 304 kerja sama yang terdiri atas 270 kerja sama dalam negeri dan 34 kerja sama luar negeri. Kerja sama antardaerah merupakan jenis kerja sama yang paling banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu sebanyak 160 kerja sama, sedangkan kerja sama yang sedikit dilaksanakan adalah kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain yaitu sebanyak 32 kerja sama. Sementara itu, kerja sama luar negeri yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bandung menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dan sampai dengan tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 34 kerja sama dengan luar negeri.

4.9. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial.

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	79,54%	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Nonformal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	0,22%	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Dasar	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102,12%	Dinas Pendidikan
4	Pendidikan Dasar	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103,10%	Dinas Pendidikan
5	Pendidikan Dasar	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	NA	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SMP	NA	Dinas Pendidikan
6	Pendidikan Dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Angka putus sekolah SD	0,01%	Dinas Pendidikan
7	Pendidikan Dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Angka putus sekolah SMP	0,02%	Dinas Pendidikan
8	Pendidikan Dasar	Program Bantuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	NA	Dinas Pendidikan
			Persentase Siswa Miskin SD yang Mendapat Bantuan Pendidikan	NA	
			Angka Putus Sekolah SMP	NA	
			Persentase Siswa Miskin SMP yang Mendapat Bantuan Pendidikan	NA	
			Persentase Masyarakat yang Mendapat Bantuan Pendidikan	NA	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SPM KESEHATAN					
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tingkat Kesehatan Masyarakat - Persentase Penanganan Masalah Gizi Buruk - Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia	100%	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tingkat Kesehatan Masyarakat - Persentase Penanganan Masalah Gizi Buruk - Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia	100%	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tingkat Kesehatan Masyarakat - Persentase Penanganan Masalah Gizi Buruk - Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia	100%	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tingkat Kesehatan Masyarakat - Persentase Penanganan Masalah Gizi Buruk - Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia	100%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tingkat Kesehatan Masyarakat - Persentase Penanganan Masalah Gizi Buruk - Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia	100%	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tingkat Kesehatan Masyarakat - Persentase Penanganan Masalah Gizi Buruk - Persentase Pencapaian Pelayanan Kesehatan Pada Bayi, Balita, Anak Remaja, Ibu dan Lansia	100%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	- Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Persentase Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular	100%	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita *Hipertensi*	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	- Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Persentase Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular	100%	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	- Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Persentase Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular	100%	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	- Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Persentase Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular	100%	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan *Tuberkulosis*	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular	- Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Persentase Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular	100%	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular	- Tingkat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Persentase Penanganan Penderita Penyakit Menular - *Universal Child Immunization* (UCI) - Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100%	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak dan Sehat Di Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Menempati Hunian yang Layak	65,97%	DPKP3
2	Penanganan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	9,76%	DPKP3
SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Penyediaan Air Bersih	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Cakupan Layanan Air bersih	77,27%	DPKP3/PDAM
2	Penyediaan Air Limbah	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengolahan air limbah rumah tangga	79,09%	DPKP3/PDAM
3	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman Dan Berkelanjutan	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan yang Ditindaklanjuti Sesuai dengan Ketentuan	75,00%	Dinas Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang Berkualitas	44,73%	Dinas Penataan Ruang
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Lahan Milik Pemerintah Kota Bandung yang Bersertifikat	16,00%	Dinas Penataan Ruang
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Program Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Satpol PP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Perkada	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	100%	
			Persentase Penegakan Perda	-	
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Satpol PP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	75%	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	90%	
		Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase Layanan Data dan Informasi	n/a	
4	Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	63,64%	Satpol PP
		Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat			
		Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol Pp dan Masyarakat	n/a	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	90%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SPM BIDANG SOSIAL					
1	Pemberian Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Persentase Warga Miskin yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhan Dasarnya	40%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar		
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar		
		Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	Persentase Lanjut Usia yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhan Dasarnya		
2	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Skala Kabupaten/Kota	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar	88%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
		Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhan Dasarnya		
		Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan		
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Persentase Warga Miskin yang Terpenuhi Sebagian Kebutuhan Dasarnya		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Program	Capaian 2018	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar		
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar		
3	Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Skala Kabupaten/Kota	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase Panti Asuhan/Jompo Terdaftar yang Memperoleh Bantuan Sarana Prasarana	100%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
4	Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Luar Panti Skala Kabupaten/Kota	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Psks yang Berperan Aktif dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial	21%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
5	Pemenuhan Kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan Korban Bencana yang Terlayani Tepat Waktu	100%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
6	Evakuasi Korban Bencana Skala Kabupaten / Kota	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan Korban Bencana yang Terlayani Tepat Waktu	100%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
7	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial-Penyelenggaraan Sosial Skala Kabupaten/Kota	Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	Persentase Penyandang Disabilitas Berat yang Memperoleh Jaminan Sosial	5%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
		Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Jaminan Sosial	3%	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI
Bandros
17a
Bandros
21a
Bandung Tram

Bab 3
Gambaran Keuangan Daerah

1. Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan.

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2013 - 2017

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengaruh dari pergerakan *output* sektor-sektor produksi utama dalam hal ini diindikasikan melalui pergerakan pertumbuhan ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah, selama tahun 2013-2017 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	4.349,88	4.332,09	99,59
2	2014	5.302,47	4.953,94	93,43
3	2015	5.455,36	5.098,07	93,45
4	2016	6.684,13	5.685,27	85,06
5	2017	6.345,54	5.735,69	90,39

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Secara lebih detail, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	**PENDAPATAN**	**4.349,88**	**4.332,09**	**5.302,47**	**4.953,94**	**5.455,36**	**5.098,07**	**6.684,13**	**5.685,27**	**6.345,55**	**5.735,69**	**7,42**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.407,76**	**1.442,78**	**1.808,51**	**1.716,06**	**2.066,25**	**1.859,70**	**2.787,40**	**2.152,82**	**3.015,84**	**2.579,15**	**15,72**
1.1.1.	Pajak Daerah	1.063,00	1.194,09	1.938,45	1.399,60	1.598,00	1.494,15	2.186,42	1.709,87	2.400,09	2.174,86	16,40
1.1.2	Retribusi Daerah	100,82	115,51	131,16	99,19	107,56	64,99	204,77	92,01	262,68	50,06	(13,16)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	19,16	12,07	19,16	9,36	20,00	8,60	20,00	10,66	20,00	11,28	(0,20)
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	224,79	121,11	258,19	207,91	340,68	291,96	356,22	340,28	333,06	342,94	32,36
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.818,17**	**1.778,97**	**1.938,45**	**1.886,01**	**1.857,23**	**1.765,83**	**2.785,94**	**2.443,76**	**2.416,22**	**2.290,75**	**7,94**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	264,92	225,72	278,09	241,56	250,29	173,38	291,22	315,65	349,27	302,06	14,14
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.485,94	1.485,94	1.596,75	1.596,75	1.574,74	1.574,74	1.672,46	1.672,46	1.643,08	1.643,08	2,63
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	67,31	67,31	63,61	47,70	32,19	17,71	822,26	455,65	423,87	345,61	589,17
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**1.123,95**	**1.110,34**	**1.555,51**	**1.351,87**	**1.531,89**	**1.472,54**	**1.130,78**	**1.088,69**	**913,49**	**865,79**	**(3,97)**
1.3.1	Hibah	0	0	15,50	0	15,50	8,55	270,23	269,62	26,51	20.57	740,27
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	619,65	610,10	717,42	677,41	773,07	749,48	770,18	742,94	798,13	785,52	6,63
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	417,05	425,12	503,19	503,19	632,52	629,17	0	0	0	0	(14,15)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	87,25	75,12	319,41	171,27	110,80	85,34	90,38	76,13	88,85	59,70	11,36

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,42 persen per tahun, dengan pertumbuhan pendapatan daerah terbesar bersumber dari PAD sebesar 15,72 persen per tahun, dana perimbangan sebesar 7,94 persen per tahun. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 3,97% per tahun.

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2013–2017, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,71 persen per tahun. Komponen PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.3
Realisasi Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	1.407,76	1.442,78	102,49
2	2014	1.808,51	1.716,06	94,89
3	2015	2.066,25	1.859,69	90,00
4	2016	2.767,40	2.152,82	77,79
5	2017	3.015,84	2.579,15	85,52

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

PAD Kota Bandung selama periode 2013-2017 senantiasa meningkat, baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi. Namun demikian selama periode 2013-2017 tersebut, hanya tahun 2013 realisasi mampu memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan tahun-tahun lainnya pencapaian realisasi masih di bawah target yang ditetapkan. Rata-rata pertumbuhan PAD tahun 2013-2017, yaitu 15,71% per tahun. Sumber utama PAD Kota Bandung berasal dari pajak daerah, yaitu rata-rata 81,69% di tahun 2013-2017.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sampai dengan tahun 2017, Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; pajak bumi dan bangunan; bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan pajak air tanah.

Selama tahun 2013 hingga tahun 2017, penerimaan pajak daerah secara kumulatif berada pada nilai Rp7.972,73 miliar atau sebesar 92,20% dari target yang ditetapkan

sebesar Rp8.647,51 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,40 persen per tahun.

Tabel 3.4
Realisasi Target Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	1.063,00	1.194,09	112,33
2	2014	1.400,00	1.399,60	99,97
3	2015	1.598,00	1.494,15	93,50
4	2016	2.186,42	1.709,87	78,20
5	2017	2.400,10	2.174,86	90,62

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Dari sisi pertumbuhan, realisasi perolehan pajak daerah dari tahun 2013-2017 tren perolehannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tren pertumbuhan pajak daerah yang senantiasa mengalami kenaikan tiap tahunnya tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan pendapatan asli daerah secara total, dengan pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2013-2017

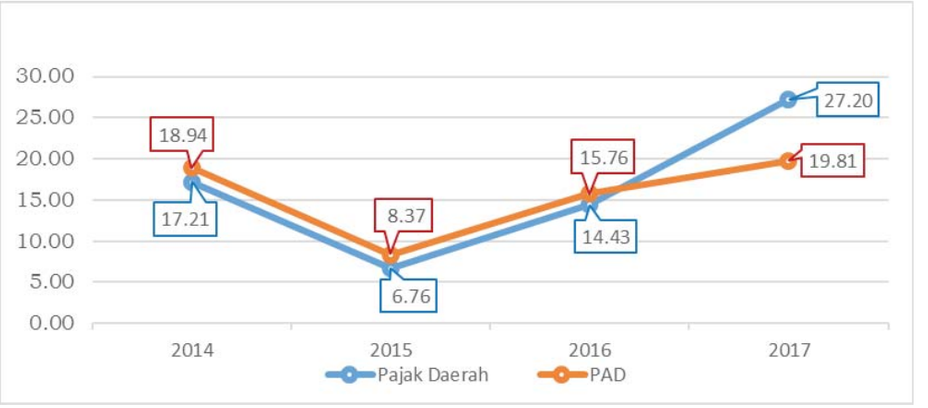

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung berjumlah 16 jenis retribusi, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Retribusi Jasa Umum*, meliputi: retribusi pelayanan penguburan/pemakaman, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, retribusi pelayanan tera/tera ulang;
2. *Retribusi Jasa Usaha,* meliputi: retribusi tempat rekreasi,retribusi rumah potong hewan, retribusi terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, retribusi Trans Metro Bandung (TMB);
3. *Retribusi Perizinan Tertentu,* meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi, retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan, retribusi pemberian izin trayek kepada orang pribadi, retribusi pemberian izin trayek kepada badan, retribusi pemberian IMTA.

Retribusi daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2017, dari sisi perbandingan realisasi dengan target terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 114,57% pada tahun 2013 menjadi 19,06% pada tahun 2017. Penurunan dalam hal realisasi ini berimplikasi pada sisi pertumbuhan realisasi yang juga mengalami pertumbuhan negatif, dengan rata-rata sebesar minus 13,15% per tahun.

Tabel 3.5
Realisasi Target Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	100,82	115,51	114,57
2	2014	131,16	99,19	75,63
3	2015	107,56	64,98	60,42
4	2016	204,77	92,01	44,93
5	2017	262,68	50,06	19,06

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Pertumbuhan retribusi daerah cenderung tidak sejalan dengan pola pertumbuhan PAD, dimana pertumbuhan PAD kecenderungannya positif dan terus meningkat, sedangkan pertumbuhan retribusi kecenderungannya negatif dan semakin menurun, hal tersebut dikarenakan PAD yang bersumber dari retribusi daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan pemungutan retribusi daerah dan juga kepatuhan masyarakat untuk membayar retribusi daerah. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah selama periode 2013-2017 dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Pertumbuhan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013-2017

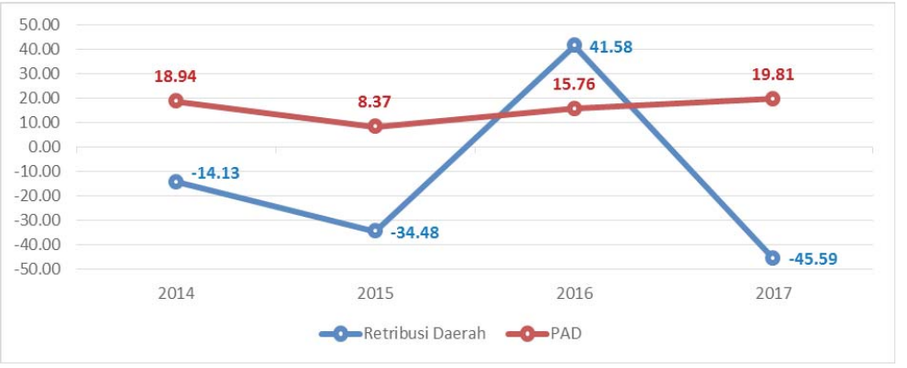

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Tabel 3.6
Realisasi Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017
(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	19,16	12,07	63,00
2	2014	19,16	9,36	48,84
3	2015	20,00	8,60	43,01
4	2016	20,00	10,66	53,29
5	2017	20,00	11,28	56,40

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung pada PDAM Tirtawening, PT. Bank Jabar Banten, PD. BPR, dan KPKB Kota Bandung. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017, rata-rata ketercapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 52,91%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbesar bersumber dari bagian laba yang diperoleh dari PT. Bank Jabar Banten.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2013 hingga tahun 2017 tumbuh negatif dengan rata-rata sebesar minus 0,20 persen per tahun, dengan rincian per tahun sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2013-2017

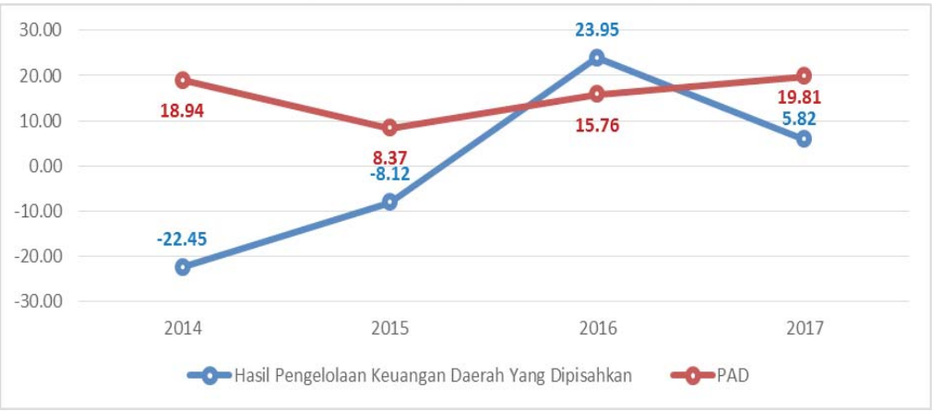

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi ketiga setelah pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal pembentukan pendapatan asli daerah. Pos pendapatan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas: (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; (2) penerimaan jasa giro; (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); (4) pendapatan denda pajak; (5) pendapatan dan pengembalian dari PD; (6) fasilitas sosial dan fasilitas umum; (7) pendapatan dan pemanfaatan kekayaan daerah; (8) penerimaan setoran dari lembaga lain - PT. Taspen; (9) pendapatan lainnya, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari sisi pencapaian, pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2017 mampu melebihi dari target yang ditetapkan, meskipun pada tahun 2013 pencapaiannya masih sangat kecil. Pendapatan BLUD menjadi penyumbang terbesar terhadap pos ini, disusul oleh komponen pendapatan dari jasa giro kas daerah, serta hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa.

Tabel 3.7
Realisasi Target Lain-lain PAD Yang Sah Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	224,78	121,11	53,88
2	2014	258,19	207,91	80,52
3	2015	340,68	291,96	85,70
4	2016	356,22	340,28	95,53
5	2017	333,06	342,94	102,97

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Lain-lain PAD yang sah selama tahun 2013 hingga tahun 2017 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 32,29 persen per tahun, dengan kecenderungan terjadi perlambatan pertumbuhan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Pertumbuhan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017

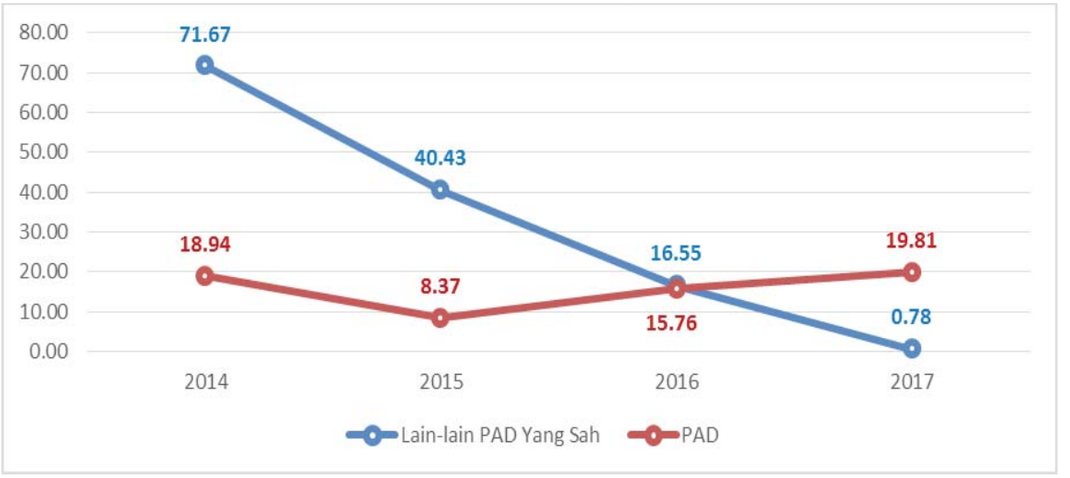

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan selama periode tahun 2013–2017, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,94 persen per tahun. Komponen dana perimbangan terdiri atas: (1) dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak; (2) dana alokasi umum; dan (3) dana alokasi khusus. dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dilihat dari besaran realisasi dana perimbangan, terlihat bahwa secara umum mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dari sisi persentase capaian pun, dana perimbangan realisasinya cenderung stabil mendekati target yang ditetapkan dikisaran 95% sampai 98%. Namun pada tahun 2016 realisasinya cukup jauh dari target yaitu hanya 87,72%, hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan merealisasikan anggaran yang berasal dari DAK.

Tabel 3.8
Realisasi Target Dana Perimbangan Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2013	1.818,17	1.778,97	97,84
2	2014	1.938,45	1.886,02	97,30
3	2015	1.857,23	1.765,83	95,08
4	2016	2.785,94	2.443,76	87,72
5	2017	2.416,22	2.290,75	94,81

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak selama tahun 2013 hingga tahun 2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,14% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5
Pertumbuhan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2013-2017

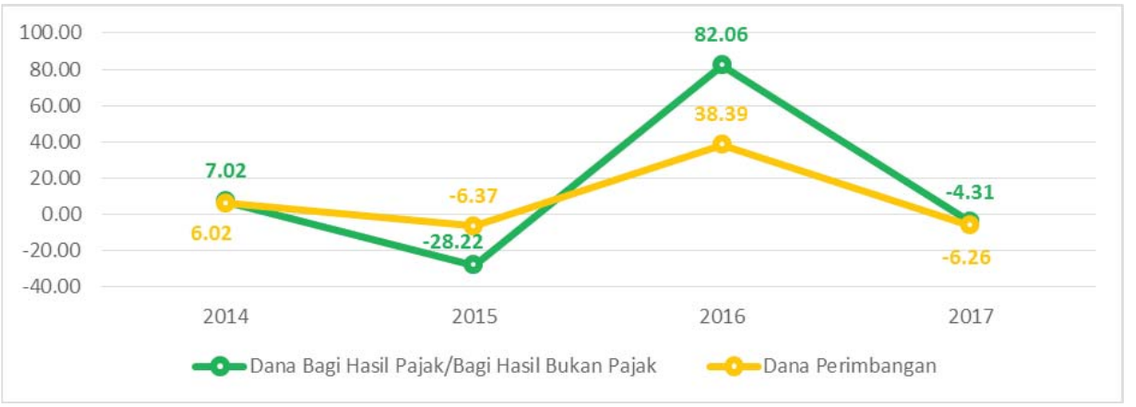

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Berdasarkan gambar tersebut pertumbuhan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak memiliki tren yang sama dengan dana perimbangan secara total. Dimana pada tahun 2014 dan 2016 tumbuh secara positif, sedangkan pada tahun 2015 dan 2017 tumbuh secara negatif.

Tabel 3.9
Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Bagi Hasil Pajak/
Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2013	264,92	225,72	85,20
2	2014	278,09	241,56	86,86
3	2015	250,29	173,38	69,27
4	2016	291,22	315,65	108,39
5	2017	349,27	302,06	86,48

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Fluktuasi pertumbuhan realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 tersebut sejalan dengan persentase capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak yang juga berfluktuasi dari tahun 2013-2017, persentase terkecil dicapai pada tahun 2015 sebesar 69,55%, sedangkan pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan raihan 108,55%. Kontribusi terbesar dana bagi hasil pajak diperoleh dari dana bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan untuk dana bagi hasil bukan pajak, bagi hasil dari petambangan panas bumi dan pertambangan gas bumi menjadi sektor yang paling banyak memberikan kontribusi. Hal ini sejalan masih besarnya kontribusi sektor pertambangan dalam pendapatan pemerintah pusat.

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan realisasi dari DAU Kota Bandung selama periode tahun 2013-2017 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan mampu terealisasikan 100%, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Umum Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2013	1.485,94	1.485,94	100,00
2	2014	1.596,75	1.596,75	100,00
3	2015	1.574,74	1.574,74	100,00
4	2016	1.672,46	1.672,46	100,00
5	2017	1.643,08	1.643,08	100,00

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Tren pertumbuhan realisasi dana alokasi umum memiliki kesamaan dengan tren realisasi dana perimbangan secara total, yaitu tumbuh secara positif pada tahun 2014 dan 2016, dan tumbuh negatif pada tahun 2015 dan 2017. Namun demikian secara keseluruhan terjadi peningkatan realisasi DAU dari tahun 2013 sebesar Rp1.485 miliar menjadi Rp1.643 miliar atau terjadi kenaikan sebesar 10,58% dengan rata-rata pertumbuhan 2,63 persen per tahun.

Gambar 3.6
Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2013-2017

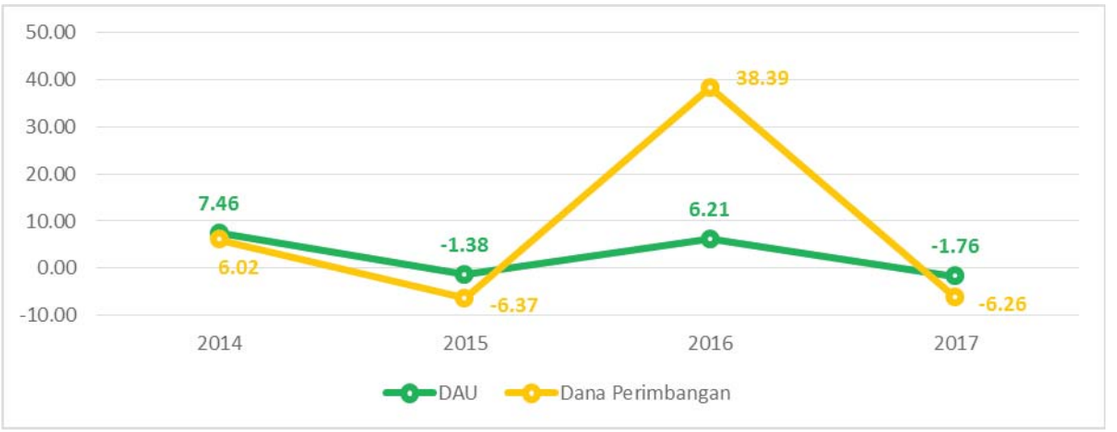

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke Daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Tabel 3.11
Persentase Realisasi Terhadap Target Dana Alokasi Khusus Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017
(Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2013	67,31	67,31	100,00
2	2014	63,61	47,71	75,00
3	2015	32,20	17,71	55,00
4	2016	822,26	455,65	55,41
5	2017	423,87	345,61	81,54

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Penerimaan Dana Alokasi Khusus terjadi fluktuasi setiap tahunnya, dari Rp67,312 miliar pada tahun 2013 meningkat drastis pada tahun 2016 menjadi Rp822,262 miliar, namun kembali menurun pada tahun selanjutnya di kisaran Rp423,866 miliar. Dalam hal capaiannya pun, terjadi fluktuasi dimana dari 100% pencapaian di tahun 2013, terus

turun sampai tahun 2015, kemudian meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Alokasi terbesar DAK setiap tahunnya diperuntukan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Sebagaimana halnya komponen dana perimbangan yang lain (dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak dan DAU), pertumbuhan realisasi DAK memiliki tren yang sama dengan dana perimbangan secara total, dengan rata-rata tumbuh sebesar 589,17% per tahun dengan rincian pertumbuhan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.7
Pertumbuhan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013-2017

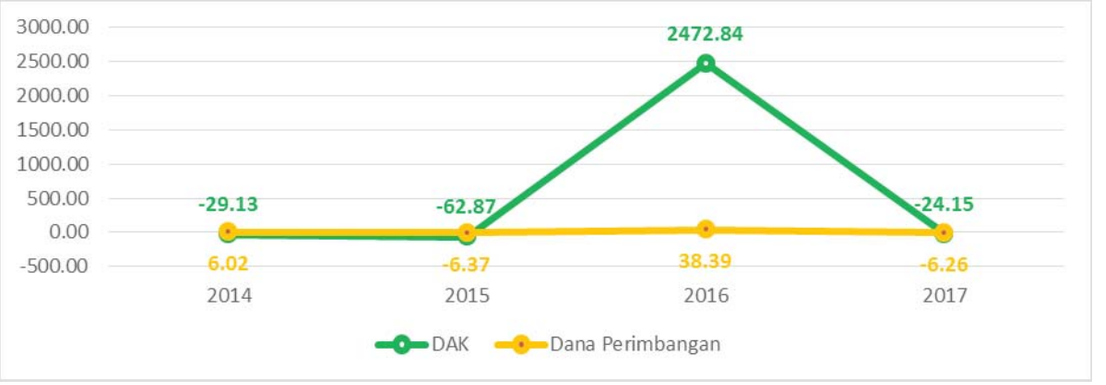

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kota Bandung yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah selama periode tahun 2013–2017, memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar minus 3,97 persen per tahun, dengan kecenderungan terjadi fluktuasi pertumbuhan setiap tahunnya. Komponen lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas: (1) pendapatan hibah; (2) dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; (3) dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan (4) bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah ini relatif besar, dimana selama periode 2013-2018 berkisar pada nilai 1 (satu) triliunan. Dalam hal persentase capaian, tiap tahunnya mendekati target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian sebesar 94,58%.

Tabel 3.12
Persentase Realisasi Terhadap Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	2013	1.123,95	1.110,34	98,79
2	2014	1.555,52	1.351,87	86,91
3	2015	1.531,88	1.472,54	96,13
4	2016	1.130,78	1.088,69	96,28
5	2017	913,49	865,79	94,78

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

4) Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2013-2017, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat

Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian yang digambarkan melalui realisasi indikator makro ekonomi, juga pelaksanaan kebijakan belanja daerah, diperoleh nilai realisasi belanja daerah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2013	4.755,24	4.027,47	84,70
2	2014	5.717,54	4.435,59	77,58
3	2015	6.553,37	5.201,94	79,38
4	2016	7.360,85	5.830,41	79,21
5	2017	6.752,91	5.541,66	82,06

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun 2013 realisasi belanja daerah sebesar Rp4,027 triliun, maka pada tahun 2017 realisasinya telah mencapai Rp5,541 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 37,60%.

Selama periode 2013 sampai 2017, belanja langsung tercatat terus mengalami peningkatan baik dari sisi anggaran maupun dari sisi realisasi. Pada tahun 2013, realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp2.115,99 miliar dari anggaran Rp2.366,20 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi sebesar Rp2.688,86 miliar dari target Rp2.826,04 miliar, atau tumbuh sebesar 27,07%.

Dalam periode 2013-2017, realisasi belanja tidak langsung dibelanjakan untuk keperluan belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya termasuk pemerintah desa, serta belanja tidak terduga.

Dari semua jenis belanja yang menjadi komponen belanja tidak langsung, belanja pegawai yang dipakai untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menjadi pengeluaran terbesar diantara belanja lainnya, dengan pengeluaran rata-rata per tahun sebesar 87,22% dari total belanja tidak langsung, sedangkan sisanya terbagi ke dalam belanja lainnya.

Sama halnya dengan belanja tidak langsung, untuk belanja langsung dari tahun 2013 sampai 2017, juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, realisasi belanja langsung Pemerintah Kota Bandung mencapai Rp1.911,47 miliar dari anggaran Rp2.389,05 miliar dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi Rp2.852,80 miliar dari anggaran Rp3.926,88 miliar, atau tumbuh sebesar 49,25%. Alokasi belanja langsung terbagi ke dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara lebih rinci, tabel berikut menyajikan proporsi realisasi belanja terhadap rencana belanja daerah menurut kategori tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 3.14

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun															Rata-rata
		2013			2014			2015			2016			2017			
		Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)	Anggaran	Realisasi	Proporsi (%)	
2	**BELANJA**	**4.755,24**	**4.027,46**	**84,70**	**5.717,54**	**4.435,59**	**77,58**	**6.553,37**	**5.201,94**	**79,38**	**7.360.85**	**5.830,41**	**79,21**	**6.752,91**	**5.541,72**	**82,06**	**80,58**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.366,19**	**2.115,99**	**89,43**	**2.703,05**	**2.340,03**	**86,57**	**2.784,26**	**2.383,63**	**85,61**	**2.934,43**	**2.556,09**	**87,11**	**2.826,04**	**2.688,86**	**95,15**	**88,77**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.958,87	1.791,06	91,43	2.306,76	2.006,28	86,97	2.494,97	2.139,61	85,76	2.621,38	2.275,39	86,80	2.428,08	2.337,41	96,27	89,45
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	95,87	95,88	100,00	101,47	95,63	94,24	126,73	116,26	91,74	130,34	128,53	98,62	4,59	0,00	0,00	96,15
2.1.4	Belanja Hibah	280,52	207,64	74,02	180,02	164,43	91,34	140,38	126,74	90,28	154,10	151,25	98,15	380,97	350,21	91,93	89,14
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21,07	19,95	94,67	100,55	72,79	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,82	0,81	99,88	0,85	0,84	98,27	1,00	0,90	90,07	1,00	0,90	90,07	1,00	0,90	90,07	93,52
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	9,04	0,65	7,21	13,40	0,06	0,49	21,18	0,12	0,55	27,61	0,02	0,08	11,40	0,34	3,03	2,25
2.2	**Belanja Langsung**	**2.389,05**	**1.911,47**	**80,01**	**3.014,49**	**2.095,56**	**69,52**	**3.769,11**	**2.818,31**	**74,77**	**4.426,42**	**3.274,32**	**73,97**	**3.926,87**	**2.852,86**	**72,65**	**74,18**
2.2.1	Belanja Pegawai	183,40	162,33	88,51	209,99	186,79	88,95	273,23	242,33	88,69	300,79	264,95	88,09	0,66	0,52	78,79	86,61
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	776,48	684,30	88,13	1.196,99	937,33	78,31	1.587,23	1.288,18	81,16	2.130,06	1.755,34	82,41	2.505,95	1.933,46	77,15	81,43
2.2.3	Belanja Modal	1.429,17	1.064,84	74,51	1.607,51	971,44	60,43	1.908,65	1.287,80	67,47	1.995,57	1.254,03	62,84	1.420,26	918,88	64,70	65,99

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Dari rincian realisasi belanja daerah sebagaimana disajikan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 88,77 persen, sedangkan rata-rata realisasi belanja langsung tahun 2013 hingga tahun 2017 sebesar 74,18 persen. Realisasi belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017, secara proporsi realisasi terhadap anggaran, diketahui bahwa realisasi belanja langsung relatif lebih rendah dibandingkan realisasi belanja tidak langsung, hal ini dikarenakan belanja langsung tidak dapat sepenuhnya diserap diantaranya disebabkan karena adanya hambatan pada proses pengadaan barang dan jasa, serta adanya dampak perekonomian global.

Dari sisi pertumbuhan realisasi, belanja daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 8,64 persen per tahun. Pertumbuhan belanja daerah terbesar bersumber dari belanja langsung sebesar 11,86 persen per tahun, diikuti rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 6,22 persen, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.15
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertum buhan (%)
2	**BELANJA**	**4.027,46**	**4.435,59**	**5.201,94**	**5.830,41**	**5.541,72**	**8,64**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**2.115,99**	**2.340,03**	**2.383,63**	**2.556,09**	**2.688,86**	**6,22**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.791,06	2.006,28	2.139,61	2.275,39	2.337,41	6,93
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	95,88	95,63	116,26	128,53	0,00	(17,03)
2.1.4	Belanja Hibah	207,64	164,43	126,74	151,25	350,21	26,79
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	19,95	72,79	0,00	0,00	0,00	41,22
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,81	0,84	0,90	0,90	0,90	2,71
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,65	0,06	0,12	0,02	0,34	381,47
2.2	**Belanja Langsung**	**1.911,47**	**2.095,56**	**2.818,31**	**3.274,32**	**2.852,86**	**11,86**
2.2.1	Belanja Pegawai	162,33	186,79	242,33	264,95	0,52	(11,42)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	684,30	937,33	1.288,18	1.755,34	1.933,46	30,20
2.2.3	Belanja Modal	1.064,84	971,44	1.287,80	1.254,03	918,88	(1,39)

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

5) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. tabel berikut menyajikan gambaran realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2013 hingga tahun 2017.

Tabel 3.16
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun										Rata-rata Pertumbuhan Realisasi (%)
		2013		2014		2015		2016		2017		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3	**Pembiayaan**	**405,37**	**405,54**	**683,52**	**694,66**	**1.098,01**	**1.098,01**	**676,72**	**677,33**	**407,36**	**408,51**	**12,84**
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**432,45**	**432,46**	**710,16**	**710,16**	**1.213,01**	**1.213,01**	**994,14**	**994,14**	**532,13**	**532,13**	**17,63**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	432,45	432,46	710,16	710,16	1.213,01	1.213,01	994,14	994,14	532,13	532,13	17,63
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27,08**	**26,92**	**26,64**	**15,50**	**115,00**	**115,00**	**317,42**	**316,81**	**124,76**	**123,62**	**178,51**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26,00	26,00	26,64	15,50	115,00	115,00	317,42	316,81	124,76	123,62	179,01
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang Pokok	1,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah tumbuh dengan rata-rata sebesar 12,84 persen per tahun. Penerimaan pembiayaan tumbuh dengan rata-rata 17,63 persen per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh dengan rata-rata 178,51 persen per tahun.

1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio quick (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2017 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandung Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
	ASET						
	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	688,23	1.168,81	908,54	416,34	492,04	2,89
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,01	0,06	0,06	125,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,61	16,48	6,51	5,53	0,28	46,51
	Kas di BLUD	19,81	28,38	35,31	110,20	103,43	68,28
	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kas Lainnya	0,00	16,19	48,16	1,85	2,66	36,27
	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Pendapatan	122,06	897,26	1.066,19	1.155,29	1.273,02	168,12
	Piutang Lainnya	53,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	(576,49)	(638,84)	(750,59)	7,08
	Beban Dibayar Dimuka	1,20	1,04	0,29	0,65	0,52	4,67
	Persediaan	39,79	54,59	57,15	64,95	78,70	19,18
	JUMLAH ASET LANCAR	924,94	2.181,75	1.545,67	1.116,03	1.206,12	21,56

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bergulir	0,37	0,37	0,40	0,40	0,40	2,03
	Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,37	0,37	0,40	0,40	0,40	2,03
	Investasi Jangka Panjang Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	831,43	810,31	931,06	1.074,70	1.329,60	12,88
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	831,43	810,31	931,06	1.074,70	1.329,60	12,88
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	831,80	810,68	931,46	1.075,10	1.330,00	12,87
	ASET TETAP						
	Tanah	15.375,59	15.686,71	15.661,33	15.571,81	14.559,65	(1,30)
	Peralatan dan Mesin	825,03	1.078,83	1.472,20	1.803,48	1.883,98	23,55
	Gedung dan Bangunan	1.692,36	2.523,08	2.742,62	2.932,66	2.733,35	14,48
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.109,91	2.472,68	2.911,92	3.390,73	3.238,01	11,72
	Aset Tetap Lainnya	63,18	69,51	89,37	148,24	221,65	38,50
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	811,95	169,22	403,43	546,49	450,19	19,27
	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	(2.754,26)	(2.825,38)	(2.093,11)	(5,83)
	JUMLAH ASET TETAP	20.878,02	22.000,03	20.526,61	21.568,03	20.993,72	0,27

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET LAINNYA						
	Tagihan Jangka Panjang	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	384,68	211,83	211,83	211,83	211,83	(11,23)
	Aset Tidak Berwujud	1,96	20,10	21,28	26,69	26,88	239,38
	Aset Lain-lain	17,33	22,83	21,52	21,90	194,37	203,82
	JUMLAH ASET LAINNYA	404,48	255,27	255,14	260,93	433,59	7,88
	JUMLAH ASET	23.042,24	25.247,73	23.258,88	24.020,09	23.963,43	1,18
	KEWAJIBAN						
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	(50,00)
	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
	Pendapatan Diterima Dimuka	15,66	20,04	29,28	37,03	33,77	22,94
	Utang Beban	0,00	0,00	41,45	52,08	245,83	99,42
	Utang Jangka Pendek Lainnya	39,28	251,69	38,46	68,76	122,53	153,26
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	55,78	271,73	109,20	157,87	402,14	131,66

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	55,78	271,73	109,20	157,87	402,14	131,66
	EKUITAS						
	EKUITAS	22.986,46	271,73	109,20	157,87	402,14	0,79
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	23.042,24	25.247,73	23.258,88	24.020,09	23.963,43	1,18

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat di dalam elemen utama neraca sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, adalah sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

Aset Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,18%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain, aset lancar rata-rata naik sebesar 21,56%, investasi jangka panjang terjadi peningkatan sebesar 12,87%, aset tetap rata-rata naik sebesar 0,27%, dan aset lainnya rata-rata naik sebesar 7,88%.

Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari aset, dijelaskan berikut:

1. Kas di Kas Daerah; mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, meliputi:
   a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bank yang ditentukan oleh wali kota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Bandung;
   b) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah;
   c) Uang tunai (uang kertas/tunai dan logam) di bendahara umum daerah.
2. Kas di Bendahara Penerimaan; mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; mencakup seluruh saldo rekening bank bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu per tanggal neraca.
4. Kas di BLUD; merupakan kas yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Kas Lainnya; merupakan kas yang dikelola bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggal neraca.

6. Investasi Jangka Pendek; adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dalam rangka untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat berupa:
    a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
    b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
    c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
    d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
7. Piutang; adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penyisihan Piutang; adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
9. Beban Dibayar Di muka; adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Klasifikasi beban dibayar di muka, antara lain: pembayaran premi asuransi dan sewa guna (*leasing*).
10. Persediaan; adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.
11. Investasi Jangka Panjang Non Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
12. Investasi Jangka Panjang Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri atas penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.
13. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
15. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
16. Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

17. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.
18. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
19. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
20. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
21. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/ kepala daerah pemerintah daerah, sedangkan ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit.
22. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG).
23. Aset Tidak Berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
24. Aset tak Berwujud terdiri atas: *goodwill*, hak paten atau hak cipta, royalti, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
25. Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/direklasifikasi. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 131,66%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek tumbuh positif rata-rata sebesar 131,66%, sedangkan untuk kewajiban jangka panjang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.

Adapun sub-sub rekening dari aset, dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), terdiri atas: utang taspen, utang askes, utang PPh pusat, utang PPN pusat, dan utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
2. Utang Bunga Pinjaman, terdiri atas : a) utang bunga kepada pemerintah pusat; b) utang bunga kepada daerah otonom lainnya ; c) utang bunga kepada BUMN/ BUMD; d) utang bunga kepada bank/lembaga keuangan; e) utang bunga dalam negeri lainnya; dan f) utang bunga luar negeri.
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri atas: a) utang bank; b) utang obligasi (SUN); c) utang pemerintah pusat; d) utang pemerintah provinsi; dan e) utang pemerintah kabupaten/kota lain.
4. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
5. Utang Beban adalah sejumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebagai akibat belanja modal dan barang jasa yang sudah menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan namun oleh pemerintah daerah belum dibayarkan, misalnya belum jatuh tempo atau baru akan dibayar.
6. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya, antara lain: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, seperti biaya sewa atau bunga yang sudah menjadi kewajiban namun belum jatuh tempo.
7. Utang Dalam Negeri, terdiri atas: 1) utang dalam negeri sektor perbankan; 2) utang dalam negeri – obligasi; 3) utang kepada pemerintah pusat; 4) utang kepada pemerintah provinsi; dan 5) utang kepada pemerintah kabupaten/kota.
8. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Perkembangan ekuitas Pemerintah Kota Bandung selama periode 2013-2017 tumbuh rata-rata sebesar 0,79%.

Rasio keuangan yang dapat dianalisis berdasarkan data neraca tahun 2013 sampai dengan 2017, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.18
Analisis Rasio Keuangan Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Lancar (%)	1.663,57	802,91	1.415,45	706,93	299,93
2	Rasio Quick (%)	1.592,24	782,82	1.363,11	665,79	280,36
3	Rasio Total Hutang Terhadap Aset (%)	0,24	1,08	0,47	0,66	1,68
4	Rasio Hutang Terhadap Modal (%)	0,24	1,09	0,47	0,66	1,71
5	Rata-rata Umur Piutang (Hari)	6	38	70	71	77

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas yang diperoleh dari neraca daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai *current ratio* artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, setiap Rp100,00 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp1.663,57, tahun 2014 sebesar Rp802,91, tahun 2015 sebesar Rp1.415,45, tahun 2016 sebesar Rp709,93, serta tahun 2017 sebesar Rp299,93.
2. Rasio Quick (*Quick Ratio*), yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel tersebut, *quick ratio* tahun 2013 sebesar 1.592,24, artinya bahwa hutang lancar sebesar Rp100,00 dijamin dengan aktiva sebesar Rp1.592,24, tahun 2014 sebesar Rp782,82, tahun 2015 sebesar Rp1.363,11, tahun 2016 sebesar Rp665,79, dan tahun 2017 sebesar Rp280,36, hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.
3. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (*Debt to Asset Ratio*), yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2013 sebesar 0,24 persen, tahun 2014 sebesar 1,08 persen, tahun 2015 sebesar 0,47 persen, tahun 2016 sebesar 0,66 persen, dan tahun 2017 sebesar 1,68 persen.
4. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2013 sebesar 0,24%, tahun 2014 sebesar 1,09%, tahun 2015 sebesar 0,47%, tahun 2016 sebesar 0,66%, serta tahun 2017 sebesar 1,71%.

5. Rata-rata umur piutang, digunakan untuk menilai berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Angka rata-rata umur piutang yang terlalu tinggi menunjukkan tidak kembalinya piutang yang lebih tinggi. Sebaliknya, angka yang terlalu rendah bisa jadi merupakan indikasi kebijakan piutang terlalu ketat. Tercatat selama tahun 2013 sampai tahun 2017, rata-rata umur piutang adalah 6 hari pada tahun 2013, 38 hari pada tahun 2014, 70 hari pada tahun 2015, 71 hari pada tahun 2016, dan 77 hari pada tahun 2017.

2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2013 – 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017, arah kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung diarahkan pada:

1. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan: menerapkan sistem daring penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD.

b) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya.
c) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
d) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
e) Penguatan data basis pajak daerah Kota Bandung.
f) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
g) Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.

2. Arah kebijakan untuk meningkatkan dana perimbangan
   a) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21.
   b) Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
   c) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi.
3. Arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional,
   a) Meningkatkan peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
   b) Penguatan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
   c) Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan infrastruktur.
   d) Mengembangkan jejaring dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2013 sampai 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan dan urusan kesehatan serta peningkatan infrastruktur kota bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

3. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran, dan jumlah personilnya.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
   a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
   b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
   c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD.
   d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD.
   e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Belanja Bunga

   Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD.
3. Belanja Subsidi

   Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

   Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
5. Belanja Bagi Hasil Pajak
   a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran rencana.
   b) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan
    a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah.
    b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.
7. Belanja Tidak Terduga

    Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Kemudian, terkait pembiayaan Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2013-2018 memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
    a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
    b) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya;
    c) Apabila akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang

disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang.

2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Untuk melihat upaya pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat rincian proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, yaitu sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandung
Tahun 2013 s.d. 2017 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
A	**Belanja Tidak Langsung**	**1.785,06**	**2.006,28**	**2.139,60**	**2,275,38**	**2.337,70**	**7,03**
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.540,68	1.722,77	1.804,02	1.846,17	1.406,97	(1,23)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	201,55	212,11	270,08	346,68	849,91	51,52
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4,72	6,48	7,03	7,28	9,42	19,68
4.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	33,56	60,05	55,89	71,34	69,94	24,42
5.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4,55	4,87	2,58	3,91	1,46	(12,77)
B	**Belanja Langsung**	**260,05**	**413,21**	**612,71**	**666,41**	**324,58**	**16,16**
1.	Belanja Honorarium PNS	68,99	76,61	92,17	112,42	2,83	(11,04)
2.	Belanja Uang Lembur	10,33	11,90	13,30	13,36	0,34	(17,51)
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,58	2,17	1,17	0,14	0,25	(4,55)
4.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	23,11	22,93	35,77	59,15	27,57	16,80
5.	Belanja Premi Asuransi	1,22	1,43	64,25	76,31	0,27	1.082,34
6.	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	3,04	3,22	3,68	4,80	2,28	(0,46)
7.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6,52	5,40	8,13	10,01	6,61	5,63
8.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7,10	11,21	17,30	16,51	12,82	21,32

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
9.	Belanja Perjalanan Dinas	61,80	71,60	60,10	98,39	78,45	10,81
10.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan, dan lain-lain)	76,36	206,74	316,84	275,32	193,16	45,26
	TOTAL	2.045,11	2.419,49	2.752,31	2.941,79	2.662,28	7,36

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena jumlah aparatur yang jumlahnya terus bertambah, juga berkenaan dengan peningkatan keahlian aparatur yang mengakibatkan lebih besar anggaran yang harus disediakan.

Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 5 (lima) tahun terakhir dengan tabel berikut.

Tabel 3.20
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1.	2013	2.045,11	4.054,38	50,44
2.	2014	2.419,49	4.451,09	54,36
3.	2015	2.752,31	5.316,94	51,76
4.	2016	2.941,79	6.147,22	47,86
5.	2017	2.662,28	5.665,34	46,99

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 sebesar 50,44 persen, tahun 2014 sebesar 54,36 persen, tahun 2015 sebesar 51,76 persen, tahun 2016 sebesar 47,86 persen, dan tahun 2017 sebesar 46,99 persen.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD,

meskipun jumlah aparatur terus meningkat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Defisit Riil Anggaran Kota Bandung (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.332,09	4.953,94	5.098,07	5.685,21	5.735,00
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	4.027,46	4.435,49	5.201,94	5.830,41	5.541,72
No	**Uraian**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26,92	15,50	115,00	316,81	123,62
	Defisit Riil	**277,71**	**502,95**	**(218,87)**	**(462,01)**	**70,66**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Berdasarkan tabel tersebut selama kurun waktu 2013-2017, APBD Kota Bandung mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah pada tahun 2013, 2014, dan 2017. Namun demikian, tahun 2015 dan 2016 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.Sehingga diperoleh data bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2017 terjadi surplus riil masing-masing sebesar Rp277,71 miliar; Rp502,95 miliar; dan Rp70,66 miliar, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 terjadi defisit riil masing-masing sebesar Rp218,87 miliar dan Rp462,01 miliar.

Tabel 3.22
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandung
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	432,46	710,16	1.213,01	994,14	532,13
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	**432,46**	**710,16**	**1.213,01**	**994,14**	**532,13**

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2013 sampai dengan 2017, maka dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Kota Bandung mempunyai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran. Surplus riil Pemerintah Kota Bandung dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.332,09	4.953,94	5.098,07	5.685,21	5.735,00
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	4.027,46	4.435,49	5.201,94	5.830,41	5.541,72
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26,92	15,50	115,00	316,81	123,62
A	**Defisit Riil**	**277,71**	**502,95**	**(218,87)**	**(462,01)**	**70,66**
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	432,46	710,16	1.213,01	994,14	532,13
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**432,46**	**710,16**	**1.213,01**	**994,14**	**532,13**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	710,17	1.213,11	994,14	532,13	602,79

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Berdasarkan tabel tersebut, didapat informasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2013-2017, berturut-turut sebesar Rp710,17 miliar tahun 2013; Rp1.213,11 miliar tahun 2014; Rp994,14 miliar tahun 2015; Rp532,13 miliar tahun 2016; serta Rp602,79 miliar tahun 2017. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bandung cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

b. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Tabel berikut memberikan gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2013 hingga 2017.

Tabel 3.24
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandung
(Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	711,65	100	1.228,86	100	998,53	100	533,98	100	598,47	100
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	711,65	100	1.228,86	100	998,53	100	533,98	100	598,47	100

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
5	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Perolehan SiLPA selama tahun 2013 hingga 2017 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, sehingga keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehingga terjadi over target dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah.

SiLPA yang terdapat pada APBD Kota Bandung sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kota Bandung dapat diperkecil.

c. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.25
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
Kota Bandung Tahun 2013-2018 (Dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Saldo Kas Neraca Daerah	711,65	1.228,86	998,53	533,98	598,47
	Dikurangi					
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan Lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	711,65	1.228,86	998,53	533,98	598,47

Sumber: *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung 2013-2017 (Audited)*

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

a. Proyeksi Pendapatan Tahun 2019-2023

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.8
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2013-2017, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/ lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;
5. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak dilakukan penghapusan piutang pajak, dan piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
9. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.

Proyeksi pendapatan dalam RPJMD ini berlaku untuk periode 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.26
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	**PENDAPATAN**	**6.552.675.658.887,08**	**6.417.323.951.787,41**	**6.708.178.385.831,00**	**7.046.992.867.249,42**	**7.373.285.215.687,46**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**3.055.014.614.374,75**	**3.068.092.487.054,00**	**3.268.833.227.361,00**	**3.511.226.056.482,00**	**3.734.347.236.961,40**
1.1.1	Pajak Daerah	2.436.311.729.897,75	2.522.552.659.693,00	2.691.062.135.340,00	2.898.122.897.465,00	3.082.342.305.461,00
1.1.2	Retribusi Daerah	135.564.168.477,00	68.517.268.961,00	78.763.712.768,00	90.860.026.931,00	105.155.337,726,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	80.040.000.000,00	24.952.800.00,00	25.929.496.000,00	26.974.560.720,00	28.092.779.970,40
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	403.098.716.000,00	452.069.758.400,00	473.077.883.253,00	495.268.571.366,00	518.756.813.804,00
1.2	**Dana Perimbangan**	**2.535.287.328.333,33**	**2.440.444.114.451,41**	**2.471.121.980.863,01**	**2.503.947.297.923,42**	**2.539.070.387.178,06**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	339.361.364.333,33	438.255.234.451,41	468.933.100.863,01	501.758.417.923,42	536.881.507.178,06
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.695.146.944.000,00	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	500.779.020.000,00	359.111.975.000,00	359.111.975.000,00	359.111.975.000,00	359.111.975.000,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**962.373.716.179,00**	**908.787.350.282,00**	**968.223.177.607,00**	**1.031.819.512.844,00**	**1.099.867.591.548,00**
1.3.1	Hibah	100.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	862.373.716.179,00	849.083.247.491,00	908.519.074.816,00	972.115.410.053,00	1.040.163.488.757,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	59.704.102.791,00	59.704.102.791,00	59.704.102.791,00	59.704.102.791,00

Sumber: *Hasil Kajian Potensi dan Analisis, 2018*

b. Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.9
Analisis Proyeksi Belanja Daerah

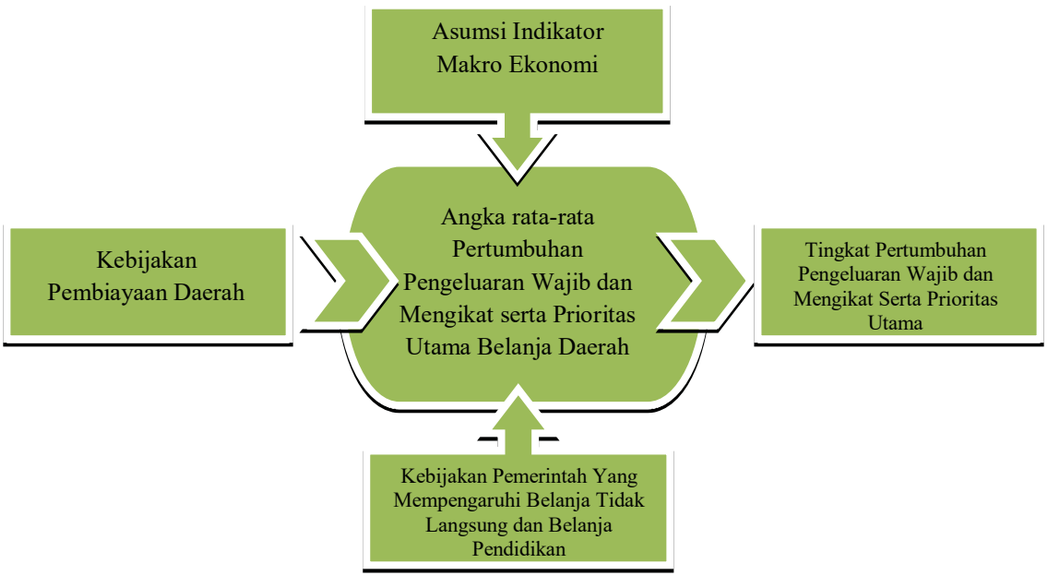

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja pegawai berdasarkan pada acress 7,5% dengan menjadikan realisasi 2017, dengan memperhatikan kebijakan pusat pada tahun berjalan.
2. Belanja hibah berdasarkan pada rata-rata realisasi lima tahun (2013-2017).
3. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja tidak terduga berdasarkan pada rata-rata anggaran lima tahun (2013-2017).

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
4. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;
5. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.27
Proyeksi Belanja Kota Bandung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	**BELANJA**	**7.121.331.712.722,25**	**6.754.191,164.324,20**	**7.004.923.742.037,65**	**7.361.781.840.366,99**	**7.721.740.972.130,36**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.226.341.577.041,95**	**3.028.283.041.980,00**	**3.178.475.607.280,00**	**3.339.827.356.780,00**	**3.573.937.356.780,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	2.909.152.769.690,95	2.701.160.000.000,00	2.903.740.000.000,00	3.121.530.000.000,00	3.355.640.000.000,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	108.825.685.200,00	108.825.685.200,00	56.438.250.500,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	196.470.565.700,00	200.050.000.000,00	200.050.000.000,00	200.050.000.000,00	200.050.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	10.392.556,451,00	16.530.000.000,00	16.530.000.000,00	16.530.000.000,00	16.530.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**3.894.990.135.680,30**	**3.725.908.122.344,20**	**3.826.448.134.757,65**	**4.021.954.483.586,99**	**4.147.803.615.350,36**

Sumber: *Hasil Analisis, 2018*

c. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019-2023

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

a. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam gambar berikut.

Gambar 3.10
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Berikut tersaji proyeksi pembiayaan daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.28
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	**PEMBIAYAAN**	**568.656.053.835,17**	**336.867.212.536,79**	**296.745.356.206,64**	**314.788.973.117,57**	**348.455.756.442,90**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	779.006.053.835,17	336.867.212.536,79	296.745.356.206,64	314.788.973.117,57	348.455.756.442,90
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	210.350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: *Hasil Analisis, 2018*

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukan melalui tabel berikut.

Tabel 3.29
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	**Belanja Tidak Langsung**	**2.910.652.769.690,95**	**2.702.877.356.780,00**	**2.905.457.356.780,00**	**3.123.247.356.780,00**	**3.357.357.356.780,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.895.068.037.423,03	2.690.274.188.155,00	2.892.037.752.266,62	3.108.950.083.686,62	3.342.116.589.963,12
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DRPD serta Operasional KDH/WKDH	14.084.732.267,92	10.885.811.845,00	11.702.247.733,38	12.579.916.313,38	13.523.410.036,88
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	**2.910.652.769.690,95**	**2.702.877.356.780,00**	**2.905.457.356.780,00**	**3.123.247.356.780,00**	**3.357.357.356.780,00**

Sumber: *Hasil Analisis, 2018*

c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2019-2023 untuk mendanai pembangunan Kota Bandung. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bandung tahun 2019-2023, sebagaimana tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan	6.552.675.658.887,08	6.417.323.951.787,41	6.708.178.385.831,00	7.046.992.867.249,42	7.373.285.215.687,46
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	779.006.053.835,17	336.867.212.536,79	296.745.356.206,64	314.788.973.117,57	348.455.756.442,90
	Total Penerimaan	7.331.681.712.722,25	6.754.191.164.324,20	7.004.923.742.037,64	7.361.781.840.366,99	7.721.740.972.130,36
	Dikurangi :					
4.	Belanja Tidak Langsung	3.226.341.577.041,95	3.028.283.041.980,00	3.178.475.607.280,00	3.339.827.356.780,00	3.573.937.356.780,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	210.350.000.000,00	-	-	-	-
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.894.990.135.680,30	3.725.908.122.344,20	3.826.448.134.757,64	4.0021.954.483.586,99	4.147.803.615.350,36

Sumber: *Hasil Analisis, 2018*

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas; dan
3. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja non urusan yang tidak mengikat.

Tabel 3.31
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Bandung

No	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	**7.331.681.712.722,25**	**6.754.191.164.324,20**	**7.004.923.742.037,65**	**7.361.781.840.366,99**	**7.721.740.972.130,36**
1	Prioritas I	**2.910.652.769.690,95**	**2.702.877.356.780,00**	**2.905.457.356.780,00**	**3.123.247.356.780,00**	**3.357.357.356.780,00**
2	Prioritas II	**3.091.427.296.566,10**	**3.055.168.384.353,67**	**3.165.724.946.415,54**	**3.340.859.265.515,00**	**3.449.208.280.501,00**
3	Prioritas III	**1.329.601.646.465,20**	**996.145.423.190,53**	**933.741.438.842,11**	**897.675.218.071,99**	**915.175.334.849,35**

Sumber: *Hasil Analisis, 2018*

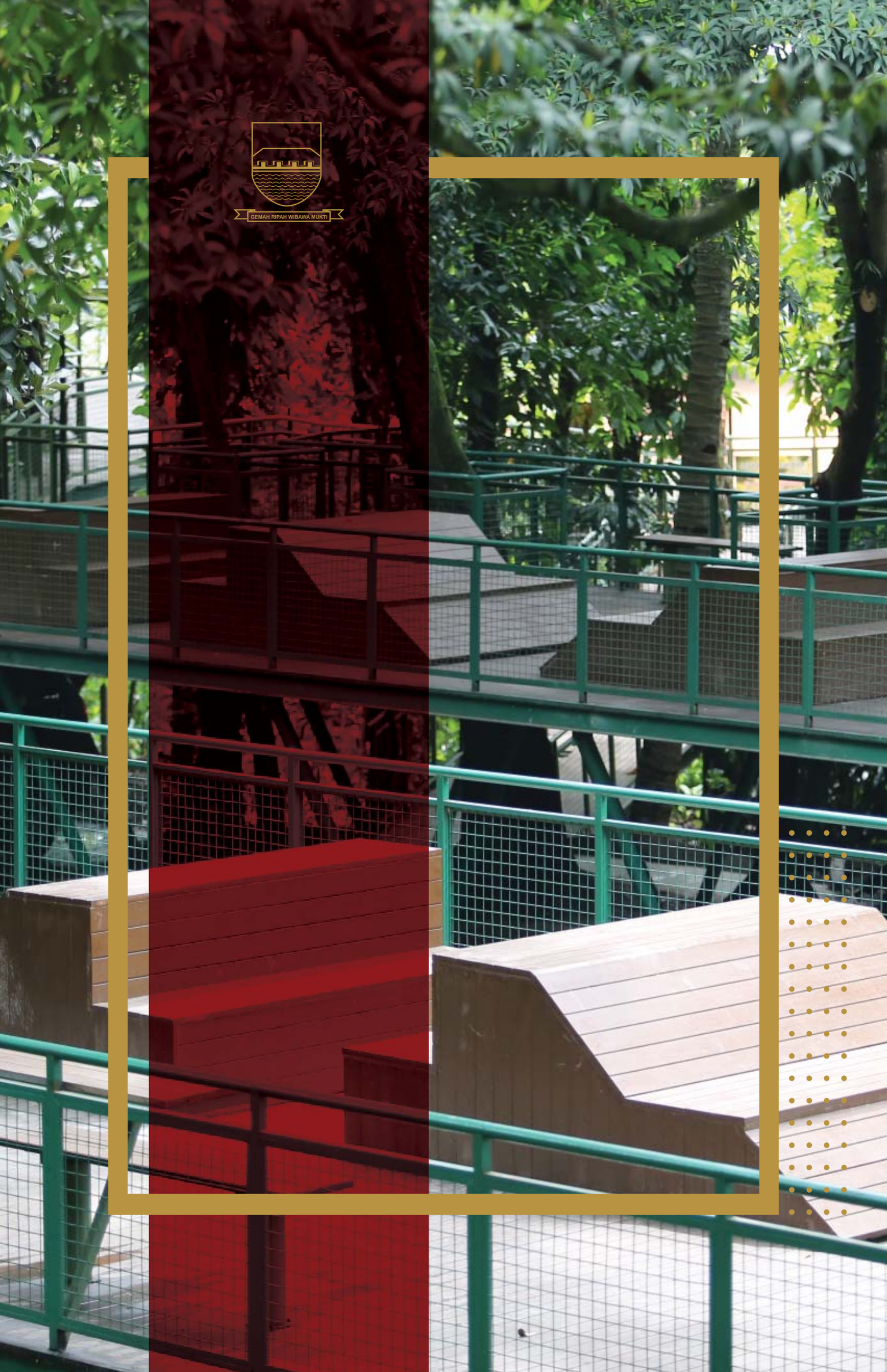
GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 4

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan yang tepat pula. Isu strategis ini diperoleh dengan cara melakukan penelaahan terhadap dokumen perencanaan lain serta mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan.

1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) evaluasi terhadap beberapa urusan yang berpengaruh sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi, berdasarkan kriteria berikut:

1. cakupan masalah yang luas;
2. permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif;
3. memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka permasalahan-permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, dapat diuraikan berikut ini.

1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Permasalahan pada urusan pendidikan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Penyebaran sekolah yang tidak merata; data eksisting menunjukkan bahwa sebanyak 274 SD tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bandung, sedangkan untuk SMP masih terdapat kecamatan yang belum memiliki SMP, yaitu Kecamatan Cinambo. Pemenuhan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk mengejar standar nasional yaitu rasio 1:28 untuk SD dibutuhkan sejumlah 770 RKB yang harus terbangun, sedangkan untuk tingkat SMP dengan rasio standar 1:32 dibutuhkan 552 RKB. Adapun TK negeri yang sudah dimiliki sampai dengan saat ini adalah 3 TK negeri, yang dinilai masih belum dapat memenuhi layanan pendidikan PAUD.
2. Kualitas layanan pendidikan yang tidak merata; pemerataan kualitas layanan pendidikan untuk SD dan SMP baik negeri dan swasta masih belum optimal berdasarkan data statistik, dari 35.000 lulusan SD, yang ditampung oleh SMP negeri hanya 18.500 siswa, tetapi bila dihitung dengan SMP swasta, daya tampung keseluruhan adalah 45.000 siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan kualitas layanan pendidikan pada semua lini baik negeri maupun swasta menjadi kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kota dengan memperlihatkan keberpihakan terhadap sekolah swasta agar dapat bersaing dengan sekolah negeri dan tentunya, harus dapat dijangkau dari sisi akses dan biaya pendidikan dan tertuang dalam program pembinaan dan pengembangan pendidikan dasar.
3. Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru; saat ini kualitas kemampuan guru diukur dari kepemilikan minimal ijazah S-1. Sampai dengan tahun 2017, jumlah guru yang memiliki ijazah S-1 adalah sejumlah 8.292 guru dari total jumlah guru keseluruhan sebanyak 22.061 guru.

4. Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya untuk pendidikan nonformal; konsep *link and match* antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan masih menjadi salah satu target pembelajaran terutama untuk pendidikan nonformal. Sampai dengan tahun 2017, hanya 8 Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) yang telah menjalin kerjasama dari total 65 lembaga pendidikan non formal.
5. Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah. Hal ini berarti bahwa sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluwesan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan data yang telah diolah Dinas Pendidikan pada tahun 2017 untuk SD baik negeri dan swasta yang telah menerapkan MBS adalah sejumlah 356 SD dari total 454 SD, sementara jumlah SMP yang telah menerapkan MBS adalah 150 SMP negeri dan swasta dari total 225 SMP di Kota Bandung.
6. Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif, yaitu sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus, sampai dengan tahun 2017 dari total 1.090 PAUD/TK, baru 60 PAUD/TK yang masuk sekolah inklusif, sedangkan pada level SD sebanyak 454 SD telah menerima siswa berkebutuhan khusus. Pada jenjang SMP, dari total 225 SMP sebanyak 120 SMP masuk dalam kategori sekolah inklusif.

b. Urusan Kesehatan

Permasalahan urusan kesehatan di Kota Bandung diantaranya:

1. Sebaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) belum merata. Idealnya 1 (satu) puskesmas melayani 30.000 penduduk (atau 3,3 per 100.000 penduduk), sementara di Kota Bandung seperti dapat dilihat pada tabel sebelumnya, setiap 100.000 penduduk Kota Bandung masih dilayani oleh kurang dari 3 puskesmas (atau 1 puskesmas melayani sekitar 35.000 penduduk). Namun persebaran penduduk Kota Bandung yang tidak merata, menyebabkan jumlah penduduk yang dilayani Puskesmas juga berbeda-beda. Ada puskesmas yang melayani kurang dari 30.000 penduduk, namun juga ada puskesmas yang melayani lebih dari 35.000 penduduk. Meskipun jumlah puskesmas di Kota Bandung sudah berjumlah 80 unit puskesmas, namun keberadaaan 80 puskesmas dimaksud belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga sesuai dengan RPJMD 2013-2018 bahwa target puskesmas yang terbangun adalah 84 unit.
2. Standarisasi fasilitas kesehatan milik pemerintah (puskesmas) yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi, hal ini dapat terlihat dari 80 UPT Puskesmas yang ada, sampai dengan akhir tahun 2018 hanya 30 UPT Puskesmas yang sudah terakreditasi, 32 UPT Puskesmas yang sedang berproses untuk mendapatkan proses akreditasi.

3. Ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang masih terbatas, dilihat tren tahun 2014, 2015, dan 2016, secara umum didapatkan bahwa jumlah dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat mengalami penurunan.
4. Tenaga dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi lebih banyak memberikan pelayanan pada upaya kesehatan perorangan. Pada upaya kesehatan masyarakat, peran tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, bidan, perawat, dan sanitarian sangatlah besar. Pada era Jaminan Kesehatan Nasional, sistem rujukan harus diberlakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat primer, sekunder, dan tersier.
5. Pada pelayanan primer, upaya kesehatan yang utama adalah upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Upaya promotif dan preventif merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat dengan tenaga utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, sanitarian, bidan, dan perawat.
6. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam peningkatan layanan kesehatan hal ini berkaitan dengan peningkatan efesiensi di dalam organisasi dan membantu pengambilan keputusan para stakeholder di dalam organisasi. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang bisa mengumpulkan data dari berbagai sistem informasi yang ada di bawah struktur organisasi yang ada. Sampai dengan akhir tahun 2018, Puskesmas yang menggunakan aplikasi SIMPUS sebagai aplikasi terkait dengan layanan kesehatan primer adalah 47 Puskesmas dari 80 Puskesmas yang ada, sehingga hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya layanan kesehatan berbasis online sebagai layanan rujukan puskesmas.
7. Lingkungan fisik dan sosial yang belum mendukung ketercapaian program kesehatan. Hal ini digambarkan sampai dengan akhir Oktober 2018 bahwa baru tercapainya 6 kelurahan dari jumlah total kelurahan sebanyak 151 kelurahan yang sudah menyandang status ODF (*Open Defecation Free*/Bebas Buang Air Besar Sembarangan). Indikator ODF ini dilihat aspek sanitasi masyarakat, yang mana jamban dan toilet yang memiliki standar kelayakan masih dapat dikatakan kurang baik.
8. Perilaku masyarakat yang bersih dan sehat masih belum mencapai 100%. Data sampai dengan akhir Oktober menunjukkan masih status rumah tangga yang sudah menggunakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sejumlah 67,78% (data Dinas Kesehatan, diolah).

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

1. Penyediaan Prasarana Jalan
   a) Kuantitas dan kualitas jalan: luas penyediaan jalan Kota Bandung masih kurang dari 5% dari luas total wilayah kota. *Fly over/underpasss* belum terbangun seluruhnya di persimpangan sebidang dengan kereta api serta pada persimpangan jalan yang padat. Selain itu, desain jalan dan persimpangan serta pedestrian yang memenuhi prinsip-prinsip jalan yang berkeselamatan (*road safety*) pun harus menjadi perhatian.

b) Konfigurasi jalan: jaringan jalan primer masih terganggu oleh lalu lintas *commuter* dan perkotaan, serta jaringan jalan sekunder belum terintegrasi.
c) Kondisi fisik jalan: cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya.
d) Kinerja jaringan jalan: titik kemacetan yang teramati tahun 2017 mencapai 51 titik (bertambah 7 titik dibanding tahun 2013), *Degree of Saturation* (DS) > 1 pada hampir seluruh persimpangan di jalan utama pada jam sibuk, kecepatan rata-rata lalu lintas jalan 14,1 km/jam.

2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kota Bandung sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase dan sumber daya air. Penanganan permasalahan genangan di Kota Bandung saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir/ genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir/ genangan adalah berkurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase dan desain teknis drainase yang bermasalah.

   Hingga tahun 2017, telah teridentifikasi sebanyak 68 titik yang masih berpotensi terjadi genangan. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan intervensi program dan kegiatan, sehingga pada 66 titik telah dapat tertangani dengan menurunnya waktu genangan menjadi rata-rata di bawah 2 jam.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

   Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut di atas terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Persentase ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Persentase ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Saat ini, di Kota Bandung baru terealisasi sebesar kurang lebih 12,20%. Luasan RTH ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kualitas udara ambien, kapasitas resapan air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga usaha untuk menambah jumlah RTH dan intensifikasi RTH yang ada, harus terus ditingkatkan. Sesuai hasil kajian *Liveable City Index* Kota Bandung Tahun 2018, terdapat 16 kecamatan yang memiliki luas RTH yang masuk kategori sangat kurang. Hanya 4 kecamatan yang masuk kategori sangat baik, yaitu Kecamatan Arcamanik, Bandung Wetan, Coblong, dan Regol.

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

   Pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bandung masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya implementasi pembangunan yang belum sesuai

dengan ketentuan peruntukan dan intensitas sesuai izin yang diterbitkan. Sampai dengan tahun 2017 terdapat 67% penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Luasan kawasan permukiman kumuh memperhatikan 7 aspek, mulai dari bangunan gedung, jalan lingkungan, air minum, drainase, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Dalam penanganan kawasan kumuh pada tahun 2017 realisasinya sebesar 9,76% dari target 10,03%. Capaian kinerja tahun 2017 baru tertangani 0,27%, artinya target tercapai dan kawasan kumuh di Kota Bandung semakin berkurang. Target pembangunan sesuai SDGs pada tahun 2019 adalah pelayanan akses universal air minum dan sanitasi kepada seluruh masyarakat serta terwujudnya kota tanpa kawasan kumuh. Dimana pada kawasan kumuh akan dibangun prasarana dan sarana dasar air minum untuk menambah akses air minum menjadi 100%, sanitasi layak 100% sehingga akan mengurangi kawasan kumuh menjadi 0%.

1. Cakupan Pelayanan Air Minum

   Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya: *escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Pelayanan air minum menjadi kewenangan PDAM dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3). DPKP3 bertanggungjawab dengan pengelolaan non perpipaan yang sudah mencapai 1,52% dari target 85% dan sisanya menjadi kewenangan PDAM. Sedangkan untuk layanan perpipaan PDAM, capaian kinerja sebesar 75,75% sehingga total menjadi 77,27%. Adapun yang menjadi kendala dengan tidak tercapainya target adalah:

   a) Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
   b) Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk minum, mandi, dan cuci. Sehingga air tanah seminimal mungkin digunakan sebagai sumber air baku.
   c) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; air baku yang tersedia berada di luar wilayah Kota Bandung (perlu adanya peran Pemerintah Pusat dan Provinsi).
   d) Sungai-sungai di Kota Bandung juga banyak yang tercemar. Beberapa sungai belum memenuhi baku mutu, baik kualitas, kuantitas, serta kontinuitas.
   e) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan.
   f) Belum tersedianya infrastruktur perkotaan khususnya untuk sistem penyediaan air minum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Bandung.

2. Air Limbah Domestik

   Penanganan air limbah domestik merupakan salah satu pelayanan sanitasi dasar kawasan permukiman. Sanitasi dasar yang dimaksud adalah jamban yang dilengkapi dengan saluran pembuangan air limbah domestik, seperti: septic tank, saluran air limbah PDAM/riol kota, sistem pengolahan air limbah yang digunakan komunal atau individual, sehingga tidak mencemari badan air.

   Tingkat pelayanan air limbah dengan sistem terpusat adalah dengan dilakukannya kolaborasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan dengan PDAM, adapun capaian pelayanan air limbah dengan sistem *off site* sebesar 42,85% dan *on site* sebesar 36,24%.

   Pelayanan sanitasi dasar sesuai Target SDGs dan Universal akses pada tahun 2019 harus mencapai 100%, oleh karena itu masih diperlukan 20,91% penambahan cakupan pelayanan air limbah se-Kota Bandung.

3. Rumah Tidak Layak Huni

   Penanganan rumah tidak layak huni dari tahun 2014 - 2017 sebanyak 7.520 unit. Akumulasi capaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni sampai dengan tahun 2017 sebanyak 4.978 unit. Beberapa permasalahan yang terjadi karena ada rutilahu yang sudah di perbaiki secara swadaya maupun sudah berpindah tangan, sehingga tidak bisa memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan dan mengundurkan diri. Penanganan rumah tidak layak huni dilakukan melalui sinergi program dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta (CSR), serta optimalisasi *database* kebutuhan perumahan layak huni. Selain itu tingkat pendapatan dan daya beli yang rendah menyebabkan sejumlah penduduk tidak dapat memiliki rumah yang layak huni dan sehat.

e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban. Menurut data Polrestabes Kota Bandung pada tahun 2017, total jumlah tindak pidana menurut jenis kriminalitas di Kota Bandung pada tahun 2016 sebanyak 3.546 kasus yang mengalami penurunan, dibandingkan tahun 2015 sebanyak 4.455 kasus dan tahun 2014 sebanyak 4.918 kasus. Sementara itu, jumlah gangguan umum kamtibmas pada tahun 2016 sebanyak 3.515 dan tahun 2015 sebanyak 4.159, meskipun trennya menurun, namun ketenteraman dan ketertiban perlu terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Peningkatan potensi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) terhadap stabilitas politik dan keamanan, hal ini menjadi krusial mengingat banyaknya ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang datang dari dalam dan luar negeri. Selain itu, pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun dipengaruhi oleh globalisasi dan kebebasan pada masa demokrasi. Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki tingkat perkembangan pluralitas yang tinggi yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga tentunya diperlukan pengembalian kepada bingkai NKRI yaitu kondisi Bhineka Tunggal Ika, perbedaan suku, agama, ras dan kepercayaan yang tetap terjaga.

3. Meningkatnya individualisme di kalangan masyarakat merupakan suatu konsekuensi akibat dari banyaknya pendatang yang meningkatkan heterogenitas atau keberagaman latar belakang, sehingga terjadi percampuran budaya yang dapat memudarkan nilai-nilai budaya, juga tak lepas dari tekanan globalisasi yang memicu tingginya kompetisi sehingga masyarakat semakin jauh dari rasa kebersamaan dan empati. Kajian Bappelitbang tahun 2017 mengenai "Instrumen Indeks Kemasyarakatan Kota Bandung" dan kajian dari Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah tahun 2016 mengenai "Rapor Warga" menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki karakteristik masyarakat yang kreatif dan terbuka pada perubahan, namun tidak dapat dipungkiri, dihadapkan pula pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan terutama degradasi moral, seperti sikap individualistik, hedonistik, intoleransi, dan sikap-sikap destruktif lainnya, seperti mudah tersinggung dan gampang marah.
4. Potensi terjadinya konflik horizontal, hal ini sesuai dengan data dari *Setara Institute for Democracy and Peace* yang menyebutkan bahwa pada tahun 2015, Kota Bandung menjadi kota nomor 6 paling tidak toleran se-Indonesia dan pada tahun 2017, menjadi kota nomor 12 paling tidak toleran se-Indonesia.

f. Urusan Sosial

Permasalahan pada urusan sosial di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Masih tingginya ketimpangan pendapatan ditandai dengan angka Gini Rasio Indeks pada tahun 2018 yang sebesar 4,30 poin yang menunjukan tingkat ketimpangan berada di batas sedang menuju tinggi.
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program. Hal ini dapat terlihat dari belum terintegrasinya data kesejahteraan sosial khususnya warga miskin penerima program bantuan (KIS, KIP, KKS), kemudian belum adanya sinkronisasi data warga miskin yang memperoleh bantuan serta validasi dan verifikasi data warga miskin, rigidnya proses yang ditempuh untuk sampai tahap verifikasi dan validasi data serta kesulitan mengelola ketersediaan data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana pada tahun 2017 jumlah PMKS Kota Bandung sebesar 80.388 orang. Hal ini juga disebabkan belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data PMKS.
4. Adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Bandung, yang dikategorikan dalam kelas sedang untuk tingkat kerentanan, dan potensi kerugian fisik dan ekonomi terhadap bencana gempa bumi berada pada kelas sedang dengan potensi kerugian fisik sebesar 14.171,3 miliar rupiah, dan potensi kerugian ekonomi sebesar 20,2 miliar rupiah. Studi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN (2016) mengenai Kota Tangguh Bencana, menyebutkan bahwa Kota Bandung memiliki ancaman bahaya gempa bumi sedang, dengan sebagian kecil wilayah di bagian timur yang tergolong tinggi. Sementara itu, ancaman dan potensi bencana sosial yang terjadi di wilayah Kota Bandung, seperti maraknya kasus LGBT, kekerasan pada anak dan pornografi, merupakan hal yang perlu diwaspadai.

1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pada urusan tenaga kerja di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, dengan nilai 8,44% pada tahun 2017 dan nilai 9,02% pada tahun 2015.
2. Terjadinya *mismatch* dan *share* sektor jasa berproduktivitas rendah. Menurut data CEDS FE Unpad, 36,08% pekerja mengalami *over-education* (kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari kebutuhan pekerjaan) dan 27,11% mengalami *under-education* (kualifikasi pendidikan yang lebih rendah dari kebutuhan pekerjaan). Konsekuensi dari *mismatch* adalah menurunnya produktivitas pekerja dan karir yang terhambat. Sementara itu, *share* sektor jasa meningkat dan menyerap tenaga kerja namun bukan merupakan jasa produktif, sehingga kesejahteraan belum optimal.

b. Uusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Partisipasi perempuan dalam ruang publik harus dapat dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa pada tahun 2017, partisipasi organisasi perempuan di ruang publik adalah sejumlah 20% dari keseluruhan jumlah organisasi perempuan yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan dari DP3APM sebagai perangkat daerah pengampu. Menjadi sebuah tantangan yang besar di kemudian hari, sehingga keterlibatan organisasi perempuan di ruang publik di tahun mendatang lebih banyak dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kota;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kota Bandung dan relatif tinggi, berdasarkan laporan yang disampaikan oleh masyarakat melalui UPT P2TP2A dari Januari sampai dengan Juli tahun 2018, terjadi sebanyak 71 kasus laporan. Sehingga dapat dilihat bahwa masih terdapat bentuk kekerasan baik verbal maupun non verbal yang terjadi selama kurun waktu 2018, meskipun berdasarkan laporan sebelumnya selama tahun 2017 terdapat 151 laporan.
3. Pemenuhan hak anak belum optimal jika dilihat dari indikator kelurahan layak anak yang sudah terbentuk. Pada tahun 2017, kelurahan layak anak yang terbentuk adalah 62 kelurahan layak anak dari total 151 kelurahan di Kota Bandung.

c. Urusan Pangan

Permasalahan pada urusan pangan Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

   Penilaian jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan suatu daerah dilakukan dengan menggunakan metode yang dinamakan PPH. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan wilayah. Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Berdasarkan Hasil Analisis Konsumsi Pangan pada tahun 2013-2018, kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung yang ditunjukkan oleh skor PPH, sudah cukup baik meskipun belum mencapai kondisi ideal. Pada tahun 2017 ketersediaan pangan di Kota Bandung sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang

sudah mencapai skor maksimum, diantaranya umbi-umbian (2,50), pangan hewani (24,00), minyak dan lemak (5,00), serta sayur dan buah (30,00), sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum selama empat tahun terakhir adalah buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

2. Penguatan Cadangan Pangan Ekuivalen Beras
   Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat. Pemerintah kota dalam rangka penguatan cadangan pangan diharuskan menyediakan pangan kota equivalen beras minimal 60 ton setiap tahunnya. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2017 adalah sebanyak 79,837 ton, meningkat drastis dari realisasi tahun 2014 sebanyak 26,7 ton. Akan tetapi yang masih menjadi permasalahan adalah informasi distribusi bahan pangan (beras) yang belum merata atau diketahui oleh banyak pihak.
3. Jumlah Maksimum Pangan Segar yang Tercemar
   Jumlah maksimum pangan segar yang tercemar baru masuk ke urusan pangan pada tahun 2018, dimana sebelumnya ada di urusan pertanian. Ada 2 program yang mendukung target sasaran ini, yaitu Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan. Target pada tahun 2018 sebanyak 35 kasus dan sampai dengan triwulan 1 tahun 2018 ditemukan 1 kasus pangan segar yang tercemar yaitu pada ikan yang mengandung bahan kimia berbahaya (formalin).
4. Kota Bandung bukan Produsen Pangan
   Kota Bandung bukan merupakan daerah produksi sehingga pangan segar yang dijual dan dikonsumsi masyarakat, 84,18% kebutuhan pangan di Kota Bandung dari sisi energinya disediakan dari wilayah lain (Penyusunan NBM (Neraca Bahan Makanan), 2017), sehingga diperlukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif. Selain itu juga perlu ada upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat dengan menanam bahan pangan menggunakan media hidroponik untuk menyiasati keterbatasan lahan.
5. Pelaku usaha dan masyarakat masih kurang memahami tentang tata cara penanganan dan penyimpanan produk pangan segar serta pengetahuan tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya.
6. Terbatasnya SDM pengawas mutu pangan segar terutama petugas laboratorium yang memiliki pendidikan khusus (analis kimia).

d. Urusan Pertanahan

Permasalahan pada urusan pertanahan, diantaranya adalah:

1. Inventarisasi data aset belum optimal, dimana belum tercapainya perencanaan dari pemanfaatan dan penggunaan tanah, target 39 M, sementara baru tercapai 26,272 M. Tingginya tuntutan BPK untuk standarisasi di Kota Bandung, sehingga Kota Bandung masih dinyatakan belum WTP, padahal sudah ada penurunan piutang, dari 19 triliun menjadi 1 triliun. Harga sewa tanah milik pemerintah di bawah standar harga pasar, sehingga belum mendukung PAD.

2. Masih banyaknya lahan pemerintah Kota Bandung yang belum tersertifikasi bahkan sebagian digunakan secara informal oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari DPKP3 pada Kajian Bappelitbang (2017) "Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan Milik Pemerintah Kota Bandung". Jumlah tanah milik pemerintah Kota Bandung sebanyak 11.553 bidang, yang sudah bersertifikat sebanyak 8.378 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 3.175 bidang.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup dan persampahan di Kota Bandung diantaranya mencakup: 1) kualitas lingkungan hidup dan 2) pelayanan pengelolaan sampah.

1. Kualitas Lingkungan Hidup

   Kualitas lingkungan hidup di Kota Bandung diukur berdasarkan penilaian terhadap kualitas air dan udara. Penilaian terhadap kualitas air dilihat dari tingkat pencemaran sungai yang terjadi di Kota Bandung. Indikator jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi baku mutu sungai kelas IV pada tahun 2017 dan terealisasi sebanyak 2 sungai. Baku mutu air permukaan yang saat ini berlaku adalah baku mutu yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Baku mutu kelas IV ini adalah merupakan kualitas air permukaan yang paling rendah yang peruntukannya hanya bisa digunakan untuk mengairi tanaman. Klasifikasi mutu air di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yaitu: a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut; d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sungai utama di Kota Bandung adalah sebanyak 46 sungai dan saat ini kondisi kualitas airnya sangat buruk akibat pencemaran limbah padat, limbah cair domestik, limbah cair sejenis domestik, dan limbah cair non domestik. Perbaikan pada kualitas air sungai akan menunjukkan efektivitas pengendalian pencemaran sehingga dari realisasi 2 sungai yang kualitasnya masih memenuhi baku mutu kelas IV menunjukkan bahwa proses pengendalian pencemaran belum berjalan dengan efektif.

   Untuk menentukan tingkat kualitas udara perkotaan, dilakukan dengan cara mengukur kualitas udara pada beberapa titik pantau, yaitu pada daerah yang diperkirakan menerima dampak polusi udara paling buruk seperti wilayah yang terpapar polusi transportasi dan aktivitas industri. Sebagai pembanding, pengukuran dilakukan pula pada pemukiman yang diperkirakan tingkat polusinya rendah. Dari

hasil pengukuran sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, kondisinya masih memenuhi baku mutu kualitas udara ambien. Meskipun tidak dapat dijadikan acuan untuk menyimpulkan kondisi udara Kota Bandung secara keseluruhan, namun masih cukup baiknya kualitas udara pada wilayah-wilayah yang diperkirakan kondisinya paling buruk, memberikan harapan bahwa hal yang sama terjadi juga di seluruh wilayah Kota Bandung. Namun, metode pengukuran yang dilakukan adalah metode pengukuran sesaat yang dilakukan hanya 1 kali dalam setahun sehingga dari segi periode waktu, hasil pengukuran dianggap tidak dapat mewakili kualitas udara Kota Bandung seluruhnya.

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kualitas udara Kota Bandung dengan lebih baik, maka pada tahun 2016 diadakan alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS). Alat ini berupa stasiun pengukuran yang akan mengukur kualitas udara secara terus menerus selama 24 jam sepanjang tahun. Dengan alat ini, diharapkan dapat diketahui kondisi udara Kota Bandung dengan lebih baik. Akan tetapi, stasiun pemantauan udara yang ada baru tersedia sebanyak 4 unit dan ditempatkan pada wilayah yang mewakili kategori pemukiman, wilayah yang terpapar polusi transportasi, dan wilayah yang terpapar polusi industri. Untuk mendapatkan gambaran kondisi udara yang lebih baik, diharapkan stasiun pemantau udara ini dapat bertambah jumlahnya. Berdasarkan data kualitas udara hasil pemantauan pada 20 titik pantau yang ditempatkan di seluruh Kota Bandung terdapat 13 titik yang memenuhi target baku mutu udara ambien dari 9 titik.

2. Pelayanan Pengelolaan Sampah

Masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS). TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).

Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang, dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah pun didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan styrofoam dan anjuran membawa tumbler dan misting ke sekolah. Dan salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah sektor informal, seperti pemulung – tukang rongsok – bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang.

Kemudian masalah yang dihadapi pada tahun 2022 adalah TPPAS direncanakan akan berpindah ke TPPAS Legok Nangka yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan investor. Teknologi yang akan digunakan di TPPAS Legok Nangka adalah teknologi *Waste to Energy - Moving Grate Incineration* dan Kota Bandung direncanakan akan mengirimkan sampahnya sebesar 1.200 ton/hari. Penggunaan teknologi *Waste to Energy* secara thermal memerlukan biaya yang besar sehingga beban *tipping fee* akan meningkat hingga 6 sampai dengan 8 kali lipat dari besaran *tipping fee* saat ini. Lonjakan biaya *tipping fee* ini akan sangat mempengaruhi keuangan daerah.

Permasalahan pelayanan pengelolaan sampah lainnya adalah terkait implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Sampah. Berdasarkan perda tersebut dinyatakan bahwa pemerintah daerah kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Di dalam pengelolaan sampah tersebut, pemerintah daerah kota dapat menyelenggarakannya melalui:

a) pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
b) pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada kecamatan; dan/atau
c) bekerjasama dengan perorangan dan/atau badan usaha.

Di dalam pasal 32 dinyatakan bahwa apabila pemerintah daerah kota belum dapat membentuk UPT atau mendelegasikan kewenangan kepada kecamatan maka khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pada pasal 60 yang merupakan ketentuan peralihan dinyatakan bahwa terkait pengumpulan sampah, waktu yang ditetapkan untuk melakukan peralihan paling lama adalah selama 2 (dua) tahun dan untuk pengangkutan, paling lama adalah 3 (tiga) tahun.

Dari ketentuan peralihan yang ditetapkan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tanggung jawab pengumpulan sampah akan menjadi tanggung jawab DLHK. Konsekuensi dari implementasi perda tersebut adalah perlunya mempersiapkan sarana prasarana terkait peralihan tanggung jawab tersebut, meliputi kesiapan pembiayaan pelaksana teknis penyapuan dan pengangkutan, penyediaan armada pengangkutan sampah dan penyediaan sarana pusat daur ulang serta tempat pengumpulan sampah.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan baik secara teknis maupun non teknis;
2. Belum optimalnya *database* kependudukan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam pengelolaan data kependudukan.

Salah satu data pendukung permasalahan tersebut, dimana dari jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2017 sebanyak 2.412.458 jiwa, yang sudah memiliki KTP sebanyak 1.656.807 orang, yang sudah rekam KTP sebanyak 1.717.723 orang, dan yang belum rekam sebanyak 64.161 orang.

Secara lebih detail permasalahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat (keluarga) melaporkan kematian anggota keluarganya padahal data tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Terbatasnya SDM Aparatur Sipil Negara.
3. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai.
4. Koordinasi yang dilakukan dengan ***stakeholder*** terkait masih belum optimal.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pada urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja pada sektor kerja formal yang berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Meskipun angka pengangguran dan kemiskinan realtif meningkat setiap tahunnya, akan tetapi *outcome* dari program pemberdayaan masyarakat masih menunjukan hasil yang belum optimal, hal ini ditunjukan dari data sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan dari 30 kecamatan selama periode tahun 2015 – 2016 termasuk kategori sedang. Kecamatan Andir merupakan satu-satunya kecamatan yang berhasil meraih kategori tinggi pada tahun 2016.
2. Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan mulai ditargetkan pada tahun 2017 dan secara rata-rata dari 30 kecamatan diperoleh nilai sebesar 83,19%. Terdapat 14 kecamatan yang realisasi capaian kinerjanya berada di atas rata- rata, yaitu Kecamatan Buahbatu; Kecamatan Gedebage; Kecamatan Astanaanyar; Kecamatan Cibiru; Kecamatan Cibeunying Kaler; Kecamatan Panyileukan; Kecamatan. Cibeunying Kidul; Kecamatan Cinambo; Kecamatan Sukajadi; Kecamatan Antapani; Kecamatan Bojongloa Kaler; Kecamatan Bandung Kulon; Kecamatan Arcamanik; dan Kecamatan Rancasari. Realisasi capaian tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Buahbatu dengan nilai sebesar 100,00%, sedangkan yang terendah Kecamatan Regol sebesar 69,00%.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Kepadatan penduduk di Kota Bandung yang sudah tinggi.
2. Belum tersedianya data untuk mengetahui kondisi yang ideal antara luas wilayah dengan jumlah penduduk.
3. Disintegrasi data kependudukan yang memerlukan aplikasi khusus tapi multi fungsi.
4. *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Bandung yang masih di atas rata-rata nasional. (Perbandingan LPP pada tahun 2016, Kota Bandung = 0,37, Provinsi Jawa Barat = 1,54, dan Nasional = 1,36)

Meskipun Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung relatif kecil, rata-rata periode 2013-2017 mencapai 0,42%, akan tetapi jumlah penduduk Kota Bandung terus meningkat. Pertambahan penduduk dikarenakan faktor migrasi masuk ke Kota Bandung, ini yang menyebabkan kepadatan penduduk relatif lebih tinggi dari daerah lain bahkan paling tinggi di Jawa Barat. Menurut konsep perhitungan Indeks Kepadatan Penduduk (IKP), nilai indeks suatu kota kurang dari atau sama dengan 96 jiwa per hektar diberi nilai indeks 100, nilai 100 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kota tersebut merupakan kepadatan yang ideal.

i. Urusan Perhubungan

Permasalahan transportasi di Kota Bandung banyak berkaitan dengan masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi (pasar, pedagang kaki lima, pusat perbelanjaan, dan lain-lain), ruas jalan yang sempit, dan persimpangan. Titik kemacetan tersebut akan bertambah pada waktu puncak dan pada hari libur.

Isu dan permasalahan lainnya yaitu mengenai kenyamanan dan keamanan berlalu lintas, baik bagi penumpang yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Selain itu, transportasi juga menyebabkan permasalahan berupa polusi udara. Permasalahan juga disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, jalan tol, rel kereta api, terminal angkutan umum, bandara, stasiun KA, dan sebagainya.

1. Manajemen Lalu Lintas Jalan
    a) Pengaturan lalu lintas jalan: *Area Traffic Control System* (ATCS) perlu direvitalisasi untuk optimalisasi pengaturan lalu lintas.
    b) Belum ada penetapan lintas angkutan barang.
    c) Pengaturan parkir dan hambatan samping: masih cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan. Parking meter belum optimal pemanfaatannya. Belum tersedia fasilitas parkir *off street* yang memadai, berupa lahan parkir, bangunan parkir, *park and ride*.
    d) Manajemen kebutuhan transportasi: pola perjalanan masih memusat ke *Central Business District* (CBD) lama (Alun-Alun dan sekitarnya). Belum ada skema pengaturan dan pembatasan perjalanan.
    e) Penyediaan perlengkapan jalan: penyediaan rambu, marka, dan PJU belum 100%.
    f) Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan *non-motorized* belum tersedia dengan baik.
2. Pelayanan Angkutan Umum
    a) Jaringan trayek angkutan umum: peran moda angkutan umum relatif terbatas (sekitar 25%). Belum adanya pengaturan hirarki jaringan angkutan dengan baik. Sistem angkutan massal belum mampu berperan maksimal.
    b) Angkutan tidak dalam trayek: peningkatan efektivitas pengaturan angkutan berbasis *on-line*, taksi, ojeg, dan antar jemput.
    c) Tingkat pelayanan angkutan umum: biaya dan waktu penggunaan angkutan umum tidak dapat bersaing dengan moda lain (khususnya sepeda motor), kenyamanan dan keselamatan menggunakan angkutan umum masih rendah.

d) Integrasi antar moda: penyediaan fasilitas alih moda di simpul masih terbatas serta biaya moda pra/purna angkutan sangat mahal. Selain itu juga belum didukung oleh sistem tiketing yang terintegrasi (*integrated-ticketing*).

Adapun 12 aspek penyebab kemacetan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Parkir pada badan jalan;
2. Pasar tumpah;
3. PKL;
4. Jalur perlintasan sebidang;
5. Genangan/banjir;
6. Kualitas/kondisi infrastruktur jalan;
7. Volume penggunaan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan penambahan aksesibilitas maupun dimensi jalan;
8. Terpusatnya kegiatan pada pusat kota;
9. Keluar masuk kendaraan pada fasilitas pendidikan;
10. Disiplin pengemudi angkutan umum;
11. Marka jalan dan rambu lalu lintas;
12. Kesadaran masyarakat.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pada urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi, dari 289 aplikasi baru 9 aplikasi yang sudah terintegrasi dengan server dari Diskominfo, sehingga masih menjadi tantangan ke depan untuk dapat mengintegrasikan semua aplikasi yang ada untuk menuju *smart city* level "*smart*".
2. Kurangnya keterlibatan/peran perguruan tinggi dan relawan TIK. Sampai saat ini terdapat 16 orang yang terlibat baik dari perguruan tinggi maupun relawan TIK. Idealnya pada satu kecamatan terdapat satu relawan TIK.
3. Level kematangan *smart city* di Kota Bandung berdasarkan hasil survei Tim RKCI bersama ITB pada tahun 2017 berada pada kategori *integrative* dengan nilai 60,80%. Capaian ini perlu ditingkatkan ke level *smart.* Pemanfaatan ICT (*Information and Communication Technology*) atau yang lebih dikenal dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan oleh manfaat TIK yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas suatu aktivitas kegiatan. Melalui jaringan internet basis data, aplikasi bahkan sistem informasi terhubung satu sama lainnya membentuk jaringan yang jauh lebih kompleks. *E-Gov, E-Health,* dan *E-Learning* merupakan beberapa contoh sistem informasi layanan publik yang dibangun dengan basis internet.

   Namun demikian pemanfaatan yang optimal dari TIK belum sepenuhnya dapat tercapai. Salah satu penyebabnya adalah basis data dan aplikasi dibangun menggunakan platform sistem informasi dan data yang berbeda- beda. Akibatnya suatu basis data atau sistem informasi belum tentu dapat saling berhubungan untuk melayani suatu kegiatan yang sifatnya terpadu.

k. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

Permasalahan pada urusan KUMKM di Kota Bandung sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan. Data UMKM yang mendapat akses sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1,03% dari data 147.073 UMKM binaan, dan data koperasi yang dapat mengakses pembiayaan sampai dengan tahun 2017 adalah 4,04%.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat dari lembaga sertifikasi profesi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 14,64% dari jumlah pengelola koperasi.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menjadi anggota koperasi. Jumlah penduduk yang telah berkoperasi sampai dengan tahun 2017 sebanyak 30,77% dari jumlah penduduk dewasa Kota Bandung.
4. Rendahnya daya saing produk menghadapi perdagangan bebas. Total UMKM Binaan yang telah difasilitasi (halal, HAKI, kemasan, dan lain sebagainya) sampai dengan tahun 2017 sebanyak 5,84% dari total sebanyak 5.792 UMKM binaan.
5. Terbatasnya kemampuan KUMKM dalam pemasaran produk. Data UMKM yang telah terfasilitasi sebanyak 4,25% dari 5.792 UMKM binaan. Data koperasi yang telah terfasilitasi promosi dan pemasaran sampai dengan tahun 2017 sebanyak 7% dari data koperasi aktif.

l. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan penanaman modal di Kota Bandung, diantaranya:

1. Kualitas pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Data IKM pada tahun 2017 sebesar 79,38%.
2. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal.
3. Ketersediaan *database* urusan penanaman modal belum optimal. Investor yang terdata dari tahun 2013-2017 tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Diperlukan perbaikan pengelolaan dan penyusunan database. Saat ini sedang disusun *database* berbasis kewilayahan.

m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan. Data menunjukkan bahwa dari seluruh organisasi pemuda se-Kota Bandung sejumlah 834 organisasi, maka pada tahun 2018 baru 198 organisasi yang mendapatkan pembinaan. Ini menjadi kewajiban yang harus dipenuhi ke depannya sehingga semua organisasi pemuda mendapatkan pembinaan yang pada akhirnya bertujuan membentuk organisasi pemuda aktif positif.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan.
3. Data memperlihatkan bahwa dari 17 SOR/GOR yang berada di bawah kepengelolaan Dispora, tidak semuanya memenuhi standar.

n. Urusan Statistik

Permasalahan pada urusan statistik di Kota Bandung, diantaranya adalah belum optimalnya ketersediaan, akurasi, dan validitas data. Dari 63 perangkat daerah se-Kota Bandung, baru 10% yang mempunyai sistem informasi terstruktur yang datanya dapat

dipertanggungjawabkan, dampaknya sinkronisasi data antar perangkat daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Jenis data yang dibutuhkan sebagai input dalam penyusunan dokumen perencanaan seringkali tidak dimiliki oleh perangkat daerah.

o. Urusan Persandian

Permasalahan pada urusan persandian di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Belum terdapat sandiman yang berkualitas.
2. Belum optimalnya keamanan sistem informasi. Dari 289 aplikasi baru yang diuji, terdapat 27 aplikasi yang memiliki keamanan sistem informasi.

p. Urusan Kebudayaan

Permasalahan pada urusan kebudayaan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Pemajuan kebudayaan di Kota Bandung belum dilakukan secara terpadu; pembangunan belum mengarah pada proses pelestarian yang terpadu, yakni pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
2. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya. Pada tahun 2017, terdapat 105 lingkung seni yang memenuhi standar usaha sanggar/lingkung seni di Kota Bandung. Namun, upaya pemanfaatan budaya selama ini baru sebatas pelindungan saja belum dikembangkan lebih luas.

q. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan perpustakaan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah.
2. Hal ini dapat terlihat bahwa data jumlah pemustaka per tahun meskipun mengalami kenaikan tiap tahunnya belum dapat dikatakan optimal. Pada tahun 2017, jumlah pemustaka adalah sebanyak 90.079 pemustaka. Layanan mobil keliling perpustakaan, Taman Baca Masyarakat (TBM), maupun perbaikan sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan baik secara kualitas dan kuantitas untuk dapat menjangkau pemustaka yang lebih banyak lagi. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung memiliki 5 unit mobil perpustakaan keliling. Idealnya satu kecamatan memiliki kendaraan perpustakaan keliling, sehingga masih dibutuhkan 25 kendaraan untuk dapat meningkatkan jumlah pemustaka.
3. Pengelola perpustakaan, baik umum, kelurahan, kecamatan, dan sekolah serta taman bacaan masyarakat masih banyak yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Saat ini di Kota Bandung, jumlah pustakawan yang sudah memenuhi kualifikasi adalah 2 orang.

r. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Belum seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar.
2. Masih kurangnya arsiparis yang melakukan pengelolaan kearsipan.
3. Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan baik perangkat daerah maupun tingkat kota.
4. Belum tersedianya depo/tempat penyimpanan arsip yang memadai.

1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya lahan perikanan.
2. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan.
3. Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan.
4. Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan.
5. Belum optimalnya sarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.

b. Urusan Pariwisata

Permasalahan pada urusan pariwisata di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Diferensiasi paket wisata yang memenuhi aspek 3A (*Amenity, Attraction,* dan *Accessibility*) masih terbatas.
2. Kurangnya promosi pariwisata.
3. Masih belum dirasakan manfaat Bandung sebagai Kota Pariwisata di kalangan masyarakat level *grassroot*.

c. Urusan Pertanian

Permasalahan pada urusan pertanian di Kota Bandung, diantaranya adalah:

1. Produk pertanian yang tercemar (jumlah maksimum pangan segar hasil pertanian dan peternakan yang tercemar).
2. Pangan yang bebas dari berbagai cemaran, baik itu cemaran secara fisik, zat kimia berbahaya, cemaran mikroba dan cemaran residu antibiotik, residu hormone, residu pestisida dan juga logam berbahaya (logam berat) menjadi prasyarat yang harus dipenuhi sehingga pangan dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan setiap tahunnya dapat diketahui bahwa jumlah kasus produk pangan segar hasil pertanian dan peternakan yang tercemar mampu ditekan sehingga senantiasa berada di bawah target yang ditetapkan, seperti pada tahun 2016 hanya terjadi 13 kasus dari 40 kasus yang ditargetkan dan pada tahun 2015 terjadi 20 kasus dari 50 kasus yang ditargetkan.
3. Kasus penyakit *zoonosa* di Kota Bandung.
   Penyakit *zoonosa* merupakan penyakit atau infeksi pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang tergolong dalam *zoonosa*, misalnya: antraks, rabies, *brucellosis*, *avian influenza*, dan lain-lain. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga resiko masuknya penyakit *zoonosa* dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 jumlah kasus penyakit *zoonosa* stagnan pada posisi 1 kasus.

d. Urusan Perdagangan

Berdasarkan data BPS Kota Bandung (2018), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, nilai ekspor perdagangan Kota Bandung selama kurun

waktu 2013-2017 tidak terlihat mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai ekspor Kota Bandung pada tahun 2013 sebesar 601,5, tahun 2014 naik sebesar 603, kemudian naik kembali sebesar 635 pada tahun 2015. Pada tahun 2016 nilai ekspor Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 609, terus menurun sampai tahun 2017 sebesar 465. Penurunan nilai ekspor dikarenakan adanya penurunan permintaan buyer. Bahan baku yang terbatas sehingga dilakukan impor bahan baku yang menyebabkan harga jual lebih tinggi. Kapasitas produksi terbatas dengan kurangnya penunjang mesin produksi dan kemampuan SDM dengan berbagai permintaan desain produk dari pihak buyer, naiknya upah buruh, listrik, dan bahan bakar. Faktor eksternal yang teridentifikasi antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun.

e. Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2013-2017 lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan pola peranan yang menurun. Makin mengecilnya kontribusi industri pengolahan pada perekonomian Kota Bandung terutama akibat semakin tingginya tingkat persaingan secara nasional ataupun global yang mempengaruhi penurunan kinerja industri pengolahan lokal Kota Bandung, terutama di sektor padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil, selain itu, adanya tekanan eksternal, seperti adanya kesepakatan perdagangan bebas *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) juga turut menekan kinerja industri pengolahan Kota Bandung. Akar permasalahan pada urusan perindustrian di Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:

1. Tingginya harga bahan baku produksi usaha industri.
2. Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM).
3. Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM).
4. Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk.

f. Urusan Transmigrasi

Tingkat penempatan transmigrasi di Kota Bandung masih sangat rendah, permasalahannya diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun 2018 sebanyak 3 kepala keluarga atau 12 orang.

1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

a. Urusan Perencanaan

Permasalahan pada urusan perencanaan, antara lain:

1. Kurangnya SDM fungsional perencana serta perlunya optimalisasi peran fungsional perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Kurangnya ketersediaan dokumen perencanaan sektoral.
3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
4. Duplikasi program/kegiatan pada perangkat daerah.
5. Belum terintegrasinya perencanaan sektoral.

b. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan terkait kinerja tingkat penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Realisasi pajak daerah tahun 2017 sebesar 90,62%, belum dapat memenuhi capaian yang ditargetkan. Adapun mata pajak yang tidak tercapai adalah pajak hotel dengan persentase penerimaan sebesar 98,46%; pajak reklame dengan realisasi penerimaan sebesar 5,34%; pajak air bawah tanah dengan realisasi sebesar 91,11%; serta PBB target perubahan sebesar 93,90%.

Selain permasalahan PAD, pengelolaan keuangan terkait dengan Opini pemerintah Kota Bandung dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 yang diberikan oleh BPK RI pada tahun 2017 mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian). Hal ini menunjukkkan tidak tercapainya target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2017. Tidak tercapainya target WTP terdapat pada tatanan pengelolaan asset Pemerintah Kota Bandung yang dirasakan masih belum optimal.

c. Urusan Kepegawaian

Permasalahan pada urusan kepegawaian, antara lain:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan.
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain.
4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum.
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD.
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu.
7. Masih adanya beberapa data pegawai yang belum akurat.

d. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pada urusan pendidikan dan pelatihan, antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi ASN Kota Bandung dibandingkan dengan tuntutan kinerja yang semakin tinggi.
2. Belum terpenuhinya target jam diklat yang harus didapatkan oleh ASN.
3. Belum tersusunnya pola diklat yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Bandung.

e. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan, antara lain:

1. Masih minimnya *research based policy.*
2. Belum terintegrasinya data pembangunan ke dalam data center pemerintah.
3. Kurangnya jumlah SDM Peneliti.
4. Alur kegiatan kelitbangan belum sepenuhnya menempatkan lembaga litbang sebagai pintu masuk dan pintu keluar kajian.

f. Fungsi Penunjang Lainnya

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola pemerintahan di Kota Bandung, diantaranya, mencakup: 1) fungsi pengawasan dan 2) fungsi pendukung/Sekretariat Daerah.

1. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat dengan permasalahan dalam penyelenggaraan pengawasan, diantaranya:
   a) Perlunya peningkatan kemampuan teknis dan profesionalisme para auditor di lingkungan inspektorat daerah.
   b) Perlunya pemantapan status dan kedudukan organisasi fungsi pengawasan Inspektorat yang mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan seluruh kegiatan dan program pemerintah daerah.
   c) Belum adanya pedoman dalam penyusunan perencanaan pekerjaan audit yang efektif, baik untuk perencanaan penugasan audit, program kerja pengawasan tahunan, maupun perencanaan audit jangka panjang yang mengacu pada pola rencana strategis dan rencana kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah.
   d) Perlunya penyempurnaan kebijakan, sistem, prosedur, dan pola pendekatan audit dan fungsi pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah saat ini dan mendatang untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berhasil.
   e) Perlunya peningkatan hubungan dan koordinasi pekerjaan audit dan fungsi pengawasan dengan auditor eksternal (misal: BPK) dan perguruan tinggi terutama berkaitan dengan peran Inspektorat Daerah untuk mereviu laporan keuangan daerah dan penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, serta untuk meningkatkan pengetahuan berbagai fungsi yang ada di pemerintahan daerah.
   f) Peningkatan komunikasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan para auditor di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah.
2. Berdasarkan survey kepuasan kualitas pelayanan publik di Kota Bandung pada 63 perangkat daerah tahun 2017, sebanyak 61 perangkat daerah yang memperoleh capaian IKM di atas 75,00. Akan tetapi, kualitas pelayanan publik tetap menjadi orientasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung. Selain belum seluruh perangkat daerah mencapai kinerja yang baik, standar pelayanan di Kota Bandung perlu ditingkatkan lebih tinggi dan standar survei kepuasan masyarakat yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait standar pelayanan publik di Kota Bandung perlu dilakukan reviu dalam rangka perbaikan berkelanjutan, mengingat standar yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI masih berorientasi pada pemenuhan atau dimensi *tangible*. Permasalahan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah ketidaktepatan mekanisme, waktu, dan biaya layanan. Hal ini memerlukan perbaikan secara berkesinambungan.
3. Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung diantaranya melalui capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai laporan penyelenggaraan pemerintah darah (LPPD), dengan uraian sebagai berikut:
   a) Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung pada tahun 2017 adalah 80,31 atau kategori "A", capaian tersebut sudah sesuai dengan target RPJMD periode sebelumnya. Akan tetapi capaian tersebut cenderung stagnan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 80,22 pada tahun 2015 dan 80,61 pada tahun 2016. Capaian tersebut tidak terlihat peningkatan secara

signifikan. Berdasarkan komponen akuntabilitas kinerja yang harus diperbaiki antara lain: komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.

b) Nilai LPPD Kota Bandung pada tahun 2017 adalah sebesar 3,3040 dengan kategori "Sangat Tinggi", capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,0913 atau sebesar 106,88%. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2016. Namun dengan capaian tersebut, perangkat daerah masih harus terus meningkatkan nilai LPPD secara optimal.

2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Bandung.
2. Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bandung.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kota Bandung yang antara lain terdiri atas RPJPD dan RTRW Kota Bandung.
5. KLHS RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

2.1 Pertimbangan Penentuan Isu Strategis

Berbagai unsur yang menjadi pertimbangan, seperti yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

a. Penelaahan terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) *Policy Paper* mengenai

kesiapan Indonesia menghadapi AEC, dan h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh kepala negara/pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan *The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together* yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian *ASEAN Community 2025* menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. *ASEAN Community 2025* merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi *ASEAN Economic Community* (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan *ASEAN Socio-Culture Community (ASCC)*. Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Sebab di sisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha.

b. Penelaahan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan.

Indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di kota/kabupaten. Pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:

1. Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah).
2. Analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan.
3. Analisis kontribusi pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengkajian pembangunan berkelanjutan menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan yang disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. alternatif proyeksi ini diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya sebanyak 319 indikator dan pembagian indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat sebanyak 308 indikator
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 235 indikator
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota sebanyak 222 indikator

Kota Bandung telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori, diantaranya, diantaranya:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS.
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB.
3. Indikator TPB tidak ada target/TT.
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 45 indikator dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Kota. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun yaitu sebanyak 10 indikator telah dilaksanakan dan sudah mencapai target. Sedangkan pencapaian terbesar selanjutnya adalah tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan sebanyak 6 indikator.

c. Penelaahan terhadap Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan Menengah–Tinggi dapat diwujudkan dengan:
   a) Transformasi struktural berjalan
   b) Produktifitas tenaga kerja meningkat
   c) Iklim investasi kondusif
   d) GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
   a) Kualitas hidup meningkat
   b) Perilaku disiplin dan beradab

c) SDM berkualitas dan berdaya saing
d) Indeks kebahagiaan meningkat

3. Adil dapat diwujudkan dengan:
   a) Ketimpangan menurun
   b) Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
   a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*low carbon development*)
   b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

1. Pembangunan Manusia
   a) Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
   b) SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan Ekonomi
   a) Pangan dan pertanian
   b) Energi, mineral, dan pertambangan
   c) Kelautan dan kemaritiman
   d) Pariwisata
   e) Ekonomi kreatif dan digital
   f) Industri manufaktur
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan
5. Pembangunan Kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
   a) Pelayanan dasar
   b) SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan Ekonomi:
   a) Pangan
   b) Energi
   c) Pariwisata, ekonomi kreatif dan digital
   d) Industri manufaktur kelautan dan kemaritiman
3. Pembangunan Kewilayahan:
   a) Sentra pertumbuhan
   b) Komoditas unggulan daerah pertumbuhan perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
   a) Transportasi
   b) Telekomunikasi
   c) Sumber daya air perumahan dan pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
   a) Hukum dan regulasi
   b) Hankam
   c) Politik

d. Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2028-2023

Penelaahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2028-2023 menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara "batin" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategik dan untuk itu perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi. Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
    a) Kelas pintar untuk semua
    b) 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
    a) Layat rawat
    b) Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
    c) Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
    a) Ekonomi digital
    b) Inkubator bisnis
    c) *Creative/start-up hub*
    d) Gudang tani dan ikan juara
    e) Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata, meliputi:
    a) 1 Kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
    b) Infrastruktur pariwisata
    c) Pengembangam SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
    a) Modernisasi dana umat
    b) Tunjangan santri dan ulama
    c) Modernisasi manajemen pesantren
    d) 1 pesantren 1 produk (*trenmarket*)
6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
    a) 100% jalan mulus di Jawa Barat
    b) Pembangunan dan perbaikan jalan kereta
7. Gerakan bangun desa (gerbang desa), meliputi:
    a) 1 Desa 1 Bumdes (OVOP)
    b) Tunjangan desa

c) Irigasi pertanian desa
d) Internet masuk desa

8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
   a) Rumah gratis
   b) Transportasi gratis
   c) Layanan kesehatan gratis
   d) Pendidikan gratis
   e) Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
   a) Provinsi pintar (*E-planning budgeting, E-money*, E-remunerasi kinerja, dan lain sebagainya)
   b) Kota/desa pintar
   c) Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan. Isu strategis pada RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

e. Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Penelaahan dilakukan terhadap kesesuaian rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta rencana indikasi program pemanfaatan ruang. Dengan menelaah rencana tata ruang daerah, dapat diidentifikasi secara geografis arah pengembangan wilayah per 5 (lima) tahun dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1) Rencana Struktur Ruang

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

a) perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional;
b) pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
c) peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan, dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.

Untuk mendukung struktur ruang, rencana hirarki pusat pelayanan wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 3 hirarki, yaitu:

a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
b) Subpusat Pelayanan Kota (SPK) yang melayani Subwilayah Kota (SWK); dan
c) Pusat Lingkungan (PL).

Sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031, arahan struktur ruang dibagi menjadi 8 (delapan) Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh 2 (dua) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 8 (delapan) Subpusat Pelayanan Kota (SPK). Dalam RTRW Kota Bandung, PPK yang direncanakan terdiri atas PPK Alun-alun dan PPK Gedebage. PPK Alun-alun berada di bagian barat yang melayani SWK Cibeunying, Karees, Bojonegara, dan Tegalega, sedangkan PPK Gedebage bagian timur melayani SWK Arcamanik, Derwati, Kordon, dan Ujungberung.

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi, tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya.

Untuk pengembangan SPK di Kota Bandung adalah sebagai berikut:
a) Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Andir;
b) Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, dan Cibeunying Kaler;
c) Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, dan Astana Anyar;
d) Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, dan Batununggal;
e) Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, dan Antapani;
f) Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, dan Panyileukan;
g) Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, dan Buahbatu; serta
h) Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, dan Rancasari.

SPK minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Kemudian pusat lingkungan terdiri atas pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Secara lengkap, rencana struktur ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 4.1
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung

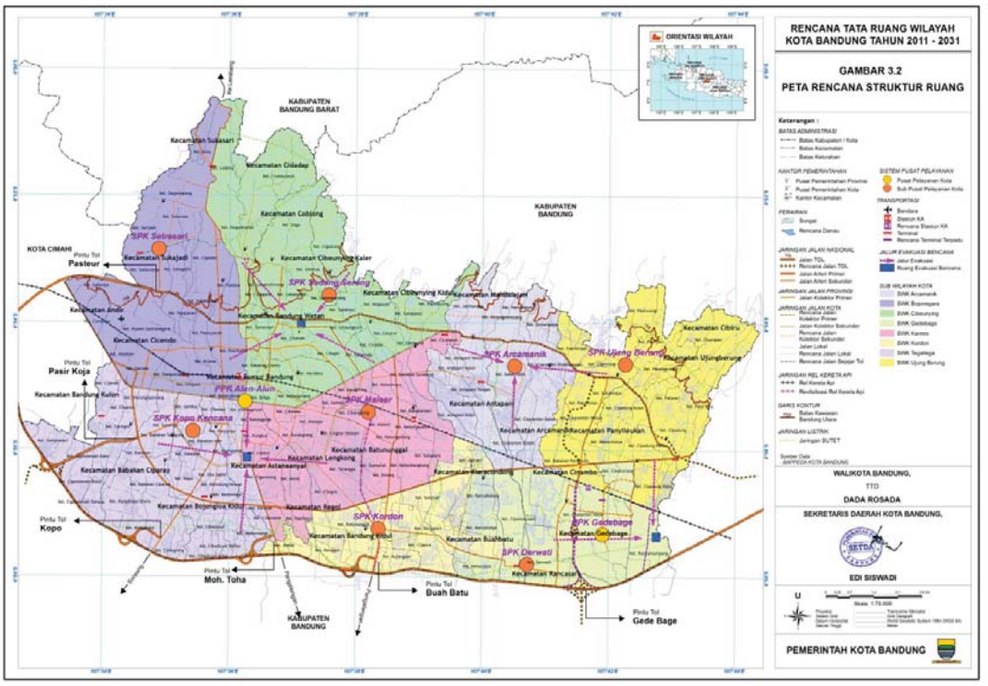

Sumber: *Pemerintah Kota Bandung*

2) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri atas pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pola ruang dalam RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terdiri atas:

a) perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;
b) optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Bandung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung lainnya. Dalam rangka perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung di Kota Bandung, rencana yang dilakukan:

a) menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Bandung Utara;
b) mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
c) mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
d) mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
e) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain di dalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
f) melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
g) meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, rencana yang dilakukan meliputi:

a) mengembangkan pola ruang kota yang kompak, intensif dan hijau, serta berorientasi pada pola jaringan transportasi;
b) mendorong dan memprioritaskan pengembangan ke Bandung bagian timur yang terdiri atas SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung, SWK Kordon, dan SWK Gedebage;
c) mengendalikan bagian barat kota yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi, yang terdiri atas SWK Bojonagara, SWK Cibeunying, SWK Tegallega, dan SWK Karees;
d) membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya;
e) mempertahankan fungsi dan menata RTNH; dan
f) menata, mengendalikan, dan mewajibkan penyediaan lahan dan fasilitas parkir yang memadai bagi kegiatan pada kawasan peruntukan lainnya.

Secara lengkap, rencana pola ruang Kota Bandung diuraikan dalam gambar berikut.

Gambar 4.2
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung

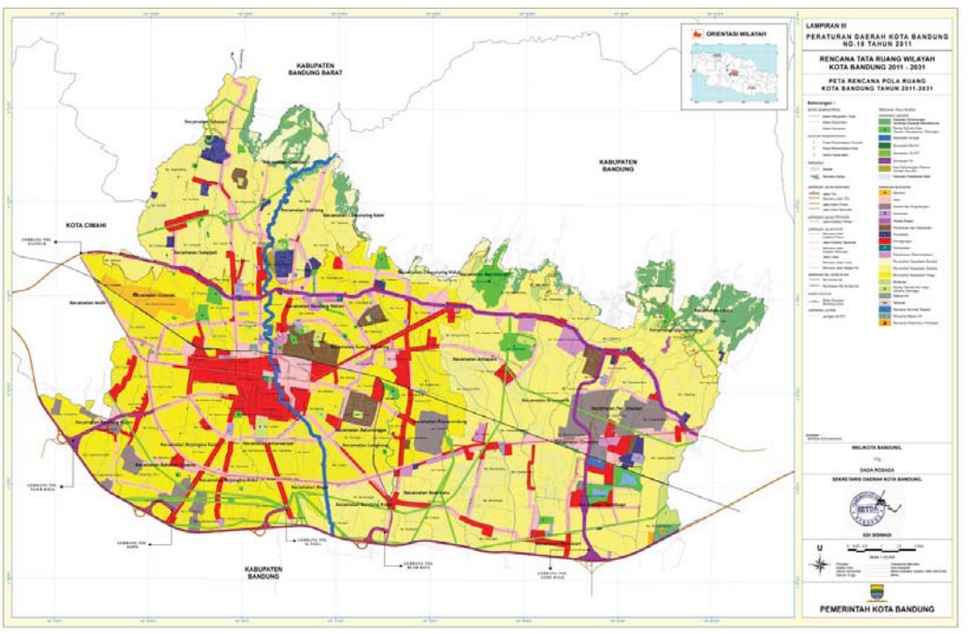

Sumber: *Pemerintah Kota Bandung*

f. Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Periode IV)

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan dalam RPJPD.

RPJPD Kota Bandung 2005-2025 telah mengamanatkan target capaian pembangunan daerah Kota Bandung setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Berikut hasil telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018-2023.

Tabel 4.1
Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025
Periode Perencanaan Tahun 2018-2023

Misi 1 RPJPD Kota Bandung *"Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius"*

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023
1	Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IPM	poin	77,42	82,66	82,54
		Jumlah penduduk (maksimal)	jiwa	Pertumbuhan penduduk 1,59%	Pertumbuhan penduduk < 0,50%	3.068.869
		Angka fertilitas	-	2,06	1,80	1,8
2	Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, dan kompetitif	Indeks pendidikan	poin	89,06	94,04	93,92
		Rata-rata lama sekolah	tahun	10,34	12,38	12,33 Tahun
		Sertifikasi guru	%	< 25,00	100,00	100%
		Lembaga pendidikan di Kota Bandung yang telah menerapkan SPM	%	25,00	100,00	100%
		Angka melek huruf	%	99,26	99,80	99,78 %
3	Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Indeks kesehatan	poin	79,27	82,16	81,87
		Angka harapan hidup	tahun	72,56	75,00	74,45
		Fasilitas kesehatan yang telah memenuhi SPM	%	70,00	100,00	90,00
		Angka kematian bayi	/1.000 kelahiran hidup	35,66	26,00	29,00
		Jumlah kematian ibu melahirkan	orang/ tahun	14	10	11
		Pemaparan zoonosis di wilayah Kota Bandung	% di wilayah Kota	Terjadinya kasus positif flu burung di 3 kelurahan	< 5,00	< 9,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023
4	Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia	Tingkat pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	-	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap norma-norma agama	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan
		Tingkat kerukunan umat beragama, meliputi kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah	-	Belum optimalnya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terpeliharanya sikap toleransi dan kerukunan umat beragama	Terwujudnya sikap toleransi dan Kerukunan umat beragama
5	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Tingkat pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	-	Masih rendahnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan	Terwujudnya pemahaman peran kesetaraan gender dalam proses pembangunan
		Tingkat hak-hak perlindungan perempuan dan anak	-	Masih rendahnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terlindunginya hak-hak perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya hak-hak perlindungan perempuan dan anak

Misi 2 RPJPD Kota Bandung "*Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing*"

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, berdaya saing serta sehat dan berkeadilan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	7,53	> 11,00	> 11,00 %
		Tingkat pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	%	13,34 (kategori sedang)	> 17,00 (kategori rendah)	≥ 17,00 % (kategori sedang)
		PDRB riil/kapita	Rp/thn	9.410.386	≥ 25.000.000	≥ 20.000.000
		Indeks daya beli	poin	63,93	71,77	70,66
		Tingkat inflasi umum	%	19,56	< 10,00	< 10,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Tingkat pengangguran terbuka	%	16,25	≤ 10,00	12,00
		Kesempatan kerja	%	84,32	≥ 95,00	≥ 92,00
		Nilai investasi berskala nasional	Rp	3.658.612.953.405	> 5.487.919.430.107 (meningkat > 50% dari 2005)	5,122,058,134,767 (meningkat 40 % dari 2005)
2	Terwujudnya pariwisata yang berdaya saing	Jumlah wisatawan	orang	Wisnus : 1.928.850 Wisman : 91.350	Wisnus : ≥ 2.893.275 Wisman: ≥ 137.025)	Wisnus : ≥ 2,796,833 Wisman: ≥ 132,458 (meningkat 45% dari 2005)
3	Terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang menguntungkan dengan wilayah pemerintah daerah lainnya	Sinergitas kegiatan ekonomi antar wilayah	-	Kerjasama antar daerah belum terealisir secara optimal	Terwujudnya Kota Bandung sebagai pusat kegiatan pemasaran ekonomi di Priangan Timur	Meningkatnya kegiatan ekonomi antar daerah di Priangan Timur

Misi 3 RPJPD Kota Bandung *"Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif, Berkesadaran Tinggi serta Berhati Nurani"*

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya peningkatan mutu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung	Akses informasi tentang pembangunan	-	Terbatasnya aksesibilitas warga terhadap informasi pembangunan; belum tersedianya mekanisme peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi; belum tersedianya modal sosial	Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan	Meningkatnya peran serta aktif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	-	Rendahnya tingkat kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya rasa kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap lingkungan sosial maupun fisik
2	Terwujudnya multikulturalisme dalam lingkungan Sunda yang inklusif	Pengembangan pusat – pusat kebudayaan	-	Terbatasnya pusat-pusat kebudayaan	Terwujudnya pusat-pusat kebudayaan sebagai sarana pelestarian pembangunan budaya Sunda	Meningkatnya peran pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian multikultur dalam Budaya Sunda
		Sinergitas pelestarian budaya lokal Sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	-	Kurangnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terwujudnya sinergitas pelestarian budaya lokal sunda antara pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat	Terpeliharanya hubungan pemerintah, pelaku budaya dan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian peninggalan budaya

Misi 4 RPJPD Kota Bandung "*Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota*"

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Lokasi sampel yang telah memenuhi BM kualitas udara	%	Kandungan SO2 dan NOx di beberapa lokasi sampling melebihi baku mutu, sedangkan kandungan HC di semua lokasi sampling melebihi baku mutu	75,00	75% lokasi/sample telah memenuhi BM

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
2	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal, dan air tanah dalam)	Sungai dan anak sungai di Kota Bandung yang telah memenuhi baku mutu untuk parameter BOD dan COD	%	Kandungan BOD dan COD di seluruh sungai di Kota Bandung melebihi baku mutu	20,00	20 % sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu
		Kapasitas produksi air bersih dari sumber air baku	liter/detik	± 3.750	± 6.500	Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 6.120 liter/ detik
		Ruang terbuka hijau (RTH) kota yang efektif menunjang fungsi hidroorologi (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi, dan RTH lainnya)	%	± 5,72% (1.084,41 ha)	≥ 30,00% (20% RTH publik dan 10% RTH privat)	Ruang terbuka hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 29% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya)
3	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Reduksi dan Peningkatan pemanfaatan kembali limbah padat	-	80% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 5% dengan 3R dan 75% diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA) (jumlah timbulan sampah 6.860 m^3/hari)	90% sampah dapat dikelola, terdiri atas: 40% dengan 3R dan 50% diangkut ke TPA	90% sampah dapat dikelola (35% *reuse*, *reduce* dan *recycle*, 55% ke pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35 % , dan *landfill* 20 %).

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
4	Tersedianya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Terbentuk struktur ruang kota	-	Terdapat 1 pusat primer (Alun-alun) dan 5 pusat wilayah pengembangan (WP)	Terbentuknya 2 pusat primer (Alun-alun dan Gedebage) dan 6 wilayah pengembangan	Minimum 80% Kawasan Pusat Primer Gedebage terbangun dan semua Pusat WP berfungsi efektif
		Pengendalian pemanfaatan ruang	-	45% bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	Tertibnya pemanfataan ruang dan penggunaan bangunan	Terkendalinya pemanfataan ruang dan penggunaan bangunan
5	Tersedianya sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau, dan ramah lingkungan	Pengembangan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	-	Luas jalan 2,32% dari luas wilayah kota, dan 72,10% berkondisi baik	Luas jalan minimum 5% dari luas wilayah kota	Luas jalan min 5 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik
		Indeks aksesibilitas	km/km^2 area	5,575 (indeks mobilitas 0,435 km/1.000 penduduk)	≥ 10	Indeks aksesibilitas minimum 10 km/km^2 area
		Terwujudnya prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota	%	Pelayanan angkutan umum massal belum optimal	100,00	75% dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi kota
		Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan (dari 32 aspek)	aspek	Teridentifikasinya aspek-aspek penyebab kemacetan	32	Teratasinya aspek-aspek penyebab kemacetan sebanyak 10 aspek*
6	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Penduduk kota yang dilayani air bersih dengan pengaliran kontinu 24 jam	%	53,00	90,00 (standar pengaliran air 120 liter/orang/hari)	90% penduduk dilayani air bersih dengan standar 120 liter/orang / hari dengan pengaliran air 24 jam
		Berfungsinya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	%	Belum tersedianya TPA sampah yang berkelanjutan dengan sistem pengolahan yang ekonomis	100,00	Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Penataan sistem drainase kota yang tertata	-	Sistem drainase telah berubah karena perubahan guna lahan, penyempitan saluran, perubahan alur, dan banyaknya bangunan di atas sungai	Tertatanya sistem drainase kota yang baik dari hulu sampai hilir	Seluruh jaringan drainase kota terpadu
		Kawasan kota yang terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL	%	Belum terintegrasinya sistem air limbah kota dengan IPAL yang memadai	100,00 (IPAL terdesentralisasi	100% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL
7	Terwujudnya mitigasi bencana yang handal	Peningkatan pengelolaan bencana	-	Fungsi organisasi yang menangani kebencanaan belum berjalan secara optimal	Terkendalinya bencana di Kota Bandung	Tertanggulanginya bencana secara dini dan komperhensif

Misi 5 RPJPD Kota Bandung "*Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan*"

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan yang aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel, dan berdasarkan data base	Tingkat kualitas aparatur perencana dan pengelola data	-	Perencanaan yang ada belum sepenuhnya aspiratif, antisipatif, aplikatif, akuntabel dan berbasis data yang akurat; belum tersedia database secara optimal yang dapat mengakses dan diakses oleh instansi terkait	Terwujudnya perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat	Terwujudnya Perencanaan sesuai dengan aspirasi masyarakat, bersifat: antisipatif, aplikatif, akuntabel berdasarkan basis data yang akurat.
2	Terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar hukum dan HAM	Tingkat kualitas produk hukum yang produktif dan implementatif	-	Peraturan yang ada belum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	Produk hukum daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah	Semakin mantapnya kualitas produk hukum yang sinergi dengan kebutuhan masyarakat serta peraturan yang berlaku.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
3	Tersedianya prasarana dan sarana aparatur pemerintah kota yang berkualitas	Menginvertarisir secara sistematis terhadap sarana dan prasarana yang ada	-	Belum optimalnya kuantitas, kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana kerja aparatur pemerintah kota.	Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.
4	Tersedianya aparatur yang profesional	Terwujudnya pelayanan publik yang prima.	-	Baru 1 SKPD yang bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2000.	Seluruh SKPD bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A.	Meningkatnya jumlah SKPD bersertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2001, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat = A.
5	Terwujudnya organisasi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kinerja aparatur	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual.	-	Organisasi dan Pengorganisasian belum mencerminkan tuntutan reformasi birokasi.	Terwujudnya *Good Government* dan *Clean Governance*.	Organisasi pemerintah kota sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6	Terwujudnya kemampuan teknis dan administratif aparatur pengawasan yang profesional	Organisasi pemerintah kota sesuai dengan urusan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan	-	Pola pengawasan yang ada belum optimal.	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur.	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
7	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat	-	Rendahnya tingkat pelanggaran teknis dan administratif aparatur	Tersosialisasinya pendidikan politik terhadap seluruh masyarakat secara sistematis.	Terwujudnya masyarakat yang demokratis.
8	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis	Melakukan pendidikan politik bagi semua lapisan masyarakat	-	Perilaku masyarakat dalam berpolitik masih banyak melanggar nilai-nilai demokrasi dan etika politik.	Meningkatnya ketertiban dan keamanan.	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.
9	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban serta terciptanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan stabilitas keamanan daerah	Menjadikan ketertiban dan keamanan kebutuhan bersama yang harus ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat	-	Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan belum memadai.	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.	Terwujudnya stabilitas keamanan daerah.

Misi 6 RPJPD Kota Bandung "*Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (Melalui Pembiayaan Pembangunan yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat)*"

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
1	Terwujudnya anggaran pemerintah yang optimal	Meningkatkan pendapatan Daerah	Persen	Rata-rata peningkatan pendapatan 10%	Rata-rata peningkatan pendapatan 20%	Rata-rata peningkatan pendapatan 19%
		Menguatkan sinergitas APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota (Fiskal antar pemerintahan)	-	APBN, APBD Prov & APBD Kota tidak duplikatif	APBN, APBD Prov dan APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya.	APBN, APBD Prov & APBD Kota terintegrasi dan sinergi sepenuhnya.

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2005)	Target 20 Tahun (2025)	Target Tahap IV (Tahun 2019-2023)
		Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional	-	Alternatif instrumen pembiayaan *non-konvensional* diperkenalkan	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional mulai signifikan
2	Terwujudnya masyarakat dan sektor swasta berperan besar dalam pembiayaan pembangunan kota	Mengembangkan sistem insentif yang menarik dan fasilitasi untuk sektor swasta dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik	-	Pajak dan retribusi daerah sebagai insentif fiskal ke swasta	Insentif fiskal ke swasta melembaga	Insentif fiskal ke swasta melembaga
		Mengembangkan sistem pembiayaan dengan kemitraan pemerintah dan swasta	--	Studi-studi kelayakan dan legal kemitraan pemerintah dan swasta untuk beberapa layanan jasa umum dan barang publik	Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD	Berkontribusinya perusahaan patungan untuk layanan jasa dan penyediaan barang publik terhadap PAD
		Mengembangkan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional,		Belum siap menggunakan instrumen pembiayaan seperti obligasi daerah, road funds, dan lain-lain.	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional, terutama obligasi daerah menjadi sumber pembiayaan yang signifikan	Penggunaan instrumen pembiayaan pembangunan non-konvensional sebagai sumber pembiayaan signifikan
		Menyediakan insentif dan fasilitasi untuk keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta pemanfaatan dan pemeliharaan barang dan jasa publik	-	Insentif masih sangat terbatas hanya hak memasang iklan dan kemudahan administrasi	Insentif fiskal ke swasta melembaga	Insentif fiskal ke swasta melembaga

Sumber: *RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, LKPJ AMJ Wali Kota Bandung Tahun 2013-2018*

g. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah seluas 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, antara lain Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung.

Tabel 4.2
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kota Cimahi	Pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang didukung sinergitas pembangunan, sumber daya unggul serta kualitas sarana prasarana yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang mandiri	Terkait dengan Kota Cimahi sebagai pendukung Kota Bandung, maka potensi terbesar Kota Cimahi adalah terjadi pergerakan regional yang melintasi Kota Cimahi dan tumbuhnya *second home* akibat pesatnya perkembangan Kota Bandung yang memerlukan tempat hunian dengan memanfaatkan lahan di sekitar Kota Cimahi. Dari hal tersebut mempengaruhi Kota Cimahi dengan tingginya permintaan tempat hunian, melihat dari terbatasnya ruang di Kota Cimahi maka untuk kebutuhan hunian diarahkan pembangunan hunian vertikal, seperti apartement, rumah susun, dan lain sebagainya.
2	Kabupaten Bandung	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan	• Sektor Transportasi dan Perhubungan Rencana sistem prasarana transportasi untuk Kabupaten Bandung berdasarkan RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 akan diarahkan untuk menunjang struktur ruang yang akan dibentuk. Dalam konteks transportasi sebagai alat pemenuh kebutuhan wilayah, maka *demand* pergerakan eksisting yang mengarah ke Bandung dan Cimahi sebagai kota inti perlu ditanggulangi dengan segera. Konsep transportasi yang sesuai untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana transportasi massal antarwilayah. • Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur dengan kabupaten/kota yang berbatasan, salah satunya ditandai dengan kemacetan lalu lintas pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan kota bandung dan kota cimahi merupakan ancaman dari strategi pengembangan terkait misi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan
		Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif	• Perkembangan ekonomi Kota Bandung yang semakin pesat turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bandung khususnya yang berbatasan langsung, ini merupakan strategi pengembangan terkait misi untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang memliki keunggulan kompetitif

No	Daerah Lain	Kebijakan Terkait	Keterangan
3	Kabupaten Bandung Barat	Peningkatan aksesibilitas baik antar wilayah dalam Kabupaten Bandung Barat maupun keluar daerah	• Aksesibilitas yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuhnya perekonomian masyarakat, serta mendukung pelayanan publik lain di suatu daerah. Sebaliknya, sulitnya akses antara pusat pelayanan dan daerah layanannya, serta satu daerah ke daerah lain akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menyulitkan masyarakat ketika akan mengakses pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan. • Pengembangan PKN Metropolitan Bandung dapat dilakukan di Kota Bandung dengan strategi mengarahkan perkembangan ke Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat • Kebijakan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung Barat yaitu dengan pembatasan pengembangan kawasan, yaitu kawasan di sekitar Kota Bandung sebagai kawasan penyangga (bukan lagi sebagai kawasan konservasi). Pesatnya permintaan perkembangan kawasan terbangun dikendalikan dengan strategi pengembangan kawasan terbangun vertikal • Strategi Penataan Ruang Makro di wilayah Kabupaten Bandung Barat ialah Peningkatan hubungan eksternal Kabupaten Bandung Barat dengan Kota Bandung sebagai pusat dari Metropolitan Bandung. Diharapkan peningkatan hubungan eksternal ini dapat mendukung peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang dan menjadi kawasan produksi utama bagi Kota Bandung • Secara geografis Kabupaten Bandung Barat mempunyai potensi yang sangat besar terkait dengan fungsi dan peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat, dan peran Kabupaten Bandung Barat sebagai kawasan belakang Kota Bandung, hal tersebut perlu ditunjang oleh ketersediaan fasilitas yang mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan strategi penataan ruang mikro wilayah Kabupaten Bandung Barat

Sumber: *RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Rancangan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2018-2023, dan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2017-2022.*

h. Penelaahan terhadap Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Pencapaian target indikator TPB di Kota Bandung baru sebesar 21% dari total 214 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 45 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Bandung pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Isu strategis yang terumuskan adalah sebagai berikut:

1. Isu Pengelolaan Sampah yang Belum Optimal
2. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air (Air Permukaan dan Air Tanah)
3. Tingginya Tingkat Alih Fungsi Lahan
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir yang Semakin Tinggi
5. Rendahnya Kualitas Udara
6. Kemacetan yang Semakin Sering Terjadi dan Meluas
7. Belum Optimalnya Pola Kemitraan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Berdasarkan hasil analisis pencapaian target TPB, ditemukan permasalahan-permasalahan terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. sistem pengelolaan sampah yang belum optimal,
2. rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air tanah,
3. tingginya tingkat alih fungsi lahan,
4. rendahnya kualitas udara dan sungai,
5. frekuensi dan intensitas banjir yang semakin tinggi,
6. rendahnya kualitas udara,
7. kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas, serta
8. belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam dokumen KLHS juga dibuat proyeksi terhadap indikator TPB di Kota Bandung yang belum mencapai target. Proyeksi ini dibuat perbandingan antara tingkat pencapaian jika dilakukan BAU (*business as ussual*) dan dengan upaya tambahan.

Berdasarkan analisis permasalahan strategis Kota Bandung dan analisis indikator TPB yang belum tercapai, diperoleh rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengkaji ulang aktivitas alih fungsi lahan dengan menghitung kembali daya dukung, penegakkan hukum atas pelanggaran dengan tegas, penerapan sistem insentif dan disinsentif.
2. Mengendalikan pertumbuhan populasi penduduk dan urbanisasi di Kota Bandung.
3. Edukasi kepada masyarakat Kota Bandung terkait isu-isu penting perkotaan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat kota, meliputi: pengelolaan sampah, pencemaran udara, kualitas air, alih fungsi lahan, kemacetan, dan drainase.
4. Pengendalian kualitas dan kuantitas sumber daya air oleh pemerintah daerah untuk pengelolaan bagi masyarakat umum.

5. Restrukturisasi anggaran pembangunan oleh pemerintah daerah termasuk untuk meningkatkan sarana-prasarana pelayanan kepada masyarakat. Melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan terkait pengelolaan sampah perkotaan, *green building* dan infrastruktur transportasi vertikal.
6. Mengembangkan pola kemitraan untuk berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi pembiayaan pembangunan dengan pihak ketiga agar terjadi pemerataan dan efektivitas pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan program-program solutif inovatif bagi masalah lingkungan perkotaan.

2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu global, isu nasional, isu regional, SDGs, capaian kinerja RPJMD tahun lalu, dan prediksi permasalahan yang akan datang, diidentifikasi terdapat 8 isu strategis jangka menengah Kota Bandung. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

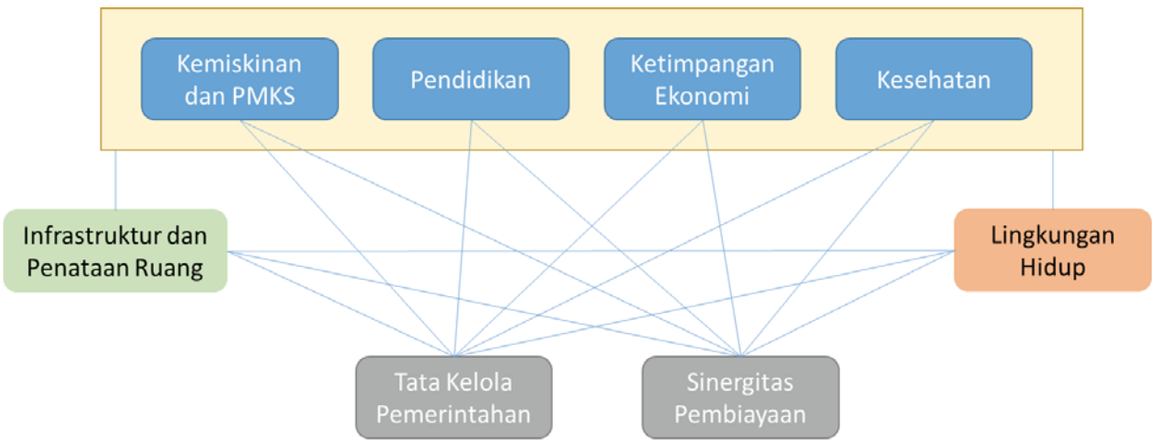

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama.

Sampai dengan saat ini sebagian besar penyelenggara pendidikan anak usia dini oleh masyarakat sementara, sedangkan yang disediakan oleh pemerintah kota dalam bentuk taman kanak-kanak sebanyak 3 TK Negeri. Sementara itu layanan pendidikan dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Bila standar rasio rombel tingkat SD = 1: 28, saat ini pada SDN di Kota Bandung adalah 1:31 dengan rombel 7.424 dan jumlah kelas hanya 2.952. Pada tingkat SMP rasio rombel di Kota Bandung adalah 1:33, sedangkan standar nasional 1:32 dengan jumlah rombel 3.361 dan ruang kelas 2.994. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah yang berlokasi jauh dari rumah.

b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan di Kota Bandung, dengan sasaran kesehatan secara *continum of care* (dari lahir hingga lansia). Bukan hanya AKI, AKB, dan *stunting* masih tinggi, tetapi penyakit dengan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) cenderung meningkat. Selain penyakit menular terjadi fenomena meningkatnya penyakit tidak menular, terjadi pula masalah gizi disatu sisi penderita gizi buruk masih dijumpai tetapi penderita obesitas meningkat (*the double burden of diseases*). Ketersediaan layanan kesehatan di Kota Bandung yang meliputi layanan puskesmas terdiri atas 80 puskesmas, yang di dalamnya terdapat 7 puskesmas rawat inap sehingga jumlah sarana kesehatan tersebut belum memadai, berdasarkan rasio menurut WHO bahwa satu puskesmas maksimal melayani 30.000/penduduk di Kota Bandung.

c. Tata Kelola Pemerintahan

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada tata kelola sumber daya aparatur dan keuangan daerah. Layanan publik didasarkan pada kejelasan prosedur dan persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya secara transparan. Esensi terwujudnya reformasi birokrasi adalah kepuasan layanan publik yang merupakan hak-hak masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat ialah tolok ukur tingkat kesesuaian layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat. Hasil survei Ombudsman terhadap layanan perangkat daerah di Kota Bandung, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan dan termasuk kategori hijau (baik). Namun demikian kualitas, kecepatan, dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang menggambarkan Kota Bandung sebagai Kota Cerdas (*Smart City*). Dalam hal tata kelola, bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Opini BPK menjadi salah satu indikator tingkat ketaatan terhadap pengelolaan keuangan dan asset sesuai standar yang berlaku.

d. Ketimpangan Ekonomi

Di samping laju pertumbuhan ekonomi tinggi yang melebihi Jawa Barat dan Nasional, tingkat ketimpangan pendapatan justru lebih tinggi, berdasarkan rasio gini. Ketimpangan ini berkaitan dengan tingkat lapangan kerja, pengangguran, kemiskinan dan dinamika sektor ekonomi.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut Kebijakan Kota Bandung menerapkan konsep *pro poor, pro job, pro growth,* dan *pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat sebagai penggerak utamanya.

e. Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang

Infrastuktur kota merupakan layanan dasar penting Pemerintah Kota Bandung, sehingga menjadi isu strategis. Layanan infrastruktur tersebut berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya turut membentuk struktur ruang wilayah yang kemudian memiliki dampak lanjutan pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena itu pengelolaan infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pengendalian ruang wilayah.

Beberapa fokus terkait infrastruktur untuk masa lima tahun mendatang, yaitu:

1. Infrastruktur pengendalian banjir untuk mengatasi 68 titik genangan yang tersebar di ruas-ruas jalan di Kota Bandung dan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
2. Pengendalian kemacetan lalu lintas pada 8 titik yang semakin kompleks sebab dan akibatnya pada polusi udara, gangguan kejiwaan, pemborosan, dan lain sebagainya. Beberapa gagasan telah dibahas, seperti: (1) transportasi massal yang representatif serta pembangunan jalan simpang tidak sebidang di 5 (lima) titik, (2) pembangunan jalan layang (*flyover*) atau bahkan jalan bawah tanah (*underpass*) dan lain sebagainya.
3. Kebutuhan peningkatan akses wisatawan, seperti: bandara internasional yang representatif, jalan berbayar/tol, stasiun kereta api dan terminal antar kota yang memadai guna mewujudkan fasilitas kota yang berkelas dunia (*world class city*).

f. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan

Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup meliputi berbagai aspek. Aspek lingkungan hidup di Kota Bandung diantaranya:

1. Air. Ketersediaan air tanah yang semakin berkurang, kualitas air permukaan yang semakin menurun, dan pelayanan air bersih yang belum mencukupi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri atas indeks pencemaran air, udara, dan tutupan hutan. Nilai IKLH Kota Bandung saat ini berada pada tingkat "waspada" yang menunjukkan buruknya kualitas lingkungan Kota Bandung. Penyebab terbesar buruknya nilai IKLH berasal dari rendahnya indeks kualitas air, yang menunjukkan kadar BOD5 pada seluruh sampel air sungai berada jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Kondisi fisik air sungai terlihat keruh, menghitam, dan berbau busuk, sebagai akibat pencemaran air limbah domestik yang cukup dominan.

   Peta kontur muka air tanah yang merupakan hasil Kajian Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah Kota Bandung pada tahun 2017. Pada peta kontur tersebut dapat dilihat terbentuknya kerucut-kerucut permukaan air tanah yang menunjukkan terjadinya eksploitasi air tanah dalam jumlah besar di beberapa tempat sehingga mengakibatkan kekritisan air tanah di tempat-tempat tersebut. Menurunnya resapan air, berpengaruh pula pada cakupan pelayanan air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kota Bandung baru mencapai 72,15% dengan sumber air baku untuk pengolahan air bersih berasal dari air permukaan (sungai dan danau) di luar wilayah Kota Bandung.
2. Udara. Polusi udara yang semakin bertambah serta pengelolaan sampah yang berpotensi menimbulkan masalah besar.

3. Sampah. Timbulan sampah di kota metropolitan seperti Bandung mencapai 1.500–1.600 ton setiap hari. Walaupun penghargaan Adipura sering didapat "kota kembang" beserta sederet penghargaan bergengsi lainnya, namun permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Sumber sampah utama, yaitu dari rumah tangga (70%). Komposisi sampah umumnya organik yang mudah membusuk (45%), anorganik (24%), dan residu (31%). Pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan pola kumpul – angkut – buang, dan 73,74% sampah diangkut ke TPPAS Sarimukti. Pengurangan sampah pola 3R mencapai 14,32% . Sekitar 12,21% sampah belum tertangani, yang dibuang ke TPS – TPS liar, selokan, dan sungai. Sejak tahun 2005, Kota Bandung tidak memiliki TPA, sehingga pembuangan akhir sampah dilakukan ke TPPAS Sarimukti, di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang akan ditutup dan dipindah ke TPPAS Legok Nangka tahun 2019. Dana kompensasi ke TPPAS Sarimukti saat ini sebesar Rp61.250,00/ton sampah, dengan jarak angkut 42 km. Direncanakan biaya pengolahan sampah di TPPAS Legok Nangka meningkat mencapai 6-7 kali lipat saat ini, karena menggunakan teknologi thermal yang berbiaya cukup mahal. Dengan demikian maka beban biaya pengelolaan sampah akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
4. Bencana. Selama 3 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana di Kota Bandung mencapai 2.671 kejadian, dengan 256 orang meninggal dunia. Salah satunya adalah kejadian banjir bandang di Jatihandap. Bencana ini terjadi bukan hanya akibat faktor hujan deras, tetapi faktor lain yang juga sangat penting adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Permasalahan-permasalahan tersebut berkaitan dengan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum memenuhi mandat undang-undang yaitu sebesar 30%. Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan kawasan resapan air. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) atas eksploitasi lahan diantaranya menjadi akar penyebab terjadinya banjir bandang di Kota Bandung. Berkurangnya luas kawasan berakibat pula pada ketersediaan air tanah yang semakin kritis.

g. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS

Kemiskinan dan PMKS di perkotaan, umum banyak terjadi di kota-kota lain, bahkan di kota-kota dunia. Persoalan sosial mengemuka menjadi tantangan yang terus ada, dan membutuhkan layanan pemerintah kepada warganya yang tidak beruntung tersebut.

Kemiskinan di Kota Bandung terdiri dari dimensi kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Pada tahun 2017, jumlah warga sangat miskin (desil-1) sebanyak 27.815 KK, sedangkan rumah tangga sasaran intervensi program perlindungan sosial lainnya adalah golongan desil 2 (miskin) sebanyak 44.662 KK, golongan desil 3 (hampir miskin) sebanyak 30.431 KK, dan golongan desil 4 (rentan miskin) sebanyak 35.825 KK.

Jumlah PMKS di Kota Bandung tahun 2017 dalam berbagai bentuk, sebanyak 80.388 orang yang memerlukan penanganan secara holistik dan berkesinambungan.

h. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan

Pelayanan dan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Kota Bandung membutuhkan biaya triliunan rupiah untuk melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah saat ini yaitu dana dari pemerintah pusat (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus), dan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dana tersebut belum mencukupi untuk memenuhi dapat memberikan tingkat layanan dasar maupun layanan prima menuju kota yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Karena itu, pemerintah daerah dituntut menggali pendapatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif.

Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan tersebut, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholders. Kebutuhan ini di masa yang akan datang semakin kuat. Pada tahun 2017, partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan tercatat sudah cukup signifikan yaitu mencapai Rp193 miliar. Instrumen pembiayaan lain yang telah dimanfaatkan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana selama tahun 2015-2018, kontribusi CSR cukup signifikan yaitu mencapai Rp71670.074.763,00. Namun peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dan CSR ini masih perlu dioptimalkan melalui penyusunan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang jelas, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, instrumen pembiayaan lainnya adalah sumbangan pihak ketiga dimana pada tahun 2015-2018 mencapai Rp25.504.408.459,00. Indikasi ini menunjukkan adanya suatu potensi yang perlu terus dikembangkan untuk bersinergi dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bandung.

Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan kota.

Tabel 4.3
Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung
1. Pembangunan Manusia: - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan Ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Isu pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya air (air permukaan dan air tanah) 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan 4. Frekuensi dan intensitas banjir yang semakin tinggi 5. Rendahnya kualitas udara	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Peningkatan derajat masyarakat 3. Tata kelola pemerintahan 4. Ketimpangan ekonomi 5. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang 6. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung
3. Pembangunan Kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik	4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi	6. Kemacetan yang semakin sering terjadi dan meluas 7. Belum optimalnya pola kemitraan pembiayaan pembangunan infrastruktur	7. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS 8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 5

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang *(clarity of direction)* yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Bandung tahun 2018-2023, yaitu:

"Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis"

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023.

Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna "layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat".

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing**
   Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih**
   Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.
3. **Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan**
   Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.
4. **Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**
   Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan
5. **Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi**
   Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.1
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung dengan
Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2018 – 2023
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius.	Misi 1 : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi, serta berhati nurani.	
Misi 5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.	Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih
Misi 2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing.	Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.	Misi 4 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)	Misi 5 : Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

a. Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilali Agama dan Budaya	1.1 Indeks Pembangunan Manusia	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1.1.1 Harapan Lama Sekolah
			1.1.1.2 Angka Kelulusan
			1.1.1.3 Rata-rata Nilai Ujian SD
			1.1.1.4 Rata-rata Nilai Ujian SMP
		1.1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.2.1 Umur Harapan Hidup

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

1) Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing adalah membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

B. Sasaran

1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kota Bandung adalah Harapan Lama Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Nilai Ujian SD, serta Rata-rata Nilai Ujian SMP.

2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup.

b. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	2.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2.1.1.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik
			2.1.1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kota
			2.1.1.3 Nilai LPPD Kota
			2.1.1.4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
			2.1.1.5 Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variable yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerjanya.

B. Sasaran

1) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Kepemerintahan yang baik *(good governance)* mengandung dua pemahaman, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian daerah, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi adalah Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung, Nilai LPPD Kota Bandung, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung.

c. Misi 3 : Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
3. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	3.1 Lalu Pertumbuhan Ekonomi	3.1.1 Meningkatnya Perekonomian Kota	3.1.1.1 PDRB Per Kapita
			3.1.1.2 Indeks Daya Saing Pariwisata
			3.1.1.3 Pengeluaran Per Kapita
	3.2 Indeks Gini	3.2.1 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	3.2.1.1 Angka Kemiskinan
		3.2.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja	3.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Bandung sebagai indikator kinerjanya yang akan dijelaskan sebagai berikut.

B. Sasaran

1) Meningkatnya Perekonomian Kota

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian kota adalah PDRB Per Kapita, Indeks Daya Saing Pariwisata dan Pengeluaran Per Kapita.

2) Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah angka kemiskinan.

3) Meningkatnya Kesempatan Kerja

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kesempatan kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

d. Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
4. Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	4.1 *Indeks Liveable City* (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur)	4.1.1 Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	4.1.1.1 Persentase RTH
		4.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4.1.2.1 Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan
			4.1.2.2 Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan
			4.1.2.3 Persentase Luasan Kawasan Kumuh
		4.1.3 Meningkatnya Layanan Air Bersih	4.1.3.1 Cakupan Layanan Air Bersih
		4.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	4..1.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			4.1.4.2 Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian *Indeks Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Kota Bandung sebagai indikator kinerjanya.

B. Sasaran

1) Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan adalah Persentase RTH.

2) Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas adalah Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan, Jumlah Titik Kemacetan, serta Persentase Luasan Kawasan Kumuh.

3) Meningkatnya Layanan Air Bersih

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya layanan air bersih adalah Cakupan Layanan Air Bersih.

4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah.

e. Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
5. Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	5.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	5.1.1 Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	5.1.1.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan
		5.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	5.1.2.1 Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga
			5.1.2.2 Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)

Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan, dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan, yang dapat dilihat atau diukur dari Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan sebagai indikator kinerjanya.

B. Sasaran

1) Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan adalah Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan.

2) Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta Dalam Pembangunan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan adalah:

a) Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan (sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga

b) Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan *ya*ng Dibiayai dari Swasta melalui Kerjasama Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, atau Obligasi Daerah (akumulasi)

Tabel 5.2
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	**Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing**	1.1	**Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**80.31**						**81.20**
		1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.90	14.00	14.01	14.02	14.03	14.04	14.04
				Angka Kelulusan	persentase	100	100	100	100	100	100	100
				Rata-rata Nilai Hasil ujian SD	Angka	76.72	76.74	76.76	76.78	76.80	76.82	76.82
				Rata-rata Nilai Hasil ujian SMP	Angka	57.02	57.03	57.04	57.05	57.06	57.07	57.07
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.86	73,90	73,92	73,94	73,96	73,98	73,98
2	**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih**	2.1	**Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**69.81**						**70.13**
		2.1.1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan Baik	Persentase	51.61	60	70	80	90	100	100
				Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
				Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung	Tingkat	*Integrative*	*Integrative*	*Integrative*	*Smart*	Smart	Smart	Smart

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
3	**Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan**	3.1	**Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**7.21**						**7.98**
				Indeks Gini	**Poin**	**0.43**						**0.38**
		3.1.1	Meningkatnya perekonomian kota	PDRB Per Kapita	Juta Rp	69.20	70,73	73,38	76,03	78,68	81,33	81,33
				Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3.27	3.39	3.55	3.65	3.69	3.74	3.74
				Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah/org/ tahun	16.156	16.370	16.584	16.798	17.013	17.227	17.227
		3.1.2	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	%	4.17	3,83	3,66	3,49	3,32	3,14	3,14
		3.1.3.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.44	8.39	8.34	8.29	8.25	8,22	8,22
4	**Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**	4.1	**Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**	***Indeks Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur**	**Poin**	**7.375**						**8.00**
		4.1.1	Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	%	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.2
		4.1.2	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	120	100	80	60	40	30	30
				Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	12	11	10	9	8	7	7
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	9,76	4,55	3,96	3,36	2,76	2,16	2,16

NO	MISI	NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	
		4.1.3	Meningkatnya layanan air bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	%	77,27	79	80	81	82	83	83
		4.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	35,23	35,35	35,47	35,59	35,71	35,83	35,83
				Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%	97,97	98	98,3	98.5	98.7	99	99
5	**Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi**	5.1	**Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan**	**Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan**	**%**	**5**						**100**
		5.1.1	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	193 Miliar	Meningkat 2% dari tahun 2018	Meningkat 4% dari tahun 2018	Meningkat 6% dari tahun 2018	Meningkat 8% dari tahun 2018	Meningkat10% dari tahun 2018	Mening kat10% dari tahun 2018
		5.1.2	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai Dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	100	100
				Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (akumulasi)	%	0	33,33	33,33	66,67	66,67	100	100

Untuk mencapai target misi "membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.1
Pemetaan Kinerja Misi 1

Untuk mencapai target misi "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.2
Pemetaan Kinerja Misi 2

Untuk mencapai target misi "membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 5.3
Pemetaan Kinerja Misi 3

Untuk mencapai target misi "mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.4
Pemetaan Kinerja Misi 4

Untuk mencapai target misi "mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi" diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.5
Pemetaan Kinerja Misi 5

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI
mulkisalman

Bab 6
Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bandung. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada perangkat daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.1
Logic Model

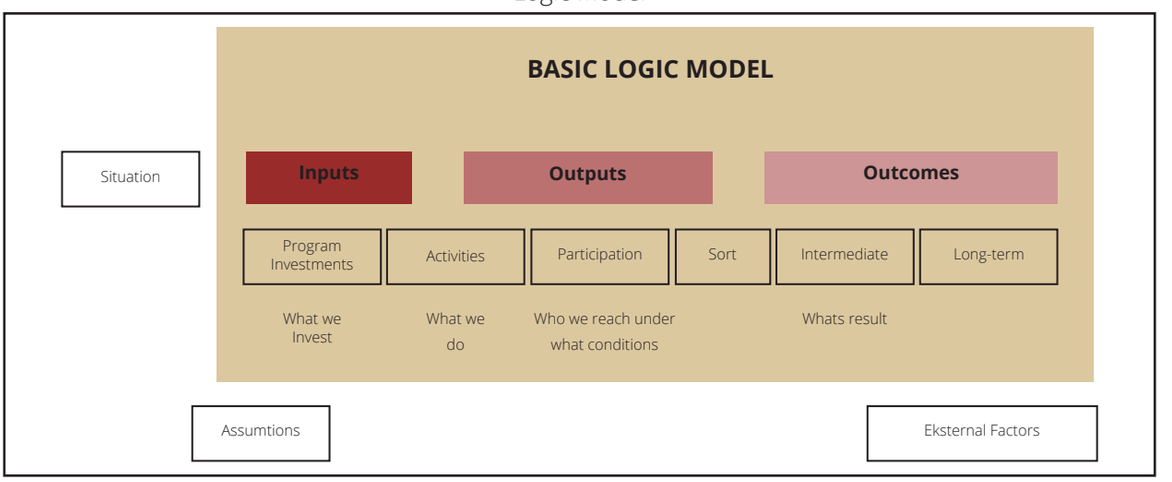

Pada penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan ***short term outcome*** untuk strategi dan ***intermediate term outcome*** untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan dengan perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *logic model*.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Setiap Misi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing		
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan
		Meningkatkan mutu proses pembelajaran
		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
		Meningkatkan budaya baca
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
		Meningkatkan budaya hidup sehat
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur
		Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat
		Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan
		Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
		Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan		
Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Kota	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
		Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
		Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung
		Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif
		Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
		Optimalisasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari BUMD
		Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif
		Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
		Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin
		Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
		Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan
		Membangun rumah layak huni untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin agar mandiri secara ekonomi
		Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
		Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya
		Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan lahan
		Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang
		Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
		Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatkan kapasitas saluran drainase
		Meningkatkan resapan air hujan
		Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/ kabupaten
		Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta
		Meningkatkan mobilitas penduduk kota
		Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan
		Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu-lintas
		Meningkatkan keselamatan berlalu-lintas
		Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
		Meningkatkan akses sanitasi dan air minum
		Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya layanan air Bersih	Meningkatkan akses air bersih
		Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku
		Menurunkan tingkat kebocoran air bersih
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatkan Indeks Kualitas Air
		Meningkatkan Indeks Kualitas Udara
		Meningkatkan penanganan sampah
		Meningkatkan pengurangan sampah
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi		
Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota
	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/TJSL, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain)

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.

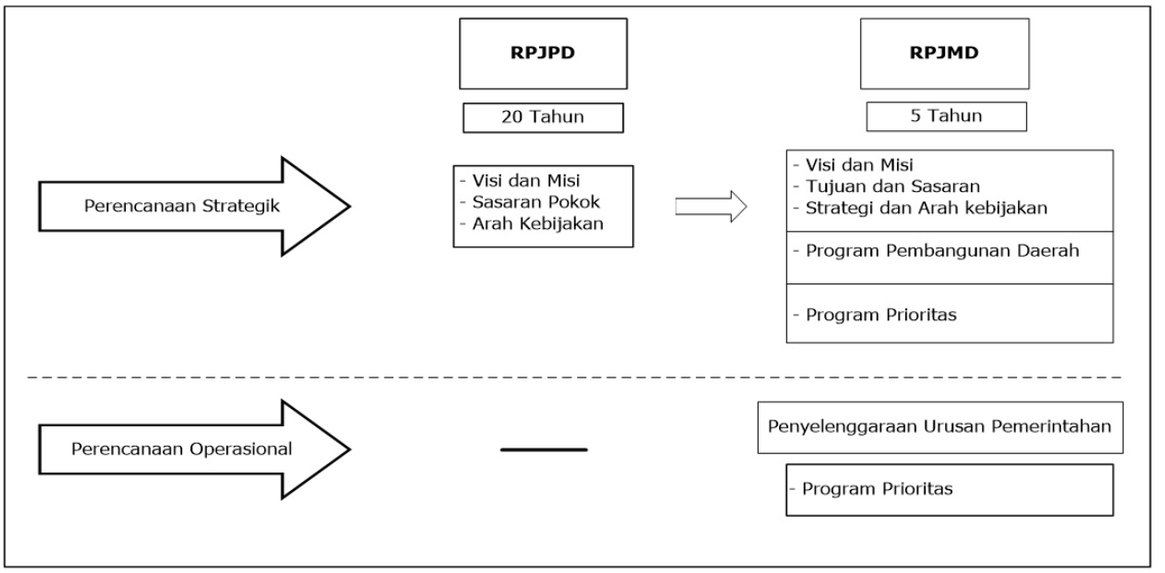

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan 5 tahun ke depan, yang tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.2
Capaian Kinerja Misi 1

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	13,9 Tahun
		Angka Kelulusan	100%
		Rata-rata Nilai Ujian SD	76,72
		Rata-rata Nilai Ujian SMP	57,02
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73,86 Tahun

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 1 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 1 dikategorikan baik terlihat dari capaian UHH yang mencapai 73,86 tahun, angka kelulusan sebesar 100%, rata-rata nilai ujian SD sebesar 76,72, rata-rata nilai ujian SMP sebesar 57,02, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,9 Tahun.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 1 maka terkait pendidikan, dan kesehatan **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.**

Tabel 6.3
Capaian Kinerja Misi 2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	51,61%
		Nilai Evaluasi AKIP Kota	A
		Nilai LPPD Kota	Sangat Tinggi
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP
		Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung	(Level 4) *Integrative*

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 2 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 2 dikategorikan sangat baik terlihat dari capaian nilai evaluasi AKIP Kota yang mendapat predikat A, nilai LPPD Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi (ST), indeks kepuasan masyarakat yang berada pada angka 80, serta level kematangan *Smart City* yang mencapai level 4 (*integrative*), sedangkan untuk opini BPK terhadap LKPD masih berada pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Melihat capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 2 terkait tata kelola pemerintahan, perlu mendapat dukungan khususnya terkait pencapaian opini BPK sehingga hal ini **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 2-3 tahun ke depan. Untuk tahun ke 4 dan 5 terkait tata kelola pemerintahan tetap terus melakukan peningkatan dan perbaikan akan tetapi tidak menjadi prioritas mengingat capaiannya sudah baik.**

Tabel 6.4
Capaian Kinerja Misi 3

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Kota	PDRB Per kapita	69,20
		Indeks Daya Saing Pariwisata	3,74
		Pengeluaran Per Kapita	16,156 juta rupiah/ orang/tahun
	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	4,17
	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,44

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 3 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 3 dikategorikan baik terlihat dari capaian PDRB Per kapita Kota yang mencapai 69,20 Juta rupiah, indeks daya saing pariwisata yang mencapai 3,27 poin, pengeluaran per kapita sebesar Rp16,156 juta rupiah/orang/tahun, tingkat pengangguran terbuka yang berada pada angka 8,44%, serta angka kemiskinan yang mencapai 4,17%.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 3 terkait peningkatan perekonomian kota, kesempatan kerja dan kemiskinan, perlu mendapat dukungan penuh khususnya terkait pengentasan kemiskinan sehingga hal ini harus **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.**

Tabel 6.5
Capaian Kinerja Misi 4

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	Persentase RTH	12,2%
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan	120 menit
		Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	12 Aspek
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	9,76%
	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	77,27%
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,23
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	97,97 %

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 4 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 4 dikategorikan baik terlihat dari capaian persentase RTH yang mencapai 12,2%, lama genangan yang tertangani mencapai 120 menit, titik kemacetan yang teratasi sebanyak 24 titik, persentase luasan kawasan kumuh sebesar 9,76%, indeks kualitas lingkungan hidup yang berada pada angka 35,23 poin, serta cakupan layanan persampahan yang mencapai 97,97%.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 4 terkait permasalahan RTH, macet, banjir, kawasan kumuh, sampah, dan kualitas lingkungan, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.**

Tabel 6.6
Capaian Kinerja Misi 5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan Kepentingan Lainnya	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	193 miliar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN SAAT INI
	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta Dalam Pembangunan	Presentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL	5,00%
		Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta	N/A

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran misi 5 dapat digambarkan bahwa pencapaian misi 5 dikategorikan cukup terlihat dari capaian tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan dengan kriteria cukup, persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL sebesar 5,00% dan persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian dibiayai dari swasta (Kerjasama Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga) yang belum memiliki angka.

Berdasarkan capaian tersebut dan disesuaikan dengan strategi yang harus dilakukan, maka dalam rangka memenuhi atau mencapai target misi 5 maka terkait permasalahan pembiayaan pembangunan, perlu mendapat dukungan penuh sehingga hal ini harus **menjadi prioritas atau fokus pembangunan selama 5 tahun ke depan.**

Berdasarkan hasil analisa atas capaian kinerja sasaran misi, maka dapat terlihat sasaran yang masih memerlukan penanganan khusus, serta waktu yang dibutuhkan serta tahapan yang harus dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target visi dan misi kepala daerah. Hal ini dapat terlihat dalam penjelasan tabel berikut.

Tabel 6.7
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bandung

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
SASARAN 1.1.1	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata				
SASARAN 1.1.2					
SASARAN 2.1.1	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien				
SASARAN 3.1.1	Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah				
SASARAN 3.1.2					
SASARAN 3.1.3					
SASARAN 4.1.1	Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, infrastruktur kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
SASARAN 4.1.2					
SASARAN 4.1.3					
SASARAN 4.1.4					

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN				
	Tahun 1 (2019)	Tahun 2 (2020)	Tahun 3 (2021)	Tahun 4 (2022)	Tahun 5 (2023)
SASARAN 5.1.1	Mengoptimalkan pembangunan kota melalui partisipasi, kolaborasi dan integrasi antara masyarakat, swasta dan instansi pemerintah lainnya				
SASARAN 5.1.2					

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus tahunan pembangunan di Kota Bandung adalah sebagai berikut.

Tabel 6.8
Fokus Pembangunan

FOKUS PEMBANGUNAN				
TAHUN I (2019)	TAHUN II (2020)	TAHUN III (2021)	TAHUN IV (2022)	TAHUN V (2023)
1. Ketenteraman dan Kenyaman 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Peningkatan Perekonomian 6. Pengangguran 7. Kemiskinan 8. RTH 9. Banjir 10. Macet 11. Kawasan Kumuh 12. Sampah 13. Kualitas Lingkungan Hidup 14. Pembiayaan Pembangunan	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Tata Kelola Pemerintahan 4. Peningkatan Perekonomian 5. Pengangguran 6. Kemiskinan 7. RTH 8. Banjir 9. Macet 10. Kawasan Kumuh 11. Sampah 12. Kualitas Lingkungan Hidup 13. Pembiayaan Pembangunan	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Tata Kelola Pemerintahan 4. Peningkatan Perekonomian 5. Pengangguran 6. Kemiskinan 7. RTH 8. Banjir 9. Macet 10. Kawasan Kumuh 11. Sampah 12. Kualitas Lingkungan Hidup 13. Pembiayaan Pembangunan	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Peningkatan Perekonomian 4. Pengangguran 5. Kemiskinan 6. RTH 7. Banjir 8. Macet 9. Kawasan Kumuh 10. Sampah 11. Kualitas Lingkungan Hidup 12. Pembiayaan Pembangunan	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Peningkatan Perekonomian 4. Pengangguran 5. Kemiskinan 6. RTH 7. Banjir 8. Macet 9. Kawasan Kumuh 10. Sampah 11. Kualitas Lingkungan Hidup 12. Pembiayaan Pembangunan

Berdasarkan fokus pembangunan tahunan tersebut, maka tema pembangunan tahunan Pemerintah Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun (periode RPJMD) adalah sebagai berikut.

Tabel 6.9
Tema Pembangunan

NO	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
1	2019	Mewujudkan Kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
2	2020	Meningkatkan Kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
3	2021	Memantapkan Kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
4	2022	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar, Peningkatan Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Menuju Kota Bandung yang Nyaman, Sejahtera dan Berdaya Saing.
5	2023	Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Dalam Mendukung Perekonomian Kota Menuju Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis.

Tabel 6.10
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata
			Meningkatkan mutu proses pembelajaran	
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan	
			Meningkatkan budaya baca	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat	
			Meningkatkan budaya hidup sehat	
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
2.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
			Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat	
			Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan	
			Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi	
			Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	
			Meningkatkan kinerja instansi pemerintah	
			Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	
			Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Kota	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah
			Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	
			Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif	
			Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan	
			Meningkatkan pengembangan perdagangan pasar tradisional	
			Meningkatkan kualitas iklim usaha dan invenstasi yang kondusif	
			Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	
			Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan	
		Meningkatkan Kesempatan Kerja	Meningkatkan daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung	
			Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	
			Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya	
			Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin	
			Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan	
			Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup	
4.	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ruang Kota yang Aman, Nyaman, Tertib dan Berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan lahan	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
			Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang	
			Meningkatkan kualitas RTH	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta	
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatkan kapasitas saluran drainase	
			Merningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/ wilayah perbatasan kota/kabupaten	
			Meningkatkan resapan air hujan	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/ swasta	
			Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas penduduk kota	
			Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan	
			Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu lintas	
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan	
			Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	
			Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	
			Meningkatkan akses sanitasi dan air minum	
			Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh	
			Meningkatkan akses air bersih	
			Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku	
			Mengurangi tingkat kehilangan air	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Meningkatkan Indeks Kualitas air	
			Meningkatkan Indeks Kualitas air	
			Meningkatkan penanganan sampah	
			Mengurangi sampah dari sumber	
5.	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota	Mengoptimalkan pembangunan kota melalui partisipasi, kolaborasi masyarakat dan swasta dengan pemerintah kota.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, Obligasi Daerah, TJSL, Sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain)	

3. Program Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masayarakat
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
4. Peningkatan perekonomian kota
5. Tata kelola pemerintahan
6. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
7. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah terkait diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah Kota Bandung sebagai berikut.

Tabel 6.11
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN
SPM PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Angka partisipasi kasar PAUD	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Nonformal	1	Angka partisipasi kasar kesetaraan	
3	Pendidikan Dasar	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	1	Angka putus sekolah SD	
		Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	1	Angka putus sekolah SMP	
		Program Bantuan Pendidikan	1	Angka putus sekolah SD	
			2	Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	
			3	Angka putus sekolah SMP	
			4	Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	
			5	Persentase masyarakat yang mendapat bantuan pendidikan	
SPM KESEHATAN					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Tingkat kesehatan masyarakat	PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2	Persentase penanganan masalah gizi buruk	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia	
4	Pelayanan Kesehatan Balita				
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	
8	Pelayanan kesehatan Penderita *hipertensi*		2	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Melitus*				
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan *Tuberkulosis*	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular	1	Tingkat pencegahan dan pengendalian Penyakit	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)		2	Persentase penanganan penderita penyakit menular	
			3	*Universal Child Immunization* (UCI)	
			4	Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	
SPM PEKERJAAN UMUM					
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Cakupan layanan air bersih	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Persentase pengolahan air limbah rumah tangga	
SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	1	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
			2	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang Layak Huni dan Korban Bencana	
			3	Persentase Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penataan Kawasan Permukiman	1	Persentase Luasan Kawasan pemukiman kumuh	
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum	1	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	PD Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
		Program Penegakan Produk Hukum Daerah	1	Cakupan penyelesaian penegakan perda	
			2	Persentase penegakan perda	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	1	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH TERKAIT PELAKSANAAN JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		PENANGGUNG JAWAB URUSAN
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3	Rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	1	Tingkat waktu maksimum tanggap (*response time rate*) 15 menit	
SPM SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	1	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	1	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar diluar Panti	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	1	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Geladangan dan Pengemis diluar Panti	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota	Program Perlindungan Sosial Bencana	1	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program prioritas kepala daerah Kota Bandung diantaranya:

Tabel 6.12
Program Prioritas Kepala Daerah

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
1	PIPPK Plus	100 juta per LKK pada tahun pertama mengacu pada pelaksanaan PIPPK periode sebelumnya, sedangkan pada tahun pelaksanaan kedua terdapat kenaikan pada anggaran RW	Bandung Unggul	Kecamatan
				Bagian Pemerintahan
2	1 Pusat Kreativitas Pemuda per Wilayah	6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga
3	*Youthspace* di Setiap Kelurahan	151 kelurahan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga
4	1 Perpusatakaan Keliling / Kecamatan	Melayani seluruh kelurahan di 30 kecamatan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
5	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	Beasiswa yang dimaksudkan adalah beasiswa prestasi, perlu disusun kriteria penerima	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
6	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	Penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: (1). *Call center,* (2). Konselor untuk pendampingan penanganan kasus	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi perempuan dalam ruang publik (1). pembinaan perempuan di bidang politik, (2). pembinaan perempuan di bidang ekonomi, (3). pembinaan perempuan di bidang	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pd Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
7	Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan	Pembentukkan kelurahan ramah anak dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong kelurahan agar mampu mempromosikan, memenuhi dan menghormati hak - hak anak kreatifitas anak	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	Konsep kampung wisata disesuaikan dengan konsep penembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam rencana induk pembangunan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
9	Pembangunan *Flyover / Underpass*	Pembangunan *flyover/ underpass*	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan PUPR
10	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	Pembangunan kolam/ saluran retensi	Bandung Nyaman	PD penanggung Jawab urusan PUPR
11	Fasilitas Disabilitas di Semua Ruang Publik	Fasilitas disabilitas, adanya di SKPD lintas sektoral, aksesibilitas di semua layanan publik.	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial, PUPR, Kawasan Permukiman,
		Penbangunan taman RW dan taman tematik yang ramah disabilitas, diantaranya disediakan jalur untuk pengguna kursi roda, toilet yang ramah untuk kaum difabel dan sarana	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Sub Urusan Pertamanan
12	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	Dalam kaitan mengatasi kehilangan air (bukan kebocoran saja), kehilangan dalam faktor administrasi (meteran tidak bagus, sambungan ilegal). Saat ini angka kehilangan air PDAM sebesar 42%. Target kehilangan air dalam 5 tahun ke depan bisa 30% (berkurang 12%). Sambungan air saat ini 174.000 SR.	Bandung Nyaman	PDAM Tirtawening

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
13	Revitalisasi Sarana Olahraga/ Kecamatan	30 Kecamatan	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan
14	Bank Sampah per Kecamatan	Membangun bank sampah per kecamatan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dari sumber.	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
15	Menuntaskan Revitalisasi Pasar Tradisional	Melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan renovasi pasar-pasar tradisional	Bandung Nyaman	PD Pasar Bermartabat, PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
16	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	Pendampingan WUB pada 30 kecamatan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan KUMKM
		Pusat pemberdayaan ekonomi dan Kreatifitas masyarakat (*co-working* space) di dispangtan terkait dengan 4 subsektor, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan *urban farming*.	Bandung Sejahtera	Pd Penanggung Jawab Urusan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Konsep co-working space digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif: konsep pembentukan *co-working space*, direncanakan dibangun dengan konsep *social business* hub, yakni menitikberatkan pada pembentukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial.	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
		(1). Bandung Bersih melalui KANG PISMAN (kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah per keluarga), (2). Kerja sama dengan BPR fasilitasi Kredit Bagja per kelompok masyarakat	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
		1. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna dengan maksud meningkatkan usaha ekonomi dan mengembangkan kewirausahaan 2. Fasilitasi kredit Bagja per kelompok masyarakat, bekerja sama dengan PD. BPR Kota Bandung	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat
17	UMK untuk Guru Honorer	Guru honorer mendapatkan kompensasi sesuai dengan UMK secara bertahap	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
18	Gratis Biaya Pemakaman Bagi Warga Tidak Mampu	Pembebasan biaya pemakaman bbagi warga miskin	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab sub urusan Pemakaman
19	Peningkatan Insentif RT dan RW	Besaran tidak didefinitifkan, yang ditekankan ada peningkatan	Bandung Sejahtera	Kecamatan
			Bandung Sejahtera	Bagian Pemerintahan
20	Subsidi Harga Sembako	Subsidi harga sembako di Dispangtan diaplikasikan dalam Program Penguatan Cadangan Pangan dan ATM Beras. Pengadaan beras diperuntukkan pengisian ATM Beras dan apabila terjadi bencana	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Pangan
		Anggaran subsidi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Disdagin Kota Bandung memfasilitasi dalam hal penyaluran komoditi yang disubsidi di seluruh Kecamatan Se- Kota Bandung	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Perdagangan
21	Kartu Bandung Sejahtera bagi Warga Tidak Mampu	Kartu Bandung sejahtera bagi warga tidak mampu yang multifungsi (untuk akses bansos, akses atm beras, akses proteksi kesehatan, akses Koperasi Juara, dan hal-hal kebutuhan yg terkait dukungan kepada warga tidak mampu)	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Sosial

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
22	Menciptakan 1 Koperasi Juara Setiap Kelurahan	Seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
23	1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di Kelurahan	Seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
24	Peningkatan Intensif untuk Guru Ngaji	Guru ngaji di Kota Bandung berjumlah kurang lebih 12.000 orang dengan database yang berasal dari FKDT, GMM, serta Guru Madrasah	Bandung Agamis	Bagian Kesra
25	Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah	Dari 3.802 masjid yang ada di Kota Bandung, belum seluruhnya memiliki tanah yang bersertifikat begitupula beberapa rumah ibadah agama lain. Dalam mewujudkan Bandung Agamis Pemerintah Kota Bandung menfasilitasi sertifikasinya secara gratis.	Bandung Agamis	Bagian Kesra
26	Gerakan Meyemarakan Tempat Ibadah	Dengan telah dikeluarkannya program Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah, Gerakan Maghrib Mengaji dan Berjama'ah Shalat Waktu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk meyemarakan tempat ibadah. Kegiatan ini tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama Kota Bandung, MUI, dan Ormas Islam	Bandung Agamis	Bagian Kesra

Dari 26 Program Prioritas Wali Kota Bandung, sebanyak 4(empat) program tidak secara langsung dikerjakan melalui program perangkat daerah, yaitu gerakan menyemarakan tempat ibadah yang tidak membutuhkan anggaran khusus, gratis sertifikasi tanah tempat ibadah yang dilakukan dengan mekanisme hibah, penambahan 25.000 sambungan air bersih baru yang diampu oleh PDAM Tirta Wening, serta menuntaskan revitalisasi pasar tradisional yang menjadi kewenangan PD, Pasar bermartabat.

Adapun program prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.13

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Pembangunan Daerah

Visi: Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing																
1.1	**Tujuan: Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu, Adil dan Merata Berlandaskan Nilai-nilai Agama dan Budaya**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**80,31**											**81,20**		
1.1.1	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**	**Harapan Lama Sekolah**	**13,90**	**14,00**		**14,01**		**14,02**		**14,03**		**14,04**		**14,04**		
		Angka Kelulusan	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	**76,72**	**76,74**		**76,76**		**76,78**		**76,80**		**76,82**		**76,82**		
		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	**57,02**	**57,03**		**57,04**		**57,05**		**57,06**		**57,07**		**57,07**		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	56%	57%	5.385.328.910	100%	4.234.488.027	100%	4.350.202.531	100%	4.465.096.762	100%	4.574.612.366	100%		PD Penanggung jawabUrusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102,12%	102,13%	110.617.957.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103,10%	103,11%	105.133.613.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
4	Program Inovasi Pendidikan	Persentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100%	100%	2.740.436.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat ketepatan manajemen pelayanan pendidikan	100%	100%	2.813.813.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	102,12%	-	-	100%	203.965.253.240	100%	209.538.946.704	100%	215.073.129.550	100%	220.348.236.652	100%	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMP	103,10%	-		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%		
7	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	100%	100%	14.016.681.361	100%	8.994.313.996	100%	9.240.098.747	100%	9.484.141.188	100%	9.716.759.092	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
8	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	100%	188.094.000	100%	156.623.456	100%	160.903.456	100%	165.153.115	100%	169.203.832	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
9	Program Bantuan Pendidikan	Angka putus sekolah SD	0,01%	-	-	0,01%	262.039.669.112	0,01%	269.200.343.629	0,01%	276.310.257.787	0,01%	280.779.505.990	0,01%		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
		Persentase siswa miskin SD yang mendapatkan bantuan pendidikan	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%		
		Angka putus sekolah SMP	0,02%	-		0.02%		0.02%		0.02%		0.02%		0.02%		
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapatkan bantuan pendidikan	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapat bantuan pendidikan	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
10	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Angka putus sekolah SD pendidikan gratis	0,01%	0,01%	85.205.850.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
		Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%		-		-		-		-		-		
11	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Angka Putus Sekolah SMP	0,02%	0,02%	197.473.177.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
		Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%		-		-		-		-		-		
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang disertifikasi	50,59%	51,75%	5.356.424.000	52,55%	3.607.726.983	53,35%	3.706.314.189	54,14%	3.804.202.532	54,95%	3.897.508.357	54,95%	1. Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru, dan ASN Berprestasi 2. UMK untuk Guru Honorer	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
13	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Persentase pemustaka per tahun	4,475%	5,04%	1.269.919.500	5,50%	1.057.445.647	6,01%	1.086.342.127	6,50%	1.115.033.766	7,00%	1.142.382.243	7,00%	1 Perpusatakaan Keliling / Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
14	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase *smart library* yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung	1,54%	2,04%	432.188.790	2,54%	372.094.390	3,03%	369.712.324	3,53%	379.476.884	4,03%	388.784.328	4,03%		PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
		Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem kearsipan secara baku	28,12%	37,50%		44,87%		56,25%		62,50%		68,75%		68,75%		
1.1.2	**Sasaran: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	**Umur Harapan Hidup**	**73,86**	**73,90**		**73,92**		**73,94**		**73,96**		**73,98**		**73,98**		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tingkat kesehatan keluarga	NA	-	39.971.989.960	79,24%	32.717.420.387	79,95%	32.118.695.120	80,79%	33.041.778.736	81,63%	33.195.815.836	81,63%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase penanganan masalah gizi buruk	NA	95%		-				-		-		-		
		Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu, dan lansia	NA	85%		-				-		-		-		
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	7,95 %	8,74%	985.127.829	9,6 %	820.303.282	10,58 %	842.719.449	11,64%	864.976.712	12,8 %	886.192.030	12,8 %		PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga	67,8 %	67,85%		67,9 %		67,95 %		68,0 %		68,5 %		68,5 %		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
3	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar	70%	75%	622.970.000	-		-	-	-	-	-	-	-		PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	30%	40%		-		-		-		-		-		
4	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti	NA	-	-	100%	618.661.570	100%	635.567.538	100%	652.353.663	100%	668.353.967	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	37%	37,50%	8.182.050.689	38,59%	4.648.994.114	40,00%	4.745.627.032	50,00%	4.748.732.000	51,00%	4.938.849.165	51,00%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
6	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan	100%	100%	247.576.530	100%	206.153.795	100%	211.787.294	100%	217.380.858	100%	222.712.567	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
7	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu	N/A	1,30%	308.084.463	1,60%	256.537.973	1,90%	263.548.304	2,20%	270.508.941	2,50%	277.143.724	2,50%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
8	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	228.879.013.494	100%	128.583.371.618	100%	131.391.674.632	100%	131.573.379.852	100%	137.008.280.659	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	100%	100%	6.367.858.578	100%	5.491.306.753	100%	5.641.365.942	100%	5.694.539.721	100%	5.932.381.819	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
10	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan BLUD	40,30%	40,30%	326.527.776.045	74,71%	270.220.187.728	97,70%	280.094.477.036	97,70%	282.630.282.164	100%	292.799.843.114	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
11	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	NA	100%	36.946.319.885	100%	27.683.417.737	100%	28.439.913.668	100%	28.903.581.948	100%	29.907.016.934	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
12	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	NA	-	-	100%	2.636.091.829	100%	2.708.127.470	100%	2.779.652.467	100%	2.847.829.113	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
13	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase penanganan penderita penyakit menular	100%	100%	2.698.266.000	-	'	-	'	-	'	-	'	-		PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		-		-		-		-		-		
		Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100%	100%		-		-		-		-		-		
14	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	100%	100%	6.333.518.000	-	'	-	'	-	'	-	'	-		PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
15	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	95%	96%	169.962.087.000	100%	149.852.116.965	100%	153.947.078.002	100%	157.532.646.977	100%	161.888.602.139	100%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayanan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
16	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	NA	-	-	77,40%	25.862.251.122	79,23%	26.568.980.615	81,06%	27.270.700.267	82,88%	27.939.569.804	82,88%		PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
17	Program Pengadaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan, dan Bahan Berbahaya	Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	100%	100%	111.661.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Persentase industri rumah tangga pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar kesehatan	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	20%	40%	756.700.000											PD Pengampu Urusan Kesehatan
19	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	35.786.200.946	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	100%	100%		-		-		-		-		-		
20	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	9%	15%	2.504.858.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Pengampu Urusan Kesehatan
21	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO_2	1,17 poin	-	-	1,16 poin	1.494.407.312	1,15 poin	1.484.840.448	1,14 poin	1.524.056.921	1,13 poin	1.561.437.525	1,13 poin		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
22	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,61	65	1.049.678.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
23	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20 poin	32 poin	999.999.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
24	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	39,13%	-	-	41,30%	1.467.151.548	41,30%	1.457.759.169	43,48%	1.496.260.392	43,48%	1.532.959.230	43,48%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
25	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100%	-	-	100%	1.806.078.342	100%	1.794.516.229	100%	1.841.911.623	100%	1.887.088.262	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
27	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Limbah B3	Persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0%	0,34%	649.528.928	0,51%	602.708.542	0,66%	597.250.184	0,82%	705.263.159	0,93%	753.228.936	0,93%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
28	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	84.473.826.693	130.735 ton	150.141.157.966	145.002 ton	174.916.234.789	176.363 ton	259.656.353.832	206.653 ton	275.925.721.172	206.653 ton	1. Bank Sampah Per Kecamatan 1. Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
29	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	4,563,334,645	28,99%	4.079.615.976	30,75%	4.191.194.768	49,18%	4.301.983.425	67,60%	4.411.250.430	67,60%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
30	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 mnt	-	-	80 mnt	66,465,587,428	60 mnt	65,977,203,206	40 mnt	67,670,969,932	30 mnt	69,364,736,658	30 mnt		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128.334.964.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
32	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,55%	56.498.590.300	3,96%	51.835.399.507	3,36%	53.201.180.176	2,76%	56.300.867.436	2,16%	64.577.717.581	2,16%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
33	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23%	66,51%	75.642.426.333	67,70%	62.692.288.145	68,73%	64.344.130.632	69,67%	65.995.973.120	70,52%	67.647.815.608	70,52%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
34	Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	72,29%	72,50%	6.202.814.500	73%	6.326.870.790	73,50%	6.453.408.206	74%	6.582.476.370	74,50%	6.845.775.425	74,50%		PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Program Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok tribina aktif	N/A	71,06%	808.534.000	74,56%	673.255.870	78,26%	691.653.719	82,16%	709.921.150	86,26%	709.573.191	86,26%		PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
36	Program Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB baru	2.000 pasangan akseptor	2.500 pasangan akseptor	1.003.004.000	2.625 pasangan akseptor	585.382.396	2.757 pasangan akseptor	601.378.954	2.895 pasangan akseptor	617.262.116	3.040 pasangan akseptor	616.959.574	3.040 pasangan akseptor		PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Kampung KB aktif	15	20		31		40		49		58		58		
37	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	47,68%	52,28%	1.764.788.413	68,87%	1.469.516.630	79,47%	1.509.673.643	90,62%	1.549.545.992	100%	1.587.551.767	100%	Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per Kelurahan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	Peningkatan Pelayanan bagi Lansia	Persentase lansia mendapat layanan	18,75%	18,75%	1.488.393.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Pemenuhaan Hak Lanjut Usia	Persentase ketercapaian kriteria Kota Layak Lansia	N/A	-	-	25%	1.239.366.290	50%	1.273.234.058	75%	1.306.861.745	85%	1.338.915.194	85%		PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
38	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	800.000.000	100%	666.149.718	100%	684.353.379	100%	702.427.999	100%	719.656.478	100%	Pusat pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan Per Kelurahan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
39	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat partisi-pasi organisasi perempuan dalam ruang publik	N/A	16,95%	1.767.874.246	30,50%	1.472.086.164	45,76%	1.512.313.393	69,49%	1.552.255.461	100%	1.590.327.692	100%	Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Per Kelurahan	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
40	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	91%	91%	2.949.999.029	92%	2.456.426.278	93%	2.293.263.997	94%	2.590.202.393	95%	2.653.732.389	95%		PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian
41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah maksimum kasus penyakit *zoonosa*	7 kasus	7 kasus	1.184.637.395	7 kasus	986.432.334	7 kasus	977.498.827	7 kasus	1.040.153.093	7 kasus	1.065.664.969	7 kasus		PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
42	Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,25	84,26	2.415.064.464	84,27	2.010.993.141	84,28	2.033.048.587	84,29	2.120.511.123	84,30	2.210.609.070	84,30	Subsidi Harga Sembako	PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian
		Jumlah cadangan pangan ekuivalen besar	60 ton	80 ton		80 ton		80 ton		80 ton		80 ton		80 ton		
43	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi ikan konsumsi	2.970 ton	2.970 ton	1.349.982.986	2.970.5 ton	1.239.757.190	2.971 ton	944.600.505	2.971.5 ton	1.040.153.093	2.972 ton	1.065.664.969	2.972 ton		PD Pengampu Urusan Pangan dan Pertanian
		Produksi ikan hias	1.222.000 ekor	1.222.000 ekor		1.272.000 ekor		1.322.000 ekor		1.372.000 ekor		1.422.000 ekor		1.422.00		
		Tingkat konsumsi ikan	37,95 kg/ kap/th	37,95 kg/ kap/ th		37,97 kg/ kap/th		37,99 kg/ kap/th		38,00 Kg/ kap/th		38,02 kg/ kap/th		38,02 kg/ kap/th		
44	Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	100%	100%	7.449.984.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Pengampu Urusan Pemuda dan Olahraga
45	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	90%	90%	62.266.278.950	90%	58.260.014.611	90%	59.882.067.461	90%	61.432.834.617	90%	62.939.600.167	90%		PD Pengampu Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
46	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	90%	90%	4.306.995.74219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Revitalisasi sarana olahraga/ kecamatan	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
47	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	NA	-	-	100%	6.167.771.664	100%	6.336.316.600	100%	6.503.666.561	100%	6.663.182.247	100%	Revitalisasi sarana olahraga/ kecamatan	PD Pengampu urusan Kepemudaan dan Olahraga
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih																
2.1	**Tujuan: Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**69,81**											**70,13**		
2.1.1	**Sasaran: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**	**Nilai Evaluasi AKIP Kota**	**A**	**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		**A**		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Bandung komponen pelaporan	12,61	13,00	375.000.000	13,25	312.257.680	13,50	320.010.134	13,75	329.263.124	14,00	337.338.974	14,00		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
2	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	430.000.000	100%	358.055.473	100%	367.839.941	100%	396.946.094	100%	386.815.356	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	6.169.227.052	100%	5.146.516.362	100%	5.423.286.617	100%	5.873.798.574	100%	5.767.638.691	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan
4	Program Penyusunan Data, Informasi, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase penyelesaian dokumen LKPJ tepat waktu	100%	100%	560.000.100	100%	466.304.886	100%	479.047.451	100%	516.953.145	100%	503.759.624	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Perencanaan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Nilai LPPD Kota	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**		
5	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	3.4110 (ST)	3.4110 (ST)	553.090.000	3.4200 (ST)	460.550.934	3.4300 (ST)	471.985.080	3.4400 (ST)	485.632.377	3.4500 (ST)	497.543.501	3.4500 (ST)		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
6	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	100%	100%	3.171.397.223	100%	2.932.222.210	100%	3.005.020.793	100%	3.091.910.005	100%	3.167.745.404	100%	1. PIPPK Plus 2. Peningkatan Insentif RT dan RW	PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	**WDP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
7	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17.64%	19%	1.263.222.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	-	-	2 dokumen	4.572.240.053	2 dokumen	4.707.394.638	2 dokumen	4.841.678.242	2 dokumen	4.970.131.823	2 dokumen		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	350 lokasi per bidang tanah	-	-	30 lokasi per bidang tanah		30 lokasi per bidang tanah		30 lokasi per bidang tanah		30 lokasi per bidang tanah		500 lokasi per bidang tanah		
		Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17.64%	-	-	21%		24%		27%		30%		30%		
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	93.047.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 dokumen	2 dokumen	9.622.978.391	-	4.017.782.332	-	4.117.364.550	-	4.216.153.756	-	4.309.861.976	-		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	350 lokasi per bidang tanah	30 lokasi per bidang tanah		-		-		-		-		-		
		Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		
		Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perudang undangan	2 hari kerja	2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	14 dokumen	14 dokumen		14 dokumen		14 dokumen		14 dokumen		14 dokumen		14 dokumen		
11	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	80%	80%	1.075.662.600	85%	895.690.422	90%	917.927.820	95%	944.469.409	100%	967.634.447	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan)
12	Program Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	80%	80%	774.423.000	80%	619.871.464	95%	635.261.077	95%	653.629.447	100%	669.661.042	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan)
13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase capaian sistem pengawasan / pengendalian internal	100%	100%	1.470.220.000	100%	1.249.213.913	100%	1.280.228.275	100%	1.317.245.665	100%	1.349.553.801	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya (Pengawasan)
		Tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawass	N/A	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	**51.61**	**60**		**70**		**80**		**90**		**100**		**100**		
14	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	100%	100%	1.301.931.749	100%	1.084.101.834	100%	1.111.016.942	100%	1.143.141.641	100%	1.171.179.521	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
15	Program Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80,17	1.404.125.000	80,19	1.169.196.841	80,21	1.201.147.111	80,23	1.232.870.892	80,25	1.263.109.565	80,25		PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
16	Program pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	NA	-	-	60%	2.193.039.063	65%	2.414.624.200	70%	2.657.982.413	75%	2.922.323.898	75%		PD Penanggung Jawab Urusan Disdukcapil
17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentasi pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	443.570.000	100%	369.355.038	100%	379.448.286	100%	389.469.984	100%	399.022.530	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
18	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	96,38%	97,11%	550.382.800	97,83%	458.296.684	98,56%	470.820.411	99,28%	483.255.361	100%	495.108.184	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	42,08%	45,69%	11.916.613.036	52,40%	9.006.781.190	60,23%	9.439.669.234	60,97%	9.595.945.789	74,06%	9.947.294.515	74,06%		PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
20	Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	100%	100%	972.760.000	100%	1.482.183.123	100%	1.522.686.269	100%	1.562.902.297	100%	1.601.235.663	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informasi
21	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan	100%	100%	610.164.000	100%	508.075.720	100%	521.959.744	100%	535.745.346	100%	548.885.594	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Kearsipan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
22	Program Layanan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan angggota DPRD	85%	85%	38.489.479.007	85%	31.355.952.022	85%	32.134.429.472	85%	33.063.586.196	85%	33.874.538.074	85%		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
23	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	79,64%	80 %	1.143.958.578	80 %	1.249.774.746	80,20 %	1.258.983.612	80,40 %	1.273.454.688	80,50%	1.278.230.143	80,50%	Peningkatan Insentif RT dan RW (Program Kecamatan)	PD Penanggung Jawab Urusan Disdukcapil
		Level Kematangan *Smart City* Kota Bandung	***Integrative***	***Integrative***		***Integrative***		***Smart***		***Smart***		***Smart***		***Smart***		
24	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan persentase dokumen hasil kajian yang digunakan dalam rumusan kebijakan yang di implementasikan	50%	50%	578.020.600	60%	589.559.654	70%	605.670.362	80%	621.666.866	90%	636.914.514	90%		PD Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
25	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	100%	12.290.734.328	100%	12.404.735.565	100%	12.743.715.820	100%	13.080.293.122	100%	13.401.113.986	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Komunikasi dan Informasi
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan																
3.1	**Tujuan: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Yang Maju, Berkelanjutan Dan Berkeadilan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**7,21**											**7,98**		
3.1.1	**Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Kota**	**PDRB PerKapita**	**69,20**	**70,73**		**73,38**		**76,03**		**78,68**		**81,33**		**81,33**		
		Indeks Daya Saing Pariwisata	**3,27**	**3,39**		**3,55**		**3,65**		**3,69**		**3,74**		**3,74**		
		Pengeluaran Per Kapita	**16.156 ribu rupiah/ org/thn**	**16.370 ribu rupiah/ org/thn**		**16.584 ribu rupiah/ org/thn**		**16.798 ribu rupiah/ org/thn**		**17.013 ribu rupiah/ org/thn**		**17.227 ribu rupiah/ org/thn**		**17.227 ribu rupiah/ org/thn**		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	240 UMKM	240 UMKM	3.130.220.000	240 UMKM	2.788.184.177	240 UMKM	2.864.345.115	240 UMKM	2.939.996.014	240 UMKM	3.012.105.412	1.200 UMKM	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi berkualitas	N/A	30 koperasi	2.976.840.687	30 koperasi	2.591.605.934	40 koperasi	2.662.425.924	50 koperasi	2.732.743.887	70 koperasi	2.799.770.003	220 koperasi	1. Menciptakan 1 Koperasi Juara setiap kelurahan 2. 1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di kelurahan	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	1 sentra	1 sentra	249,999,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	-	-	-	4 sentra	208.171.641	8 sentra	213.860.281	12 sentra	219.508.596	16 sentra	224.892.492	16 sentra		PD Penanggung Jawab Urusan Perindustrian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	US$ 466 jt	US$ 466 jt	1.190.989.000	US$ 467 juta	1.239.651.542	US$ 468 juta	1.273.527.105	US$ 469 juta	1.307.162.531	US$ 470 juta	1.339.223.358	US$ 470 juta		PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
6	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha perdagangan dalam negeri berkualitas	255 pelaku usaha	255 pelaku usaha	1.654.301.300	275 pelaku usaha	1.629.306.452	375 pelaku usaha	1.673.829.990	450 pelaku usaha	1.718.037.911	600 pelaku usaha	1.760.176.295	1.955 pelaku usaha		PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
7	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi	2.970 ton	2.970 ton	1.349.982.965	2.970 .5 ton	1.239.757.190	2.971 ton	944.600.505	2.971.5 ton	1.040.153.093	2.972 ton	1.065.664.969	2.972 ton		PD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan
8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas tanaman padi	68,08 kw/ ha	68,08 kw/ ha	2.073.211.203	68,22 kw/ ha	1.903.934.021	68,36 kw/ ha	1.886.691.271	68,50 kw/ ha	1.922.035.995	68,64 kw/ ha	2.003.700.974	68,64 kw/ ha		PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
9	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi ternak domba	36.756 ekor	36.756 ekor	787.240.176	37.829 ekor	655.524.777	38.437 ekor	616.689.773	39.158 ekor	691.224.427	39.849 ekor	708.178.116	39.849 ekor		PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
10	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA)	400 investor	500 investor	2.299.997.270	550 investor	1.915.178.167	600 investor	1.967.513.630	650 investor	2.019.478.100	700 investor	2.069.009.919	700 investor		PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
		Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
11	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	4,756 triliun	5,23 triliun	1.149.885.616	5,65 Triliun	957.494.974	6,10 triliun	983.660.134	6,59 triliun	1.009.639.815	7,12 triliun	1.034.403.291	7,12 triliun		PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
12	Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	N/A	20,00%	2.859.209.998	24,00%	3.629.858.141	28,00%	3.729.050.117	40,00%	3.827.538.945	48,00%	3.921.417.143	48,00%	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
13	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik / tersertifikasi jasa usaha	N/A	5,39%	1.789.990.000	10,78%	1.765.288.427	16,17%	1.813.527.901	21,56%	1.861.425.417	26,95%	1.907.080.671	26,95%		PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
14	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Indeks *brand awareness* pariwisata Kota Bandung	N/A	3,46	2.781.741.718	3,80	2.611.615.588	3,98	2.682.982.375	4,12	2.753.843.259	4,24	2.821.386.881	4,24	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
15	Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Persentase lembaga dan SDM pariwisata meningkat kompetensinya	N/A	0,97%	1.291.701.884	1,94%	532.530.128	2,90%	547.082.409	3,87%	561.531.532	4,84%	575.304.238	4,84%	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
16	Program Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	N/A	0,26%	330.040.000	0,52%	274.820.066	1,05%	282.329.987	1,57%	289.786.671	2,10%	296.894.280	2,10%		PD Pengampu Urusan Kebudayaan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
17	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	N/A	0,26%	1.166.117.000	0,52%	971.010.639	1,05%	997.545.137	1,57%	1.023.891.538	2,10%	1.049.004.567	2,10%		PD Pengampu Urusan Kebudayaan
18	Program Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	N/A	0,26%	12.349.000.000	0,52%	9.380.220.722	1,05%	9.636.551.024	1,57%	9.891.064.260	2,10%	10.133.662.781	2,10%		PD Pengampu Urusan Kebudayaan
19	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	200 orang	1.978.833.493	220 orang	1.647.749.418	260 orang	1.692.776.941	300 orang	1.737.485.275	320 orang	1.780.100.645	1.480 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
20	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45,30%	45,30%	5.134.153.733	45,56%	4.275.143.829	45,65%	4.391.969.322	45,90%	4.507.966.666	46,19%	4.618.533.742	46,19%		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
21	Program Padat Karya	Jumlah pekerja padat karya	300 orang	-	-	600 orang	635.531.552	600 orang	761.230.584	700 orang	859.814.427	800 orang	970.118.009	3.000 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
22	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus selesai melalui perjanjian bersama	58%	58%	2.803.215.305	58%	2.334.201.357	59%	2.397.987.334	59%	2.461.321.146	59%	2.521.690.067	59%		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
23	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	100%	9.622.978.391	100%	4.017.782.332	100%	4.117.364.551	100%	4.216.153.756	100%	4.309.861.976	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
24	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17,64%	19%	1.263.222.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17,64%	-	-	21%	4.572.240.053	24%	4.707.394.638	27%	4.841.678.242	30%	4.970.131.823	30%		PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
26	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	2.436.311.729.898	2.436.311.729.898	2.541.188.850	2.522.552.659.693	2.116.015.296	2.691.062.135.340	2.168.549.826	2.898.122.897.465	2.231.252.748	3.082.342.305.461	2.285.978.772	3.082.342.305.461		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang Lainnya
27	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 menit	-	-	80 menit	66.465.587.428	60 menit	65.977.203.206	40 menit	77.670.969.932	30 menit	79.364.736.658	30 menit		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128.334.964.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembangunan *Flyover/Underpass*	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
29	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	-	-	2.500 Ttk	39.680.947.718	2.500 Ttk	39.389.375.048	2.500 Ttk	40.400.579.064	2.500 Ttk	41.411.783.079	56.500 Ttk		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	-	-	94%	335.568.132.636	95%	334.279.861.209	96%	347.637.072.754	97%	350.544.284.299	97%		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19,5%	20,00%	29.711.009.902	20,25%	28.414.070.273	20,50%	29.190.532.516	20,75%	29.961.490.597	21,00%	30.696.357.255	21%		PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
32	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,55%	56.498.590.300	3,96%	51.835.399.507	3,36%	53.201.180.176	2,76%	56.300.867.436	2,16%	64.577.717.581	2,16%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan PDAM

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
3.2	**Tujuan: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju. Berkelanjutan Dan Berkeadilan**	**Indeks Gini**	**0,44**											**0,40**		
3.2.1	**Sasaran: Meningkatkan kesempatan kerja**	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**8,44**	**8,39**		**8,34**		**8,29**		**8,25**		**8,22**		**8,22**		
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	240 orang	1.978.833.734	280 orang	1.647.749.418	260 orang	1.692.776.941	320 orang	1.737.485.275	360 orang	1.780.100.645	1.600 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45,30%	45,30%	5.134.153.733	45,56%	4.275.143.829	45,65%	4.391.969.322	45,90%	4.507.966.666	46,19%	4.618.533.742	46,19%		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
3	Program Padat Karya	Jumlah Pekerja padat karya	300 orang	300 orang	-	600 orang	635.531.552	600 orang	761.230.584	700 orang	859.814.427	800 orang	970.118.009	3.000 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar kesetaraan	0,22 %	0,24 %	14.016.681.361	0,27%	8.994.313.996	0,29%	9.240.098.747	0,31%	9.484.141.188	0,33 %	9.716.759.092	0,33 %		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
5	Program Pengembangan Ekosistem Kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	25%	50%	2.300.790.000	62,50%	2.069.885.386	75,00%	2.126.448.484	87,50%	2.182.610.619	93,75%	2.236.143.596	93,75%	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
6	Program Pengembangan Infrastruktur Terpadu Ekonomi Kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	N/A	3,33%	1.108.372.400	6,67%	644.816.274	10,00%	662.436.962	13,33%	679.932.742	26,67%	696.609.479	26,67%	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
7	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM usaha mikro yang meningkat kualitasnya	60%	60%	867.040.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat	NA	-	-	60%	768.057.245	60%	798.045.701	60%	809.885.374	60%	829.749.465	60%		
9	Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemudaan	100%	100%	4.308.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
10	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif	23%	29%	5.770.534.438	35%	8.809.264.339	42%	9.049.992.298	50%	9.289.013.793	60%	9.516.845.799	60%		PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
11	Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	100%	100%	7.449.984.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
12	Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	90%	90%	62.266.278.950	90%	58.260.014.611	90%	59.852.067.461	90%	61.432.834.617	90%	62.939.600.167	90%		PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
13	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya pelaku usaha bidang peternakan	80 orang	80 orang	517.573.670	90 orang	430.976.943	100 orang	394.175.529	110 orang	454.447.797	120 orang	465.594.056	120 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
14	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya pelaku usaha bidang perikanan	80 orang	80 orang	499.997.263	90 orang	416.341.295	100 orang	427.678.195	110 orang	439.015.096	120 orang	449.782.837	120 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Bertambahnya pelaku usaha bidang pertanian	80 orang	80 orang	2.073.211.203	90 orang	1.903.934.021	100 orang	1.886.691.271	110 orang	1.922.035.995	120 orang	2.003.700.974	120 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan. Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian, dan perikanan diberdayaan	48 kelompok	48 kelompok	2.310.082.272	48 kelompok	1.923.575.819	51 kelompok	1.910.344.117	54 kelompok	2.028.333.085	57 kelompok	2.078.082.090	57 kelompok	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
17	Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase infrastruktur kepemudaan yang memenuhi standar	100%	100%	1.850.074.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. 1 Pusat Kreativitas Pemuda Per wilayah *2. Youthspace* di Setiap Kelurahan	PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga
18	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase Infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	N/A	-	-	100%	6.167.771.864	100%	6.336.316.600	100%	6.503.666.561	100%	6.663.182.247	100%	1. 1 Pusat Kreativitas Pemuda Per wilayah *2. Youthspace* di Setiap Kelurahan	PD Penanggung Jawab Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
3.2.2	**Sasaran: Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin**	**Angka Kemiskinan**	**4,17**	**3,83**		**3,66**		**3,49**		**3,32**		**3,14**		**3,14**		
1	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	62.000 KK	62.000 KK	2.415.899.095	62.000 KK	2.011.688.127	65.000 KK	2.066.660.887	68.000 KK	2.121.243.959	72.000 KK	2.173.271.793	72.000 KK		PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
2	Program Pemberdayaan PMKS	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	N/A	200 orang	1.786.855.975	500 orang	1.487.892.006	500 orang	1.528.551.156	500 orang	1.568.922.084	500 orang	1.607.403.097	2.200 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
3	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100%	100%	1.493.618.190	100%	4.757.474.909	100%	4.887.480.910	100%	5.016.565.328	100%	5.139.606.823	100%	Kartu Bandung Sejahtera bagi Warga Tidak Mampu	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
4	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100%	100%	1.683.301.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	100%	80%	1.499.728.900	85%	1.248.804.980	90%	1.282.930.676	95%	1.316.814.463	100%	1.349.112.023	100%		
6	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	100%	100%	11.542.135.773	100%	12.822.248.477	100%	13.172.637.975	100%	13.520.543.642	100%	10.382.965.974	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	2.173.201.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fasilitas Disabilitas di semua Ruang Publik	PD Penanggung Jawab Urusan Sosial

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
8	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	200 orang	100%	4.219.782.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Sosia
9	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	100%	100%	1.490.900.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Sosial
10	Program Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras	60 ton	80 ton	2.415.064.464	80 ton	2.010.993.141	80 ton	2.033.048.587	80 ton	2.120.511.123	80 ton	2.210.609.070	80 ton	Subsidi Harga Sembako	PD Penanggung Jawab Urusan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	84,25	84,26		84,27		84,28		84,29		84,30		84,30		
11	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah UM yang usahanya meningkat	240 UMKM	240 UMKM	3.130.220.000	240 UMKM	2.788.154.116,62	240 UMKM	2.864.345.115	240 UMKM	2.939.996.014	240 UMKM	3.012.105.412	1200 UMKM	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
12	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki	34,09 %	66,51%	75.642.426.333	67,70%	62.692.288.145	68,73%	64.344.130.632	69,67%	65.995.973.120	70,52%	67.647.815.608	70,52%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Program Bantuan Pendidikan	Angka putus sekolah SD	NA	NA	-	0,01%	262.039.669.112	0,01%	269.200.343.629	0,01%	276.310.257.787	0,01%	280.779.505.990	0,04% (komulatif)		PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
		Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	-	-		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		
		Angka Putus sekolah SMP	NA	NA		0.02%		0.02%		0.02%		0.02%		0.08% (komulatif)		
		Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan		-		100%		100%		100%		100%		100%		
14	Program Padat Karya	Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (padat karya)	300 orang	300 orang	-	600 orang	635.531.552	600 orang	761.230.584	700 orang	859.814.427	800 orang	970.118.009	3000 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	120 orang	120 orang	187.758.600	120 orang	156.344.173	120 orang	160.616.541	120 orang	164.858.622	120 orang	168.902.116	600 orang		PD Penanggung Jawab Urusan Tenaga Kerja
16	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase tingkat lonjakan harga kebutuhan pokok	15%	15%	1.574.999.760	15%	1.311.482.058	15%	1.303.086.241	15%	1.337.502.360,	15%	1.370.307.333	15%	Subsidi Harga Sembako	PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
17	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	95%	96%	169.962.087.000	97%	149.852.116.965	98%	153.947.078.002	99%	157.532.646.977	100%	161.888.602.139	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
18	Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase kelurahan klasifikasi swasembada	24,50%	41,72%	1.450.000.000	56,29%	1.207.396.365	71,52%	1.240.390.500	85,43%	1.273.150.748	100%	1.304.377.366	100%	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan																
4.1	**Tujuan: Terwujudnya infrastruktur Dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**	**Indeks *Liveable City* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur**	**7,375**											**8,00**		
4.1.1	**Sasaran: Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan**	**Persentase RTH**	**12,2%**	**12,4%**		**12,6%**		**12,8%**		**13,0%**		**13,2%**		**13,2%**		
1	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	76%	1.238.097.779	77%	1,030,948,108	78%	1,059,120,499	79%	1,087,093,182	80%	1,113,756,359	80%		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44,73%	46,99%	24.715.554.518	50,31%	38.182.202.746	53,25%	39.188.243.308	55,85%	40.194.283.869	58,18%	41.200.324.431	58,18%	Fasilitas Disabilitas di Semua Ruang Publik	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
3	Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik	100%	100%	7.434.738.905	100%	7.190.646.839	100%	7.380.108.993	100%	7.569.571.147	100%	7.759.033.302	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	Cakupan penyelesaian penegakan perda	100%	100%	2.217.500.000	100%	1.991.787.658	100%	2.046.216.604	100%	2.100.259.717	100%	2.151.772.869	100%		PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase penegakan perda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17,64%	19%	102.929.252.870	-	-	-	-	-	- -		- -			PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
		Persentase luasan RTH	12,20%	12,21%		12,215%	145.554.390.708	12,22%	149.389.518.345	12,225%	153.224.645.982 12.23%		157.059.773.618 012.23%			PD Penanggung Jawab Urusan Pertanahan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17,64%	-	-	21%	4.572.240.053	24%	4.707.394.639	27%	4.841.678.242 30%		4.970.13.824 30%			PD Penanggung Jawab Urusan Keuangan
7	Program Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	82	1.404.125.000	82,02	1.169.196.842	82,04	1.201.147.111	82,04	1.232.870.892	82,04	1.263.109.,565	82,04		PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
		Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan gedung umum yang memenuhi rth privat sesuai peraturan yang berlaku	NA	0%	5.488.082.054	5%	3.157.591.591	5%	3.243.878.090	5%	3.329.552.924	5%	3.411.216.999	5%		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen rencana rinci pada pusat-pusat pelayanaan kota	2 dokumen	2 dokumen	2.149.779.700	2 dokumen	1.790.093,927	2 dokumen	1.839,011,253	2 dokumen	1.887.581.816	2 dokumen	1.933.878.609	2 dokumen		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
10	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal pemakaman ditata	75%	31%	11.435.696.855	32%	10.518.731.148	33%	10.806.173.161	34%	11.091.577.565	35%	11.363.621.124	35%		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	4.563.334.645	28,99%	4.079.615.976	30,75%	4.191.194.768	49,18%	4.301.983.425	67,60%	4.411.250.430	67,60%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
12	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	68,08 kw/ ha	68,08 kw/ ha	2.073.211.203	68,22 kw/ ha	1.903.934.021 5	68,36 kw/ ha	1.886.691.271 7	68,50 kw/ ha	1.922.035.995 6	68,64 kw/ ha	2.003.700.974	68,64 kw/ ha		PD Penanggung Jawab Urusan Pertanian
		Produksi tanaman sayuran	237.000 Pohon	237.000 Pohon		278.400 pohon		287.936 pohon		297.621 pohon		308.270 pohon		308.270 pohon		
		Produksi tanaman hias	155.485 Pohon	155.485 Pohon		161.864 Pohon		168.489 pohon		175.369 pohon		182.763 pohon		182.763 pohon		
		Jumlah penanaman pohon buah-buahan	10.000 Pohon	10.000 Pohon		11.000 Pohon		12.000 Pohon		13.000 Pohon		14.000 Pohon		14.000 Pohon		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
13	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	64-100%	64%-100%	203.166.700.229	65%-100%	221.722.100.014	65%-100%	269.161.010.786	65%-100%	299.247.554.671	65%-100%	328.598.858.232	65%-100%	PIPPK Plus	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.1.2	**Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas**	**Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan**	**120 Menit**	**100 Menit**		**80 Menit**		**60 Menit**		**40 Menit**		**30 Menit**		**30 Menit**		
1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128,334,964,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 mnt	-	-	80 mnt	66.465.587.428	60 mnt	65,977,203,206	40 mnt	77,670,969,932	30 mnt	79,364,736,658	30 mnt	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	84,473,826,693	130.735 ton	150.141.157.966	145.002 ton	174.916.234.789	176.363 ton	259.656.353.832	206.653 ton	275.925.721.172	206.653 ton	1. Bank Sampah Per kecamatan 2. Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	100%	100%	6.169.227.052	100%	5.146.516.362	100%	5.423.286.617	100%	5.873.798.574	100%	5.767.638.691	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penunjang
5	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	76%	1.238.097.779	77%	1.030.948.108	78%	1.059.120.499	79%	1.087.093.182	80%	1.113.756.359	80%		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	4.563.334.645	28,99%	4,079,615,976	30,75%	4.191.194.768	49,18%	4.301.983.425	67,60%	4.411.250.430	67,60%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
7	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100%	100%	2.959.735.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	12,5%	12,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33.38%	-	-	33.43%	3,002,858,690	33.45%	2,983,635,053	33.47%	3,062,436,547	33.49%	3,137,549,048	33.49%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	**12 aspek**	**11 aspek**		**10 aspek**		**9 aspek**		**8 aspek**		**7 aspek**		**7 aspek**		
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128.334.964.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembangunan *Flyover / underpass*	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	-	-	94%	335.568.132.636	95%	334.729.861.209	96%	347.637.072.754	97%	350.544.284.299	97%	Pembangunan *Flyover / underpass*	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (*flyover/underpass*)	3	-		1		1		1		1		4		
		Luasan trotoar dalam kondisi Baik	397.535 m^2	-		13.000 m^2		13.000 m^2		13.000 m^2		13.000 m^2		462.535 m^2		
		Luasan drainase dalam kondisi Baik	602.402 m	-		8.000 m		8.000 m		8.000 m		8.000 m		642.402 m		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
11	Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	-	-	2.500 Ttk	39.680.947.718	2.500 Ttk	39,389,375,048	2.500 Ttk	40,400,579,064	2.500 Ttk	41,411,783,079	56.500 Ttk		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19,5%	20%	29,711,009,902	20,25%	28,414,070,273	20,50%	29,190,532,516	20,75%	29,961,490,597	21%	30,696,357,255	21%		PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
13	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketercapaian tertib dan keselamatan lalu lintas	1%	5%	16,474,451,086	10%	16,167,500,930	15%	16,609,305,074	20%	17,047,977,373	25%	17,466,113,784	25%		PD Penanggung Jawab Urusan Perhubungan
14	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase penegakan perda	100%	100%	2,217,500,000	100%	1,991,787,658	100%	2,046,216,604	100%	2,100,259,717	100%	2,151,772,869	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	**9,76%**	**4,55%**		**3,96%**		**3,36%**		**2,76%**		**2,16%**		**2,16%**		
15	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,55%	56.498.590.300	3,96%	51.835.399.507	3,36%	53.201.180.176	2,76%	56.300.867.436	2,16%	64.577.717.581	2,16%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dan PDAM
		Cakupan layanan air bersih	77,27%	79%		80%		81%		82%		83%		83%		
16	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23%	66,51%	75.642.426.333	67,70%	62.692.288.145	68,73%	64.344.130.632	69,67%	65.995.973.120	70,52%	67.647.815.608	70,52%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Rata-rata tingkat waktu maksimum *assesment* tanggap darurat bencana	N/A	24 jam	1.091.176.700	24 jam	1.096.027.617	24 jam	1.151.925.912	24 jam	1.210.393.952	24 jam	1.270.290.729	24 jam		PD Penanggung Jawab Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
18	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat waktu maksimum tanggap (*response time rate*)	15 menit	15 menit	11,225,139,100	15 menit	10,977,288,366	15 menit	11,227,133,042	15 menit	11,474,779,022	15 menit	11,708,591,591	15 menit		PD Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
19	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	76%	1.238.097.779	77%	1,030,948,108	78%	1,059,120,499	79%	1,087,093,182	80%	1,113,756,359	80%		PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	84,473,826,693	130.735 ton	150.141.157.966	145.002 ton	174.916.234.789	176.363 ton	259.656.353.832	206.653 ton	275.925.721.172	206.653 ton	1. Bank Sampah per kecamatan 2. Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
21	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan peningkatan phbs tatanan rumah tangga	67,8 %	67,85	985.127.829	67,9 %	820,303,282	67,95 %	842,719,449	68,0 %	864,976,712	68,5 %	886,192,030	68,5 %		PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
22	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar	70%	-	'	77%	618,661,570	80%	635,567,538	82%	652,353,663	85%	668,353,967	85%		PD Penanggung Jawab Urusan Kesehatan
4.1.3	**Sasaran: Meningkatnya Layanan Air Bersih**	**Cakupan Layanan Air bersih**	**77,27%**	**79%**		**80%**		**81%**		**82%**		**83%**		**83%**		
1	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,55%	56,498,590,300	3,96%	51.835.399.507	3,36%	53.201.180.176	2,76%	56.300.867.436	2,16%	64.577.717.581	2,16%	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan PDAM
		Cakupan Layanan Air bersih	77.27%	79%		80%		81%		82%		83%		83%		
2	Program Peningkatan Cakupan Pelayanan	Jumlah penambahan sambungan rumah (SR) perpipaan air bersih	15.000 SR	21.000 SR		10.000 SR		10.000 SR		10.000 SR		25.000 SR		91.000 SR	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	PDAM
3	Program Peningkatan Kapasitas Produksi	Kapasitas produksi air baku	3.042 ltr/ det	3.742 ltr/ det		3.862 ltr/ det		3.962 ltr/ det		4.062 ltr/ det		4.129 ltr/ det		4.129 ltr/ det	25.000 sambungan air bersih baru	PDAM

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
4	Program Penurunan Tingkat Kehilangan Air	Persentase pengurangan kebocoran air	42%	40%		37%		35%		33%		30%		30%	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	PDAM
4.1.4	**Sasaran: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**35,23**	**35,35**		**35,47**		**35,59**		**35,71**		**35,83**		**35,83**		
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	20 poin	32 poin	999.999.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase Sungai dengan Status Indeks Pencemaran "cemar ringan"	39,13%	-	-	41,30%	1,467,151,548	41,30%	1,457,759,169	43,48%	1,496,260,392	43,48%	1,532,959,230	43,48%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	58,61	65	1.049.678.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
4	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO^2	1,17 poin	-	-	1,16 poin	1.494.407.312	1,15 poin	1.484.840.448	1,14 poin	1.524.056.921	1,13 poin	1.561.437.525	1,13 poin		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
5	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100%	100%	2.959.735.350	-	-	-	-	-	-		-	-		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	10%	10%		-	-	-	-	-	-		-	-		
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,38%	-	-	33,43%	3.002.858.690	33,45%	2.983.635.053	33,47%	3.062.436.547	33,49%	3.137.549.048	33,49%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
6	Program Pencegahan Dampak Lingkungan	Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan	100.00%	-	-	100%	1.806.078.342	100%	1.794.516.229	100%	1.841.911.623	100%	1.887.088.262	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Akibat Limbah B3	Persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0,00%	0,34%	649,528,928	0,51%	602,708,542	0,66%	597,250,184	0,82%	705,263,159	0,93%	735,228,936	0,93%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8,8%	17,61%	4,563,334,645	28,99%	4,079,615,976	30,75%	4,191,194,768	49,18%	4,301,983,425	67,60%	4,411,250,430	67,60%		PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
9	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9,76%	4,55%	56,498,590,300	3,96%	51.835.399.507	3,36%	53.201.180.176	2,76%	56.300.867.436	2,16%	64.577.717.581	2,16%		PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128,334,964,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
11	Program Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 mnt	-	-	80 mnt	66.465.587.428	60 mnt	65.977.203.206	40 mnt	77.670.969.932	30 mnt	79.364.736.658	30 mnt	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	PD Penanggung Jawab Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44,73%	46,99%	24.715.554.518	50,31%	38.182.202.746	53,25%	39.188.243.308	55,85%	40.194.283.869	58,18%	41.200.324.431	58,18%	Fasilitas Disabilitas di Semua Ruang Publik	PD Penanggung Jawab Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	N/A	-	-	45%	618.661.570	47%	635.567.538	50%	652.353.663	55%	668.353.967	55%		PD Pengampu Urusan Kesehatan
14	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	2.217.500.000	100%	1.991.787.658	100%	2.046.216.604	100%	2.100.259.717	100%	2.151.772.869	100%		PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	**97,97%**	**98%**		**98,3%**		**98,5%**		**98,7%**		**99%**		**99%**		
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan didaur ulang di sumber sampah	103.601.6 ton	116.915 ton	84,473,826,693	130.735 ton	150.141.157.966	145.002 ton	174.916.234.789	176.363 ton	259.656.353.832	206.653 ton	275.925.721.172	644.653 ton	1. Bank Sampah Per kecamatan 2. Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (*Co-Working space*) Per Kecamatan	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup
16	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Persentase penegakan perda	100%	100%	2,217,500,000	100%	1,991,787,658	100%	2,046,216,604	100%	2,100,259,717	100%	2,151,772,869	100%		PD Pengampu Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
17	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	64-100%	64%-100%	203.166.700.229	65%-100%	221.722.100.014	65%-100%	269.161.010.786	65%-100%	299.247.554.671	65%-100%	328.598.858.232	65%-100%	PIPPK Plus	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan dan Desa
Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi																
5.1	**Tujuan : Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan**	**Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan**	**17,86%**											**100%**		
5.1.1	**Sasaran: Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan**	**Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan (Bobot 50%)**	193 Miliar	Meningkat 2% dari tahun 2018		Meningkat 4% dari tahun 2018		Meningkat 6% dari tahun 2018		Meningkat 8% dari tahun 2018		Meningkat 10% dari tahun 2018		Meningkat 10% dari tahun 2018		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan	N/A	30 lembaga	4.098.592.850	-	-	-	-	-	-	-	-	30 lembaga		
5.1.2	**Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan**	**Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan (Sesuai Perda 13 Tahun 2012) yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga (bobot 25%)**	**71,43%**	**71,43%**		**71,43%**		**85,71%**		**85,71%**		**100%**		**100%**		
		Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan Yang Dibiayai Dari Swasta (Akumulasi) (Bobot 25%)	**0%**	**33,33%**		**33,33%**		**66,66%**		**66,66%**		**100%**		**100%**		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	Prioritas Kepala Daerah (Janji Politik)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama aktif yang diimplementasikan	100%	100%	6.127.155.000	100%	5.102.003.222	100%	5.228.671.181	100%	5.379.856.532	100%	5.511.808.485	100%		PD Pengampu Urusan Penunjang Lainnya
2	Program Koordinasi Perumusan dan Implemantasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui TJSL	58 perusahaan	62 perusa-haan	2.380.114.118	66 perusa-haan	2.190.062.224	71 perusa-haan	2.244.435.124	76 perusa-haan	2.309.332.246	81 perusa-haan	2.365.973.329	81 peru-sahaan		PD Pengampu Urusan Penunjang Lainnya
		Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga	3 perusa-haan	4 perusa-haan		5 perusa-haan		6 perusa-haan		7 perusa-haan		8 perusa-haan		8 perusa-haan		
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	N/A	100%	2.299.997.270	100%	1.915.178.167	100%	1.967.513.630	100%	2.019.478.100	100%	2.069.009.919	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal
4	Program Pelayanan Perijinan	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	100%	1.404.125.000	100%	1.169.196.842	100%	1.201.147.111	100%	1.232.870.892	100%	1.263.109.565	100%		PD Penanggung Jawab Urusan Penanaman Modal

Selain program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, berikut merupakan program strategis lain yang dibiayai di luar APBD Kabupaten/Kota, antara lain yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN, KPBU, dan Swasta.

Tabel 6.14
Rencana Proyek Strategis Kota Bandung
Tahun 2018-2023

No	Kegiatan	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBD Provinsi	APBN	KPBU	SWASTA	
I	**Proyek Strategis Nasional**					
1.1	**Kereta Api**					
1	*High Speed Railway* Jakarta – Bandung.		√		√	2019
1.2	**Infrastruktur Ketenagalistrikan**					
1	Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Nasional		√		√	2023
II	**Infrastruktur Strategis Provinsi**					
2.1	**Jalan Tol**					
1	Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) (27,3km)	√	√			2023
2	Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (184km)		√	√	√	2023
3	Tol NS-Link Kota Bandung (14,3km)				√	2023
2.2	**Jalan Strategis**					
1	Jalan Sukasari-Lembang (18,3 km)	√				2021
2	Pembangunan Fly Over:					
	a. Kopo (1,3 km) b. Buah Batu- Kiaracondong (1,96 km) c. Jakarta-Supratman d. Gatot Subroto-Laswi	√ √ √	√ √ √			2021 2022 2019
		√	√			2019
2.3	**Kereta Api**					
1	Reaktivasi Jalur KA Bandung-Ciwidey	√	√			2022
2	Double Track lintas Padalarang-Bandung-Cicalengka		√			2023
2.4	**Prasarana dan Sarana Kereta Api dalam kota**					
1	LRT Bandung Raya	√		√	√	2022
2.5	**Infrastruktur Perumahan dan Permukiman**					
1	Penyediaan Perumahan bagi MBR (buruh industri) dan ASN	√	√	√		2023

No	Kegiatan	SUMBER ANGGARAN				TARGET
		APBD Provinsi	APBN	KPBU	SWASTA	
2.6	**Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman**					
1	Pembangunan Alun-Alun	√				2020-2022
2	Pembangunan *Creative Centre*	√				2020-2022
3	Pembangunan Pusat Budaya	√				2020-2022
4	Pembangunan Mesjid Raya Al Jabar	√				2021
5	Pembangunan Mesjid Monumental Jawa Barat	√				2019
2.7	**Sistem Air Limbah**					
1	SPALD-T (Komunal-DAS Citarum)	√	√			2021

Sumber: *Perda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023*

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Dalam perencanaan kinerja program. korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah. pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksnakan oleh Perangkat Daerah. Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi. misi. tujuan dan sasaran pembangunan. sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung *(supporting)*.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah Kota Bandung menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Demikian juga peraturan yang sifatnya *mandatory* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi urusan pendidikan minimal 20% dari belanja daerah. dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dinyatakan bahwa urusan kesehatan minimal 10% dari belanja langsung. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ perihal Program Kompetensi SDM ASN Tahun Anggaran 2019 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan (pengembangan kompetensi) Aparatur Sipil Negara dalam APBD sekurang-kurangnya 0.16% dari total belanja daerah.

Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang haruus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Dalam hal ini pola pengeluaran per perangkat daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang sudah di perhitungkan untuk kebutuhannya selama 5 tahun. baik untuk belanja tidak langsung maupun untuk belanja langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 - 2023

Kode			Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
				Tahun 2019 (Tahun n)	Tahun 2020 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n+2)	Tahun 2022 (Tahun n+3)	Tahun 2023 (Tahun n+4)
1			2	3	4	5	6	7
5			**BELANJA**	**6.730.661.059.957**	**6.754.191.164.324**	**7.004.923.742.038**	**7.361.781.840.367**	**7.721.740.972.130**
5	**1**		**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.835.670.924.277**	**3.028.283.041.980**	**3.178.475.607.280**	**3.339.827.356.780**	**3.573.937.356.780**
	1	1	BELANJA PEGAWAI	2.563.822.916.926	2.701.160.000.000	2.903.740.000.000	3.121.530.000.000	3.355.640.000.000
	1	2	BELANJA BUNGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	3	BELANJA SUBSIDI	108.825.685.200	108.825.685.200	56.438.250.500	0.00	0.00
	1	4	BELANJA HIBAH	151.129.765.700	200.050.000.000	200.050.000.000	200.050.000.000	200.050.000.000
	1	5	BANTUAN SOSIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	6	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	1.500.000.000	1.717.356.780	1.717.356.780	1.717.356.780	1.717.356.780
	1	7	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.392.556.451**	**16.530.000.000**	**16.530.000.000**	**16.530.000.000**	**16.530.000.000**
5	**2**		**BELANJA LANGSUNG**	**3.894.990.135.680**	**3.725.908.122.344**	**3.826.448.134.758**	**4.021.954.483.587**	**4.147.803.615.350**
	5.2.1		BELANJA PEGAWAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2		BELANJA BARANG DAN JASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.3		BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Selain itu. dalam bab ini juga diuraikan program pembangunan daerah dan indikator kinerja. capaian kinerja awal dan akhir RPJMD. yang disesuaikan dengan bidang urusan dan perangkat daerah penanggung jawab. Rekapitulasi rencana program dan pagu indikatif pada setiap urusan yang dilengkapi dengan strukur penanggung jawab kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 7.2
Tabel Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Belanja Langsung				**3.894.990.135.680**		**3.725.908.122.344**		**3.826.448.134.758**	**-**	**4.021.954.483.587**		**4.147.803.615.350**	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
Urusan Pendidiikan													
				703.862.757.282		**624.469.042.030**		**641.670.341.908**		**658.749.705.765**		**671.721.696.538**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.013.267.193	100%	3.341.799.748	100%	3.433.120.044	100%	3.523.792.992	100%	3.610.221.202	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3.074.667.460	100%	2.561.917.722	100%	2.631.926.431	100%	2.701.438.865	100%	2.767.697.162	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	167.843.444.000	100%	3.607.726.983	100%	3.706.314.189	100%	3.804.202.532	100%	3.897.508.357	100%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	79.56%	79.57%	5.385.328.910	100%	4.234.488.027	100%	4.350.202.531	100%	4.465.096.762	100%	4.574.612.366	100%
Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	100%	100%	14.016.681.361	100%	8.994.313.996	100%	9.240.098.747	100%	9.484.141.188	100%	9.716.759.092	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang disertifikasi	50.95%	51.75%	5.356.424.000	52.55%	140.567.249.747	53,35%	144.408.486.177	54,14%	148.222.492.974	54,95%	151.857.951.885	100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	102.12%	_	-	100%	203.965.253.240	100%	209.538.946.704	100%	215.073.129.550	100%	220.348.236.652	100%
	Angka Partisipasi Kasar SMP	103.10%	_		100%		100%		100%		100%		100%
	Presentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100%	_		100%		100%		100%		100%		100%
	Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	N/A	_		100%		100%		100%		100%		100%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat ketepatan manajemen pelayanan pendidikan	100%	100%	2.813.813.804	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Inovasi Pendidikan	Presentasi inovasi pendidikan yang dimanfaatkan untuk pelayanan pendidikan	100%	100%	2.740.436.900	_	-	_	-	_	-	_	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Kasar SD	102.12%	102.13%	110.617.957.885	_	-	_	-	_	-	_	-	102.13%
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP	103.10%	103.11%	105.133.613.764	_	-	_	-	_	-	_	-	103.11%
Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100%	100%	188.094.000	100%	156.623.456	100%	160.903.456	100%	165.153.115	100%	169.203.832	100%
Program Bantuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah SD	0.01%	_	_	0.01%	257.039.669.112	0.01%	264.200.343.629	0.01%	271.310.257.787	0.01%	274.779.505.990	0.01%
	Persentase siswa miskin SD yang mendapat bantuan pendidikan	NA	_		100%		100%		100%		100%		100%
	Angka Putus Sekolah SMP	0.02%	_		0.02%		0.02%		0.02%		0.02%		0.02%
	Persentase siswa miskin SMP yang mendapat bantuan pendidikan	NA	_		100%		100%		100%		100%		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan	NA	_		100%		100%		100%		100%		100%
	Persentase peserta didik dan mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan pendidikan	NA	_		100%		100%		100%		100%		100%
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	Angka Putus Sekolah SD	0.01%	0.01%	85.205.850.623	_	_	_	_	_	_	_	_	0.01%
	Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%		_	_	_	_	_	_	_	_	100%
Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	Angka Putus Sekolah SMP	0.02%	0.02%	197.473.177.382	_	_	_	_	_	_	_	_	0.02%
	Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	100%	100%		_	_	_	_	_	_	_	_	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Kesehatan													
				1.003.984.249.356		**737.347.646.104**		**756.440.850.313**		**765.190.551.930**		**788.980.829.000**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	24.386.068.560	100%	20.680.817.529	100%	21.245.955.638	100%	21.807.087.614	100%	22.341.950.910	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	9.059.661.037	100%	7.656.490.576	100%	7.865.717.054	100%	8.073.460.374	100%	8.271.478.454	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	588.034.000	100%	576.705.796	100%	592.465.251	100%	608.112.991	100%	623.028.203	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	2.041.850.000	_	-	_	-	_	-	_	-	_
Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan pemerintah dan tata laksana keuangan yang sehat	NA	_	_	100%	59.102.901.385	100%	60.717.987.533	100%	62.321.624.711	100%	63.850.189.650	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat	NA	100%	80.380.568.000	_	-	_	-	_	-	_	-	_
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tingkat kesehatan keluarga	NA	-	39.971.989.960	79,24%	32.717.420.378	79,95%	32.118.695.120	80,79%	33.041.778.736	81,63%	33.195.815.838	81,63%
	Persentase masalah gizi ditangani sesuai standar	NA	-		100%		100%		100%		100%		100%
	Persentase penanganan masalah gizi buruk	NA	95%		_		_		_		_		_
	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak remaja, ibu dan lansia	NA	85%		_		_		_		_		_
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	7.95 %	8,74%	985.127.829	9,6%	820.303.282	10,58%	842.719.449	11,64%	864.976.712	12,8%	886.192.030	12,8%
	Cakupan peningkatan PHBS tatanan rumah tangga	67.8 %	67,85%		67,9%		67,95%		68,00%		68,5%		68,5%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan lansia	100%	100%	55.000.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Persentase akses penduduk terhadap sanitasi dasar	70%	75%	622.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	30%	40%		-		-		-		-		-
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti	NA	-	-	100%	618.661.570	100%	635.567.538	100%	652.353.663	100%	668.353.967	100%
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang ditangani	100%	100%	5.597.683.269	_	-	_	-	_	-	_	-	_
	Persentase RW Siaga Aktif	NA	47.64 %		_	-	_	-	_	-	_	-	_
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	37%	37,50%	8.182.050.689	38,59%	4.645.994.114	40,00%	4.745.627.032	50,00%	4.748.732.000	51,00%	4.938.849.195	51,00%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Cakupan fasilitas kesehatan primer yang dibina	65%	65%	608.087.692	_	-	_	-	_	-	_	-	65%
	Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang dibina	75%	80%		_	-	_	-	_	-	_	-	80%
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan pelayanan laboratorium kesehatan	100%	100%	247.576.530	100%	206.153.795	100%	211.787.294	100%	217.380.858	100%	222.712.567	100%
Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan penanggulangan gawat darurat terpadu	NA	1,30%	308.084.463	1,60%	256.537.973	1,90%	263.548.304	2,20%	270.508.941	2,50%	277.143.724	2,50%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	100%	100%	2.000.000.000	100%	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	100%	100%	228.879.013.494	100%	128.583.371.618	100%	131.391.674.632	100%	131.573.379.852	100%	137.008.280.659	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase sarana prasarana kesehatan dalam kondisi baik	100%	100%	6.367.858.578	100%	5.491.306.753	100%	5.641.365.942	100%	5.694.539.721	100%	5.932.381.819	100%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan Pelayanan BLUD	40,30%	40,30%	326.527.776.045	74,71%	264.101.282.607	97,70%	272.487.798.539	97,70%	272.751.128.732	100%	281.855.259.182	100%
Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Cakupan pengembangan *smart city* pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	100%	100%	8.555.438.400	100%	5.855.821.075	100%	6.015.841.231	100%	6.078.905.365	100%	6.326.174.814	100%
	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk	NA	100%	36.946.319.885	100%	27.683.417.737	100%	28.439.913.668	100%	28.903.581.948	100%	29.907.016.934	100%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase tingkat pencegahan dan pengendalian penyakit	N/A	-	-	100%	2.636.091.829	100%	2.708.127.470	100%	2.779.652.467	100%	2.847.829.113	100%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase penanganan penderita penyakit menular	100%	100%	2.698.266.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyalit Tidak Menular	Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	100%	100%	6.333.518.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	95%	96%	169.962.087.000	100%	149.852.116.965	100%	153.947.078.002	100%	157.532.646.977	100%	161.888.602.139	100%
	Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayanan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	Persentase pengelolaan sumber daya kesehatan	NA	-	-	77,40%	25.862.251.122	79,23%	26.568.980.615	81,06%	27.270.700.267	82,88%	27.939.569.804	82,88%
Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya	Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	100%	100%	111.661.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
	Persentase industri rumah tangga pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar kesehatan	100%	100%		_	-	_	-	_	-	_	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	20%	40%	756.700.000	_	-	_	-	_	-	_	-	40%
Program Kefarmasian dan Alat kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100%	100%	35.786.200.946	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
	Persentase instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	100%	100%		_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	9%	15%	2.504.858.900	_	-	_	-	_	-	_	-	15%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai Kesehatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan	NA	100%	212.460.800	_	-	_	-	_	-	_	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pembinaan lingkungan sosial	NA	100%	3.307.338.279	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
	Persentase lingkungan sosial yang memenuhi standar alat kesehatan	NA	100%		_	-	_	-	_	-	_	-	100%
												-	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Sub Urusan Pekerjaan Umum				**303.363.813.982**		**460.770.239.511**		**459.361.939.637**		**485.768.361.739**		**491.882.628.156**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.964.567.564	100%	8.670.249.250	100%	8.606.540.900	100%	9.127.143.918	100%	9.355.591.252	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	9.508.031.437	100%	9.295.005.297	100%	9.539.913.963	100%	9.784.822.630	100%	10.029.731.296	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	1.277.328.840	100%	1.090.317.180	100%	1.119.045.311	100%	1.147.773.442	100%	1.176.501.572	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Sarana dan prasaran pekerjaan umum dalam kondisi baik	78%	78%	148.278.922.031	_	-	_	-	_	-	_	-	78%
Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase dokumen acuan pekerjaan pelaksanaan di impelementasi-kan	100%	100%	7.000.000.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	100%	100%	128.334.964.110	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	120 Mnt	_	-	80 Mnt	66.465.587.428	60 Mnt	65.977.203.206	40 Mnt	77.670.969.932	30 Mnt	79.364.736.658	30 Mnt
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	92%	_	-	94%	335.568.132.636	95%	334.729.861.209	96%	347.637.072.754	97%	350.544.284.299	97%
	Jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (*flyover/ Underpass*)	3	_	-	1		1		1		1		7

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Luasan trotoar dalam kondisi baik	397.535 M2	_	-	13.000 M2		13.000 M2		13.000 M2		13.000 M2		462.535 M2
	Luasan drainase dalam kondisi baik	602.402 M	_	-	8.000 M		8.000 M		8.000 M		8.000 M		642.402 M2
Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU dalam kondisi baik	44.000 Ttk	_	-	2.500 Ttk	39.680.947.718	2.500 Ttk	39.389.375.048	2.500 Ttk	40.400.579.064	2.500 Ttk	41.411.783.079	56.500 titik
								-		-		-	
Sub Urusan Penataan Ruang				**31.313.983.781**		**25.566.354.708**		**26.264.998.334**		**26.958.689.438**		**27.619.906.273**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	6.761.710.029	100%	5.629.935.919	100%	5.783.783.384	100%	5.936.540.259	100%	6.082.146.016	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3.841.067.364	100%	3.198.407.428	100%	3.285.809.289	100%	3.372.591.578	100%	3.455.311.264	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	289.000.000	100%	240.646.586	100%	247.222.658	100%	253.752.115	100%	259.975.903	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	110.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan gedung umum yang memenuhi RTH privat sesuai peraturan yang berlaku	NA	0%	5.488.082.054	5%	3.157.591.591	5%	3.243.878.090	5%	3.329.552.924	5%	3.411.216.999	5%
Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah ketersediaan dokumen rencana rinci pada pusat-pusat pelayanaan kota	2 dokumen	2 dokumen	2.149.779.700	2 dokumen	1.790.093.927	2 dokumen	1.839.011.253	2 dokumen	1.887.581.816	2 dokumen	1.933.878.609	10 dokumen
Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Persentase pelanggaran tata ruang dan bangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	76%	1.238.097.779	77%	1.030.948.108	78%	1.059.120.499	79%	1.087.093.182	80%	1.113.756.359	80%
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase areal pemakaman ditata	NA	31%	11.435.696.855	32%	10.518.731.148	33%	10.806.173.161	34%	11.091.577.565	35%	11.363.621.124	35%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
				288.499.023.672		**335.053.763.015**		**336.224.580.298**		**358.360.073.571**		**369.053.880.122**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	9.977.380.732	100%	9.654.275.612	100%	9.908.650.482	100%	10.163.025.352	100%	10.417.400.222	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	11.024.618.114	100%	12.006.984.585	100%	12.538.317.883	100%	12.639.714.634	100%	12.956.079.659	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	178.750.000	100%	172.881.407	100%	177.436.558	100%	181.991.709	100%	186.546.861	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	100%	97.711.900	100%	94.503.892	100%	96.993.920	100%	99.483.948	100%	101.973.976	100%
Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	9.76%	4,55%	56.498.590.300	3,96%	51.835.399.507	3,36%	53.201.180.176	2,76%	54.566.960.846	2,16%	64.577.717.581	2,16%
Program penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas	Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi baik	100%	100%	7.434.738.905	100%	7.190.646.839	100%	7.380.108.993	100%	7.569.571.147	100%	7.759.033.302	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	64,23%	66,51%	75.642.426.333	67,70%	62.692.288.145	68,73%	64.344.130.632	69,67%	65.995.973.120	70,52%	67.647.815.608	70,52%
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	NA	100%		100%		100%		100%		100%		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pertanahan													
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luasan RTH	12,20%	12,21%	102.929.252.870	12,215%	153.224.580.282	12,22%	149.389.518.345	12,225%	166.949.068.945	12,23%	164.206.988.483	12,23%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	44,73%	46,99%	24.715.554.518	50,31%	38.182.202.746	53,25%	39.188.243.308	55,85%	40.194.283.869	58,18%	41.200.324.431	58,18%
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				**33.069.420.104**		**31.130.647.019**		**32.464.574.489**		**33.844.282.935**		**35.236.984.172**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.964.329.966	100%	3.256.022.636	100%	3.344.998.929	100%	3.433.344.489	100%	3.517.554.264	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	75%	75%	4.450.571.109	75%	3.356.983.398	75%	3.448.718.613	75%	3.539.803.539	75%	3.626.624.440	75%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	90%	91,00%	417.925.000	91,64%	416.268.341	92,20%	427.643.573	92,22%	438.938.169	92,80%	449.704.023	93,37%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi	N/A	80%	135.450.000	80%	193.974.471	80%	199.275.150	80%	204.538.253	80%	209.554.971	80%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	63,64%	66,91%	3.238.815.000	-	-	-	-	-	-	-	-	66,91%
Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	N/A	-	-	70,07%	3.253.213.421	75,00%	3.419.129.937	76,38%	3.592.673.935	79,54%	3.770.458.686	79,54%
Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan masyarakat	N/A	73,00%	1.562.241.750	75%	1.503.867.754	73,23%	1.544.963.469	80,55%	1.585.767.865	84,03%	1.624.662.056	100%
Program Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	N/A	100%	17.082.587.279	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum	N/A	-	-	100%	17.158.529.340	100%	18.033.628.215	100%	18.948.956.968	100%	19.886.652.863	100%
Program Penegakan Produk Hukum daerah	Cakupan penyelesaian penegakan perda	100%	100%	2.217.500.000	-	1.991.787.658	-	2.046.216.604	-	2.100.259.717	-	2.151.772.869	100%
	Persentase penegakan PERDA	N/A	-		100%		100%		100%		100%		100%
Sub Urusan Pemadaman dan Penyelamatan serta Sub Urusan Kebencanaan				**39.709.473.669**		**33.148.053.869**		**34.003.751.987**		**34.852.956.655**		**35.660.166.706**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.857.018.264	100%	4.044.376.686	100%	4.154.896.078	100%	4.264.632.025	100%	4.369.230.822	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3.157.375.048	100%	2.629.105.624	100%	2.700.950.355	100%	2.772.285.796	100%	2.840.281.759	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	971.869.800	100%	809.263.492	100%	831.377.977	100%	853.335.699	100%	874.265.497	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	33.600.000	100%	27.978.288	100%	28.742.842	100%	29.501.976	100%	30.225.572	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	100%	266.956.000	100%	222.290.830	100%	228.365.301	100%	234.396.711	100%	240.145.768	100%
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	Persentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana	0%	10%	1.218.697.608	15%	1.014.793.835	20%	1.042.524.783	25%	1.070.059.153	30%	1.096.304.535	100%
Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat waktu maksimum tanggap (*respons time rate*)	15 menit	15 menit	11.225.139.100	15 menit	10.977.288.366	15 menit	11.227.133.042	15 menit	11.474.779.022	15 menit	11.708.591.591	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	Rata-rata tingkat waktu maksimum *assesment* tanggap darurat bencana	N/A	24 jam	1.091.176.700	24 jam	1.096.027.617	24 jam	1.151.925.912	24 jam	1.210.393.952	24 jam	1.270.290.729	24 jam
Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana Lainnya	Persentase tersedianya sarana pengamanan kebakaran di kelurahan	N/A	0%	16.120.047.944	1,65%	12.326.929.131	1,65%	12.637.835.696	1,65%	12.943.572.322	1,65%	13.230.830.432	7%
Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana	*Response time rate* ≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	767.593.205	_	-	-	-	-	-	-	-	≤ 15 menit
								-		-		-	
Urusan Sosial													
				39.345.286.882		**31.520.861.200**		**32.382.221.728**		**33.237.476.270**		**30.583.496.584**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.523.741.310	100%	6.597.609.841	100%	6.791.563.963	100%	6.984.143.189	100%	7.167.707.064	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	2.213.278.739	100%	1.842.968.761	100%	1.893.330.981	100%	1.943.336.195	100%	1.991.000.478	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	163.748.750	100%	136.351.480	100%	140.077.513	100%	143.777.133	100%	147.303.561	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	139.095.000	100%	115.822.619	100%	118.987.667	100%	122.130.278	100%	125.125.772	100%
Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	100%	100%	1.490.900.300	100%	1.350.000.000	100%	1.400.000.000	100%	1.450.000.000	100%	1.500.000.000	100%
Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	N/A	200 orang	1.786.855.975	500 orang	1.487.892.006	500 orang	1.528.551.156	500 orang	1.568.922.084	500 orang	1.607.403.097	2200 orang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100%	100%	1.493.618.190	100%	4.407.474.909	100%	4.487.480.910	100%	4.566.565.328	100%	4.639.606.823	100%
Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	100%	100%	4.219.782.000	_	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	62000 KK	62000 KK	2.415.899.095	62000 KK	2.011.688.127	65000 KK	2.066.660.887	68000 KK	2.121.243.959	72000 KK	2.173.271.793	72000 KK
Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	100%	100%	11.542.135.773	100%	12.322.248.477	100%	12.672.637.975	100%	13.020.543.642	100%	9.882.965.974	100%
Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100%	100%	1.683.301.750	_	-	-	-	-	-	-	_	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	2.173.201.100	_	-	-	-	-	-	-	_	100%
Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	72%	80%	1.499.728.900	85%	1.248.804.980	90%	1.282.930.676	95%	1.316.814.463	100%	1.349.112.023	100%
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar													
Urusan Tenaga Kerja													
				33.105.384.737		**25.959.429.809**		**13.250.541.268**		**13.700.408.220**		**14.123.579.215**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.727.713.579	100%	2.768.486.320	100%	2.844.139.863	100%	2.919.257.116	100%	2.990.857.850	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	19.103.210.027	100%	14.000.000.000	100%	855.967.869	100%	900.000.000	100%	920.000.000	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	170.500.000	100%	141.973.159	100%	145.852.814	100%	149.704.967	100%	153.376.787	100%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	180 orang	180 orang	1.978.833.493	220 orang	1.647.749.418	260 orang	1.692.776.941	300 orang	1.737.485.275	320 orang	1.780.100.645	1300 orang
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	45,30%	45,30%	5.134.153.733	45,56%	4.275.143.829	45,65%	4.391.969.322	45,90%	4.507.966.666	46,19%	4.618.533.742	45,71%
	Calon wirausaha baru yang dilatih	700 orang	700 orang		1120 orang		1220 orang		1280 orang		1400 orang		6020 orang
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diseleseikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	58%	58%	2.803.215.305	58%	2.334.201.357	59%	2.397.987.334	59%	2.461.321.146	59%	2.521.690.067	59%
Program Padat Karya	Jumlah peserta kegiatan pemberian kerja sementara (padat karya)	300 orang	_	-	600 orang	635.531.552	600 orang	761.230.584	700 orang	859.814.427	800 orang	970.118.009	3000 orang
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	120 orang	120 orang	187.758.600	120 orang	156.344.173	120 orang	160.616.541	120 orang	164.858.622	120 orang	168.902.116	600 orang
								-		-		-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
				16.854.891.210		**12.003.094.650**		**12.331.099.392**		**12.656.778.984**		**12.967.212.299**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.113.880.314	100%	3.425.575.058	100%	3.519.184.656	100%	3.612.130.677	100%	3.700.725.548	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.177.077.705	100%	980.137.477	100%	1.006.921.382	100%	1.033.515.421	100%	1.058.864.494	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	42.615.000	100%	35.484.963	100%	36.454.649	100%	37.417.461	100%	38.335.201	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	151.669.000	100%	126.292.827	100%	129.743.991	100%	133.170.690	100%	136.436.973	100%
Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	47.68%	52,28%	1.764.788.413	68,87%	1.469.516.630	79,47%	1.509.673.643	90.62%	1.549.545.992	100%	1.587.551.767	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat partisipasi organisasi perempuan dalam ruang publik	N/A	16,95%	1.767.874.246	30,50%	1.472.086.164	45,76%	1.512.313.393	69,49%	1.552.255.461	100%	1.590.327.692	100%
Program Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Persentase penanganan perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	800.000.000	100%	666.149.718	100%	684.353.379	100%	702.427.999	100%	719.656.478	100%
Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Persentase lansia mendapat layanan	18,75%	18,75%	1.488.393.682	_	-	_	-	_	-	_	-	18,75%
Program Peningkatan Pemberdayaan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lansia	Persentase ketercapaian kriteria Kota Layak Lansia	N/A	_	-	25%	1.239.366.290	50%	1.273.234.058	75%	1.306.861.745	85%	1.338.915.194	85%
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
Program Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase kelurahan klasifikasi swasembada	24.50%	41,72%	1.450.000.000	56,29%	1.207.396.365	71,52%	1.240.390.500	85,43%	1.273.150.748	100%	1.304.377.366	100%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pem-bangunan	18%	20%	4.098.592.850	22%	1.381.089.157	24%	1.418.829.740	26%	1.456.302.789	28%	1.492.021.585	28%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Laporan partisipasi swadaya masyarakat	N/A	30 Lem-baga		30 Lem-baga		30 Lembaga		30 Lembaga		60 Lem-baga		60 Lembaga
Urusan Pangan													
				55.212.508.603		**31.056.500.736**		**21.615.213.281**		**23.178.225.701**		**24.317.451.708**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.740.296.204	100%	3.114.496.579	100%	3.199.605.434	100%	3.284.110.972	100%	3.364.660.491	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	36.281.918.222	100%	15.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	6.600.000.000	100%	7.260.000.000	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	107.525.000	100%	89.534.686	100%	91.981.371	100%	94.410.713	100%	96.726.329	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	215.050.000	76%	179.069.371	77%	183.962.743	78%	188.821.426	80%	193.452.657	80%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,25	84,26	2.415.064.464	84,27	2.010.993.141	84,28	2.033.048.587	84,29	2.120.511.123	84,30	2.210.609.070	84,30
	Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras	60 ton	80 ton		80 ton		80 ton		80 ton		80 ton		80 ton
Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	91%	91%	2.949.999.029	92%	2.456.426.278	93%	2.293.263.997	94%	2.590.202.393	95%	2.653.732.389	95%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayaan	45 Ke-lompok	45 Ke-lompok	2.310.082.272	48 Ke-lompok	1.923.575.819	51 Ke-lompok	1.910.344.117	54 Ke-lompok	2.028.333.085	57 Ke-lompok	2.078.082.090	57 Ke-lompok
Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	399.930.900	100%	333.017.321	100%	342.117.579	100%	351.153.327	100%	359.766.079	100%
Uurusan Pertanian													
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	68,08 kw/ha	68,08 kw/ha	2.073.211.203	68,22 kw/ha	1.903.934.021	68,36 kw/ha	1.886.691.271	68,50 kw/ha	1.922.035.995	68,64 kw/ha	2.003.700.974	68,64 kw/ha

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Produksi tanaman sayuran	237.000 Pohon	237.000 Pohon		278.400 pohon		287.936 pohon		297.621 pohon		308.270 pohon		308.270 pohon
	Produksi tanaman hias	155.485 Pohon	155.485 Pohon		161.864 Pohon		168.489 pohon		175.369 pohon		182.763 pohon		182.763 pohon
	Jumlah penanaman pohon buah-buahan	10.000 Pohon	10.000 Pohon		11.000 Pohon		12.000 Pohon		13.000 Pohon		14.000 Pohon		14.000 Pohon
	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang pertanian	80 orang	80 orang		90 orang		100 orang		110 orang		120 orang		120 orang
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase kualitas bahan baku tembakau	100%	100%	379.999.840	100%	316.420.983	100%	313.555.354	100%	333.653.159	100%	341.836.683	100%
Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi ternak domba	36.756 ekor	36.756 ekor	787.240.176	37.829 ekor	655.524.777	38.437 ekor	616.689.773	39.158 ekor	691.224.427	39.849 ekor	708.178.116	39.849 ekor
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan	80 orang	80 orang	517.573.670	90 orang	430.976.943	100 orang	394.175.529	110 orang	454.447.797	120 orang	465.594.056	120 orang
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah maksimum kasus penyakit *zoonosa*	7 kasus	7 kasus	1.184.637.395	7 kasus	986.432.334	7 kasus	977.498.827	7 kasus	1.040.153.093	7 kasus	1.065.664.969	7 kasus

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Kelautan dan Perikanan													
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi ikan konsumsi	2.970 ton	2.970 ton	1.349.982.965	2.970 ,5 ton	1.239.757.190	2.971 ton	944.600.505	2.971,5 ton	1.040.153.093	2.972 ton	1.065.664.969	2.972 ton
	Produksi ikan hias	1.222.000 ekor	1.222.000 ekor		1.272.000 ekor		1.322.000 ekor		1.372.000 ekor		1.422.000 ekor		1.422.000 ekor
	Tingkat Konsumsi ikan	37,95 kg/ kap/th	37,95 kg/kap/ th		37,97 kg/kap/ th		37,99 kg/ kap/th		38,00 kg/ kap/th		38,02 kg/kap/ th		38,02 kg/ kap/th
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	80 orang	80 orang	499.997.263	90 orang	416.341.295	100 orang	427.678.195	110 orang	439.015.096	120 orang	449.782.837	120 orang
Urusan Lingkungan Hidup													
				101.263.879.535		**166.150.371.190**		**191.078.921.083**		**276.338.164.929**		**293.029.730.674**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.928.670.158	100%	2.709.628.890	100%	2.783.674.055	100%	2.857.194.331	100%	2.927.272.849	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	406.697.500	100%	376.279.757	100%	386.562.234	100%	396.771.821	100%	406.503.459	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	70.070.000	100%	64.829.321	100%	66.600.891	100%	68.359.903	100%	70.036.569	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	299.910.000	100%	277.479.114	100%	285.061.697	100%	292.590.529	100%	299.766.909	100%
Program pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	100%	100%	149.978.542	100%	128.175.732	100%	131.591.566	100%	134.982.446	100%	134.916.286	100%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	103.601 ton	116.915 ton	84.473.826.693	130.735 ton	150.141.157.966	145.002 ton	174.916.234.789	176.363 ton	259.656.353.832	206.653 ton	275.925.721.172	206.653 ton
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase kawasan konservasi terpelihara	8.8%	17,61%	4.563.334.645	28,99%	4.079.615.976	30,75%	4.191.194.768	49,18%	4.301.983.425	67,60%	4.411.250.430	67,60%
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai Cikapundung	0%	0%	449.907.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan	100%	100%	2.959.735.350	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	12,5%	12,5%			-		-		-		-	12,5%
Program Penataan Lingkungan	Persentase dokumen pengelolaan lingkungan dan dokumen kebijakan lingkungan yang ditindaklanjuti	30%	30%	1.812.542.200	-	-		-	-	-	-	-	30%
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan dokumen lingkungan	70 poin	75 poin			-		-		-		-	75 poin
Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	0%	1,50%	449.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air	20 poin	32 poin	999.999.703	-	-		-	-	-	-	-	32 poin

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara	58,61 poin	65 poin	1.049.678.916	-	-	-	-	-	-	-	-	65 poin
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	0,00%	0,34%	649.528.928	0,51%	602.708.542	0,66%	597.250.184	0,82%	705.263.159	0,93%	735.228.936	0,93%
Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	Persentase sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	39,13%	-	-	41,30%	1.467.151.548	41,30%	1.457.759.169	43,48%	1.496.260.392	43,48%	1.532.959.230	43,48%
Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	Indeks SO_2	1,17 poin	-	-	1,16 poin	1.494.407.312	1,15 poin	1.484.840.448	1,14 poin	1.524.056.921	1,13 poin	1.561.437.525	0,43
Program Pencegahan dampak lingkungan	Cakupan pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat kebijakan dan usaha/ kegiatan	100%	-	-	100%	1.806.078.342	100%	1.794.516.229	100%	1.841.911.623	100%	1.887.088.262	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	33,38%	-	-	33,43%	3.002.858.690	33,45%	2.983.635.053	33,47%	3.062.436.547	33,49%	3.137.549.048	33,49%
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil													
				21.684.103.345		**14.129.262.019**		**14.785.502.809**		**15.476.413.658**		**16.191.450.609**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100% -	10.784.813.551	100%	8.980.375.637	100%	9.225.779.500	100%	9.469.443.751	100%	9.701.701.171	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.423.000.000	100%	1.184.913.812	100%	1.217.293.574	100%	1.249.443.803	100%	1.280.088.960	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100% -	136.000.000	100%	113.245.452	100%	116.340.074	100%		100%	122.341.601	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100% -	198.000.000	100%	164.872.055	100%	169.377.461	100%	119.412.760	100%	178.114.978	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat keserasian database kependudukan	98%	98% -	7.655.315.800	-	-	-	-	-	173.850.930	-	-	98% -
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Cakupan pendayagunaan data kependudukan	100%	100% -	184.413.994	-	-	-	-	-	-	-	-	100% -
Program penataan administrasi pencatatan sipil	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	90%	90%	1.091.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90% -
Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk	100%	90% -	210.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	90% -
Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	N/A	-	-	60%	2.193.039.063	65%	2.414.624.200	70%	2.657.982.414	75%	2.922.323.898	75%
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi kependudukan	93,34	-	-	95,25%	1.492.816.000	95,50%	1.642.088.000	96%	1.806.280.000	96,50%	1.986.880.000	96,50%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
				14.262.285.912,00		**12.788.082.909,74**		**13.091.183.809,73**		**13.395.563.840,48**		**13.655.523.552,69**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.022.007.551	100%	3.349.073.997	100%	3.440.593.074	100%	3.531.463.395	100%	3.529.732.496	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	962.930.861	100%	801.820.152	100%	823.731.236	100%	845.486.997	100%	845.072.593	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	128.000.000	100%	106.583.955	100%	109.496.541	100%	112.388.480	100%	112.333.394	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	100%	100%	136.700.000	100%	113.828.333	100%	116.938.884	100%	120.027.384	100%	119.968.555	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi	100%	100%	140.915.000	100%	117.338.109	100%	120.544.571	100%	123.728.302	100%	123.667.658	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Keluarga Berencana	Persentase peserta KB Aktif	NA	72,29%	6.202.814.500	73%	6.326.870.790	73,50%	6.453.408.206	74%	6.582.476.370	74,50%	6.845.775.425	74,50%
Program Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok tribina aktif	NA	71,06%	808.534.000	74,56%	673.255.870	78,26%	691.653.719	82,16%	709.921.150	86,26%	709.573.191	71,26%
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan data dan informasi kependudukan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	857.380.000	100%	713.929.307	100%	733.438.626	100%	752.809.647	100%	752.440.668	100%
Program Promosi Keluarga Berencana	Jumlah peserta KB Baru	2000 Pasangan Akseptor	2500 Pasangan Akseptor	1.003.004.000	2625 Pasangan Akseptor	585.382.396	2757 Pasangan Akseptor	601.378.954	2895 Pasangan Akseptor	617.262.116	3040 Pasangan Akseptor	616.959.574	3040 Pasangan Akseptor
	Jumlah Kampung KB Aktif	15	20		31		40		49		58		58
Urusan Perhubungan													
				120.799.207.616		**187.728.442.713**		**192.400.843.219**		**197.036.218.769**		**201.434.145.639**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.297.395.497	100%	7.861.857.802	100%	8.076.696.284	100%	8.290.011.827	100%	8.493.341.272	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	7.820.037.000	100%	7.716.156.975	100%	7.927.013.938	100%	8.136.376.184	100%	8.335.937.403	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan Pegawai Negeri Sipil	100%	100%	850.000.000	100%	786.426.751	100%	807.917.184	100%	829.255.277	100%	849.594.453	20%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	15%	16%	306.500.000	17%	370.083.177	18%	380.196.322	19%	390.237.777	20%	399.809.154	20%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Tingkat pengelolaan data dan informasi perangkat daerah	100%	100%	110.780.000	100%	102.494.536	100%	105.295.372	100%	108.076.353	100%	110.727.146	100%
Program Peningkatan pelayanan Angkutan	Persentase penumpang sarana angkutan umum	19.5%	20,00%	29.711.009.902	20,25%	28.414.070.273	20,50%	29.190.532.516	20,75%	29.961.490.597	21,00%	30.696.357.255	21,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana prsaarana perhubungan yang terbangun	20%	20%	9.999.665.894	40%	13.159.762.920	60%	13.519.375.567	80%	13.876.439.004	100%	14.216.786.969	100%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase fasiitas perlengkapan jalan yang terbangun	20%	20%	11.299.662.708	40%	11.379.745.624	60%	11.690.716.305	80%	11.999.482.588	100%	12.293.794.369	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR	90%	90%	6.548.504.922	90,25%	6.541.173.029	90,50%	6.719.921.579	90,75%	6.897.403.022	91,00%	7.066.575.897	91%
Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase ketercapaian yertib dan keselamatan lalu lintas	1%	5%	16.474.451.086	10%	16.167.500.930	15%	16.609.305.074	20%	17.047.977.373	25%	17.466.113.784	25%
Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	Persentase dokumen perencanaan ditindaklanjuti	100%	100%	4.754.683.438	100%	4.808.537.064	100%	4.939.938.425	100%	5.070.408.310	100%	5.194.770.414	100,00%
Program Pembinaan Transportasi	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	0.8%	1%	1.000.000.000	1,25%	925.207.942	1,50%	950.490.805	1,75%	975.594.442	2,00%	999.522.886	2,00%
Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	Persentase kinerja APILL dan parkir	70%	70,00%	18.115.017.169	72,50%	17.685.365.700	75,00%	18.168.648.051	77,50%	18.648.504.526	80,00%	19.105.897.129	80%
Program Peningkatan Pelayanan Transportasi BLUD	Cakupan pelayanan transportasi	100%	100%	5.511.500.000	100%	71.810.059.990	100%	73.314.795.797	100%	74.804.961.489	100%	76.204.917.509	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
				15.328.435.818		13.571.498.038		13.942.362.039		14.310.597.071		14.661.593.648	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.492.279.178	100%	2.183.234.981,83	100%	2.242.895.548	100%	2.302.133.195	100%	2.358.597.706	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	931.808.141	100%	858.007.616,17	100%	881.454.117	100%	904.734.411	100%	926.924.867	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	29.150.000	100%	25.188.786,23	100%	25.877.112	100%	26.560.559	100%	27.212.011	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75%	75%	137.095.000	75%	124.649.102,61	75%	128.055.349	75%	131.437.449	75%	134.661.221	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100%	100%	198.000.000	100%	166.537.429,59	100%	171.088.345	100%	175.607.000	100%	179.914.120	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah usaha non formal yang kemampuan usahanya meningkat	N/A	200 Orang -	2.420.328.700	200 orang	2.165.588.201,16	200 orang	2.224.766.540	200 orang	2.283.525.377	200 orang	2.339.533.493	1000 orang
Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Jumlah koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	N/A	150 Koperasi	1.539.904.325	160 Koperasi	1.363.861.881	170 Koperasi	1.401.131.700	180 Koperasi	1.438.137.322	190 Koperasi	1.473.410.572	850 Koperasi
Program Pem-berdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	240 UM	240 UM	3.130.220.000	240 UM	2.788.154.117	240 UM	2.864.345.115	240 UM	2.939.996.014	240 UM	3.012.105.412	1200 UM
Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat	N/A	60%	867.040.887	-	-	-	-	-	-	-	-	60%
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	N/A	60%	605.768.900	60%	536.612.742	60%	551.276.588	60%	565.836.484	60%	579.714.778	60%
Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang berkualitas	N/A	30 Koperasi	2.976.840.687	30 Koperasi	2.591.605.934	40 Koperasi	2.662.425.924	50 koperasi	2.732.743.887	70 Koperasi	2.799.770.003	220 Koperas

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase SDM usaha mikro yang kualitasnya meningkat	N/A	_	-	60%	768.057.246	60%	789.045.701	60 %	809.885.374	60 %	829.749.465	60%
Urusan Penanaman Modal													
				10.665.405.037		**8.880.945.702**		**9.017.469.592**		**9.364.598.897**		**9.594.284.782**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.780.022.022	100%	3.147.575.757	100%	3.127.425.674	100%	3.318.991.631	100%	3.400.396.669	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.098.755.000	100%	914.919.167	100%	939.920.872	100%	964.745.345	100%	988.407.692	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	319.826.129	100%	266.315.107	100%	273.592.615	100%	280.818.535	100%	287.706.182	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	258.044.000	100%	214.869.922	100%	220.741.604	100%	226.571.663	100%	232.128.795	110 orang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA)	400 investor	500 investor	2.299.997.270	550 investor	1.915.178.167	600 investor	1.967.513.630	650 investor	2.019.478.100	700 investor	2.069.009.919	700 investor
	Persentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	4,756 Trilyun	5,23 Trilyun	1.149.885.616	5,65 Trilyun	957.494.974	6,10 Trilyun	983.660.134	6,59 Trilyun	1.009.639.815	7,12 Trilyun	1.034.403.291	7,12 Trilyun
Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	N/A	32 investor	354.750.000	100 investor	295.395.766	150 investor	303.467.952	200 investor	311.482.916	200 investor	319.122.669	682 investor
Program Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	_	-	80.19	1.169.196.842	80.21	1.201.147.111	80.23	1.232.870.892	80.25	1.263.109.565	80.25
	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	_		100%		100%		100%		100%		100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80.17	1.404.125.000	_	-	_	-	_	-	_	-	80.17
	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	N/A	100%		_		_		_		_		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga													
				100.856.933.221		**85.647.646.372**		**87.988.112.306**		**90.311.987.219**		**92.527.072.880**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	14.173.365.082	100%	11.801.962.917	100%	12.124.471.396	100%	12.444.693.687	100%	12.749.925.178	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	586.025.945	100%	487.976.273	100%	501.311.045	100%	514.551.290	100%	527.171.710	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	144.900.000	100%	120.656.368	100%	123.953.506	100%	127.227.271	100%	130.347.780	100%
Program Pembinaan Keolahragaan	Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	90%	90%	62.266.278.950	90%	58.260.014.611	90%	59.852.067.461	90%	61.432.834.617	90%	62.939.600.167	90%
Program Pembinaan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	100%	100%	7.449.984.038	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase rata-rata organisasi pemuda dan pemuda yang aktif positif	NA	0,029%	5.770.534.438	0,036%	8.809.264.339	0,042%	9.049.992.298	0,050%	9.289.013.793	0,060%	9.516.845.799	0,060%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemudaan	100%	100%	4.308.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase infrastruktur kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	N/A	_	-	100%	6.167.771.864	100%	6.336.316.600	100%	6.503.666.561	100%	6.663.182.247	100%
Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	90%	90%	4.306.995.742	_	-	_	-	_		_	-	90%
Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase infrastruktur kepemudaan yang memenuhi standar	100%	100%	1.850.074.026	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
										-		-	
Urusan Komunikasi dan Informatika													
				25.305.443.037		**24.771.977.800**		**25.448.913.742**		**26.121.051.042**		**26.761.723.087**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.777.966.721	100%	3.978.551.482	100%	4.087.272.090	100%	4.195.222.003	100%	4.298.118.378	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	300.876.949	90%	712.060.471	100%	731.518.721	100%	750.839.035	100%	769.254.894	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	NA	-	-	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	325.000.000	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	107.126.250	100%	89.202.652	100%	91.640.264	100%	94.060.597	100%	96.367.625	100%
Urusan Statistik													
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase data informasi yang berkualitas	35%	35%	1.763.826.465	45%	1.510.349.986	55%	1.551.622.839	65%	1.592.603.118	75%	1.631.664.957	75%
Urusan Persandian													
Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government*	36%	36%	2.054.296.000	40%	1.793.854.592	45%	1.842.874.685	50%	1.891.547.285	55%	1.937.941.340	55%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Optimalisasi Persandian	Cakupan persentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	100%	100%	448.949.600	100%	415.468.919	100%	426.822.306	100%	438.095.211	100%	448.840.390	100%
Urusan Komunikasi dan Informatika													
Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase interkoneksi pengembangan infrastruktur TIK yang berfungsi	100%	100%	12.290.734.328	100%	12.154.735.565	100%	12.468.715.820	100%	12.780.293.123	100%	13.076.113.986	100%
Program Layanan Informasi Publik	Persentase layanan informasi melalui media kepada masyarakat	100%	100%	972.760.000	100%	1.482.183.123	100%	1.522.686.269	100%	1.562.902.298	100%	1.601.235.664	100%
Program Diseminasi Informasi	Cakupan layanan informasi masyarakat	60%	60%	2.010.886.124	70%	1.796.011.355	80%	1.845.090.385	90%	1.893.821.505	100%	1.940.271.339	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan Persentase dokumen hasil kajian yang di-gunakan dalam rumusan ke-bijakan yang diimplementasi-kan	50%	50%	578.020.600	60%	589.559.654	70%	605.670.363	80%	621.666.867	90%	636.914.514	90%
Urusan Kebudayaan													
				49.947.821.822		**37.631.746.747**		**38.664.347.929**		**39.683.403.821**		**40.659.359.951**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	14.190.753.430	100%	9.892.506.805	100%	10.162.836.185	100%	10.431.249.263	100%	10.687.096.924	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	80%	90%	6.308.160.149	90%	3.151.483.521	94%	3.237.603.107	95%	3.323.112.211	95%	3.404.618.314	95%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	1.168.750	100%	212.158.277	100%	217.955.858	100%	223.712.342	100%	229.199.344	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	100%	120.000.000	100%	99.922.458	100%	102.653.007	100%	105.364.200	100%	107.948.472	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	28,13%	37,50%	1.487.792.893	43,75%	777.696.972	50%	803.199.283	53,13%	822.295.394	62,50%	845.103.590	62,50%
Program pelindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	N/A	0,26%	330.040.000	0,52%	274.820.066	1,05%	282.329.987	1,57%	289.786.671	2,10%	296.894.280	2,10%
Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	N/A	0,26%	1.166.117.000	0,52%	971.010.639	1,05%	997.545.137	1,57%	1.023.891.538	2,10%	1.049.004.567	2,10%
Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	N/A	0,26%	12.349.000.000	0,52%	9.380.220.722	1,05%	9.636.551.024	1,57%	9.891.064.260	2,10%	10.133.662.781	2,10%
Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	N/A	0,26%	1.224.987.000	0,52%	1.169.914.618	1,05%	1.201.884.502	1,57%	1.233.627.759	2,10%	1.263.884.995	2,10%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pariwisata													
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Indeks *Brand Awareness* Pariwisata Kota Bandung	N/A	3,46	2.781.741.718	3,80	2.611.615.588	3,98	2.682.982.375	4,12	2.753.843.259	4,24	2.821.386.881	4,24
Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	N/A	20%	2.859.209.998	24%	3.629.858.141	28%	3.729.050.117	40%	3.827.538.945	48%	3.921.417.143	26,95%
Program pengembangan industri pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	N/A	5,39%	1.789.990.000	10,78%	1.765.288.427	16,17%	1.813.527.901	21,56%	1.861.425.417	26,95%	1.907.080.671	4,84%
Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Persentase lembaga dan SDM pariwisata meningkat kompetensinya	N/A	0,97%	1.291.701.884	1,94%	532.530.128	2,90%	547.082.409	3,87%	561.531.532	4,84%	575.304.238	4,84%
Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (*evidence based policy*)	N/A	80%	637.996.600	62,50%	448.018.727	75,00%	460.261.592	87,50%	472.417.670	93,75%	484.004.676	93,75%
Program pengembangan ekosistem kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	25%	50%	2.300.790.000	62,50%	2.069.885.386	75,00%	2.126.448.484	87,50%	2.182.610.619	93,75%	2.236.143.596	26,67%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	N/A	3,33%	1.108.372.400	6,67%	644.816.274	10,00%	662.436.962	13,33%	679.932.742	26,67%	696.609.479	26,67%
Urusan Perpustakaan													
				11.249.999.577		9.588.118.189		9.467.867.143		10.097.402.113		10.345.061.491	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.794.619.896	100%	4.719.270.136	100%	4.848.232.126	100%	4.976.279.936	100%	5.098.333.349	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.182.707.345	100%	1.298.832.372	100%	1.334.325.150	100%	1.369.566.329	100%	1.403.157.736	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	248.881.600	100%	207.240.510	100%	212.903.705	100%	218.526.755	100%	223.886.570	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	468.870.000	100%	390.422.023	100%	401.090.961	100%	411.684.270	100%	421.781.666	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi perangkat daerah	100%	100%	191.056.750	100%	159.090.500	100%	163.437.916	100%	167.754.513	100%	171.869.035	100%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Persentase pemustaka per tahun	4,475%	5,04%	1.269.919.500	5,50%	1.057.445.647	6,01%	1.086.342.127	6,50%	1.115.033.766	7,00%	1.142.382.243	7,00%
Urusan Kearsipan													
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase perangkat daerah yang menyelenggara-kan OPD secara baku	0	10%	1.051.591.696	10%	875.646.890	10%	899.575.414	10%	923.334.313	10%	945.980.970	50%
Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan pengembangan kualitas sumber daya perpustakaan dan kearsipan	100%	100%	610.164.000	100%	508.075.721	100%	521.959.744	100%	535.745.347	100%	548.885.594	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase *smart library* yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung	1,54%	2,04%	432.188.790	2,54%	372.094.390	3,03%		3,53%	379.476.884	4,03%	388.784.328	4,03%
	Persentase perngkat daerah yang menyelenggara-kan sistem kearsipan secara baku	28,12%	37,50%		44,87%		56,25%		62,50%		68,75%		68,75%
Urusan Perdagangan													
				22.899.780.397		**20.271.785.303**		**20.765.670.479**		**21.774.737.810**		**23.604.122.738**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.278.284.179	100%	2.701.837.958	100%	2.775.670.222	100%	2.848.979.107	100%	2.918.856.130	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	5.110.733.539	100%	4.255.642.135	100%	4.404.297.162	100%	4.487.402.916	100%	4.597.465.624	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	62.845.090	100%	52.330.299	100%	53.760.312	100%	55.180.189	100%	56.533.595	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	165.511.500	100%	137.819.299	100%	141.585.443	100%	145.324.890	100%	148.889.279	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100%	100%	64.299.000	100%	53.540.951	100%	55.004.047	100%	56.456.772	100%	57.841.490	100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kota Bandung	US$ 466 jt	US$ 466 jt	1.190.989.000	US$467 Jt	1.239.651.542	US$468 Jt	1.273.527.105	US$469 Jt	1.307.162.531	US$470 Jt	1.339.223.358	USS 470 juta
Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	15%	15%	1.441.719.820	_	-	_	-	_	-	_	-	15%
Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	N/A	_	-	15%	1.311.482.058	15%	1.303.086.241	15%	1.337.502.360	15%	1.370.307.333	15%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan E-Commerce	Nilai daya saing perdagangan *e-commerce*	N/A	300 Poin	248.468.500	400 poin	249.662.741	500 poin	256.485.195	600 poin	263.259.286	700 poin	269.716.257	700 poin
Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai daya saing perdagangan	N/A	350 Poin	1.654.301.300	450 poin	1.629.306.452	550 poin	1.673.829.990	600 poin	1.718.037.911	700 poin	1.760.176.295	700 poin
Program Standardisasi Kemetrologian	Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi	N/A	N/A	2.561.996.380	120.500 alat UTTP	1.665.807.610	121.000 alat UTTP	1.711.328.603	121.500 alat UTTP	1.756.526.909	122.000 alat UTTP	1.799.609.314	485.000 alat UTTP
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82	82		83		84		85		86		86
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Informasi mengenai barang kena cukai illegal	15 merk	15 merk	224.986.848	16 merk	187.343.657	17 merk	192.463.137	18 merk	197.546.327	19 merk	202.391.553	85 merk
Urusan Perindustrian													
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) tersertifikasi	350 IKM	350 IKM	885.000.000	362	876.150.000	372	893.673.000	382	983.040.300	392	1.179.648.360	1.858 IKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat daya saingnya	280 IKM	280 IKM	4.141.936.595	280 IKM	4.100.517.229	360 IKM	4.182.527.574	390 IKM	4.600.780.331	400 IKM	5.520.936.397	1.710 IKM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	1.618.708.821	150 pelaku usaha	1.602.521.733	150 pelaku usaha	1.634.572.167	150 pelaku usaha	1.798.029.384	150 pelaku usaha	2.157.635.261	750 pelaku usaha
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82	82		83		84		85		86,00		
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya	1 Sentra	1 Sentra	249.999.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	-	-	-	4 sentra	208.171.641	8 sentra	213.860.281	12 sentra	219.508.596	16 sentra	224.892.492	16 sentra
Urusan Perencanaan													
				16.788.738.170		**15.276.342.520**		**16.014.540.694**		**17.342.971.043**		**16.827.297.753**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.319.900.550	100%	4.026.351.234	100%	4.136.378.051	100%	4.463.678.156	100%	4.349.757.522	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	2.038.787.808	100%	1.694.475.442	100%	1.981.215.494	100%	2.190.507.239	100%	2.202.466.968	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	_	_	100%	267.290.951	100%	280.137.612	100%	301.264.227	100%	295.202.221	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	219.450.000	100%	182.733.195	100%	187.726.686	100%	401.580.978	100%	197.410.768	100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata penyusunan dokumen tepat waktu	100%	100%	6.169.227.052	-	5.416.331.163	-	5.859.944.741	-	6.472.798.574	-	6.428.554.234	100%
	Persentase sasaran RPJMD yang di *cascade*	NA	-		50%		66,67%		83,33%		100%		100%
	Persentase perangkat daerah yang memiliki perencanaan kinerja terukur	NA	-		50%		66,67%		83,33%		100%		100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	100%	100%^	430.000.000	100%	358.055.474	100%	367.839.941	100%	396.946.094	100%	386.815.357	100%
Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	560.000.100	100%	466.304.886	100%	479.047.451	100%	516.953.145	100%	503.759.625	100%
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	N/A	100%	380.000.000	100%	407.137.328	100%	461.200.898	100%	519.076.795	100%	549.578.491	100%
Urusan Penelitian dan Pengembangan													
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasi-kan sebagai dasar perumusan kebijakan	75%	100%	2.671.372.660	100%	2.457.662.847	100%	2.261.049.819	100%	2.080.165.834	100%	1.913.752.567	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Keuangan				**16.590.196.414**		**13.262.186.442**		**13.624.597.984**		**13.984.440.475**		**14.327.437.396**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.917.905.951	100%	3.262.389.932	100%	3.351.540.222	100%	3.440.058.546	100%	3.524.432.997	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.426.957.272	100%	1.188.208.981	100%	1.220.678.789	100%	1.252.918.426	100%	1.283.648.806	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	163.707.500	100%	136.317.131	100%	140.042.226	100%	143.740.915	100%	147.266.454	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100%	100%	102.377.000	100%	85.248.012	100%	87.577.557	100%	89.890.589	100%	92.095.339	100%
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	17,64%	19%	1.263.222.550	_	-	_	-	_	-	_	-	19%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.622.978.391	_	4.017.782.332	_	4.117.364.551	_	4.216.153.756	_	4.309.861.976	2 Dokumen
	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	350 lokasi per bidang tanah	30 lokasi per bidang tanah		_		_		_		_		30 lokasi per bidang tanah
	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBDP	60 Hari Kerja RAPBD dan 30 Hari Kerja RAPBDP	_		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu
	Rata rata penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai peraturan perudang undangan	2 hari kerja	_		2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja		2 hari kerja
	Laporan keuangan Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan	14 Dokumen	_		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen		14 Dokumen

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	_	-	2 Dokumen	4.572.240.053	2 Dokumen	4.707.394.639	2 Dokumen	4.841.678.242	2 Dokumen	4.970.131.824	2 Dokumen
	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	350 lokasi per bidang tanah	_	-	30 lokasi per bidang tanah		30 lokasi per bidang tanah		30 lokasi per bidang tanah		30 lokasi per bidang tanah		500 lokasi per bidang tanah
	Persentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang telah didaftarkan/ bersertifikat dari BPN	17,64%	_	-	21%		24%		27%		30%		30%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase dokumen pengelolaan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	93.047.750	_	-	_	-	_		_	-	100%
Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan													
				19.042.179.435		**15.001.975.773**		**15.598.692.589**		**15.917.636.571**		**16.424.037.655**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.927.180.341	100%	2.437.425.450	100%	2.504.032.198	100%	2.570.166.787	100%	2.633.205.368	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	793.548.000	100%	660.777.221	100%	678.834.069	100%	696.762.917	100%	713.852.449	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	8.250.000	100%	68.696.690	100%	70.573.942	100%	72.437.887	100%	74.214.574	100%
Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Tingkat pelaksanaan pindah/purna tugas PNS	100%	100%	198.281.600	100%	165.106.540	100%	169.618.354	100%	174.098.184	100%	178.368.297	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	180.058.940	100%	149.932.765	100%	154.029.930	100%	158.098.051	100%	161.975.728	100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentasi pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	443.570.000	100%	369.355.038	100%	379.448.286	100%	389.469.984	100%	399.022.530	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	42,08%	45,69%	11.916.613.036	_	-	_	-	_	-	_	-	_
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	N/A	_	-	52,40%	9.006.781.190	60,23%	9.439.669.234	69,97%	9.595.945.789	74,06%	9.947.294.515	74,06%
Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai kompetensi dan beban kerja	55%	60%	1.284.571.666	75%	1.069.646.317	80%	1.098.876.201	85%	1.127.898.881	90%	1.155.562.901	90,00%
Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat	77,78%	79,37%	491.407.320	80,95%	409.188.560	82,54%	420.370.325	84,13%	431.472.826	85,71%	442.055.576	100%
Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase akurasi data kepegawaian	96,38%	97,11%	550.382.800	97,83%	458.296.684	98,56%	470.820.411	99,28%	483.255.361	100%	495.108.184	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Assesment Center	Persentase penempatan dan pengembangan kompetensi sesuai hasil *assesment*	50%	50%	248.315.732	60%	206.769.319	70%	212.419.638	80%	218.029.903	90%	223.377.531	90%
												-	
Urusan Penunjang Lainnya													
Sekretariat Daerah				**178.201.031.997**		**150.346.394.017**		**154.079.059.421**		**158.534.206.018**		**162.590.973.365**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	109.179.624.414	100%	91.120.641.856	100%	93.382.903.413	100%	96.083.040.122	100%	98.439.672.624	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	32.784.226.120	100%	27.344.343.561	100%	28.023.224.394	100%	28.833.506.942	100%	29.540.707.500	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	1.511.299.188	100%	1.258.439.411	100%	1.289.682.815	100%	1.326.973.580	100%	1.359.520.314	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	74.570.000	100%	62.093.481	100%	63.635.082	100%	65.475.070	100%	67.080.979	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	100%	100%	2.026.891.000	100%	1.687.766.086	100%	1.729.668.428	100%	1.779.681.236	100%	1.823.331.548	100%
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	100%	100%	115.000.000	100%	95.759.022	100%	98.136.441	100%	100.974.025	100%	103.450.619	100%
Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	Nilai hasil kepuasan pelayanan barang dan jasa	100%	100%	3.082.621.578	100%	2.566.859.370	100%	2.630.587.052	100%	2.706.649.633	100%	2.773.035.735	100%
Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daearah	Persentase penataan kelembagaan dan ketatalaksaan organisasi perangkat daerah	100%	100%	1.301.931.749	100%	1.084.101.835	100%	1.111.016.943	100%	1.143.141.641	100%	1.171.179.521	100%
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kota Bandung komponen pelaporan	12.61	13,00	375.000.000	13,25	312.257.680	13,50	320.010.134	13,75	329.263.124	14,00	337.338.974	14,00

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	3,4110	3,4110	553.090.000	3,4200	460.550.935	3,4300	471.985.080	3,4400	485.632.377	3,4500	497.543.502	3,4500
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase fasilitasi penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dan Pilkada	100%	100%	62.192.250	0%	-	0%	-	0%	-	100%	168.392.644	100%
Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Persentase batas wilayah tertata	100%	100%	294.169.773	100%	244.951.389	100%	251.032.823	100%	258.291.356	100%	264.626.478	100%
Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Terfasilitasnya penyelenggara otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	100%	100%	3.171.397.223	100%	2.932.222.210	100%	3.005.020.793	100%	3.091.910.006	100%	3.167.745.404	100%
Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian kualitas pembangunan daerah	100%	100%	1.199.219.338	-100%	998.574.530	-100%	1.023.366.243	-100%	1.052.956.550	-100%	1.078.782.456	-100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio berita baik dan berita buruk	71,00 :29,00	71,00 :29,00	9.671.650.656	71,20 : 28,80	8.677.974.562	71,40 : 28,60	8.893.423.530	71,60 : 28,40	9.150.574.019	71,80 : 28,20	9.375.010.508	
Program Sosial Keagamaan	Persentase rancangan kebijakan bidang sosial keagamaan ditindaklanjuti	100%	100%	2.121.124.590	100%	2.155.597.696	100%	2.209.114.942	100%	2.272.990.792	100%	2.328.740.526	100%
Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi bidang kesejahteraan rakyat lingkup kesehatan masyarakat, pendidikan dan sosial budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	334.165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kegiatan
Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase rancangan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti	100%	100%	634.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Koordinasi, sinkronisasi, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Persentase rancangan kebijakan bidang sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti	N/A	_	-	25%	1.052.109.371	50%	1.078.230.199	60%	1.109.406.879	70%	1.136.617.345	70%
Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Perentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100%	100%	1.201.034.000	100%	1.000.085.576	100%	1.024.914.804	100%	1.054.549.887	100%	1.080.414.873	100%
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama aktif yang di implementasikan	100%	100%	6.127.155.000	100%	5.102.003.222	100%	5.228.671.181	100%	5.379.856.532	100%	5.511.808.485	100%
Program Koordinasi Perumusan dan Implemantasi Kebijakan Ekonomi	Persentase dokumen kajian bidang perekonomian ditindaklanjtui menjadi rumusan kebijakan	100%	100%	2.380.114.118	100%	2.190.062.224	100%	2.244.435.124	100%	2.309.332.246	100%	2.365.973.329	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	58 Perusahaan	62 Perusahaan		66 Perusahaan		71 Perusahaan		76 Perusahaan		81 Perusahaan		81 Perusahaan
	Jumlah perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga	3 Perusahaan	4 Perusahaan		53 Perusahaan		6 Perusahaan		7 Perusahaan		8 Perusahaan		8 Perusahaan
								-				-	
Urusan Keuangan													
Sub Urusan Pendapatan Daerah				**29.582.447.284**		**24.632.923.659**		**25.244.487.791**		**25.974.424.060**		**26.611.499.780**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	12.041.791.150	100%	10.027.044.729	100%	10.275.987.201	100%	10.573.114.076	100%	10.832.441.260	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	2.350.233.700	100%	1.957.009.397	100%	2.005.596.270	100%	2.063.587.444	100%	2.114.201.134	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	408.285.000	100%	339.973.672	100%	348.414.234	100%	358.488.519	100%	367.281.181	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	1.000.500.000	100%	833.103.492	100%	853.787.038	100%	878.474.016	100%	900.020.383	100%
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	2.436.311. 729.898	2.436.311. 729.898	2.541.188.850	2.522.552. 659.693	2.116.015.296	2.691.062. 135.340	2.168.549.826	2.898.122. 897.465	2.231.252.748	3.082.342. 305.461	2.285.978.772	3.082.342. 305.461
Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	75%	75%	5.535.402.000	75%	4.609.258.104	75%	4.723.692.630	75%	4.860.276.687	75%	4.979.484.885	75%
Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai SKM pelayanan pajak daerah	88,31	88,31	5.652.411.584	88,31	4.706.690.481	88,31	4.823.543.970	88,31	4.963.015.197	88,31	5.084.743.266	88,31
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	Nilai SKM pelayanan PAD bukan pajak daerah	88,31	88,31	52.635.000	88,31	43.828.488	88,31	44.916.622	88,31	46.215.372	88,31	47.348.898	88,31

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												-	
Fungsi Penunjang Lainnya												-	
Urusan Pengawasan				**15.158.859.157**		**34.378.749.155**		**44.062.084.277**		**13.310.008.879**		**13.636.463.990**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8.108.140.597	100%	6.751.544.469	100%	6.919.165.759	100%	7.119.231.218	100%	7.293.844.882	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3.079.869.370	100%	24.320.729.599	100%	33.754.353.234	100%	2.704.233.098	100%	2.770.559.930	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	365.537.590	100%	304.378.453	100%	311.935.288	100%	320.954.797	100%	328.826.868	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	285.006.000	100%	237.320.833	100%	243.212.822	100%	250.245.243	100%	256.383.018	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	80%	80%	1.075.662.600	85%	895.690.423	90%	917.927.821	95%	944.469.410	100%	967.634.448	100%
Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	80%	80%	774.423.000	80%	619.871.465	95%	635.261.077	95%	653.629.448	100%	669.661.043	100%
Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase capaian sistem pengawasan/ pengendalian intern	100%	100%	1.470.220.000	100%	1.249.213.913	100%	1.280.228.276	100%	1.317.245.666	100%	1.349.553.802	100%
	Tingkat pemenuhan kapabilitas aparat pengawas	N/A	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		
Sekretariat Dewan				**81.110.062.901**		**62.809.409.130**		**64.368.784.797**		**66.229.987.570**		**67.854.413.078**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	17.697.915.379	100%	16.827.497.721	100%	17.245.275.740	100%	17.743.917.358	100%	18.179.123.117	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	22.189.898.515	100%	10.923.166.176	100%	11.194.356.748	100%	11.518.037.983	100%	11.800.541.354	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	914.950.000	100%	937.081.136	100%	960.346.146	100%	988.114.246	100%	1.012.349.763	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	1.817.820.000	100%	2.765.712.074	100%	2.834.376.692	100%	2.916.331.785	100%	2.987.860.770	100%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan angggota DPRD	85%	85%	38.489.479.007	85%	31.355.952.023	85%	32.134.429.472	85%	33.063.586.196	85%	33.874.538.074	85%
Urusan Pemerintahan				**16.996.731.365**		**14.276.636.480**		**14.572.868.703**		**14.994.238.528**		**15.362.002.796**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayana administrasi perkantoran	100%	100%	4.719.821.061	100%	3.930.134.338	100%	4.027.708.188	100%	4.144.168.079	100%	4.245.812.252	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	385.960.000	100%	321.383.932	100%	329.362.963	100%	338.886.388	100%	347.198.267	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	101.450.000	100%	84.476.111	100%	86.573.408	100%	89.076.650	100%	91.261.437	100%
Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi sosial budaya	100%	100%	1.444.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup wawasan kebangsaan	100%	100%	5.141.023.304	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit masyarakat	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	100%	100%	3.274.762.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres	76,62%	77%	1.929.335.000	-	-	-	-	-	-	-	-	77%
	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pileg		74%		-	-	-	-	-	-	-	-	74%
Program Peningakatan Kesatuan Bangsa	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik	100%	-	-	100%	9.940.642.099	100%	10.129.224.144	100%	10.422.107.411	100%	8.869.914.795	100%
Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada	76.62%	-	-	-	-	-	-	-	-	77%	1.807.816.046	77%
KECAMATAN				**474.499.534.278**		**466.737.995.537**		**495.851.999.391**		**535.258.920.066**		**569.557.589.710**	
1. Sukasari				**11.698.327.437**		**10.630.335.719**		**11.559.704.879**		**12.448.621.540**		**13.254.728.402**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.719.026.242	100%	1.163.548.769	100%	1.165.732.519	100%	1.204.660.992	100%	1.194.271.751	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	521.213.680	100%	365.555.896	100%	368.249.465	100%	372.482.218	100%	373.879.026	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	0%	-	100%	187.150.000	100%	188.529.000	100%	190.696.000	100%	191.411.110	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.961.955.707	100%	1.320.182.404	100%	1.329.910.064	100%	1.345.196.387	100%	1.350.240.873	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	70%	70%	1.005.893.600	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	70%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	287.764.750	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	100%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	79,64	80	1.143.958.578	80	1.154.400.000	80,20	1.258.983.612	80,40	1.273.454.688	80,50	1.278.230.143	80,50

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan aktif dalam pembangunan	100%	100%	570.399.050	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	100%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ Kecamatan	1 Unit/ perkeca-matan	1 Unit/ Kecama-tan		`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	1 Unit/Ke-camatan
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	-	75%	1.194.498.650	76%	1.203.300.219	78%	1.217.131.256	80%	1.221.695.498	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,20%	80,00%	4.400.000.000	79,00%	5.200.000.000	79,40%	6.000.000.000	79,80%	6.800.000.000	80,00%	7.600.000.000	80,40%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	64.279.580	_	-	`-		_	-	_	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	60%	60%	23.836.250	_	-	_	-	_	-	_	-	60%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	_	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%
2. Cidadap				**8.932.437.370**		**10.315.013.852**		**11.778.584.638**		**13.683.080.310**		**15.509.391.711**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	972.145.000	100%	1.202.920.371	100%	1.349.891.109	100%	1.535.117.062	100%	1.703.017.460	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	888.059.626	100%	920.511.117	100%	1.080.590.955	100%	1.239.380.495	100%	1.382.808.843	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	50 org	27.000.000	100%	58.425.000	100%	79.730.000	100%	103.950.000	100%	129.630.000	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	_	-	100%	82.666.250	100%	107.873.500	100%	135.877.500	100%	164.868.500	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	1.034.780.681	100%	1.070.900.198	100%	1.255.189.010	100%	1.437.453.919	100%	1.601.423.215	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	711.824.407	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	_	-	91,66%	80.664.013	91,66%	105.548.952	91,66%	133.240.407	91,66%	161.957.931	91,66%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	906.249.000	78	943.800.000	78	1.102.236.310	78	1.263.936.150	78	1.409.911.010	78
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100	100	464.356.939	100	486.215.862	100	576.384.757	100	667.381.868	100	751.491.839	100
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	_	-	_	-	_	-	_	-	_	-	1 Unit

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65%	65%	3.797.689.574	65,1%	4.522.689.574	65,2%	4.975.000.000	65,4%	5.812.500.000	65,5%	6.650.000.000	65,5%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15%	86,15%	78.154.000	_								86,15%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	52.178.143	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	36%	946.221.467	42%	1.146.140.045	48%	1.354.242.908	56%	1.554.282.914	63%
3. Sukajadi				**13.747.568.050**		**13.225.656.727**		**13.399.868.023**		**13.667.865.383**		**14.077.901.345**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.757.901.417	100%	1.267.679.204	100%	1.280.355.996	100%	1.305.963.116	100%	1.345.142.009	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	683.601.919	100%	560.553.574	100%	566.159.109	100%	577.482.292	100%	594.806.760	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	28.600.000	100%	23.452.000	100%	23.686.520	100%	24.160.250	100%	24.885.058	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	80.214.000	100%	65.775.480	100%	66.433.235	100%	67.761.899	100%	69.794.756	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	70%	70%	1.561.161.788	70,50%	1.280.152.666	71,00%	1.292.954.193	71,50%	1.318.813.277	72,00%	1.358.377.675	72%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	40%	40%	970.638.880	-	-	-	-	-	-	-	-	42%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70,00%	70,00%	528.613.900	-	-	-	-	-	-	-	-	72%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	76,00%	76,00%	1.515.337.600	76,50%	1.743.000.000	77,00%	1.760.430.000	77,50%	1.795.638.600	78,00%	1.849.507.758	78%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	54,54%	54,54%	172.876.500	-	-	-	-	-	-	-	-	54,54%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	70,50%	664.020.157	71,00%	670.660.358	71,50%	684.073.566	72,00%	704.595.773	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	70,00%	70,00%	6.396.023.646	70,50%	7.621.023.646	71,00%	7.739.188.612	71,50%	7.893.972.384	72,00%	8.130.791.555	72%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	20	20	29.656.000	-	-	-		-		-		-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	22.942.400	-	-	-				-		-
												-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Cicendo				**17.056.081.768**		**15.707.580.174**		**17.177.896.224**		**18.839.696.986**		**20.661.409.986**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.766.714.558	100%	1.400.342.099	100%	1.435.108.536	100%	1.476.604.240	100%	1.508.264.280	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	818.082.000	100%	745.455.849	100%	763.963.358	100%	786.053.114	100%	802.906.969	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	46.646.875	100%	112.965.981	100%	115.770.600	100%	119.118.069	100%	121.672.093	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	25.000.000	100%	20.817.179	100%	21.334.009	100%	21.950.875	100%	22.421.526	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	70%	75%	2.645.749.148	79%	1.703.081.312	79%	1.757.777.439	79%	1.823.060.350	79%	1.872.869.352	79%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	45,9%	51,53%	1.363.710.232	-	-	-	-	-	-	-	-	45,9%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	91,66 %	111.797.700	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66 %
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	78	83,33	2.030.703.500	84	2.129.400.000	84,5	2.342.340.000	85	2.576.574.000	85	2.834.231.400	85
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	54,54%	54,54%	694.145.800	-	-	-	-	-	-	-	-	54,54%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	64%	64%	7.395.823.555	64,5%	8.795.830.134	65%	9.939.288.051	67,00%	11.231.395.498	69,00%	12.691.476.913	69,00%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	107.916.900	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	49.791.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	20%	799.687.619	30%	802.314.230	40%	804.940.841	50%	807.567.452	50%
5. Andir				**17.303.535.769**		**18.965.558.111**		**19.889.847.995**		**21.357.120.185**		**22.873.410.697**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.987.478.889	100%	1.430.004.655	100%	1.646.735.897	100%	1.664.687.933	100%	1.733.098.603	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	795.104.000	100%	692.099.739	100%	653.508.633	100%	677.571.219	100%	687.062.380	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	56.300.000	100%	49.006.439	100%	46.273.866	100%	47.977.698	100%	48.649.751	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	120.000.000	100%	104.454.221	100%	98.629.910	100%	102.261.523	100%	103.693.964	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.335.495.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	91,66 %	77.272.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66 %
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81,5	81,5	1.785.772.236	81,5	1.989.999.999	81,5	1.467.754.625	81,5	1.521.798.243	81,5	1.543.115.017	81,5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	50%	761.101.200	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ Kecamatan	1 Unit	1 Unit		-		-		-		-		1 Unit
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	70,0%	3.926.437.316	70,5%	4.033.889.352	71,0%	4.182.419.611	71,5%	4.241.005.362	72%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	76,00%	76,00%	7.650.970.641	76,10%	8.544.334.847	76,20%	9.655.098.377	76,30%	10.813.710.182	76,50%	12.111.355.404	76,50%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	80.557.500	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	92.491.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	2.560.992.803	100%	2.229.220.896	100%	2.287.957.335	100%	2.346.693.775	100%	2.405.430.215	100%
6. Coblong				**22.134.916.530**		**23.368.672.368**		**24.843.850.912**		**27.468.531.263**		**30.164.080.227**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.565.503.534	100%	2.625.513.772	100%	2.849.975.099	100%	3.224.206.908	100%	3.437.595.162	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.130.606.700	100%	1.001.439.210	100%	1.272.271.720	100%	1.399.498.891	100%	1.539.448.781	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	31.240.000	100%	31.958.520	100%	35.154.372	100%	38.669.809	100%	42.536.790	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	2.732.166.870	100%	2.795.006.708	100%	3.074.507.379	100%	3.381.958.117	100%	3.720.153.928	100%
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.726.303.750	_	-	_	-	_	-	_	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadminis-trasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerin-tahan	Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik	80	81	3.233.291.836	82	2.480.400.000	83	2.778.048.000	84	3.111.413.760	85	3.484.783.411	85
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	78	78	233.190.200	78	238.553.575	78	262.408.932	78	288.649.825	78	317.514.808	78
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	54,54%	54,54%	1.098.669.200	54,54%	1.123.938.592	54,54%	1.236.332.451	54,54%	1.359.965.696	54,54%	1.495.962.265	54,54%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	9.300.952.440	100%	11.175.952.440	100%	11.254.152.452	100%	12.379.567.698	100%	13.617.524.467	100%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	30.540.000	_	-	_	-	_	-	_	-	86,15

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	52.452.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	40%	1.850.909.552	40,5%	2.036.000.507	41,00%	2.239.600.558	42,5%	2.463.560.614	42,5%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	_	-	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%
7. Bandung wetan				**12.184.791.272**		**13.605.048.934**		**16.353.294.088**		**18.371.092.108**		**20.269.472.790**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.449.849.089	100%	2.577.918.197	100%	2.831.506.763	100%	3.124.504.483	100%	3.424.923.154	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	742.154.508	100%	851.335.800	100%	1.157.137.840	100%	1.329.577.689	100%	1.399.646.377	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	52.635.000	100%	77.388.706	100%	85.001.395	100%	93.797.142	100%	102.815.664	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	N/A	70,00%	1.597.021.838	100%	1.680.508.271	100%	1.845.819.057	76,50%	2.036.820.110	77,00%	2.232.658.777	77,00%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	2.102.530.732	_	-	_	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	20%	351.452.780	_	-	_	-	-	-	-	-	20%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	75,00	75,00	1.055.074.900	78%	1.086.600.000	78%	1.249.120.650	76,50	1.392.553.560	77,00	1.544.354.943	77,00

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	60%	60%	212.563.600	_	-	_	-	-	-	-	-	60%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	49.302.000	78%	51.879.327	78%	56.982.672	100%	62.879.106	100%	68.924.883	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	20%	2.831.456.309	40%	3.109.985.297	60%	3.431.799.326	80%	3.761.764.158	80,00%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65,00%	65,00%	3.547.962.325	65,25%	4.447.962.325	65,50%	6.017.740.414	66,50%	6.899.160.692	67,50%	7.734.384.835	67,50%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	20%	20%	10.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	13.304.500	-	-	-	-	-		-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. Sumur Bandung				**11.581.546.445**		**11.395.024.086**		**11.977.285.257**		**13.078.796.520**		**14.128.141.858**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi	100%	100%	1.271.084.513	100%	1.055.573.912	100%	1.112.700.460	100%	1.120.461.098	100%	1.146.017.355	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	648.589.569	100%	519.400.705	100%	533.086.090	100%	546.771.476	100%	548.273.017	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	130.548.000	100%	120.104.160	100%	107.299.479	100%	120.104.160	100%	117.493.200	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	66.000.000	100%	60.720.000	100%	60.720.000	100%	60.720.000	100%	59.400.000	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	1.764.058.779	100%	1.412.685.952	100%	1.449.907.989	100%	1.487.130.027	100%	1.491.213.975	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.285.179.060	100%	-	_	-	_	-	_	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	91,66 %	96.444.000	91,66 %	-	_	-	_	-	_	-	91,66 %
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	1.073.844.000	78	1.236.600.000	78	1.384.992.000	78	1.551.191.040	78	1.737.333.965	78
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	403.091.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		_	-	_	-	_	-	_	-	1 Unit
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	100%	1.253.579.238	100%	1.253.579.238	100%	1.284.918.719	100%	1.288.410.346	80%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	78,5%	78,5%	4.811.360.120	78,75%	5.736.360.120	78,8%	6.075.000.000	78,85%	6.907.500.000	78,95%	7.740.000.000	80%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	21.778.904	_	-	_	-	_	-	_	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	9.568.500	_	-	_	-	_		_	-	100%
										-			
9. Cibeunying Kidul				**24.702.161.005**		**23.438.736.387**		**24.551.644.846**		**26.119.973.257**		**25.082.734.097**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.473.644.734	100%	1.379.106.477	100%	1.107.074.312	100%	985.878.216	100%	65.062.584	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	2.388.458.542	100%	1.550.109.594	100%	1.416.117.070	100%	1.271.615.328	100%	104.908.265	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	N/A	_	-	100%	88.500.000	100%	80.850.000	100%	90.400.000	100%	104.500.000	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan saluran air dalam kondisi baik	100%	100%	3.197.119.500	100%	2.877.407.550	100%	2.704.763.097	100%	2.596.572.573	100%	2.648.504.025	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.962.132.980	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	91,66%	320.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	2.696.485.000	78	2.986.800.000	78	3.345.216.000	78	3.746.641.920	78	3.821.574.758	78
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	629.351.042	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	77.000.000	100%	70.800.000	100%	73.500.000	100%	66.240.000	100%	5.400.000	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	1.495.502.826	77%	1.274.753.235	79%	1.067.329.551	81%	82.053.316	90%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	65%	65%	10.815.509.940	65,1%	12.990.509.940	65,2%	14.549.371.133	65,4%	16.295.295.669	65,5%	18.250.731.149	65,7%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	95.456.200	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	46.493.067	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
10. Cibeunying Kaler				**18.937.129.406**		**16.943.186.488**		**18.170.858.986**		**19.601.161.542**		**21.032.543.516**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi	100%	100%	2.311.875.317	100%	1.846.583.271	100%	1.867.349.958	100%	1.968.358.764	100%	1.933.372.498	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	988.963.741	100%	791.977.683	100%	812.845.040	100%	833.712.398	100%	854.579.755	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	232.908.500	100%	186.516.782	100%	191.431.203	100%	196.345.625	100%	201.260.047	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	94.600.000	100%	75.757.164	100%	77.753.246	100%	79.749.327	100%	81.745.408	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	3.111.960.299	100%	2.492.106.641	100%	2.557.769.703	100%	2.623.432.766	100%	2.689.095.828	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.906.242.170	-	-		-		-		-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik	80	81	1.838.044.679	81	1.549.200.000	81	1.735.104.000	81	1.943.316.480	81	2.176.514.458	81
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	78	78	1.838.044.679	-	-	-	-	-	-	-	-	78
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	690.045.020	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	3.051.082.545	76%	3.144.647.946	76%	3.238.213.346	77%	3.331.778.745	77%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80%	80%	5.799.962.401	81%	6.949.962.401	81%	7.783.957.889	82%	8.718.032.836	82%	9.764.196.776	82%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	79.655.600	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	44.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
11. Astana Anyar				**18.072.919.999**		**15.755.872.524**		**16.538.714.134**		**17.460.168.344**		**18.609.825.676**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.146.941.638	100%	1.932.247.474	100%	1.816.312.626	100%	1.743.660.121	100%	1.673.913.716	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	3.122.538.560	100%	810.284.704	100%	761.667.622	100%	731.200.917	100%	701.952.880	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	66.990.000	100%	106.426.800	100%	103.411.374	100%	94.436.047	100%	89.714.245	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aoaratur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	66.000.000	100%	64.130.000	100%	58.564.000	100%	55.635.800	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 % -	91,66 % -	565.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66 % -
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	2.156.055.389	100%	1.940.449.850	100%	1.824.022.859	100%	1.751.061.945	100%	1.681.019.467	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.542.898.830	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	82	82	1.534.685.639	82,25	1.611.000.000	82,5	1.804.320.000	82,75	2.020.838.400	83	2.263.339.008	83

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	276.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan	1 unit	1 unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	1.613.593.385	77%	1.567.874.906	79%	1.431.795.197	80%	1.360.205.437	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	75%	75%	6.500.870.310	76%	7.675.870.310	77%	8.596.974.747	78%	9.628.611.717	79%	10.784.045.123	79%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	50 % -	50 % -	23.371.400	-	-	-	-	-	-	-	-	50 % -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	36.983.233	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. Bojongloa kaler				**14.160.295.177**		**14.258.389.675**		**17.845.640.797**		**17.630.965.016**		**18.246.606.712**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.735.347.748	100%	1.213.142.703	100%	1.819.146.497	100%	1.734.879.457	100%	1.554.447.043	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	649.923.935	100%	871.543.570	100%	1.553.738.177	100%	1.480.993.225	100%	1.230.684.511	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	126.390.000	100%	90.000.000	100%	139.200.000	100%	120.700.000	100%	106.200.000	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.971.358.418	100%	1.542.814.800	100%	1.868.862.641	100%	1.677.680.140	100%	1.533.541.424	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.040.802.130	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 % -	91,66 % -	186.239.000	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66 % -
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik	78	78	1.808.754.500	78 .5	1.997.400.000	79	2.237.088.000	79,5	2.505.538.560	80	2.806.203.187	80
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	50%	563.265.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ Kecamatan	1 Unit	1 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	-	-	100%	69.000.000	100%	110.055.000	100%	98.796.500	100%	90.308.350	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	1.318.154.208	76%	2.102.455.962	78%	1.887.377.134	80%	1.725.222.197	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	84%	84%	5.981.334.394	85,00%	7.156.334.394	85%	8.015.094.521	85,50%	8.125.000.000	86,00%	9.200.000.000	86,00%
Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	51.814.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	45.066.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
13. Bojongloa Kidul				**14.727.457.145**		**14.940.795.837**		**16.480.247.936**		**17.802.039.807**		**18.694.784.563**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.869.102.951	100%	1.776.573.379	100%	1.828.025.950	100%	1.932.761.654	100%	1.841.932.675	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	952.087.211	100%	907.768.891	100%	1.128.985.015	100%	1.127.832.989	100%	1.031.523.655	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	36.900.000	100%	40.995.900	100%	43.756.020	100%	43.711.371	100%	39.978.715	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	106.020.000	100%	117.788.220	100%	125.718.516	100%	125.590.232	100%	114.865.673	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	2.146.742.065	100%	2.085.030.434	100%	2.245.606.741	100%	2.243.009.183	100%	2.025.853.342	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.508.761.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik	80	80	939.346.645	80,2	1.413.000.000	80,5	1.582.560.000	80,8	1.772.467.200	81,2	1.985.163.264	81,2
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	75%	503.084.160	-	-	-	-	-	-	-	-	75%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	91,66%	324.813.600	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90%	90%	6.199.639.013	90%	7.299.639.013	90%	8.175.595.695	90%	9.156.667.178	90%	10.255.467.239	90%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	70.959.600	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	80%	1.300.000.000	82%	1.350.000.000	85%	1.400.000.000	87%	1.400.000.000	87%
14. Babakan Ciparay				**16.563.192.782**		**16.528.170.166**		**17.009.859.916**		**17.457.251.305**		**18.879.401.882**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.024.037.003	100%	1.816.935.263	100%	1.973.652.889,72	100%	2.091.843.352	100%	2.197.366.301	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.136.626.628	100%	800.185.146	100%	797.684.567,53	100%	832.067.523	100%	832.067.523	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	30.000.000	100%	21.120.000	100%	21.054.000,00	100%	21.961.500	100%	21.961.500	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan pembinaan kinerja aparatur	100%	100%	75.504.000	100%	53.154.816	100%	52.988.707,20	100%	55.272.703	100%	55.272.703	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	75%	2.502.875.680	100%	2.162.024.479	100%	2.256.518.152,22	100%	2.432.230.142	100%	2.632.230.142	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	N/A	75%	1.277.739.150	-	-	-	-	-	-	-	-	75%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	60%	506.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	80	1.752.906.000	80,52	1.943.400.000	80,82	2.040.570.000,00	81,21	2.081.381.400	81,55	2.123.009.028	81,55

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	76%	76%	395.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	76%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	78%	1.747.853.642	79%	1.742.391.598,97	80%	1.817.494.685	80,05%	1.817.494.685	80,05%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	77,85%	78,50%	6.558.496.821	86,15 -	7.983.496.821	86,15 -	8.125.000.000	86,15 -	8.125.000.000	86,15 -	9.200.000.000	86,15 -
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	100%	100%	188.086.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	114.966.500	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Bandung Kulon				**17.893.297.625**		**18.183.243.623**		**16.951.055.153**		**17.562.592.827**		**18.301.062.954**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.176.994.753	100%	2.028.998.962	100%	2.069.578.942	100%	2.152.362.099	100%	2.259.980.204	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.438.658.616	100%	1.041.876.569	100%	1.062.714.101	100%	1.105.222.665	100%	1.160.483.798	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	72.125.000	100%	52.232.925	100%	55.315.403	100%	55.951.909	100%	55.439.673	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	118.225.000	100%	85.618.545	100%	90.671.245	100%	91.714.585	100%	90.874.945	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	2.257.942.456	100%	1.935.201.927	100%	1.973.905.965	100%	2.052.862.204	100%	2.155.505.314	100%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	82,15	82,20	2.271.782.400	82,25	2.418.600.000	82,3	2.466.972.000	82,35	2.565.650.880	82,4	2.693.933.424	82,4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.811.253.652	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	84,01%	80%	745.100.600	-	-	-	-	-	-	-	-	80%
Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	80%	190.317.400	-	-	-	-	-	-	-	-	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	90,13%	90,00%	6.704.579.173	90%	8.554.579.173	90%	7.043.830.879	90%	7.325.584.114	90%	7.691.863.320	90%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	80%	80%	70.739.975	80%	51.229.890	80%	54.253.175	80%	54.877.458	80%	54.375.059	80%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	35.578.600	100%	25.766.022	100%	27.286.580	100%	27.600.563	100%	27.347.882	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	1.989.139.610	76%	2.106.526.863	78%	2.130.766.351	80%	2.111.259.335	80%
16. Regol				**18.361.129.037**		**16.797.556.638**		**16.931.274.785**		**19.269.449.573**		**20.286.149.983**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.357.864.107	100%	2.169.234.978	100%	1.161.304.850	100%	1.355.773.124	100%	1.320.713.380	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	901.134.326	100%	727.240.165	100%	553.346.003	100%	1.339.382.604	100%	669.720.864	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	N/A	-	-	100%	27.600.000	100%	31.119.000	100%	34.230.900	100%	37.653.990	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	39.600.000	100%	26.400.000	100%	29.766.000	100%	32.742.600	100%	36.016.860	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan/saluran dan RTH dalam kondisi terpelihara	100%	75%	2.940.937.915	75%	1.294.012.683	80%	1.458.999.300	80%	1.604.899.230	90%	1.765.389.153	90%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.649.064.295	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	452.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	79,45	80	1.765.551.400	80,52	1.990.200.000	80,82	2.049.906.000	81,21	2.090.904.120	81,,55	2.132.722.202	81,,55
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	75%	91.958.500	-	-	-	-	-	-	-	-	75%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	19%	1.006.470.518	28%	1.134.795.509	42%	1.248.275.060	57%	1.373.102.566	57%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	75%	76%	8.068.608.294	77%	9.556.398.294	78%	10.512.038.123	79%	11.563.241.936	80%	12.950.830.968	80%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif		86,15	37.094.200	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	56.341.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
17. Lengkong				**20.375.644.849**		**20.237.898.772**		**18.723.841.660**		**19.678.218.103**		**20.621.724.198**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.592.809.241	100%	2.076.362.327	100%	2.106.976.286	100%	2.203.773.816	100%	2.251.561.264	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.273.040.144	100%	1.059.686.051	100%	1.046.331.958	100%	1.073.193.391	100%	1.088.097.707	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	96.449.179	100%	77.238.016	100%	79.273.115	100%	81.308.215	100%	82.437.409	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	223.953.786	100%	179.345.706	100%	184.071.181	100%	188.796.657	100%	191.418.631	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	3.060.976.435	100%	2.451.277.963	100%	2.515.865.254	100%	2.580.452.546	100%	2.616.289.404	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.629.042.190	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	91,66%	562.472.000	92,23%	450.436.404	92,45%	462.304.690	93,01%	474.172.976	93,21%	480.758.204	93,21%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	2.118.513.200	79,04	2.274.000.000	79,23	1.741.239.720	80,02	1.785.940.825	80,66	1.810.743.648	80,66
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	50%	267.092.300	55%	213.891.705	60%	219.527.413	65%	225.163.120	70%	228.290.145	100%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ Kecamatan	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	54,54%	54,54%	8.424.788.802	62,56%	10.049.788.802	64,76%	8.925.337.750	72,50%	9.585.459.770	75,00%	10.371.617.627	100%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,15	59.617.200	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	66.890.372	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	20%	1.405.871.798	30%	1.442.914.293	40%	1.479.956.788	50%	1.500.510.160	50%
18. Batununggal				**22.949.617.641**		**22.193.817.530**		**23.705.467.362**		**25.468.796.897**		**27.430.184.502**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.487.612.581	100%	1.799.443.920	100%	1.782.929.902	100%	1.794.871.035	100%	1.784.149.419	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	725.591.821	100%	623.690.822	100%	619.657.349	100%	621.878.515	100%	621.883.156	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	-	-	100%	60.619.500	100%	60.227.467	100%	60.443.353	100%	60.443.804	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	-	-	100%	83.600.000	100%	81.650.000	100%	80.400.000	100%	78.750.000	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	3.501.469.591	100%	2.509.728.589	100%	2.490.264.357	100%	2.500.982.981	100%	2.501.005.376	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.912.502.410	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80%	80%	650.603.500	-	-	-	-	-	-	-	-	80%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	81	81	2.635.560.040	80	2.895.000.000	80,25	2.923.950.000	80,5	2.953.189.500	80,75	3.012.253.290	81

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	78%	78%	10.644.669.698	80%	12.719.669.698	80,25	14.246.030.062	80,3	15.955.553.669	80,5	17.870.220.109	80,75
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	45%	261.692.000	-	202.065.000	-	200.758.225	-	201.477.844	-	201.479.347	-
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	N/A	-		-		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	50%	50%	69.166.000	-		-		-		-		50%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	50%	50%	60.750.000	-		-		-		-		50%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	20%	1.300.000.000	40%	1.300.000.000	60%	1.300.000.000	80%	1.300.000.000	80%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19. Ujung Berung				**14.739.495.339**		**15.149.901.520**		**16.342.035.108**		**16.649.600.739**		**17.916.613.854**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.207.545.977	100%	1.135.093.218	100%	1.157.795.083	100%	521.448.739	100%	353.593.613	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	705.120.648	100%	505.126.543	100%	515.229.073	100%	187.703.116	100%	206.473.428	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	38.500.000	100%	29.437.100	100%	32.380.810	100%	35.618.891	100%	39.180.780	100%
Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur	Persentase peningkatan suberdaya aparatur	100%	100%	79.470.000	100%	17.483.400	100%	19.231.740	100%	21.154.914	100%	23.270.405	100%
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	70%	70%	1.079.284.200	-	-	-	-	-	-	-	-	70%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase nilai unsur perencanaan strategis pada LKIP	25%	25%	35.208.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Admnistrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakt terhadap pelayanan publik	83	83	1.521.160.500	83.2	1.735.200.000	83.3	1.769.904.000	83..4	1.787.603.040	83.5	1.805.479.070	83.5
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	75%	75%	73.205.000	-	-	-	-			-	-	75%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ Kecamatan	15 LKK	15 LKK		-	-	-	-			-	-	15 LKK
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi UKM Aktif	86,15%	86,15%	11.379.000	-	-	-	-	-		-	-	86,15%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	75%	75%	7.378.819.182	80%	8.853.819.182	81%	9.916.277.484	82%	11.106.230.782	85%	12.438.978.476	85%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66%	91,66%	415.818.990	-	-	-	-	-		-		-

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	2.193.983.842	100%	2.018.465.135	100%	2.058.834.437	100%	2.100.011.126	100%	2.142.011.349	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	20%	855.276.942	30%	872.382.481	40%	889.830.130	50%	907.626.733	50%
20. Kiaracondong				**20.949.048.057**		**21.993.416.419**		**26.416.559.665**		**29.543.644.880**		**32.752.935.040**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.092.253.373	100%	1.660.135.337	100%	2.531.626.580	100%	2.784.789.240	100%	3.063.268.160	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.051.593.007	100%	891.454.709	100%	1.272.427.540	100%	1.399.670.300	100%	1.539.637.320	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	4.042.500	100%	33.300.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	60.000.000	100%	55.500.000	100%	85.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	53,23%	53,23%	2.206.314.039	54,63%	1.877.573.251	56,03%	2.790.987.265	57,44%	2.930.536.630	58,84%	3.077.063.460	58,84%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	82%	83,53%	1.391.817.230	-	-	-	-	-	-	-	-	83,53%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50%	50%	562.753.800	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	80,00	2.779.591.400	80,10	3.102.600.000	80,15	3.210.428.070	80,20	3.370.949.480	80,25	3.539.496.950	80,25

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	50%	439.967.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75,00%	1.961.733.414	76,00%	2.916.090.210	77,00%	3.207.699.230	78,00%	3.528.469.150	78,00%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80,00%	80,00%	10.286.119.708	80,25%	12.411.119.708	80,50%	13.550.000.000	80,75%	15.675.000.000	81,00%	17.800.000.000	81,00%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	50%	50%	74.596.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
21. Arcamanik				**14.104.984.835**		**14.578.264.722**		**14.978.221.212**		**17.666.848.747**		**16.831.299.923**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.753.518.375	100%	1.613.236.905	100%	1.645.501.643	100%	1.678.411.676	100%	1.178.367.189	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.032.191.306	100%	949.616.002	100%	968.608.322	100%	987.980.488	100%	725.616.695	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	45.375.000	100%	31.944.000	100%	38.981.663	100%	30.197.063	100%	31.888.098	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.804.461.885	100%	1.660.104.934	100%	1.693.307.033	100%	1.727.173.174	100%	1.268.118.071	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	43 RW	43 RW	1.112.646.668	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	43 RW
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 % -	91,66 % -	421.322.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	91,66 % -

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	80	1.400.117.800	80	1.505.400.000	80,50	1.535.508.000	80,80	1.566.218.160	81	983.990.367	81
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	25%	179.996.528	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	`-	-	75%	1.251.877.508	76%	1.527.681.772	78%	1.558.235.407	80%	1.249.686.723	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	78,50%	78,50%	6.291.085.373	79,00%	7.566.085.373	79,40%	7.568.632.780	79,80%	10.118.632.780	80,00%	11.393.632.780	80,20%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15 -	86,15 -	50.794.900	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	86,15 -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	13.475.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	25%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22. Cibiru				**14.602.416.121**		**13.949.139.122**		**15.417.560.351**		**16.549.602.974**		**17.869.417.847**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.641.661.604	100%	1.098.396.126	100%	1.674.494.836	100%	1.741.474.630	100%	1.845.963.107	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	622.552.765	100%	628.778.293	100%	635.003.820	100%	660.403.973	100%	700.028.211	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	96.425.000	100%	58.516.200	100%	49.948.150	100%	42.922.900	100%	36.531.300	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	89.808.000	100%	54.461.720	100%	46.455.920	100%	39.896.280	100%	33.934.720	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	1.803.314.232	100%	1.170.350.936	100%	1.060.348.768	100%	961.302.369	100%	858.377.574	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	1.543.959.849	76%	1.429.271.739	78%	1.318.921.251	80%	1.195.739.574	80%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.667.479.000	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	91,66 %	94.241.049	91,66 %	-	-	-	-	-	-	-	91,66 %
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	1.470.195.700	78	1.570.200.000	78	1.758.624.000	78	1.969.658.880	78	2.206.017.946	78

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	50%	518.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	54,54%	54,54%	6.499.475.998	94%	7.824.475.998	94%	8.763.413.118	94%	9.815.022.692	94%	10.992.825.415	94%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,16	67.463.010	-	-	-	-	-	-	-	-	86,16
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	31.639.763	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
23. Antapani				**14.487.803.953**		**14.959.789.432**		**15.515.106.319**		**16.560.673.056**		**17.762.037.356**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.789.736.539	100%	1.646.557.616	100%	1.679.488.768	100%	1.713.078.544	100%	1.781.601.685	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	697.126.897	100%	686.317.233	100%	411.050.649	100%	402.439.362	100%	386.320.945	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	138.517.500	100%	40.994.756	100%	81.674.812	100%	79.963.769	100%	76.761.077	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.274.027.696	100%	1.172.105.480	100%	1.195.547.590	100%	1.219.458.542	100%	1.268.236.883	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	994.875.674	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 % -	91,66 % -	58.882.600	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	91,66 % -

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	80	1.557.244.000	80	1.853.400.000	80,50	1.890.468.000	80,80	1.928.277.360	81	2.005.408.454	
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit	472.448.200	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	75%	609.833.272	76%	1.302.173.398	78%	1.367.282.068	80%	1.408.517.559	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	78,50%	78,50%	7.400.581.075	79,00%	8.950.581.075	79,40%	8.954.703.101	79,80%	9.850.173.411	80,00%	10.835.190.752	80,20%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15 -	86,15 -	52.780.772	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	86,15 -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	51.583.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	25%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24. Rancasari				**15.097.570.342**		**14.975.607.538**		**15.321.217.233**		**16.686.084.273**		**17.939.491.471**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.781.098.046	100%	1.472.994.537	100%	1.508.994.834	100%	1.557.217.703	100%	1.559.969.955	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.826.862.940	100%	1.397.415.585	100%	1.520.165.003	100%	1.559.190.679	100%	1.580.653.537	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	_	-	100%	69.000.000	100%	75.075.000	100%	82.582.500	100%	89.842.500	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	89.848.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	1.514.033.115	_	-	_	-	_	-	_	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	968.085.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	91,66 %	404.234.900	_	-	_	-	_	-	_	-	91,66 %
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	80	1.921.912.600	81	1.815.000.000	82	1.562.480.443	83	1.602.592.440	84	1.624.652.740	78
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	65%	146.325.200	66%	117.179.516	67%	118.959.761	68%	122.013.696	69%	123.693.261	50%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	N/A	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	70%	75%	6.399.972.341	76%	7.699.972.341	77%	8.100.000.000	78%	9.270.000.000	79%	10.440.000.000	54,54%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15%	86,15	13.003.200	_	-	_	-	_	-	_	-	86,15
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	100%	100%	32.195.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	20%	2.404.045.559	30%	2.435.542.192	40%	2.492.487.255	50%	2.520.679.478	50%
25. Buahbatu				**15.173.152.681**		**15.921.315.721**		**13.635.538.831**		**13.921.644.865**		**14.117.699.432**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.260.735.710	100%	1.993.833.517	100%	2.043.334.627	100%	2.102.416.993	100%	2.147.495.156	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	612.054.048	100%	653.386.126	100%	694.718.203	100%	714.805.757	100%	730.131.990	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	28.100.000	100%	152.331.787	100%	156.113.744	100%	160.627.723	100%	164.071.760	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	172.500.000	100%	143.638.533	100%	147.204.662	100%	151.461.037	100%	154.708.531	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	2.277.739.686	100%	1.810.669.615	100%	1.855.623.296	100%	1.909.278.048	100%	1.950.215.098	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	997.275.300									100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 %	91,66 %	62.250.000	91,66 %	51.834.775	91,66 %	53.121.682	91,66 %	54.657.679	91,66 %	55.829.600	91,66 %

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	1.721.696.593	78	1.958.400.000	78	1.469.227.620	78	1.511.709.866	78	1.544.122.610	78
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	75%	75%	6.661.153.594	78%	8.036.153.594	79%	6.067.294.357	79%	6.134.567.029	80%	6.163.657.969	80%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	50%	55%	349.050.000	_	-	_	-	_	-	_	-	55%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15	86,16	30.597.750	_	-	_	-	_	-	_	-	86,16
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	50%	1.121.067.774	60%	1.148.900.639	70%	1.182.120.733	80%	1.207.466.719	80%
26. Bandung Kidul				**10.819.676.711**		**11.307.864.125**		**13.013.473.553**		**14.821.294.718**		**16.539.510.551**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.379.708.635,00	100%	1.047.281.548	100%	1.579.247.589	100%	1.808.080.598	100%	1.950.880.567	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	1.100.823.141,00	100%	847.633.819	100%	1.252.076.241	100%	1.450.543.645	100%	1.627.832.312	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	67.625.000,00	100%	52.071.250	100%	76.916.675	100%	89.108.786	100%	99.999.860	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	53.890.000,00	100%	41.495.300	100%	61.294.486	100%	71.010.314	100%	79.689.352	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	913.149.445,00	100%	703.125.073	100%	1.038.616.179	100%	1.203.247.892	100%	1.350.311.523	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.066.066.875,00	100%	820.871.494	`-	-	`-	-	`-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85	85	170.749.000,00	85	131.476.730	`-	-	`-	-	`-	-	85
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	80	1.045.464.000,00	80	1.063.800.000	80,50	1.189.110.754	80,80	1.377.597.458	81	1.545.970.481	81%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	60%	376.670.000,00	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	60%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit		`-		`-	-	`-	-	`-	-	1 unit
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	75%	1.187.451.015	76%	1.754.034.785	78%	2.032.067.959	80%	2.280.431.820	80%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	78,50%	78,50%	4.562.657.897,00	79,00%	5.412.657.897	79,40%	6.062.176.845	79,80%	6.789.638.066	80,00%	7.604.394.634	80,20%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15 -	86,15 -	45.454.000,00	_	-	_	-	_	-	_	-	86,15 -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	37.418.718,00	_	-	_	-	_	-	_	-	25%
27. Gedebage				**19.231.871.871**		**14.016.353.579**		**15.528.000.115**		**16.792.966.755**		**18.056.403.353**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.293.932.505	100%	2.110.417.905	100%	2.152.626.263	100%	2.209.457.805	100%	2.264.759.304	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	5.995.852.404	100%	936.516.019	100%	602.235.206	100%	612.235.206	100%	622.235.206	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	37.050.000	100%	90.891.101	100%	111.054.688	100%	113.905.684	100%	116.756.680	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	_	-	100%	92.400.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.773.823.281	100%	1.574.011.556	100%	1.973.823.281	100%	2.073.823.281	100%	2.173.823.281	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	830.562.860	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91%	91%	965.343.884	-	-	-	-	-	-	-	-	91%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80,5	81	1.756.444.484	81,5	1.156.200.000	81,7	1.569.184.434	82	1.609.468.536	82,1	1.649.752.638	82,1
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	50%	296.636.500	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	85%	85%	56.533.000	-	-	-	-	-	-	-	-	85%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	75%	76%	5.225.692.953	76%	6.250.692.953	76%	6.750.000.000	76%	7.695.000.000	76%	8.640.000.000	76%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	70%	1.805.224.045	71%	2.249.076.244	73%	2.349.076.244	75%	2.449.076.244	75%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28. Panyileukan				**11.220.389.523**		**11.091.108.408**		**12.576.221.685**		**13.957.838.164**		**14.509.583.083**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.598.732.732	100%	1.470.834.113	100%	1.529.667.478	100%	1.590.854.177	100%	1.686.305.428	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	575.480.000	100%	733.073.495	100%	857.234.856	100%	1.551.418.756	100%	784.578.480	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	110.079.360	100%	101.273.011	100%	81.576.000	100%	67.300.200	100%	82.255.800	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.696.467.600	100%	1.560.750.192	100%	1.623.180.200	100%	1.688.107.408	100%	1.789.393.852	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	1.261.293.900	-	-	-	-	-	-	-	-	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 % -	91,66 % -	75.019.750	-	-	-	-	-	-	-	-	91,66 % -
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78	78	734.757.500	78,5	742.105.075	79,00	749.526.126	79,50	757.021.387	80	764.591.601	80
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	50%	216.043.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	-	-	100%	35.650.000	100%	60.720.000	100%	50.094.000	100%	61.226.000	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	75%	631.046.341	76%	1.159.975.703	78%	956.979.955	80%	1.169.642.167	80%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	84,00%	84,00%	4.891.376.181	85,00%	5.816.376.181	85,00%	6.514.341.323	85,50%	7.296.062.281	86,00%	8.171.589.755	86,00%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15 -	86,15 -	41.567.000	-	-	-	-	-	-	-	-	86,15 -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	25%	19.572.500	-	-	-	-	-	-	-	-	25%
29. Cinambo				**9.487.720.452**		**9.415.238.484**		**9.336.689.588**		**10.036.063.842**		**10.629.825.650**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.411.352.070	100%	1.298.443.904	100%	1.014.174.134	100%	1.012.413.635	100%	1.012.516.677,19	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	945.314.096	100%	2.076.830.702	100%	616.977.379	100%	681.118.642	100%	604.974.807,30	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100%	100%	33.000.000	100%	43.844.075	100%	90.233.935	100%	90.700.662	100%	92.240.862,18	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	100%	77.330.000	100%	25.170.915	100%	49.448.669	100%	47.445.145	100%	46.057.598,17	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	100%	1.274.027.696	100%	634.443.444	100%	894.112.637	100%	898.737.358	100%	913.998.935,36	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	100%	100%	968.935.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	100%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	91,66 % -	91,66 % -	93.720.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	91,66 % -
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	78%	80%	624.042.500	80,52	612.600.000	80,82	631.505.479	81,21	634.771.887	81,55	645.551.031,90	78%
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	1 Unit	1 Unit	397.488.800	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	1 unit

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	`-	-	75%	529.739.154	76%	1.090.237.355	78%	1.095.876.514	80,0%	1.114.485.737,80	80%
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	78,50%	78,50%	3.569.166.290	79%	4.194.166.290	79,40%	4.950.000.000	79,80%	5.575.000.000	80,00%	6.200.000.000	80,20%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	86,15 -	86,15 %	45.306.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	86,15 %
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	25%	100%	48.038.000	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	100%
30. Mandalajati				**15.764.347.889**		**15.208.659.751**		**16.260.395.473**		**17.543.929.862**		**19.004.647.265**	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.348.077.518	100%	2.160.231.317	100%	2.203.435.943	100%	2.291.573.381	100%	2.383.236.316	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	1.307.079.535	100%	1.129.961.660	100%	1.152.560.893	100%	1.198.663.329	100%	1.246.609.862	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	N/A	_	-	100%	12.000.000	100%	12.360.700	100%	12.718.750	100%	5.060.000	100%

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	77.220.000	100%	36.486.450	100%	28.945.917	100%	22.347.951	100%	15.017.823	100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	100%	100%	1.554.738.059	100%	1.430.359.014	100%	1.458.966.195	100%	1.517.324.842	100%	1.578.017.836	100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	64%	79%	1.014.381.656	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	79%
Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	60%	284.818.030	`-	-	`-	-	`-	-	`-	-	60%
Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	84,53	80,0	1.810.120.900	81	1.692.000.000	82,0	1.708.920.000	83	1.726.009.200	84	1.795.049.568	84

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	Program (Outcome)		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	60%	714.436.300	_	-	_	-	_	-	_	-	60%
	Jumlah lembaga yang berpartispasi dalam pembangunan/ kecamatan	4 Unit	4 Unit		_	-	_	-	_	-	_	-	4 Unit
Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	85,28%	75%	6.401.320.891	77%	7.726.320.891	78%	8.653.479.398	79%	9.691.896.926	80%	10.854.924.557	80%
Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase koperasi dan UKM Aktif	N/A	0,05	214.500.000	_	-	_	-	_	-	_	-	0,05
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	N/A	100%	37.655.000	_	-	_	-	_	-	_	-	100%
Program Peningkatan Peran Kelembagaan, Masyarakat, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	_	-	75%	1.021.300.419	76%	1.041.726.427	78%	1.083.395.484	80%	1.126.731.304	80%

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 8

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome*

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode RPJMD Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Daerah/
Tujuan Pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2017	Tahun 2023	Sumber Data
1	IPM (Metode Baru)	Poin	80,31	81,20	BPS
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	69,81	70,13	Kemen PAN & RB
3	LPE (Metode Baru)	%	7,21	7,98	BPS
4	Gini Ratio	Poin	0,43	0,38	BPS
5	*Liveable City Index*	Poin	7,375	8,00	Diskominfo

Sumber: *Proyeksi Bappelitbang Kota Bandung*

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Bandung ditargetkan meningkat menurut hasil proyeksi berdasarkan pencapaian IPM tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan target IPM ini selaras dengan meningkatnya komponen-komponen pendukung IPM. Komponen IPM yang relatif paling reaktif mempengaruhi pencapaian IPM adalah pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pergerakan komponen lain, seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup; relatif lebih lambat kenaikannya. Salah satu komposit dari IPM, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), mulai tahun 2018 berubah menjadi Umur Harapan Hidup (UHH), sesuai dengan metode perhitungan dari BPS.

Pengeluaran per kapita per tahun, sangat dipengaruhi kondisi perekonomian daerah. Namun yang menjadi persoalan, perekonomian daerah sangat tergantung kepada situasi kondisi perekonomian nasional, regional, bahkan internasional. Padahal situasi kondisi perekonomian nasional, regional, dan internasional jauh di luar kewenangan pemerintah daerah.

b. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indikator Reformasi Birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks kemudahan berusaha, dan survei kepuasan masyarakat.

Implementasi Reformasi Birokrasi sangat penting dan merupakan suatu keharusan di era milenial saat ini, mengingat perubahan tatanan kehidupan yang terjadi di tengah masyarakat sangat cepat sehingga harus diimbangi oleh kinerja birokrasi yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk mencapai tujuan atau keadaan yang ingin dicapai terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari pencapaian kinerja beberapa variabel atau area perubahan dalam komponen Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Penghitungan indeks reformasi birokrasi dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing variabel atau area perubahan berdasarkan pemenuhan, kualitas, dan implementasinya. Penilaian indeks reformasi birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu komponen proses (pengungkit) dengan bobot penilaian sebesar 60% dan komponen hasil dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang kemudian nilai reformasi birokrasi didapat dari penjumlahan pencapaian kinerja kedua komponen tersebut. Adapun beberapa sub variabel dalam komponen proses (pengungkit) dapat dilihat sebagai berikut:

Manajemen Perubahan	• Tim Reformasi Birokrasi • Roadmap Birokrasi • Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi • Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja
Pengawasan	• Pengawasan terhadap Gratifikasi • Penerapan SPIP • Pengaduan Masyarakat • Whistle-Blowing System • Penanganan Benturan Kepentingan • Pembangunan Zona Integritas • Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Akuntabilitas	• Keterlibatan pimpinan • Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

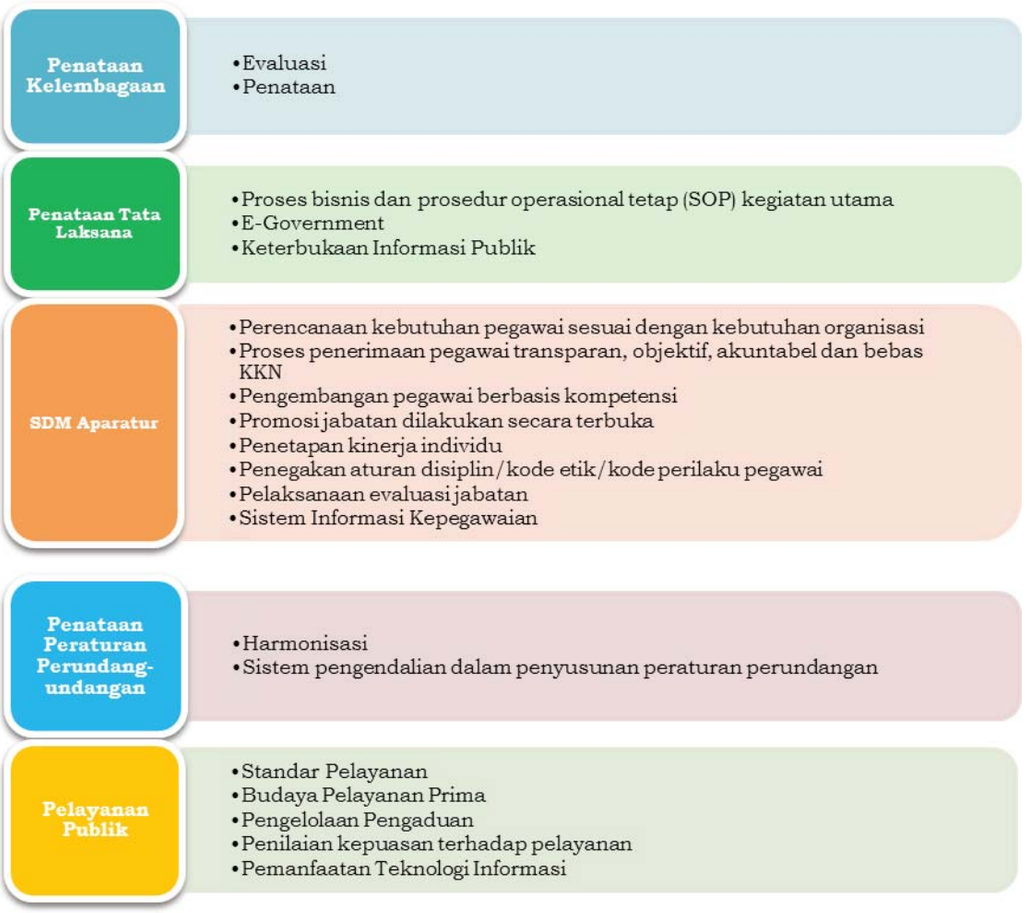

Sedangkan untuk pencapaian kinerja komponen hasil dapat dilihat dari beberapa sub variabel sebagai berikut:

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung ditargetkan sekitar 7 persen per tahun selama kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Target ini diproyeksikan berdasarkan pencapaian LPE tahun 2013 sampai dengan 2018. Pertumbuhan diproyeksikan stabil di 7 – 8 persen, mengingat pencapaian di atas 5 persen itu termasuk sangat tinggi.

Uraian tentang LPE ini akan terkait dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena konsep-konsep yang ada saling berkaitan. PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui laju

pertumbuhan ekonomi (LPE) atau dengan bahasa teknis perhitungan LPE berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun beriringan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah diantaranya:

1) tanah dan kekayaan alam;
2) mutu tenaga kerja dan penduduk;
3) barang modal dan tingkat teknologi;
4) sistem sosial dan sikap masyarakat;

d. *Gini Ratio*

Gini ratio atau koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila *gini ratio* bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai *gini ratio* lebih dari 0 sampai dengan kurang dari 0,4 berarti ketimpangan rendah. Nilai *gini ratio* antara 0,4 sampai dengan 0,5 berarti ketimpangan sedang. Nilai *gini ratio* lebih dari 0,5 sampai dengan kurang dari 1 berarti ketimpangan tinggi.

Rasio gini atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya, pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini (*gini ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien gini nya makin mendekati satu. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

NILAI KOEFISIEN	DISTRIBUSI PENDAPATAN
<0,4	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Rumus Gini Ratio GR = 1-∑fi[Yi+ Yi-1]

Keterangan:

Fi : jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i.

Yi : jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila GR = 1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

e. *Liveable City Index* Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Liveable city index mengukur tingkat kenyamanan kota didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Indeks ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas kehidupan warga kota. Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur kelayakhunian kota, yaitu: aspek transportasi, aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek sosial dan demokrasi, aspek ekonomi dan pekerjaan, dan aspek pendidikan. *Liveable city index* Kota Bandung tahun 2018 ditargetkan sebesar 7,5 poin, sedangkan realisasi adalah 7,48 berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung bekerjasama dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2023, *liveable city index* ditargetkan sebesar 8,00. *Liveable city* adalah kota yang layak huni dimana masyarakat kota dapat mencari pekerjaan, melayani kebutuhan dasar termasuk air bersih dan sanitasi, memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, hidup dalam komunitas yang aman dan lingkungan yang bersih. Dapat dikatakan bahwa *liveable city* merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Jadi *indeks liveable city* adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan ketenangan hidup masyarakat dalam suatu kota. Beberapa aspek yang mempengaruhi *liveable city*, diantaranya:

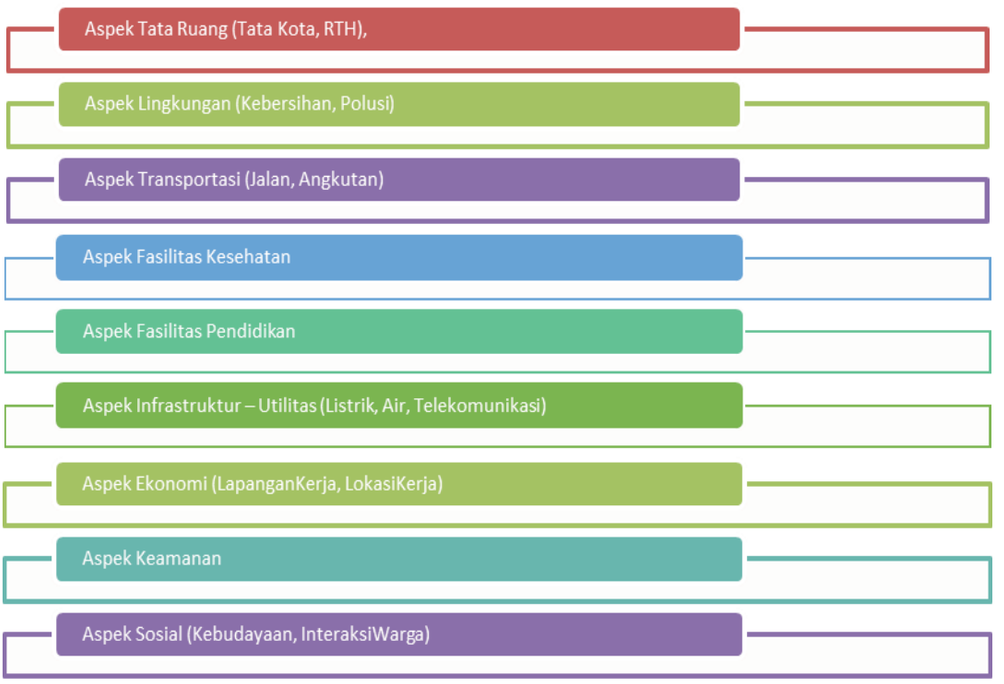

Khusus terkait indikator tujuan terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan maka aspek yang diukur hanya 3 aspek yaitu tata ruang, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kota Bandung tahun 2019-2023 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023, dicantumkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 8.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bandung Tahun 2019-2023

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	14,00	14,01	14,02	14,03	14,04
	a. Angka Kelulusan	Persen	100	100	100	100	100	100
	b. Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	Poin	76,72	76,74	76,76	76,78	76,80	76,82
	c. Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Poin	57,02	57,03	57,04	57,05	57,06	57,07
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,90	73,92	73,94	73,96	73,98
3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah/ orang/ tahun	16.156	16.370	16.584	16.987	17.013	17.227
4	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik	%	51,61	60	70	80	90	100
5	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	A	A	A	A
6	Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Level Kematangan *Smart City*	Tingkat	*Integrative*	*Integrative*	*Integrative*	*Smart*	*Smart*	*Smart*
9	PDRB Per Kapita	Juta Rp	69,20	70,73	73,38	76,03	78,68	81,33
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	poin	3,27	3,39	3,55	3,65	3,69	3,74
11	Angka Kemiskinan	persen	4,17	3,83	3,66	3,49	3,32	3,14
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	8,44	8,39	8,34	8,29	8,25	8,22
13	Persentase RTH	persen	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2
14	Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan	Menit	120	100	80	60	40	30
15	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	12	11	10	9	8	7
16	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	9,76	4,55	3,96	3,36	2,76	2,16
17	Cakupan Layanan Air Bersih	%	77,27	79	80	81	82	83
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	35,23	35,35	35,47	35,59	35,71	35,83

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%	97,97	98	98,3	98,5	98,7	99
20	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	193 Miliar	Meningkat 2% dari tahun 2018	Meningkat 4% dari tahun 2018	Meningkat 6% dari tahun 2018	Meningkat 8% dari tahun 2018	Meningkat 10% dari tahun 2018
21	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari CSR	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100	100
22	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta	%	0	33,33	33,33	66,67	66,67	100

Sumber: *Proyeksi Bappelitbang Kota Bandung*

1.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

1.2. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan: jumlah siswa SD dan SMP yang lulus dibagi Jumlah Siswa SD dan SMP yang mengikuti ujian nasional dikali 100%

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa dalam uji kompetensi di akhir tahun ke 6 untuk jenjang sekolah dasar dan tahun ketiga untuk jenjang sekolah menengah pertama. Angka kelulusan juga mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus di ujian nasional. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin bahwa siswa/i di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian nasional.

1.3. Rata-Rata Nilai Hasil Ujian SD

Rata – rata Nilai Hasil Ujian SD: jumlah rata-rata nilai mata pelajaran ujian SD dibagi jumlah mata pelajaran ujian SD X 100%

Rata-rata nilai hasil ujian SD merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan rata-rata perolehan nilai siswa SD dalam ujian nasional. Hal ini merupakan suatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena rata-rata nilai ujian akan memperlihatkan kemampuan siswa/i dalam memahami mata pelajaran tertentu yang diujikan sesuai dengan standar nasional. Adapun mata pelajaran yang diujikan secara

nasional saat ini (2018) adalah Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bahasa Indonesia yang memungkinkan di tahun mendatang akan berubah sesuai dengan kebijakan nasional.

1.4. Rata-Rata Nilai Hasil Ujian SMP

Rata – rata Nilai Hasil Ujian SMP: jumlah rata-rata nilai mata pelajaran ujian SMP dibagi jumlah mata pelajaran ujian SMP X 100%

Rata-rata nilai hasil ujian SMP merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan rata-rata perolehan nilai siswa SMP dalam ujian nasional. Hal ini merupakan suatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena rata-rata nilai ujian akan memperlihatkan kemampuan siswa/i dalam memahami mata pelajaran tertentu yang diujikan sesuai dengan standar nasional. Adapun mata pelajaran yang diujikan secara nasional saat ini (2018) adalah Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris yang memungkinkan di tahun mendatang akan berubah sesuai dengan kebijakan nasional.

1.5. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

UHH dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. UHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada waktu tertentu. UHH di hitung menggunakan pendekatan tak langsung ***(****indirect estimation****)***. Ada dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan UHH yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Sementara itu, untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). UHH dapat panjang jika status kesehatan, gizi dan lingkungannya yang baik.

1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi:

1) Persyaratan
   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3) Waktu Penyelesaian
   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4) Biaya/Tarif
   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
   Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6) Kompetensi Pelaksana
   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7) Perilaku Pelaksana
   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
   Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9) Sarana dan prasarana
   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
10) Standar Pelayanan Publik
    Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi pelayanan dan/atau penerima pelayanan. Standar pelayanan publik, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, sekurang-kurangnya meliputi:

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) yaitu:

a) Persyaratan;
b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
c) Jangka Waktu Pelayanan;
d) Tarif/Biaya;
e) Produk Pelayanan;
f) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) yaitu:

a) Dasar Hukum;
b) Sarana dan Prasarana/Fasilitas;
c) Kompetensi Pelaksana;
d) Pengawasan Internal;
e) Jumlah Pelaksana;
f) Jaminan Pelayanan;
g) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
h) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

1.7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pencapaian indikator kinerja nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) didapat dari hasil penjumlahan penilaian beberapa komponen AKIP baik dari sisi pemenuhan, kualitas, maupun implementasinya. Berikut beberapa komponen serta bobot penilaian AKIP, diantaranya:

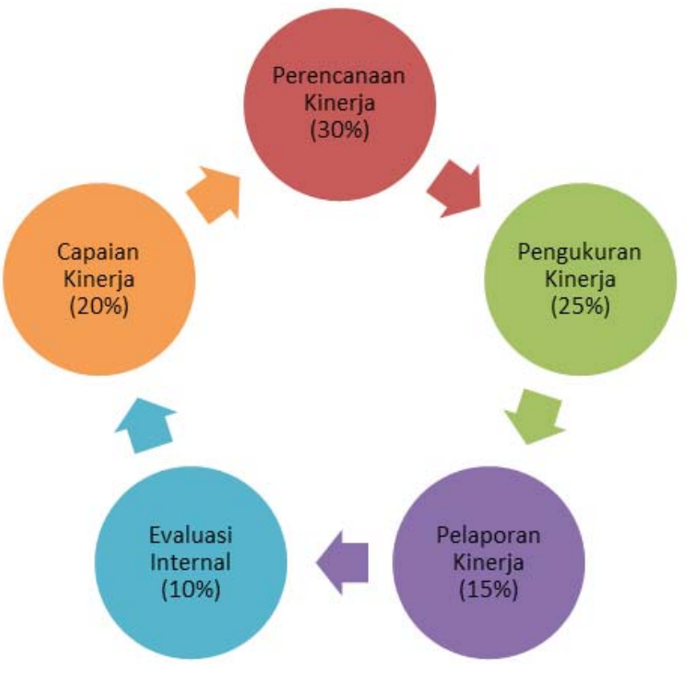

1.8. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

1) Urusan Desentralisasi;
   a) urusan wajib; dan
   b) urusan pilihan
2) Tugas Pembantuan;
   a) tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
   b) tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
   c) tugas pembantuan kepada desa.
3) Tugas Umum Pemerintahan.
   a) kerjasama antar daerah;
   b) kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
   c) koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
   d) pembinaan batas wilayah;
   e) pencegahan dan penanggulangan bencana;
   f) pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
   g) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
   h) tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

1.9. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Pencapaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di dapat dari pemenuhan beberapa kriteria penilaian, seperti kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Kriteria Opini mencakup:

1) Pembatasan lingkup

   Pembatasan terhadap lingkup audit terdiri atas:

   a) Pembatasan oleh *auditee*.

      Hal ini terjadi karena *auditee* benar-benar tidak memberikan data/informasi yang dibutuhkan. Hal ini juga didukung oleh bukti-bukti secara tertulis dan disadari oleh kedua belah pihak.

   b) Pembatasan oleh keadaan (keterbatasan waktu, dana, dan lain-lain).

      Hal ini terjadi pada saat auditor tidak mampu meyakini diri mereka sendiri terhadap kewajaran LK engan keterbatasan yang di luar kontrol pihak auditor maupun *auditee*.

2) Materialitas

   Tingkat materialitas diukur terhadap:

   a) Suatu akun tertentu tetapi tidak terhadap LK secara keseluruhan.

      Tingkat materialitas terhadap suatu akun hanya mempunyai konsekuensi maksimal pengecualian terhadap akun tertentu tersebut (apabila tidak

dilakukan koreksi). Akan tetapi, hal ini tidak berpengaruh terhadap penyajian LK secara keseluruhan.

b) Suatu akun dan terhadap LK secara keseluruhan
Tingkat materialitas ini dapat menghasilkan pendapat tidak wajar (tingkat maksimal, apabila tidak dapat dilakukan koreksi).

3) SPI yang memadai
Pengukuran tingkat pengendalian intern dilakukan dengan membandingkan tingkat kesesuaian peng-aplikasi-an penyusunan dan pelaporan LK dengan standar akuntansi pemerintahan, standar pemeriksaan keuangan negara dan standar pemeriksaan akuntan publik (dalam hal-hal yang menjadi referensi SPKN).
Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:
a) Pengukuran kuantitas tertentu
Keadaan ini dapat dihitungkan dengan persentase tertentu, misalnya dengan persentase atas sampling jumlah BAST yang diotorisasi oleh pihak yang berwenang.
b) Pengukuran kualitas yang memerlukan "judgement".
Tingkat pengendalian ini misalnya terjadi pada tingkat kompetensi personil pelaksana.

4) Kesesuaian dengan SAP
Tingkat kesesuaian terhadap SAP dilakukan dengan memahami laporan-laporan yang wajib disusun dan volunteer kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini:
a) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
b) Efektivitas pengendalian intern;
c) Kepatuhan terhadap ketentuan per-UU;
d) Pengungkapan yang memadai.

5) *Unqualified Opinion* (Pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian) diberikan dengan kondisi:
a) Keempat kriteria yang menjadi kriteria dalam penentuan opini dapat dipenuhi.
b) Semua koreksi yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LK sudah dilakukan oleh *auditee*.
c) Dapat melakukan review atas auditor lain yang melaksanakan pemeriksaan atas LK entitas lain yang menjadi bagian LK yang kita periksa. Atau, tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain tersebut, tetapi dapat meyakini bahwa bagian tersebut tidak material terhadap LK yang kita diperiksa.

6) *Unqualified Opinion with Modified Wording* (Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan)
a) Keempat kriteria kecuali pembatasan lingkup audit telah dipenuhi.
b) Terdapat koreksi material yang tidak dilaksanakan.
c) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya material (bukan tidak material, dan bukan sangat material).

7) *Qualified Opinion* (Pendapat Wajar Dengan Pengecualian)
   a) Pembatasan lingkup audit atas beberapa akun yang cukup material (bukan tidak material dan bukan sangat material).
   b) Tidak semua koreksi telah dilakukan oleh *auditee*.
   c) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.
8) *Adverse Opinion* (Pendapat Tidak Wajar)
   Pada dasarnya, pendapat tidak wajar diberikan apabila auditor dapat meyakini bahwa penyajian LK tidak wajar, dengan kondisi:
   a) Terdapat 2 kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu "kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan" dan "konsistensi pelaksanaan SAP".
   b) Terdapat koreksi yang sangat material yang tidak dilaksanakan oleh *auditee*.
9) *Disclaimer*
   Pendapat Tidak Memberi Pendapat diberikan pada saat auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa penyajian LK wajar atau tidak wajar, dengan kondisi-kondisi:
   a) Keempat kriteria tersebut tidak dilaksanakan.
   b) Terdapat pembatasan lingkup audit atas akun-akun yang sangat material terhadap penyajian LK.
   c) Prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian LK tidak dapat dilaksanakan.
   d) Tidak dapat mereview pekerjaan auditor lain yang melakukan pemeriksaan atas LK yang merupakan bagian dari LK yang kita periksa, akan tetapi jumlahnya sangat material.

1.10. Level Kematangan *Smart City*

Smart City dapat diartikan sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, transportasi, perekonomian, sumber daya energi, pemukiman dan keselamatan publik sehingga dengan bersinerginya seluruh aspek tersebut bersama masyarakat akan dapat meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kota. Konsep *smart city* dapat dirumuskan ke dalam 6 dimensi, yaitu:

Sedangkan untuk *maturity level smart city* dapat dibedakan ke dalam 5 level menurut *ganesha smart city maturity model*, diantaranya:

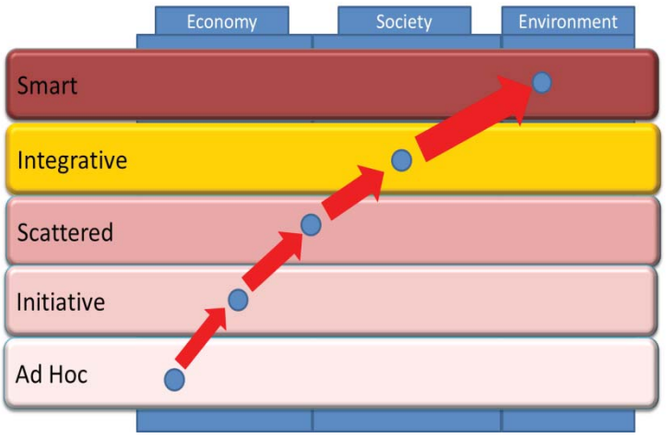

No.	Level	Definition
1	Ad hoc	Low economic level, uncomfortable environment, minimum ICT, governance, and human resouce support.
2	Initiative	Low economic growth, less comfortable environment, ICT-based sevices partially initiated.
3	Scattered	Better environment, ICT-based services are well planned.
4	Integrative	Comfortable environment, integrated ICT-based services.
5	Smart	Very comfortable environment, ubiquitous ICT-based services.

Pada tahun 2016, telah dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kematangan *smart city* Kota Bandung dan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa level kematangan *smart city* Kota Bandung berada pada level *scattered* dengan poin (54,15). Pemerintah Kota Bandung akan terus melakukan perbaikan dan penyesuaian terkait implementasi *smart city* yang sudah ada saat ini. Harapannya hal ini akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam upayanya memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan melayani. Berikut dapat dijelaskan uraian perhitungan level kematangan berdasarkan dimensi *smart city* yang telah berjalan di Kota Bandung.

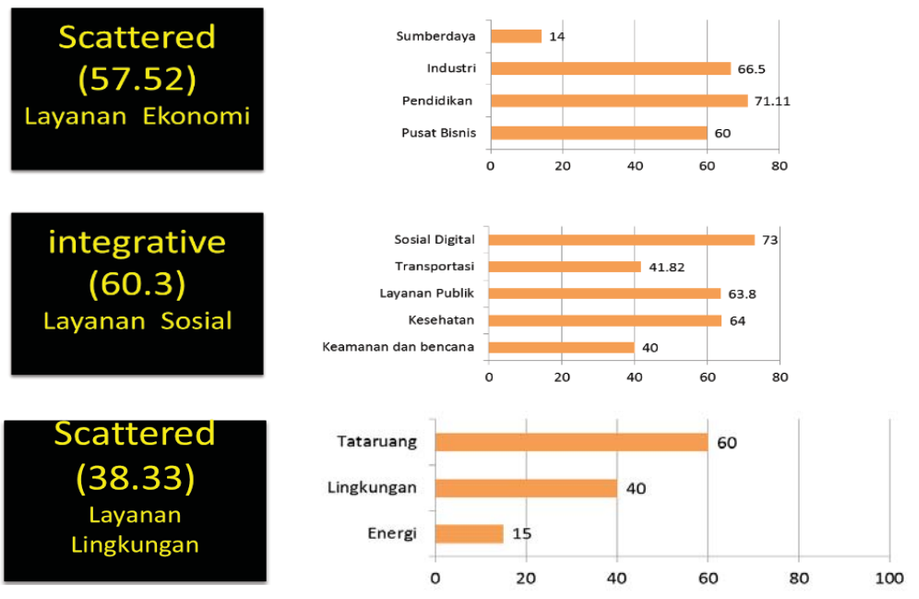

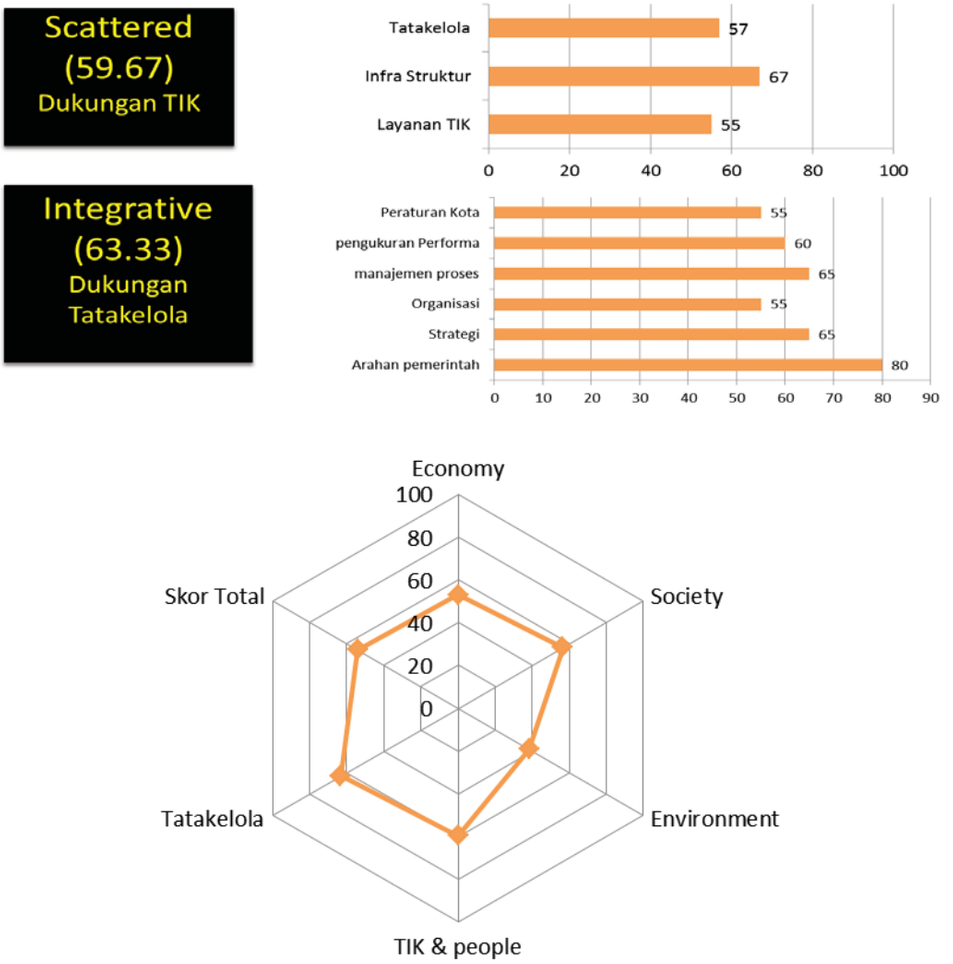

1.11. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

1.12. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Rumus perhitungan pengeluaran per kapita:

$$\frac{\text{Total pengeluaran seluruh anggota rumah tangga dalam sebulan}}{\text{Jumlah anggota rumah tangga}} \times 100\%$$

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola

pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

1.13. Indeks Daya Saing Pariwisata

Indeks Daya Saing Pariwisata adalah penilaian terhadap upaya peningkatan dan pengembangan kepariwisataan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan ranking didapat melalui survey dan mengacu pada *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) yang dikeluarkan *World Economic Forum* (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penggunaan *global standard*, dimaksudkan agar kita bisa berkompetisi di level global. Standar penilaiannya menggunakan TTCI – WEF yang sudah diakui dunia dan dipotret dengan analisa indikator dan kriteria yang sudah ditentukan. Pengukuran indeks pariwisata berbasis data sekunder (data statistik) untuk menentukan skor indeks daya saing pariwisata. Empat aspek penopang pariwisata diantaranya:

1) aspek lingkungan pendukung bisnis,
2) tata kelola,
3) potensi wisata, dan
4) infrastruktur

Keempat aspek inilah yang disusun sebagai basis konsep pengukuran indeks pariwisata. Dalam uraiannya terdapat 78 indikator data yang dikelompokkan menjadi 14 pilar penilaian. Tiap pilar dikelompokkan lagi menjadi empat aspek pengukuran utama.

1.14. Angka Kemiskinan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait menurunnya jumlah penduduk miskin adalah angka kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau "tidak memiliki harta beda". Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

1.15. Tingkat Pengangguran Terbuka

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatkan kesempatan kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka bisa disebabkan karena lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka dapat digunakan rumus berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

1.16. Persentase RTH

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri atas ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

1.17. Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait penjabaran drainase, definisi genangan adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam**.** Standar kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk indikator ini adalah terendamnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 15 cm kurang dari 2 jam. Untuk wilayah Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi (LKPJ) telah ditentukan beberapa titik genangan yang telah diidentifikasi untuk diselesaikan dalam periode RPJMD ini.

1.18. Aspek Penyebab Kemacetan

Kemacetan adalah kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan yang ditinjau melebihi kapasitas rencana jalan tersebut yang mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 12 aspek penyebab kemacetan yang dapat diintervensi oleh perangkat daerah melalui kebijakan, implementasi program/kegiatan guna mengurangi kemacetan dengan mereduksi aspek penyebabnya. Adapun 12 aspek tersebut adalah:

1) parkir pada badan jalan;
2) pasar tumpah;
3) PKL;
4) jalur perlintasan sebidang;
5) genangan/banjir;
6) kualitas/kondisi infrastruktur jalan;
7) volume penggunaan kendaraan pribadi tidak sebanding dengan penambahan aksesibilitas maupun dimensi jalan;
8) terpusatnya kegiatan pada pusat kota;
9) keluar masuk kendaraan pada fasilitas pendidikan;
10) disiplin pengemudi angkutan umum;
11) marka jalan dan rambu lalu lintas;
12) kesadaran masyarakat.

1.19. Persentase Luasan Kawasan Kumuh

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dapat

dijelaskan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Cara pengukurannya yaitu perbandingan antara luas kawasan kumuh potensial dengan luas wilayah Kota Bandung.

Adapun kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud peraturan diatas meliputi kriteria kekumuhan yang ditinjau dari:

1.20.Cakupan Layanan Air Bersih

Penyediaan air minum di Kota Bandung berupa pelayanan perpipaan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Wening. Adapun cara mengukur cakupan layanan air minum adalah persentase konversi golongan konsumen air minum terhadap jumlah penduduk Kota Bandung. Golongan konsumen air minum terdiri atas: a) sosial biasa, b) sosial khusus, c) rumah tangga, dan d) niaga/komersil. Untuk lokasi yang belum terlayani oleh perpipaan PDAM, pelayanan air minum dilakukan oleh DPKP3 melalui non perpipaan yang bersifat komunal.

1.21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target dari setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam IKLH terdapat 3 indikator yang dijadikan sebagai alat ukur yaitu indeks pencemaran air sungai, indeks pencemaran udara, dan indeks tutupan hutan. Adapun penjelasan lengkap mengenai indikator dan parameter indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KUALITAS LINGKUNGAN	PARAMETER
1	Kualitas air sungai	Proporsi jumlah sampel air dengan nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) > 1 terhadap total jumlah sampel

2	Kualitas udara	Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
3	Tutupan hutan	Proporsi luas hutan primer dan sekunder terhadap luas kawasan hutan

1.22. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah

Cakupan pelayanan persampahan adalah gambaran dari jumlah wilayah yang telah terlayani oleh angkutan sampah pada kurun waktu tertentu, dalam hal ini jumlah sampah yang dapat dikurangi dan ditangani (ton/tahun). Cara pengukurannya adalah target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun) ditambah target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun). Prioritas layanan angkutan sampah dapat dirinci menurut kategori lokasi yaitu:

1) pemukiman;
2) daerah komersial / niaga khusus;
3) perkantoran dan fasilitas umum;
4) industri;
5) jalan dan sungai .

1.23. Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan mengingat Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan memerlukan pembiayaan yang cukup besar, di sisi lain jumlah pendapatan daerah terbatas sehingga pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan guna pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2017, tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam pembangunan Kota bandung menunjukan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp193 miliar.

1.24. Persentase Realisasi Prioritas Pembangunan melalui CSR

Perbandingan antara target dan realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang diselesaikan melalui dana CSR. Selama kurun waktu 2014-2017 prioritas pembangunan yang dibiayai melalui CSR mencapai Rp82 miliar.

1.25. Persentase Realisasi Prioritas Pembangunan melalui Swasta

Perbandingan antara target dan realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang diselesaikan melalui swasta (kerjasama pemerintah dan badan usaha/KPBU, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerinta/PINA, hibah, dan lain sebagainya).

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key *performance indicator (KPI)* atau dikenal juga sebagai *key success indicators (KSI)* membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Penduduk	jiwa	2.504.373	2.509.827	5.514.447	2.518.360	2.521.673	2.524.477	2.524.477
2	PDRB Harga Berlaku	juta Rp.	240.109.627	297.049.895	328.814.885	362.881.619	399.316.284	438.173.699	438.173.699
3	PDRB Harga Konstan	juta Rp.	172.851.961	197.924.495	211.214.729	224.985.718	239.216.065	253.880.249	253.880.249
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	7,21	7,36	7,51	7,66	7,81	7,98	7.98
5	Laju Inflasi	persen	3,46	3,87	3,73	3,61	3,49	3,39	3,39
6	Indeks Kebahagiaan	poin	N/A	75,4	76,0	76,6	77,0	77,4	77,4
7	Indeks Gini	poin	0,44	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0.40
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	80,30	80,60	80,70	81,00	81,10	81,20	81.20
9	Harapan Lama Sekolah	tahun	13,90	14,00	14,01	14,02	14,03	14,04	14,04
10	Umur Harapan Hidup	tahun	73,86	73,90	73,92	73,94	73,96	73,98	73,98
11	Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0,38	0,365	0,356	0,346	0,335	0,325	0,325
12	Prevalensi Balita Gizi Kurang	angka	6,10	6,05	6,00	5,95	5,90	5,85	5,85
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	N/A	75,75	75,76	75,77	75,78	75,79	75,79
14	Persentase PAD terhadap Pendapatan	persen	N/A	50,90	47,81	48,73	49,83	50,65	50,65
15	Opini BPK	opini	N/A	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Pencapaian Score Pola Pangan Harapan	persen	N/A	84,26	84,27	84,28	84,29	84,30	84,30

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
17	Penguatan Cadangan Pangan	persen	N/A	80	100	100	100	100	100
18	Penanganan Daerah Rawan Pangan	persen	N/A	100	100	100	100	100	100
19	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	N/A	0,11	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
20	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	N/A	25,60	25,15	24,69	24,23	23,77	23,77
21	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	N/A	18,04	17,39	16,74	16,09	15,44	15,44
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio Ketergantungan	rasio	N/A	37,76	37,45	37,15	36,85	36,54	36,54
2	Rasio Penduduk yang Bekerja	rasio	N/A	92,72	93,16	93,60	94,02	94,48	94,48
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	N/A	62,35	62,20	62,05	61,90	61,74	61,74
4	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	rasio	N/A	58,00	58,16	58,33	58,55	58,67	58,67
5	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	proporsi	N/A	0,29	0,31	0,32	0,34	0,36	0,36
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	N/A	70,75	70,75	71,00	71,00	71,25	71,25

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
A	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**								
1	**PENDIDIKAN**								
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	79,54	79,56	79,58	79,60	79,62	79,64	79,64
2	Angka Partisipasi Sekolah	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni								
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Angka Partisipasi Kasar								
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	persen	102,12	102,14	102,16	102,18	102,20	102,20	102,20
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	persen	103,25	103,27	103,29	103,31	103,32	103,33	103,33
6	Angka Putus Sekolah								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Angka Kelulusan								
	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	92,95	92,97	92,99	93,01	93,03	93,05	93,05
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	persen	94,64	94,66	94,68	94,70	94,72	94,74	94,74
9	Fasilitas Pendidikan :								
	Sekolah pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik	persen	90	92	94	96	98	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	persen	90	91	93	96	100	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	rasio	1:251	1:454	1:454	1:454	1:454	1:454	1:454
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	1:36	1:28	1:28	1:28	1:28	01:28	01:28
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	rasio	1:36	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28	1:28

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	89	91	93	95	97	99	99
2	**KESEHATAN**								
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	angka	2,80	2,80	2,75	2,70	2,65	2,60	2,60
2	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	angka	0,47	1,50	1,45	1,40	1,35	1,30	1,30
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	angka	1,7	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5
4	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	angka	71,81	71,81	71,70	71,60	71,50	71,40	71,40
5	Rasio posyandu per satuan penduduk	rasio	1,959	2,001	2,008	2,015	2,022	2,029	2,029
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1,16	1,21	1,21	1,22	1,24	1,26	1,26
7	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	rasio	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
8	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1,36	1,40	1,40	1,40	1,45	1,50	1,50

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	49	1,44	1,45	1,5	1,5	1,5	1,5
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	80	80	80	80	80	80	80
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	90	90	90	90	90	90	90
12	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	90	90	90	90	90	90	90
15	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
16	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	100	100	100	100	100	100	100
18	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	persen	301	301	301	301	300	300	300
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	persen	4	4	4	4	3	3	3

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
20	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	per 100.000 penduduk	87,85	87,89	87,93	87,97	88,01	88,05	88,05
21	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	per 100.000 penduduk	15,62	15,66	15,7	15,74	15,78	15,82	15,82
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Penderita diare yang ditangani	persen	15,62	15,66	15,7	15,74	15,78	15,82	15,82
24	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
25	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	persen	100	100	100	100	100	100	100
26	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	persen	0,4	3,5	4	4,5	5	5,5	5,5
27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
28	Cakupan kunjungan bayi	persen	90	90	90	90	90	90	90
29	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen	95	95	95	95	95	95	95
30	Cakupan pelayanan nifas	persen	80	90	90	90	90	90	90
31	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	100	100	100	100	100	100	100
32	Cakupan pelayanan anak	persen	90	97	98	100	101	103	103
33	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	97	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
	PEKERJAAN UMUM								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	92	93	94	95	96	97	97
2	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	persen	54	100	100	100	100	100	100
3	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	meter	265.023	273.690	282.357	291.024	299.691	308.358	308.358
4	Jumlah lokasi banjir yang ditangani pada kawasan permukiman	lokasi	N/A	77	86	95	104	113	113
5	Panjang normalisasi saluran sungai	meter	N/A	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
6	Jumlah kawasan sempadan sungai yang ditata	meter	N/A	10	10	10	10	10	10
	PENATAAN RUANG								
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	12,20	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,2
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	persen	NA	53	54	55	56	57	57
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	NA	76	77	78	79	80	80

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Jumlah gedung pemerintah Kota Bandung yang dilengkapi fasilitas untuk kaum dafabel	persen	NA	60	60	60	60	60	60
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	Persentase luasan kawasan kumuh	persen	9,76	4,55	3,96	3,36	2,76	2,16	2,16
5	**KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/ linmas)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	Persen	NA	10	15	20	25	30	100
5	Tingkat Waktu Maksimum Tanggap (*Response Time Rate*) 15 menit	menit	22	15	15	15	15	15	15
6	Persentase kelurahan yang memilki sarana pengamanan kebakaran	persen	NA	0	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6	**SOSIAL**								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	persen	16,93	29	31	33	35	37	37
2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	17,84	37,76	40,77	43,79	46,8	49,81	49,81
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	16,93	29	31	33	35	37	37
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	NA	3	6	9	12	15	15
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	20	20	20	20	20	20	20
B	**FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**								
1	**TENAGA KERJA**								
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	58	58	58	58	58	59	59
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	44,88	45,33	45,56	45,65	45,9	46,15	46,15
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	56,02	31,11	32,65	34,62	36,63	37,29	37,29
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	persen	51,25	28,89	46,67	50,00	53,30	57,78	57,78
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	orang	25.325	28.325	30.325	32.325	34.325	35.325	35.325

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	orang	3	4	6	6	6	6	6
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	orang	211.500	231.500	251.500	271.500	291.500	311.500	311.500
4	Rasio KDRT	persentase	0,0146	0.0265	0,0236	0,0208	0,0180	0,0153	0,0153
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	orang	870.849	890.849	910.849	930.849	950.849	970.849	970.849
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	orang	243	245	246	248	250	253	253
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	orang	3	5	5	8	7	11	11

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	orang	5	5	5	5	5	5	5
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	10	10	10	10	10	10	10
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	orang	11	11	13	13	12	14	14
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	orang	10	10	10	12	14	15	15
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		5	5	5	5	5	5	5

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3	**PANGAN**								
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap	103,76	104,14	104,53	104,91	105,30	105,69	105,69
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	2.298,15	2.228,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	90,94	88,19	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	N/A	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
4	**PERTANAHAN**								
1	Penyelesaian kasus tanah negara	persen	9	9	9	9	9	9	9
5	**LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	poin	20	20,2	20,4	20,6	20,8	21,0	21,0
5	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	poin	58,61	58,81	59,01	59,21	59,41	59,61	59,61
6	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	29,13	29,24	29,35	29,46	29,57	29,68	29,68

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	persen	12,5	18,0	23,5	29,0	34,5	40,0	40,0
8	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana PPLHD di kabupaten/ kota	orang - sarana	2-1	2 -2	3 - 2	3 - 3	4 - 3	4 - 4	4 - 4
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	13	15	15	20	20	20	20
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90,99	97,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	persen	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
14	Persentase cakupan area pelayanan sampah	persen	93,50	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	90,99	97,00	97,00	98,00	99,00	99,00	99,00
16	Tersedianya sumber air baku (air permukaan) alternatif untuk penyediaan air minum yang terjaga kelestariannya (kapasitas produksi sumber air baku)	ltr/detik	3.042	3.742	3.862	3.962	4.062	4.129	4.129
17	Persentase tingkat pelayanan air limbah dengan *on site* dan *off site*	persen	NA	76	78	79	81	83	83
18	Terbangunnya Taman RW	unit	NA	300	300	300	300	300	300
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	1:0,8	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	1:0,9	1:0,9	1:0,9	1:0,9	1:1	1:1	1:1
3	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	1:0,4	1:0,4	1:0,4	1:0,5	1:0,5	1:0,5	1:0,5
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota Bandung	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	94,78	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	40,85	45	55	65	75	85	85
8	Kepemilikan KTP	persen	89,9	100	100	100	100	100	100
9	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 PDDK	buah	706	970	1000	1000	1000	1000	1000
10	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	persen	92,08	98	98	98	99	99	99
11	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	persen	25,46	35	50	70	85	100	100
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	151	151	151	151	151	151	151
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	151	151	151	151	151	151	151
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**								
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	0,37	0,36	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	*Total Fertility Rate* (TFR)	persen	1,95	1,94	1,93	1,92	1,91	1,90	1,90
3	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	jumlah	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	jumlah	37	37	37	37	37	37	37

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	jumlah	3	4	5	6	7	9	9
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jumlah	2-3	2	2	2	2	2	2
9	Ratio Akseptor KB	persen	72,29	72,50	73	73,50	74	74,50	74,50
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	72,29	72,50	73	73,50	74	74,50	74,50
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	persen	26,65	25	24	23	22	21	21
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	persen	20,22	20	19,50	19	18,50	18	18
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	persen	14,90	14,80	14,70	14,60	14,50	14,40	14,40
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	40,72	41	41,50	42	42,50	43	43
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	72,29	72,50	73	73,50	74	74,50	74,50

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	57	59	61	63	65	67	67
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	40	41,5	43	44,5	46	47,5	47,5
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	32	34	36	38	40	42	42
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	jumlah	-	-	1	2	3	4	4
20	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa	jumlah	74	77	89	101	113	125	125
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	100	100	100	100	100	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	69	71	73	75	77	80	80

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	82,69	83	84	85	86	87	87
26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	persen	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	persen	-	-	-	-	-	-	-
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	85	86	87	88	89	90	90
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	20	20	20	21	21	21	21
31	Persentase pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	0,51	0,35	0,40	0,45	0,47	0,50	0,50
9	**PERHUBUNGAN**								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	6.156.085	6.856.682	6.984.994	7.113.307	7.241.620	7.369.932	7.369.932
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	6.955	6.978	6.982	6.987	6.991	6.995	6.995
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	9.413	2.344	736	872	2.481	4.089	4.089
4	Jumlah pelabuhan laut/ udara/terminal bis	unit terminal bis	2	2	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	8,42	8,43	8,44	8,45	8,46	8,47	8,47
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	5	6	7	8	9	10	10
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	8,15	5	5	5	5	5	5
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	pj jln / 1928882	pj jln / 2044614	pj jln / 2167291	pj jln / 2297329	pj jln / 2435169	pj jln / 2581279	pj jln / 2581279

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	44.349.037	44.792.527	45.240.453	45.692.857	46.149.786	46.611.284	46.611.284
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga / bandara/terminal	penumpang	5.365.128	5.311.477	5.258.362	5.205.778	5.153.721	5.102.183	5.102.183
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	80	82	84	88	90	95	95
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/ telepon	persen	85,16	86,76	88,49	90,20	92,05	93,89	93,89
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	94,27	94,46	94,65	94,84	95,03	95,22	95,22
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	persen	26,99	25,59	24,19	22,79	21,39	20,00	20,00
11	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
1	Jumlah koperasi berkualitas	koperasi	N/A	30	30	40	50	70	220
2	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	usaha mikro	N/A	240	240	240	240	240	1.200
12	**PENANAMAN MODAL**								

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	400	500	550	600	650	700	700
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	4,75	5,23	5,65	6,10	6,59	7,12	7,12
3	Rasio daya serap tenaga kerja PMDN	rasio	5 : 1	4 : 1	5 : 1	5 : 1	4 : 1	5 : 1	5 : 1
4	Rasio daya serap tenaga kerja PMA	rasio	23 : 1	24 : 1	23 : 1	25 : 1	25 : 1	24 : 1	24 : 1
5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (miliar rupiah)	persen	8,05	8,05	18,82	17,23	13,47	11,69	11,69
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**								
1	Organisasi pemuda yang aktif	organisasi kepemudaan (OK)	834	834	872	872	914	914	914
2	Wirausaha muda	orang	25	25	25	25	25	25	25
3	Jumlah pembinaan olahraga	kegiatan PPLPD	10	10	12	12	14	14	14
4	Jumlah pembinaan atlet muda	kegiatan	125	125	160	160	190	190	190
14	**STATISTIK**								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku ”Kabupaten Dalam Angka”	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
15	**PERSANDIAN**								
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi perangkat daerah	persen	31,25	46,87	62,50	78,12	93,75	100,00	100,00
16	**KEBUDAYAAN**								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	176	40	55	60	65	70	70
2	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	N/A	2	3	4	5	6	6
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	N/A	2	4	8	10	12	12
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	99	109	119	129	139	149	149
17	**PERPUSTAKAAN**								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustaka	92.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000	97.000
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	96.236	103.736	111.336	119.036	126.836	134.736	134.736
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	ada

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	pemustaka	7.667	7.750	7.833	7.917	8.000	8.083	8.083
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	33.490	34.490	35.590	36.790	38.090	39.490	39.490
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	2	5	6	7	8	9	9
7	Jumlah perpustakan aktif	perpustakaan	79	55	67	79	92	104	104
18	**KEARSIPAN**								
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	73	12	25	38	51	64	64
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	1	2	3	4	5	5
C	**FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**								
1	**PARIWISATA**								
1	Kunjungan wisata	orang	6.960.512	8.428.063	8.697.761	9.132.649	9.589.282	10.068.746	10.068.746
2	Lama kunjungan Wisata	hari	2,25	2,34	2,43	2,53	2,63	2,74	2,74
3	PAD sektor pariwisata	rupiah	659.227.500.992	680.322.781.024	702.093.110.017	724.560.089.537	747.746.012.402	771.673.884.799	771.673.884.799
2	**PERTANIAN**								
1	Produktivitas padi per hektar	kw/ha	68,08	68,08	68,22	68,36	68,50	68,64	68,64

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Cakupan bina kelompok petani	kelompok	N/A	45	48	51	54	57	57
3	**PERDAGANGAN**								
1	Nilai Ekspor Kota Bandung (US$)	juta (US$)	NA	466	467	468	469	470	470
4	**PERINDUSTRIAN**								
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	NA	12,12	28,57	43,24	65,00	78,57	78,57
5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1	Produksi perikanan	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Konsumsi ikan	persen	N/A	100	100	100	100	100	100
3	Produksi ikan konsumsi	ton	2.970	2.970	2.971	2.971	2.972	2.972	2.972
4	Tingkat konsumsi ikan	kg/ kap/thn	N/A	37,95	37,97	37,99	38,00	38,02	38,02
D	**FOKUS PENUNJANG URUSAN**								
1	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-	-	-	-	1
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	-	-	-	-	2
3	Tersedianya dokumen perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	2	2	2	2	2	2	12

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-	-	-	-	2
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	**KEUANGAN**								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	persen	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16	24,16

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	rasio (BL/BTL)	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	**KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11,51	63,59	63,61	63,63	63,66	63,68	63,68
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	4,10	7,03	7,08	7,11	7,12	7,14	7,14
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	93,99	92,52	92,78	92,99	93,05	93,10	93,10
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	34	36	36	36	36	36	36
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	1.711	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	9.236	9.212	8.505	7.728	6.947	6.195	6.195

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	70,0	30,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,0
	Penerapan SIDa								
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	NA	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	NA	30,0	70,5	71,0	71,5	72,0	72,0
5	**PENGAWASAN**								
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	85,26	87,82	90,45	93,17	95,96	98,84	98,84
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	56,08	57,20	58,35	59,51	60,70	61,92	61,92
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67	96,67
6	**SEKRETARIAT DPRD**								
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2017/2018)	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7	**FUNGSI LAINNYA**								
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2
2	Kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	2	2	2	2	2	2	2

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Bab 9
Penutup

1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program–program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.

RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Bandung periode Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1) RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bandung harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

2) RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Bandung yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3) RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
4) Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Bandung, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5) Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
6) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7) RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

8) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Bandung tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

2. Pedoman Transisi

Masa jabatan Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung periode 2018 – 2023 akan berakhir pada September 2023, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bandung, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, penyelesaian target kinerja RPJMD 2018-2023 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Bandung dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya RKPD Kota Bandung Tahun 2024 menjadi bagian dari RPJMD periode berikutnya.

WALI KOTA BANDUNG

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SETDA

H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

Lampiran

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018-2023
MISI 1, FOKUS SASARAN 1

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 1, FOKUS SASARAN 2

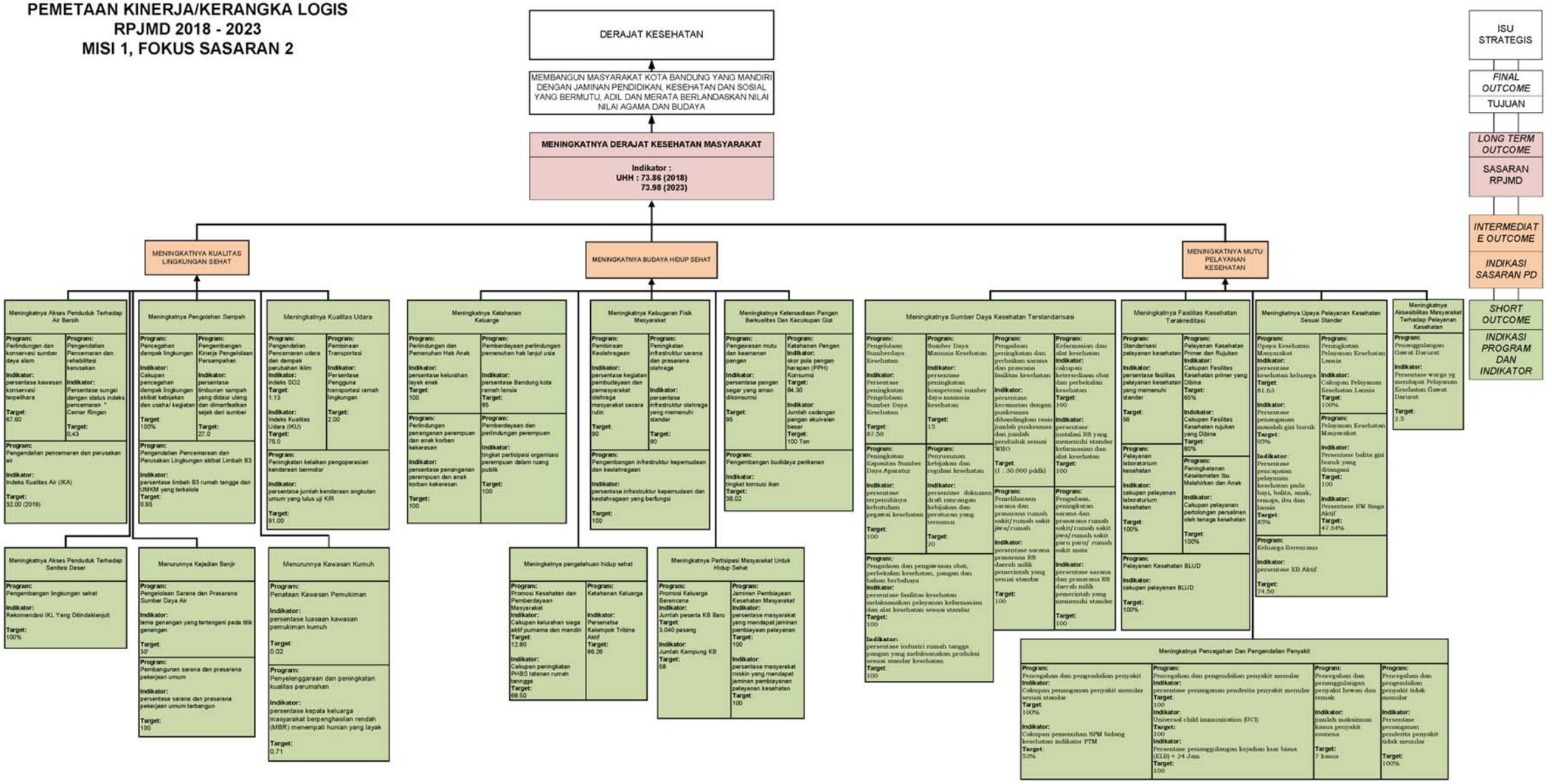

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 2

ISU STRATEGIS
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
FINAL OUTCOME
TUJUAN
TERLAKSANAKANNYA REFORMASI BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
Indikator
Indeks Reformasi Birokrasi
Data awal Tahun 2017= 69.81
Target Tahun 2023=70.13
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI
INDIKATOR :
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik" (minimal "83") dari pada Tahun 2018 sebesar 51,61% menjadi 100% pada Tahun 2023
Nilai AKIP pada Tahun 2018 mendapat predikat 'A' dan sampai dengan Tahun 2023 dipertahankan dengan predikat 'A'.
Opini BPK pada Tahun 2018 memperoleh predikat 'WDP' akan menjadi 'WTP' pada Tahun 2019.
Nilai Evaluasi SAKIP pada Tahun 2018 sebesar 61,10 (predikat 'B') akan menjadi 'Sangat Baik' pada Tahun 2021.
Nilai LPPD pada Tahun 2018 sebesar 3,4110 (predikat 'Sangat Tinggi') dan sampai dengan Tahun 2023 ditargetkan dengan nilai 3,4500 (predikat 'Sangat Tinggi').
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
BIROKRASI YANG BERSIH DARI KKN (KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME)
BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA
PELAYANAN PUBLIK PRIMA
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur
Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Dan Profesionalisme
Meningkatnya Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur
(Persentase pelanggaran disiplin PNS yang menurun dari 1,5% menjadi 1%)
(Persentase ASN yang memenuhi target kinerja 95% menjadi 98%)
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun 42,08% menjadi 74,06%)
Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Administrasi
(Persentase Tenaga Perentuka dan Kepegawan Tepat Waktu 100%)
Terpenuhinya Prasyaratan, Tata Kelola data dan Informasi Kepegawaian
(Persentase pengawai yang datanya akurat 100%)
Meningkatnya Integritas Aparatur Sebagai Pelayan Masyarakat
Peningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Persentase PD yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meningkat menuju berpredikat Bebas Korupsi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB 100%)
Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi
(Persentase capaian pelaksanaan pengawasan 100%)
Meningkatnya sistem pengawasan pemerintah daerah
(Persentase Tenaga Perentuka dan Kepegawan Tepat Waktu 100%)
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional 100%)
Pelaksanaan Penyelenggaraan Berdasarkan Asas/Kaidah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kapasitas Manajemen Pengawasan
Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)
Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
Meningkatnya Penggawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perangkat daerah
(Persentase layanan data dan informasi 100%)
Meningkatnya Penataan, Penguasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat 16% menjadi 30%)
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
(Persentase Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku 100%)
Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Kota
(Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu 100%)
BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA
Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang Undangan
Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kearsipan
(Persentase arsip inaktif yang dikelola sesuai standar 100%)
Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan
(Persentase Perpustakaan yang dikelola sesuai standar 100%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan
(Indeks Kepuasan pelayanan perpustakaan 100%)
Meningkatnya Kualitas Sistem Administrasi Kependudukan
(Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan 100%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS RPJMD 2018 - 2023 MISI 3, FOKUS SASARAN 1

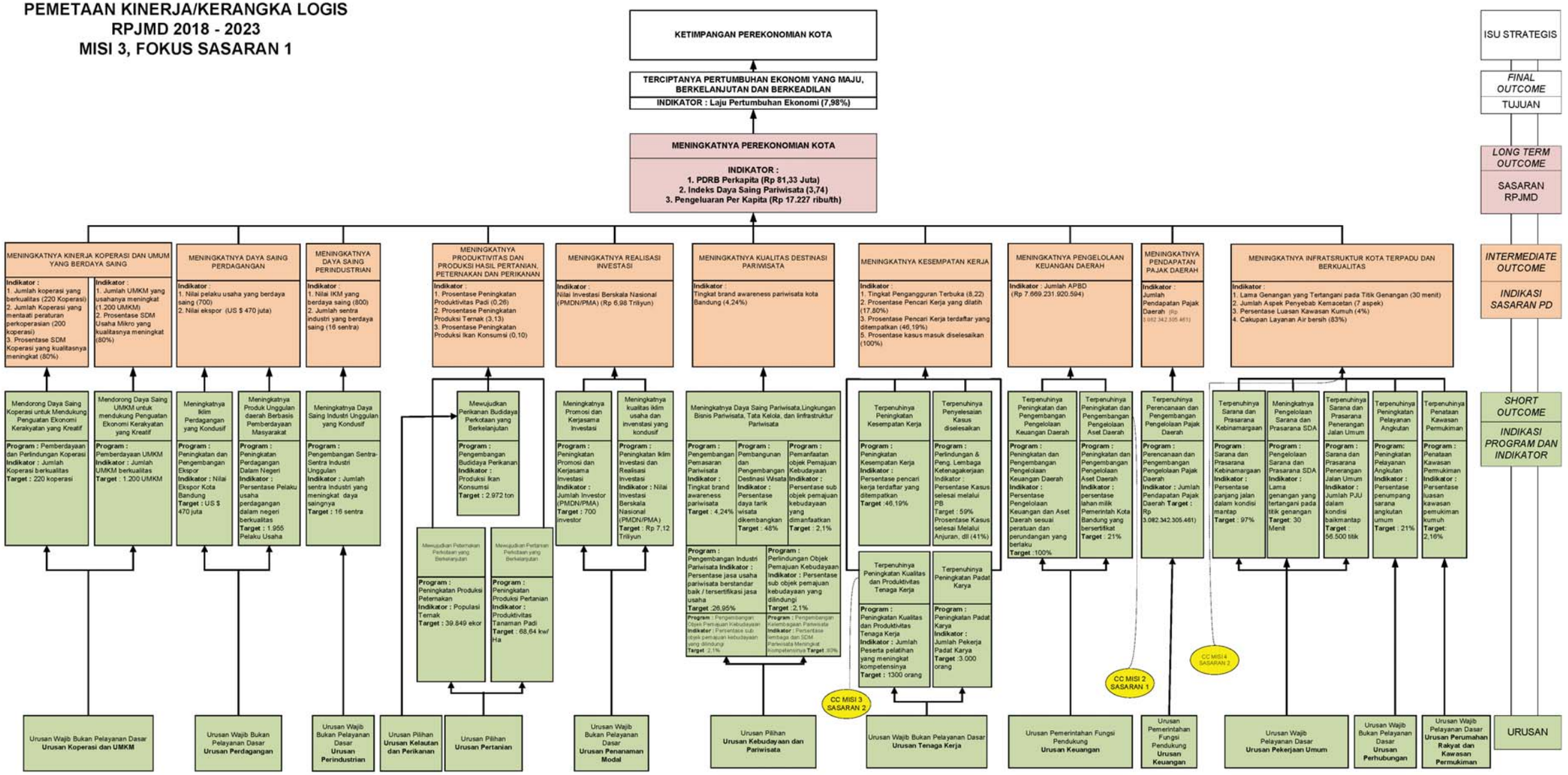

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 3, FOKUS SASARAN 2
KETIMPANGAN PEREKONOMIAN KOTA
TERCIPTANYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
INDIKATOR : Gini Ratio (0,40)
MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA
Indikator :
Tingkat Pengangguran Terbuka (8,22%)
ISU STRATEGIS
FINAL OUTCOME
TUJUAN
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
SHORT OUTCOME
INDIKASI PROGRAM DAN INDIKATOR
URUSAN
MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA KERJA
MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KERJA
MENINGKATNYA KETERAMPILAN MASYARAKAT DI BIDANG NON FORMAL
MENINGKATNYA KINERJA UMKM YANG BERDAYA SAING
MENINGKATNYA KUALITAS DESTINASI PARIWISATA KOTA BANDUNG
BERTAMBAHNYA PELAKU USAHA DIBIDANG PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKAMAN
MENINGKATNYA AKTIVITAS PEMBINAAN KEPEMUDAAN
Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Angkatan Kerja
Terciptanya Kesempatan Kerja Baru Berbasis Pradat Kerja
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Daya Saing UMKM untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Kerakyatan
Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Kreatif
Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Perikanan, dan Pertanian/ Perkebunan
Terciptanya Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Pemuda
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Urusan Tenaga Kerja
Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Urusan Pendidikan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Pilihan: Urusan Pariwisata
Urusan Pilihan: Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Pilihan: Urusan Kebudayaan dan Pariwisata
Urusan Pilihan: Urusan Pertanian
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Urusan Pangan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar: Urusan Kepemudaan dan Olahraga
CC Misi 1 Sasaran 1

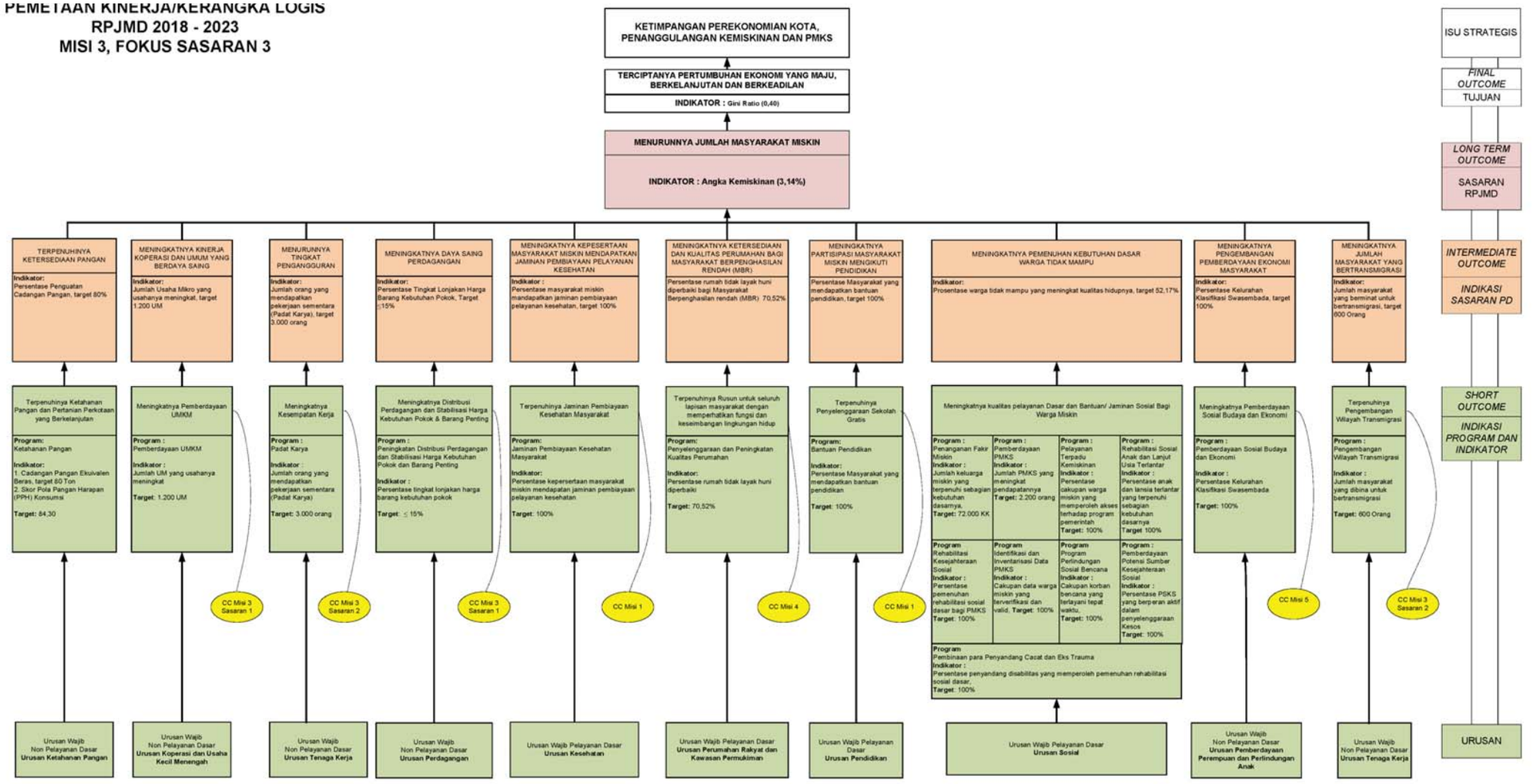
PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 3, FOKUS SASARAN 3
KETIMPANGAN PEREKONOMIAN KOTA, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PMKS
TERCIPTANYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MAJU, BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN
INDIKATOR : Gini Ratio (0,40)
MENURUNNYA JUMLAH MASYARAKAT MISKIN
INDIKATOR : Angka Kemiskinan (3,14%)
ISU STRATEGIS
FINAL OUTCOME
TUJUAN
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
SHORT OUTCOME
INDIKASI PROGRAM DAN INDIKATOR
URUSAN
TERPENUHINYA KETERSEDIAAN PANGAN
Indikator: Persentase Penguatan Cadangan Pangan, target 80%
MENINGKATNYA KINERJA KOPERASI DAN UMUM YANG BERDAYA SAING
Indikator: Jumlah Usaha Mikro yang usahanya meningkat, target 1.200 UM
MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN
Indikator: Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (Padat Karya), target 3.000 orang
MENINGKATNYA DAYA SAING PERDAGANGAN
Indikator: Persentase Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Target ≤15%
MENINGKATNYA KEPESERTAAN MASYARAKAT MISKIN MENDAPATKAN JAMINAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
Indikator : Persentase masyarakat miskin mandapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, target 100%
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN KUALITAS PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR): 70,52%
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT MISKIN MENGIKUTI PENDIDIKAN
Persentase Masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan, target 100%
MENINGKATNYA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR WARGA TIDAK MAMPU
Indikator: Prosentase warga tidak mampu yang meningkat kualitas hidupnya, target 52,17%
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
Indikator: Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada, target 100%
MENINGKATNYA JUMLAH MASYARAKAT YANG BERTRANSMIGRASI
Indikator: Jumlah masyarakat yang berminat untuk bertransmigrasi, target 600 Orang
Terpenuhinya Ketahanan Pangan dan Pertanian Perkotaan yang Berkelanjutan
Program: Ketahanan Pangan
Indikator: 1. Cadangan Pangan Ekuivalen Beras, target 80 Ton 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
Target: 84,30
Meningkatnya Pemberdayaan UMKM
Program : Pemberdayaan UMKM
Indikator : Jumlah UM yang usahanya meningkat
Target: 1.200 UM
Meningkatnya Kesempatan Kerja
Program : Padat Karya
Indikator : Jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan sementara (Padat Karya)
Target: 3.000 orang
Meningkatnya Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok & Barang Penting
Program : Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Indikator : Persentase tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok
Target: ≤ 15%
Terpenuhinya Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
Program: Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
Indikator: Persentase kepersertaan masyarakat miskin mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan
Target: 100%
Terpenuhinya Rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
Program: Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Indikator: Persentase rumah tidak layak huni diperbaiki
Target: 70,52%
Terpenuhinya Penyelenggaraan Sekolah Gratis
Program: Bantuan Pendidikan
Indikator: Persentase Masyarakat yang mendapatkan bantuan pendidikan
Target: 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan Dasar dan Bantuan/ Jaminan Sosial Bagi Warga Miskin
Program : Penanganan Fakir Miskin
Indikator : Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya.
Target: 72.000 KK
Program : Pemberdayaan PMKS
Indikator : Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya
Target: 2.200 orang
Program : Pelayanan Terpadu Kemiskinan
Indikator : Persentase cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah
Target: 100%
Program : Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar
Indikator : Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
Target 100%
Program: Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Indikator : Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS
Target: 100%
Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS
Indikator : Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid. Target: 100%
Program Program Perlindungan Sosial Bencana
Indikator : Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu.
Target: 100%
Program : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Indikator : Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos
Target: 100%
Program
Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Indikator :
Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar.
Target: 100%
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi
Program : Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi
Indikator : Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada
Target: 100%
Terpenuhinya Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Indikator : Jumlah masyarakat yang dibina untuk bertransmigrasi
Target: 600 Orang
CC Misi 3 Sasaran 1
CC Misi 3 Sasaran 2
CC Misi 3 Sasaran 1
CC Misi 1
CC Misi 4
CC Misi 1
CC Misi 5
CC Misi 3 Sasaran 2
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Tenaga Kerja
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Perdagangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Sosial
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Urusan Tenaga Kerja

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 1
ISU STRATEGIS
FINAL OUTCOME
TUJUAN
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
SHORT OUTCOME
INDIKASI PROGRAM DAN INDIKATOR
URUSAN
OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
INDIKATOR : Indeks Liveable City (8,00)
MENINGKATNYA RUANG KOTA YANG NYAMAN DAN BERKELANJUTAN
INDIKATOR : Persentase RTH (13,20 %)
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAHAN
MENURUNNYA PELANGGARAN PERIZINAN TATA RUANG
MENINGKATNYA KUALITAS RTH
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT/SWASTA
CC Misi 2 Sasaran 3
CC Misi 2
CC Misi 1 dan Misi 3
CC Misi 5

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 2.1

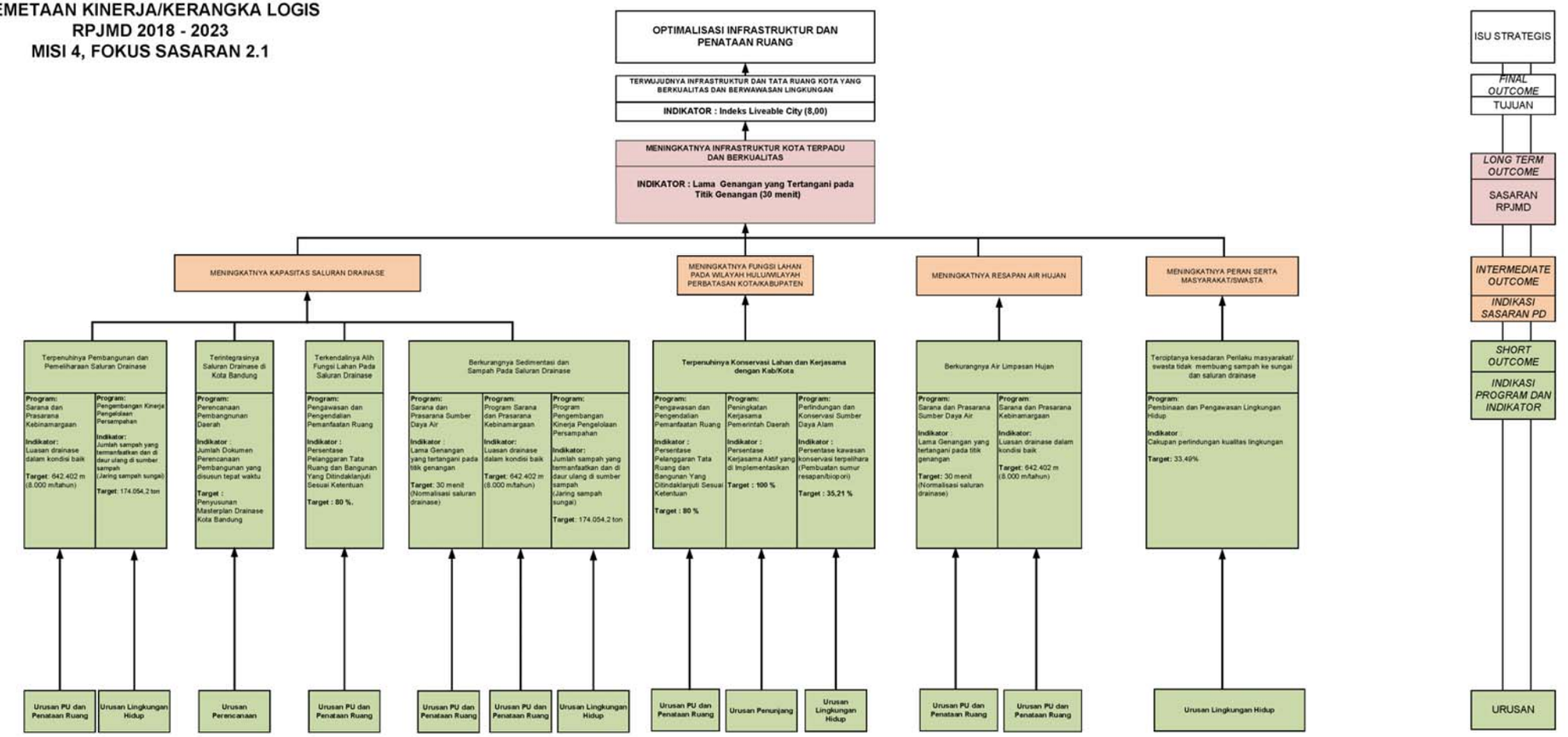

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 2.2
ISU STRATEGIS
FINAL OUTCOME
TUJUAN
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
SHORT OUTCOME
INDIKASI PROGRAM DAN INDIKATOR
URUSAN
OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
INDIKATOR : Indeks Liveable City (8.00)
MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR KOTA TERPADU DAN BERKUALITAS
INDIKATOR : Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas
MENINGKATNYA MOBILITAS PENDUDUK KOTA
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS SARANA DAN PRASARANA JALAN
MENINGKATNYA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALU LINTAS
Meningkatnya Mobilitas Penduduk Dalam Kota
Meningkatnya Mobilitas Komuter Antar Wilayah
Meningkatnya Mobilitas Wisatawan
Terwujudnya Aksesibilitas Prasarana Yang Baik
Terlaksananya Manajemen Lalu-Lintas
Berkurangnya titik genangan/banjir di jalan
Terlaksananya Aksesibilitas Sarana yang Baik
Terwujudnya Rasio Jaringan Jalan
Berkurangnya Jalur Perlintasan Sebidang
Berkurangnya PKL Pada Badan Jalan
Berkurangnya Pusat Tumpuk
Berkurangnya Jumlah Penggunaan Kendaraan Pribadi
Berkurangnya Jumlah dan Korban Kecelakaan
Urusan Perhubungan
Urusan PU dan Penataan Ruang
Program: Pengelolaan Pelayanan Angkutan
Program: Pengelolaan Pelayanan Transportasi BLUD
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Pengamanan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Kebinamargaan
Program: Pengelolaan Sarana dan Sumber Daya Air
Program: Pembangunan sarana prasarana
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program: Pengelolaan Produk Hukum Daerah
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program: Penyelenggaraan Pengendalian Operasional Lalu Lintas
Program: Pengelolaan Pelayanan Parkir
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program: Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana perhubungan
Program: Pembangunan sarana prasarana

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 2.3

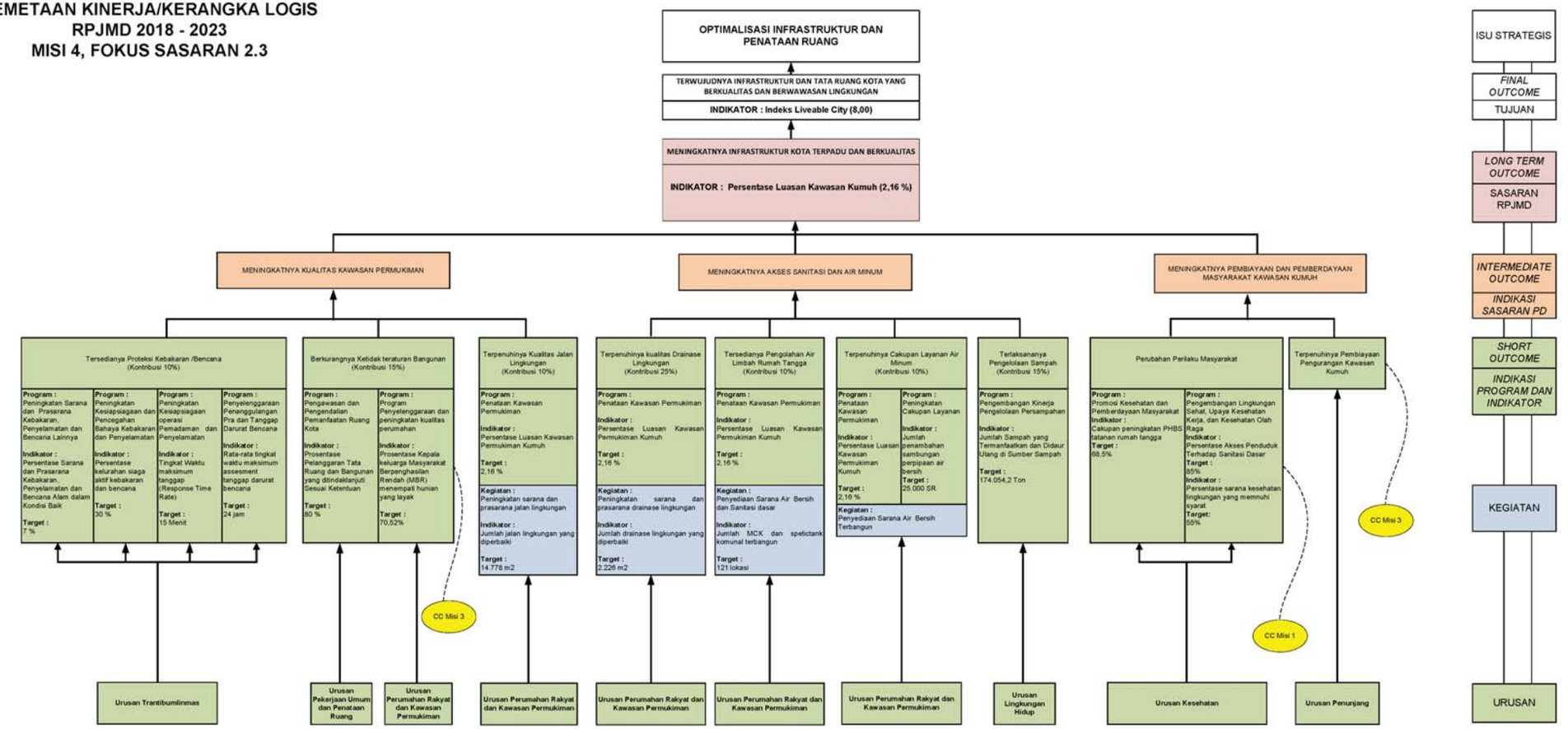

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 3
ISU STRATEGIS
FINAL OUTCOME
TUJUAN
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
SHORT OUTCOME
INDIKASI PROGRAM DAN INDIKATOR
KEGIATAN
URUSAN
OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
INDIKATOR : Indeks Liveable City (8,00)
MENINGKATNYA CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH
INDIKATOR : Cakupan Layanan Air Bersih (83%)
MENINGKATNYA AKSES AIR BERSIH
MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DAN PASOKAN SUMBER AIR BAKU
MENURUNNYA TINGKAT KEBOCORAN AIR BERSIH
Program: Peningkatan Cakupan Pelayanan
Indikator: Jumlah Penambahan Sambungan Rumah Perpipaan Air Bersih
Target: 25.000 SR (PDAM)
Program: Penataan Kawasan Pemukiman
Indikator: Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh
Target: 2,16% (DPKP3)
Urusan PU dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program: Peningkatan Kapasitas Produksi
Indikator : Kapasitas Produksi Air Baku
Target: 5400 liter/detik (PDAM)
Urusan PU dan Penataan Ruang
Program : Penurunan Tingkat Kehilangan Air
Indikator : Persentase Penurunan Kebocoran Air
Target: 12% (PDAM)
Kegiatan:
• Kalibrasi dan/atau penggantian meteran air
• Rehabilitasi atau penggantian saluran pipa
• Upaya Penegakkan hukum terhadap pelanggar penggunaan air terutama untuk kelompok Niaga dan Kelompok Industri (PDAM)
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 4.1

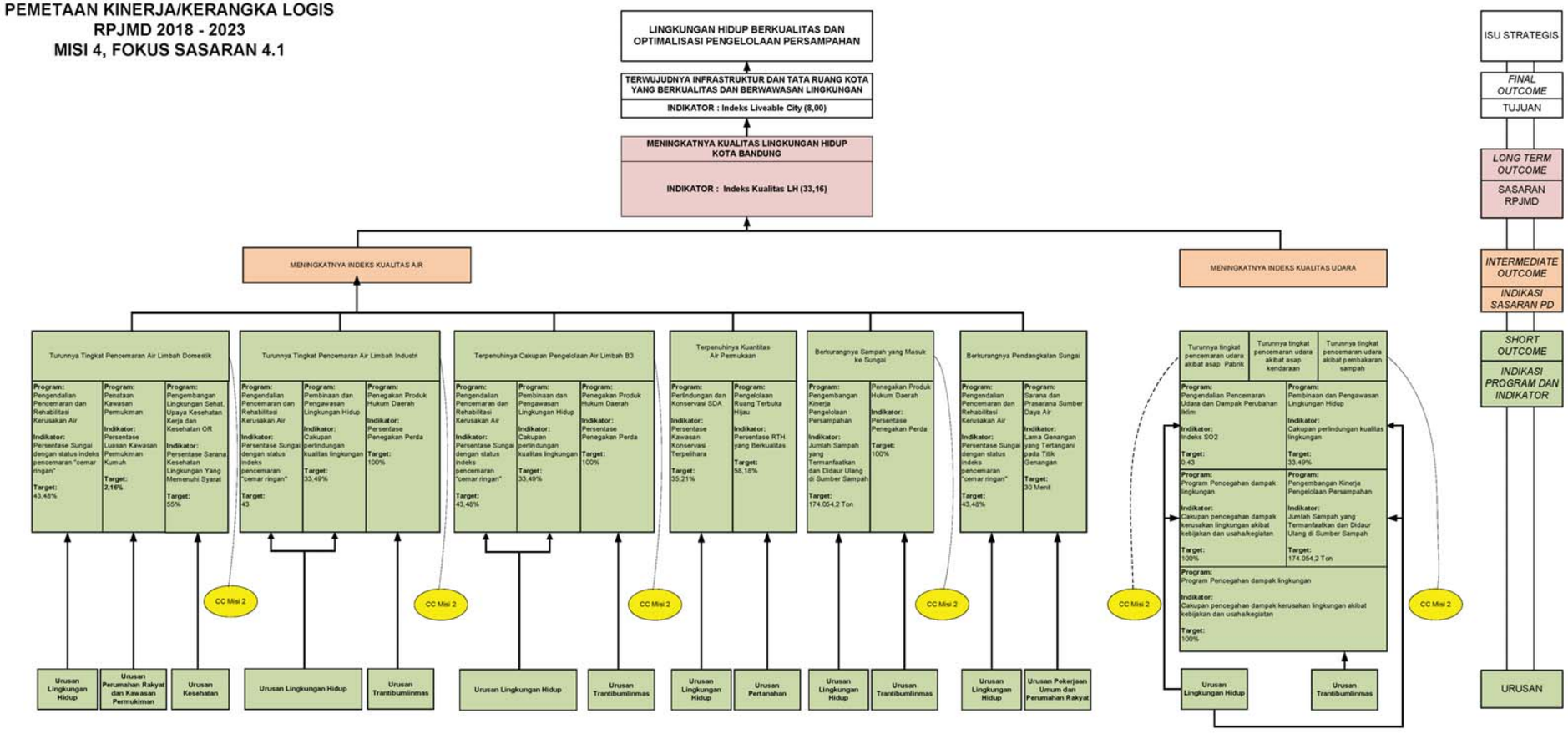

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 4, FOKUS SASARAN 4.2
LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
INDIKATOR : Indeks Liveable City (8,00)
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG
INDIKATOR : Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota (99%)
MENINGKATNYA PENANGANAN SAMPAH (KONTRIBUSI: 72%)
MENINGKATNYA PENGURANGAN SAMPAH (27%)
Meningkatnya Penyediaan Prasarana Pengelolaan Sampah
Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Sumber
Meningkatnya Kesadaran/Prilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya Pemenuhan Pembangunan TPAS Regional
Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan TPS
Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah
CC Misi 5
CC Misi 5
CC Misi 5
CC Misi 2 dan 3
Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Transkomdimas
ISU STRATEGIS
FINAL OUTCOME
TUJUAN
LONG TERM OUTCOME
SASARAN RPJMD
INTERMEDIATE OUTCOME
INDIKASI SASARAN PD
SHORT OUTCOME
INDIKASI PROGRAM DAN INDIKATOR
URUSAN

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPJMD 2018 - 2023
MISI 5

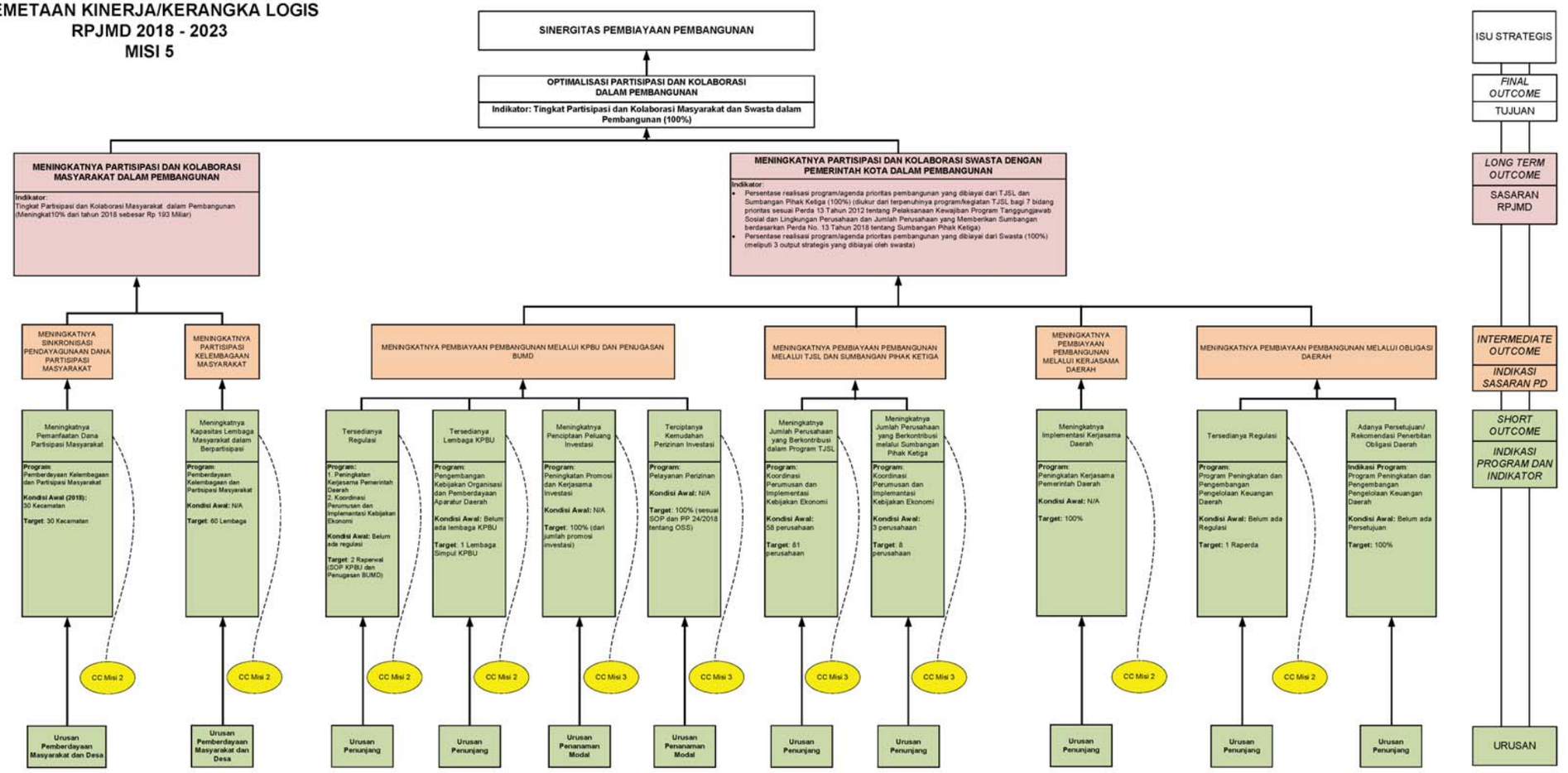

GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI